



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 - 2022

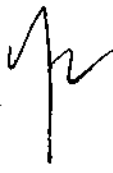
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 selama 5 (lima) tahun ke depan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan Qanun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
10. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat, tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 144);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 145);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017-2022.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi Pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan Pembangunan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten Aceh Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat selama periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang berpedoman pada RPJM Kabupaten Aceh Barat.

12. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi Renstra-SKPK.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat Kabupaten Aceh Barat sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta statistik.
14. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat adalah Kepala SKPK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta statistik di Kabupaten Aceh Barat.
15. Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP2D adalah tim di bawah Bupati yang bertugas untuk melakukan percepatan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT

Pasal 2

RPJM Kabupaten Aceh Barat merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Sistematika RPJM Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kabupaten;
- BAB III : Gambaran Keuangan Kabupaten;
- BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis;
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan;
- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Kabupaten;
- BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- BAB IX : Penutup.

Pasal 4

RPJM Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5...

Pasal 5

RPJM Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman:

- a. SKPK dalam menyusun Renstra-SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2017-2022;
- b. Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RKPK setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJM Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH BARAT

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat selama 5 (lima) tahun di bantu oleh TP2D.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan perencanaan pembangunan; dan
 - b. Pelaksanaan rencana pembangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

PENYUSUNAN RENSTRA SKPK

Pasal 8

- (1) SKPK harus melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Bappeda dalam hal penyusunan Renstra SKPK.
- (2) Kepala Bappeda dapat melakukan pemantauan terhadap capaian sasaran RPJM Kabupaten yang dituangkan dalam Renstra SKPK sesuai dengan kewenangannya.

BAB V...



BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH BARAT

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan dan substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Kabupaten Aceh Barat kurang dari 3 (tiga) tahun, kecuali terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKPK dan perubahannya serta Perubahan Renstra SKPK.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran dan indikator, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJM Kabupaten Aceh Barat, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJM Kabupaten Aceh Barat tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Pada masa berakhirnya periode Bupati Aceh Barat Tahun 2017-2022 dan belum adanya dasar dokumen perencanaan tahun berikutnya maka RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 dapat dijadikan pedoman pada masa transisi untuk penyusunan program dan kegiatan prioritas sampai tersedianya dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat periode 2022-2027 terutama untuk program-program dan kegiatan prioritas yang capaiannya belum memenuhi target.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

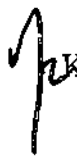


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 5 April 2018 M
19 Rajab 1439 H

 BUPATI ACEH BARAT,
RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 5 April 2018 M
19 Rajab 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT, 

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR: 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (1/33/2018)

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*.

RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJM mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022. RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman bagi Perangkat Kabupaten dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Kami harapkan semua stakeholder terkait dapat bekerjasama dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Aceh Barat dengan menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan sehingga di akhir tahun rencana, kita dapat ***mewujudkan Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas***.

Meulaboh, April 2018

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

**DAFTAR ISI**

Halaman

KATA PENGANTAR**DAFTAR ISI**

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang.....	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3	Hubungan Antar Dokumen.....	I-6
1.4	Maksud dan Tujuan	I-8
1.5	Sistematika Penulisan.....	I-9
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.2	Potensi Pengembangan Wilayah	II-7
2.1.3	Wilayah Rawan Bencana	II-7
2.1.4	Demografi.....	II-10
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-17
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-17
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-26
2.3.1	Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-26
2.3.2	Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-83
2.3.3	Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-116
2.4	Indek Pembangunan Manusia	II-125
2.5	Indek Pembangunan Gender.....	II-126
2.6	Indeks Pemberdayaan Gender	II-127
2.7	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Develompment Goals (SDGs)	II-147
2.8	Telaahan terhadap Dokumen RTRW Kabupaten Aceh Barat.....	II-148
2.9	Telaah terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	II-148
2.10	Telaahan terhadap Dokumen Kebencanaan	II-157
2.11	Telaahan terhadap Dokumen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	II-158
2.12	Telaahan terhadap Dokumen Pengarusutamaan Gender.....	II-160



2.13	Telaahan terhadap Dokumen Pembangunan Kependudukan	II-163
2.14	Perencanaan Dana Desa.....	II-164
2.15	Pengelolaan Sumber Daya Air	II-165
 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH		
3.1	Kinerja Keuangan Daerah Periode Tahun 2012-2017	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBK	III-1
3.1.2	Neraca Daerah	III-14
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2012-2017	III-18
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-19
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III-19
3.3	Kerangka Pendanaan	III-23
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-23
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-26
3.4	Bantuan Keuangan Dana Otsus Kepada Pemerintah Daerah	III-28
3.5	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	III-28
3.6	Dana CSR.....	III-28
 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS		
4.1	Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.2	Isu Strategis	IV-10
 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		
5.1	Visi.....	V-1
5.2	Misi.....	V-3
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-9
5.4	Janji Bupati dan Wakil Bupati.....	V-16
 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		
6.1	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Ke-3 (2017-2022).....	VI-1
6.2	Strategi Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022.....	VI-2
6.3	Arah Kebijakan	VI-12
6.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah	VI-16



**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH**

7.1 Kerangka Pendanaan..... VII-1

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
BARAT**

VIII-1

BAB IX PENUTUP

9.1 Pedoman Masa Transisi..... IX-1

9.2 Kaidah Pelaksanaan IX-1

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Gampong menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-2
Tabel 2.2	Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Barat	II-6
Tabel 2.3	Kawasan Lindung di Wilayah Kabupaten Aceh Barat.....	II-7
Tabel 2.4	Kawasan Andalan dan Strategis Wilayah Kabupaten Aceh Barat.....	II-7
Tabel 2.5	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016	II-10
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan Tahun 2016.....	II-10
Tabel 2.7	Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-11
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016	II-12
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kab Aceh Barat Tahun 2016	II-13
Tabel 2.10	Jumlah Lanjut Usia Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 2016.....	II-14
Tabel 2.11	Jenis Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Aceh Barat menurut Bidang Usaha Tahun 2012 - 2015	II-15
Tabel 2.12	Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2015	II-16
Tabel 2.13	Jumlah Pencari Kerja menurut Kelompok Umur Tahun 2015	II-16
Tabel 2.14	Jumlah Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015.....	II-16
Tabel 2.15	Laju Pertumbuhan Rril PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2016	II-18
Tabel 2.16	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2016 (juta rupiah).....	II-20
Tabel 2.17	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2016 (juta rupiah)	II-21
Tabel 2.18	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2012-2016	II-22
Tabel 2.19	Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2010-2016	II-23
Tabel 2.20	Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2012-2016.....	II-25
Tabel 2.21	Perbandingan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh Tahun 2012-2016 (rupiah)	II-25
Tabel 2.22	Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Aceh Barat dengan Propinsi Aceh dan Kabupaten Tetangga Tahun 2014-2015.....	II-26



Tabel 2.23	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016	II-27
Tabel 2.24	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Aceh Barat Dibandingkan dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Aceh Tahun 2012-2016	II-27
Tabel 2.25	Perkembangan Rata-Rata Lama Belajar dan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2015.....	II-28
Tabel 2.26	Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat dan Nasional Tahun 2012-2016	II-28
Tabel 2.27	Capaian Indikator Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan.....	II-29
Tabel 2.28	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Aceh Barat Dibandingkan dengan Kabupaten Tetanggadan Provinsi Aceh Tahun 2016.....	II-29
Tabel 2.29	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2016	II-31
Tabel 2.30	Angka Putus Sekolah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014-2016	II-31
Tabel 2.31	Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Aceh Barat Tahun Ajaran 2014/2015.....	II-32
Tabel 2.32	Perkembangan APS Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tahun 2012 - 2016.....	II-33
Tabel 2.33	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah 2011-2016.....	II-33
Tabel 2.34	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-35
Tabel 2.35	Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Kecamatan Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-36
Tabel 2.36	Jumlah Kepemilikan KIP/BSM Penduduk Berpendapatan Rendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-36
Tabel 2.37	Jumlah PAUD Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 - 2017.....	II-37
Tabel 2.38	Jumlah anak Usia 0-6 Tahun yang sedang Mengikuti PAUD Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 ...	II-38
Tabel 2.39	Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2016...	II-39
Tabel 2.40	Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2016	II-39
Tabel 2.41	Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2016	II-40
Tabel 2.42	Persentase Kelahiran yang ditolong Tenaga Terlatih pada 40 persen Penduduk Berpendapatan Terbawah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016	II-41
Tabel 2.43	Jumlah Kematian Ibu menurut Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-42
Tabel 2.44	Jumlah Kunjungan Ibu Hamil, Persalinan Ditolong Nakes dan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-43
Tabel 2.45	Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2012-2015.....	II-44



Tabel 2.46	Jumlah Balita yang Menderita Gizi Buruk menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas di Aceh Barat Tahun 2015-2016	II-45
Tabel 2.47	Jumlah Sarana Kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-45
Tabel 2.48	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-46
Tabel 2.49	Jaminan Kesehatan pada 40% Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-47
Tabel 2.50	Peserta mandiri BPJS Kesehatan 40% Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-47
Tabel 2.51	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016	II-48
Tabel 2.52	Jumlah Tenaga Medis menurut Jenis Kelamin pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-48
Tabel 2.53	Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis Pada Puskesmas Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-49
Tabel 2.54	Cakupan Desa <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-50
Tabel 2.55	Cakupan Imunisasi DPT-HB/DPT-HB-Hib, Polio, Campak dan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-51
Tabel 2.56	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang layak dari kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terbawah..	II-52
Tabel 2.57	Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-53
Tabel 2.58	Sumber Air Minum 40% Penduduk Berpendapatan Rendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-54
Tabel 2.59	Penduduk dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-56
Tabel 2.60	Persentase Fasilitas Sanitasi yang Layak Bagi 40 Persen Penduduk berpendapatan terbawah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2014	II-57
Tabel 2.61	Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar 40% Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-57
Tabel 2.62	Jumlah Kasus HIV dan AIDS menurut Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2016	II-58
Tabel 2.63	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2016	II-59
Tabel 2.64	Panjang Jalan dan Pemerintahan yang berwenang Mengelolanya di Kabupaten Aceh Barat (Km) Tahun 2012-2016	II-60
Tabel 2.65	Panjang Jalan dan jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Aceh Barat (km) Tahun 2012-2016	II-60
Tabel 2.66	Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Barat (km) Tahun 2012-2016	II-60



Tabel 2.67	Panjang Jembatan berdasarkan Jenis Jembatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-61
Tabel 2.68	Kondisi Jembatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-61
Tabel 2.69	Daerah Irigasi Kabupaten Aceh Barat.....	II-62
Tabel 2.70	Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2016.....	II-64
Tabel 2.71	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 s.d 2012	II-65
Tabel 2.72	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 s.d 2014.....	II-65
Tabel 2.73	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Provinsi/Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016.....	II-65
Tabel 2.74	Kondisi Pelayanan Energi Listrik di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016.....	II-66
Tabel 2.75	Akses Penerangan Listrik untuk Penduduk 40% berpendapatan terbawah Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016.....	II-66
Tabel 2.76	Sumber Penerangan Utama 40% Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-67
Tabel 2.77	Daya Listrik Terpasang (PLN) 40% Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-67
Tabel 2.78	Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015.....	II-68
Tabel 2.79	Lantai Terluas 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-70
Tabel 2.80	Jenis Atap Terluas 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-71
Tabel 2.81	Rasio Jumlah Pos Kamling Tahun 2012 - 2016.....	II-72
Tabel 2.82	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2016	II-72
Tabel 2.83	Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2016.....	II-73
Tabel 2.84	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012- 2016	II-75
Tabel 2.85	Banyaknya Pengeluaran Beras Bulog untuk Program Raskin menurut Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2016.....	II-75
Tabel 2.86	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Nasional.....	II-76
Tabel 2.87	Bahan Bakar untuk Memasak pada 40% Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-76
Tabel 2.88	Bantuan yang diberikan kepada 40% Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-77
Tabel 2.89	Jenjang Pendidikan Tertinggi 40% Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-79
Tabel 2.90	Jenis Pekerjaan Utama 40% Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-80
Tabel 2.91	Jumlah Penyandang Cacat Dalam Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan Tahun 2014-2016.....	II-81



Tabel 2.92	Jenis Kecacatan 40% Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-82
Tabel 2.93	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan Tahun 2016	II-83
Tabel 2.94	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2015 .	II-84
Tabel 2.95	Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016	II-85
Tabel 2.96	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2013- 2016	II-85
Tabel 2.97	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2016	II-86
Tabel 2.98	Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat (Hektar) Tahun 2016	II-87
Tabel 2.99	Produksi Tanaman Padi dan Palawija Menurut Jenis di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 – 2016	II-87
Tabel 2.100	Jumlah Permohonan Hak Tanah yang diterima di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 – 2016	II-87
Tabel 2.101	Capaian Realisasi Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 – 2016	II-88
Tabel 2.102	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Standar Nasional per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 – 2016	II-88
Tabel 2.103	Jumlah Penerbitan Akta Kematian per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 – 2016	II-89
Tabel 2.104	Jumlah Penerbitan KTP Standar Nasional Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 – 2016	II-89
Tabel 2.105	Kepemilikan Akte Kelahiran oleh 40% Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-90
Tabel 2.106	Tingkat Mobilitas Orang/Barang Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2015	II-91
Tabel 2.107	Tingkat Mobilitas Orang / Barang yang Dilayani oleh Angkutan Pedesaan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014-2015	II-91
Tabel 2.108	Arus Penumpang pada Pelabuhan Umum Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014	II-92
Tabel 2.109	Jaringan Komunikasi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2016	II-92
Tabel 2.110	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 – 2016	II-93
Tabel 2.111	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016	II-93
Tabel 2.112	Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan Tahun 2016.	II-93
Tabel 2.113	Jumlah Remaja Usia 15 – 24 Tahun yang Mendapat Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi, HIV/AIDS, dan Keluarga Berencana Menurut Kecamatan Tahun 2016	II-94
Tabel 2.114	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-94



Tabel 2.115	Kepesertaan KB pada 40% Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015.....	II-95
Tabel 2.116	Alasan Tidak mengikuti KB pada 40% Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-96
Tabel 2.117	Jenis KB yang digunakan pada 40% Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-97
Tabel 2.118	Capaian Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2014 s.d 2016..	II-97
Tabel 2.119	Jumlah Gampong Yang Melaksanakan Peradilan Adat di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010-2016.....	II-98
Tabel 2.120	Perkembangan Seni dan Budaya Kab. Aceh Barat Tahun 2010-2016....	II-98
Tabel 2.121	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016 Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.....	II-98
Tabel 2.122	Data Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-98
Tabel 2.123	Anggota Perpustakaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015.....	II-99
Tabel 2.124	Data Pengguna Layanan Perpustakaan Keliling di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015.....	II-99
Tabel 2.125	Data Pengelola Perpustakaan Gampong Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015.....	II-100
Tabel 2.126	Realisasi Indikator Kearsipan Tahun 2012 - 2016.....	II-100
Tabel 2.127	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016.....	II-101
Tabel 2.128	Persentase UKM non BPR/LKM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2016.....	II-101
Tabel 2.129	Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2016.....	II-101
Tabel 2.130	Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN/PMA Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012- 2016.....	II-102
Tabel 2.131	Jumlah Masjid dan Meunasah menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-102
Tabel 2.132	Jumlah Pondok Pesantren, Santri dan Teungku di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-103
Tabel 2.133	Jumlah TKQ/TPQ dan Santri di Kab. Aceh Barat Tahun 2015.....	II-103
Tabel 2.134	Pelaksanaan Syariat dan Syiar Islam di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016.....	II-104
Tabel 2.135	Data Dayah/Pesantren beserta Jumlah santri dan Guru di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-104
Tabel 2.136	Realisasi Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Menurut Kecamatan dan Penerima pada Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016.....	II-108
Tabel 2.137	Jumlah Pelanggar Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016.....	II-109
Tabel 2.138	Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2016.....	II-109
Tabel 2.139	Rasio Lulusan S1, S2 dan S3 di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010-2016.....	II-110



Tabel 2.140	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016..	II-111
Tabel 2.141	Rasio Ketergantungan di Kab. Aceh Barat Tahun 2012-2016	II-111
Tabel 2.142	Realisasi Indikator Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012 – 2016.....	II-111
Tabel 2.143	Data Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 – 2016	II-112
Tabel 2.144	Kegiatan Pra Bencana di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2015	II-113
Tabel 2.145	Kegiatan Tanggap Darurat di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2015.....	II-114
Tabel 2.146	Kegiatan Pasca Bencana Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2015.....	II-116
Tabel 2.147	Jumlah Produksi (Ton) Perikanan Menurut Jenis Usaha Per Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2016	II-116
Tabel 2.148	Jumlah Alat Penangkap Ikan menurut Jenis Alat Dan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016.....	II-117
Tabel 2.149	Jumlah Industri Tradisional menurut Jenis Industri Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2015	II-119
Tabel 2.150	Jumlah Usaha Perdagangan Dan Tenaga Kerjanya Per Kecamatan Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2015.....	II-120
Tabel 2.151	Jumlah Restoran/Rumah Makan menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-121
Tabel 2.152	Capaian Indikator Pariwisata Tahun 2012 – 2016	II-122
Tabel 2.153	Luas Kawasan Hutan dan Perairan menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-123
Tabel 2.154	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Barat, Aceh dan Nasional Tahun 2012-2016.....	II-126
Tabel 2.155	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Barat dan Propinsi Aceh Tahun 2010-2014	II-127
Tabel 2.156	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Aceh Barat dan Propinsi Aceh Tahun 2014	II-128
Tabel 2.157	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 – 2016	II-129
Tabel 2.158	Perbandingan dan Keterkaitan Isu strategis RPJMD dengan Isu Strategis KLHS.....	II-152
Tabel 2.159	Visi RPJMD Kab. Aceh Barat Kaitannya dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	II-153
Tabel 2.160	Misi RPJMD Kaitannya dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan...	II-153
Tabel 2.161	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kaitannya dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	II-155
Tabel 2.162	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Kaitannya dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	II-155
Tabel 2.163	Indikator Pengendalian dan Evaluasi PPRG di Daerah	II-161
Tabel 3.1	Perbandingan Pagu dan Realisasi APBK Aceh Barat Tahun 2012-2016.....	III-1



Tabel 3.2	Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 s/d Tahun 2016.....	III-3
Tabel 3.3	Perbandingan Pagu dan Realisasi Pendapatan Tahun 2012-2016.....	III-6
Tabel 3.4	Kinerja Anggaran Pendapatan Tahun 2012-2016 (Realisasi).....	III-8
Tabel 3.5	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2012-2016.....	III-9
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2012-2016 (Persen).....	III-9
Tabel 3.7	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016.....	III-11
Tabel 3.8	Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016.....	III-13
Tabel 3.9	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016.....	III-15
Tabel 3.10	Balance Sheet Ratio Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016.....	III-17
Tabel 3.11	Ratio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016.....	III-18
Tabel 3.12	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Aceh Barat.....	III-19
Tabel 3.13	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Barat.....	III-20
Tabel 3.14	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Barat.....	III-21
Tabel 3.15	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Aceh Barat.....	III-22
Tabel 3.16	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2022.....	III-24
Tabel 3.17	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.....	III-26
Tabel 3.18	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Aceh Barat.....	III-27
Tabel 5.1	Perumusan Penjelasan Visi.....	V-2
Tabel 5.2	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat.....	V-10
Tabel 5.3	Janji Bupati dan Wakil Bupati.....	V-16
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Aceh Barat.....	VI-6
Tabel 6.2	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018- 2022.....	VI-17
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2022.....	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2022.....	VII-3
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Barat.....	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.....	VIII-4

**DAFTAR GAMBAR**

		Halaman
Gambar 1.1	Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Aceh Barat	I-3
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen	I-6
Gambar 1.3	Hubungan RPJM dengan RKPD Tahunan Aceh Barat	I-7
Gambar 1.4	Hubungan RPJM Aceh Barat dengan Renstra OPD	I-7
Gambar 1.5	Hubungan RPJM dengan Dokumen Lainnya	I-8
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat	II-1
Gambar 2.2	Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Barat	II-3
Gambar 2.3	Peta Geologi Kabupaten Aceh Barat	II-3
Gambar 2.4	Peta Hidrologi Kabupaten Aceh Barat	II-4
Gambar 2.5	Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Barat	II-5
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat	II-6
Gambar 2.7	Peta Bahaya Gempa Kabupaten Aceh Barat	II-8
Gambar 2.8	Peta Potensi Tsunami Kabupaten Aceh Barat	II-8
Gambar 2.9	Peta Potensi Kebakaran Kabupaten Aceh Barat	II-9
Gambar 2.10	Peta Potensi Kekeringan Kabupaten Aceh Barat	II-9
Gambar 2.11	Sebaran Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-11
Gambar 2.12	Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2016	II-12
Gambar 2.13	Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-13
Gambar 2.14	Perkembangan Jumlah Lanjut Usia Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016	II-14
Gambar 2.15	Nilai PDRB (Rp. Trilyun) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016	II-17
Gambar 2.16	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2012-2016	II-18
Gambar 2.17	Pertumbuhan Ekonomi Tiap Kategori di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 (%)	II-19
Gambar 2.18	Laju Inflasi Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh Tahun 2012-2016	II-24
Gambar 2.19	Perbandingan Pendapatan Regional Perkapita Kab. Aceh Barat dengan Propinsi Aceh Tahun 2012-2016	II-26
Gambar 2.20	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016	II-29
Gambar 2.21	Perbandingan APM dengan Kab. Tetangga, Provinsi dan Nasional Tahun 2016	II-30
Gambar 2.22	Perkembangan Angka Putus Sekolah Tahun 2014-2016	II-32



Gambar 2.23	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kab. Aceh Barat Tahun 2012 – 2016.....	II-33
Gambar 2.24	Jumlah Anak Usia 0-6 Tahun Yang Sedang Mengikuti PAUD Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016.....	II-38
Gambar 2.25	Capaian Indikator AKB dan AKABA di Kabupaten Aceh Barat Terhadap Capaian Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2015	II-40
Gambar 2.26	Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2012 – 2015	II-44
Gambar 2.27	Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 – 2016	II-68
Gambar 2.28	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Nasional	II-76
Gambar 2.29	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 – 2015.....	II-84
Gambar 2.30	Perkembangan Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2016.....	II-85
Gambar 2.31	Keikutsertaan dalam Kegiatan dari Tahun 2011 s/d 2015.....	II-114
Gambar 2.32	Keikutsertaan Perempuan dan Laki-laki dalam Kegiatan Tanggap Darurat Tahun 2011 s/d 2015.....	II-115
Gambar 2.33	Jumlah Industri Tradisional menurut Jenis Industri Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 – 2015.....	II-118
Gambar 2.34	Jumlah Usaha Perdagangan dan Tenaga Kerjanya Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2015	II-120
Gambar 2.35	Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 – 2015.....	II-121
Gambar 2.36	Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015	II-122
Gambar 2.37	Produksi Kayu Hutan menurut Jenis Produksi (m3) di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 – 2015.....	II-122
Gambar 2.38	Luas Panen Tanaman Sayuran menurut Jenis Sayuran di Kabupaten Aceh Barat (Hektar) Tahun 2016.....	II-123
Gambar 2.39	Produksi Buah-buahan menurut Jenis Buah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016.....	II-124
Gambar 2.40	Produksi dan luas tanam tanaman perkebunan menurut Jenis tanaman di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-124
Gambar 2.41	Produksi dan Jumlah ternak yang dipotong menurut Jenis Ternak di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016	II-125
Gambar 2.42	Perbandingan IPM Kab. Aceh Barat, IPM Aceh dan IPM Nasional Tahun 2012 – 2016.....	II-126
Gambar 2.43	Perbandingan IPG Kabupaten Aceh Barat dengan IPG Provinsi Aceh	II-127
Gambar 2.44	Perbandingan IPM dengan IPG Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 – 2014	II-127



Gambar 2.45	Perbandingan IDG Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh.....	II-128
Gambar 2.46	Goal, Target, dan Indikator dalam 4 Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.....	II-147
Gambar 2.47	Pola Ruang Propinsi Aceh	II-148
Gambar 2.48	Kerangka Pikir Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022.....	II-150
Gambar 2.49	Perkembangan Pagu CSR Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 – 2017	II-159
Gambar 2.50	Pagu dan Realisasi CSR Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 – 2016.	II-159
Gambar 3.1	Perbandingan Pagu dan Realisasi APBK Aceh Barat Tahun 2012-2016.....	III-2
Gambar 3.2	Perbandingan Pendapatan dan Belanja 2012-2106 (Realisasi)	III-2
Gambar 3.3	Perbandingan Pendapatan Pagu dan Realisasi Tahun 2012-2016....	III-6
Gambar 3.4	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2016	III-9
Gambar 5.1	Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang	V-5
Gambar 5.2	Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh	V-6
Gambar 5.3	Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh	V-7
Gambar 5.4	Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.....	V-8
Gambar 6.1	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Barat dengan Propinsi Aceh dan Nasional.....	VI-12
Gambar 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat.....	VI-15



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima) tahunan yang berisikan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.

Sebagai tahapan rencana pembangunan yang harus disusun oleh semua tingkatan pemerintah, baik pusat maupun daerah, RPJM diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi melalui perumusan strategi, kebijakan dan program prioritas pembangunan. Beberapa permasalahan pembangunan tersebut seperti masih tingginya angka kemiskinan, masih adanya ketimpangan pembangunan, pendapatan masyarakat yang belum optimal serta pencarian sumber pendanaan baru.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, telah menetapkan pasangan H. Ramli, MS dan Drs. H. Banta Puteh Syam, SH, MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017 - 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11-3277 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Aceh Barat dan Nomor 131.11-3276 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Aceh Barat. Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tanggal 10 Oktober 2017 di gedung DPRK Aceh Barat oleh Gubernur Aceh drh. Irwandi Yusuf, M.Sc, maka semua janji politik saat kampanye yang meliputi visi, misi dan program kerja dituangkan ke dalam RPJM Tahun 2017 - 2022 untuk direalisasikan.

RPJM yang disusun akan menjadi dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mengimplementasikan visi dan misi yang sudah disesuaikan dengan program, kebijakan dan sasaran yang disepakati sampai akhir masa kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan bagi semua stakeholders di Kabupaten Aceh Barat melalui program dan kegiatan perangkat daerah.

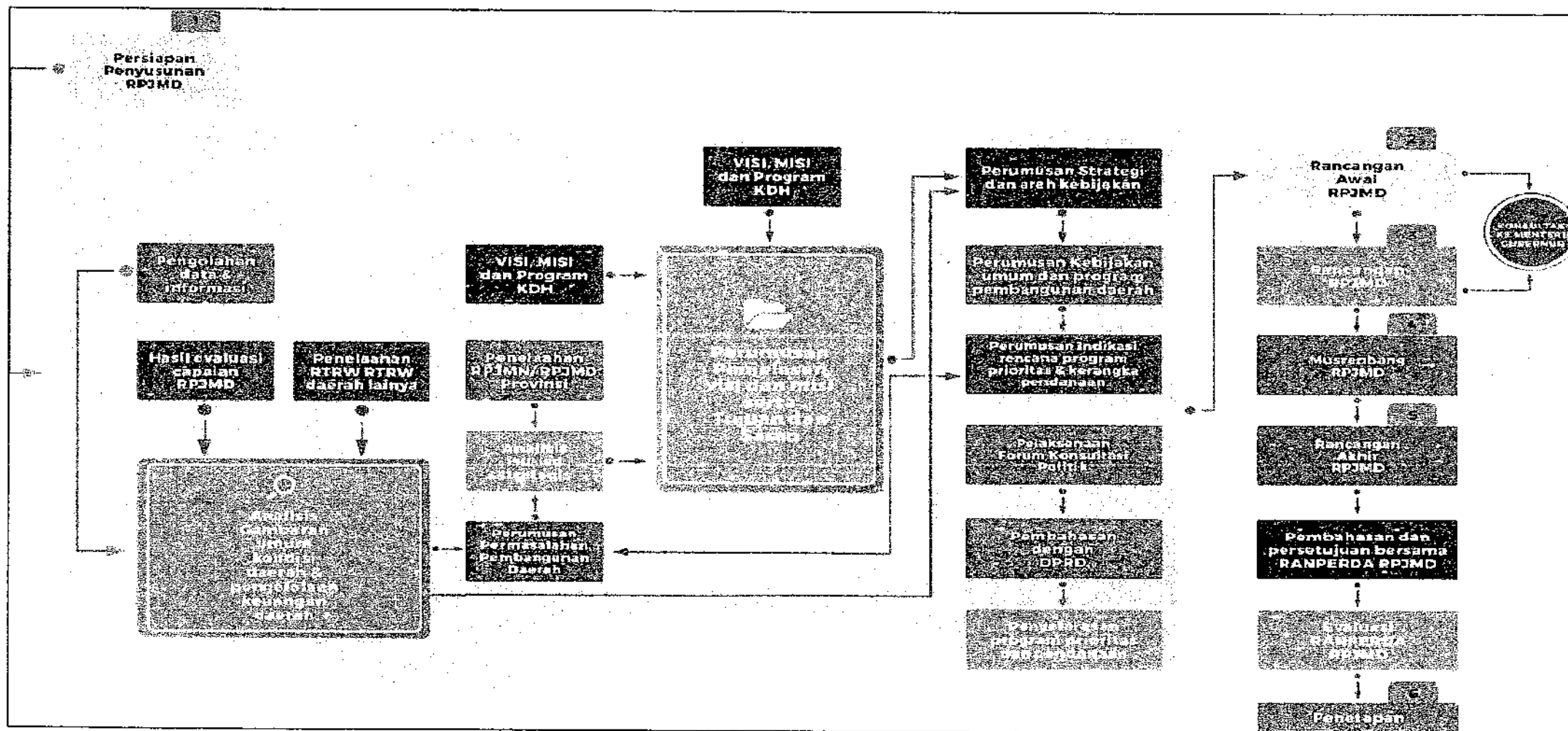
Secara teknis, penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan: Teknokratik, Partisipatif, Politis; dan Atas-Bawah dan Bawah-Atas. (1) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; (2) Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; (3) Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRK; dan (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari gampong, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.



Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan: holistik-tematik, integratif dan spasial. (1) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; (2) Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan (3) Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ruang dalam perencanaan.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Aceh Barat



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 merupakan tahap ke-3 pelaksanaan RPJP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan penekanan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam. Untuk itu, dalam pencapaian visi pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, misi yang diangkat berkaitan dengan pemantapan pembangunan di berbagai bidang pembangunan sesuai dengan permasalahan dan isu yang diangkat. Di samping itu, salah satu misi juga mengangkat tentang pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada Sumber Daya Alam, terutama Sumber Daya Alam unggulan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan



- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
 21. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1);
 22. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
 23. Qanun Aceh Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
 24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025;

26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Aceh Barat tahun 2012-2032;
27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017.

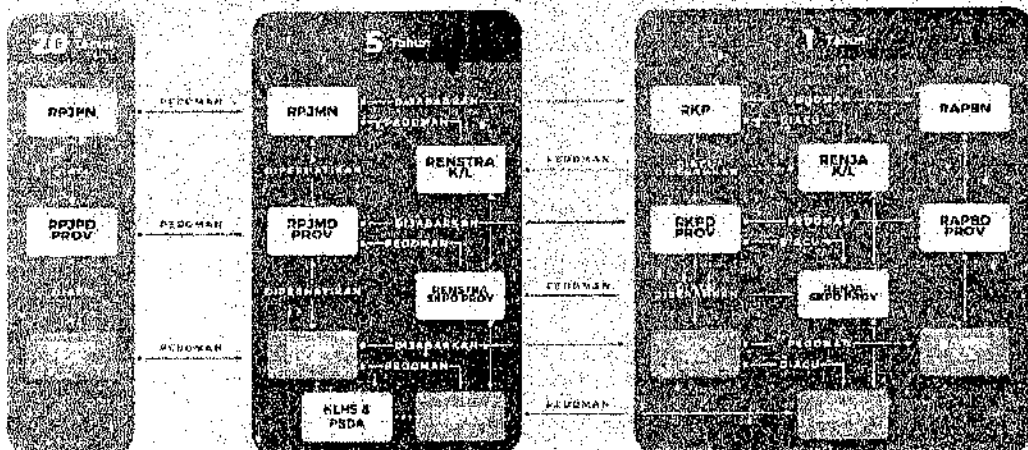
1.3 Hubungan Antar Dokumen

A. Hubungan dengan dokumen perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Aceh. Penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 berpedoman pada RPJP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan RPJM Aceh Tahun 2017-2022.

Hubungan RPJM Kabupaten Aceh Barat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.2.
Hubungan Antar Dokumen

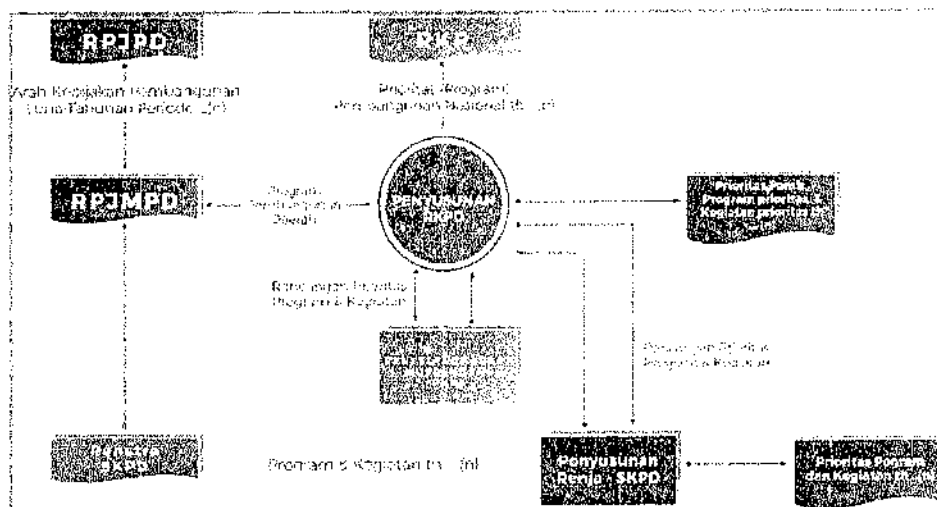


Sumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Aceh Barat yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Aceh Barat yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat gampong, kecamatan, dan kabupaten.

Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dalam Renja OPD harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan OPD juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022.

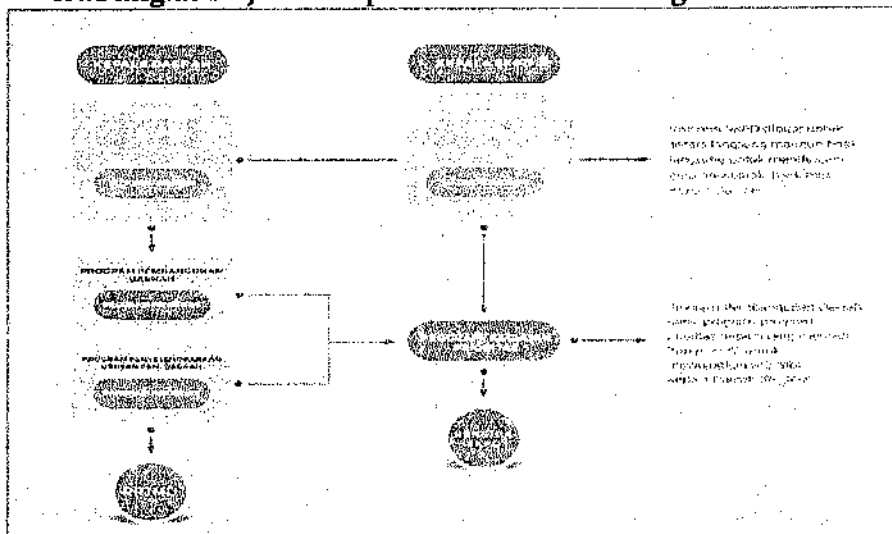
Gambar 1.3.
Hubungan RPJM dengan RKPD Tahunan Aceh Barat



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJM yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Gambar 1.4.
Hubungan RPJM Kabupaten Aceh Barat dengan Renstra OPD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam menjalankan rencana pembangunan ke depan, terdapat adanya perubahan paradigma, antara lain:

1. Proses perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumberdaya melalui efisiensi, efektivitas dan keadilan alokasi sumber daya;
2. Teknis perencanaan dan penganggaran melalui efisiensi, efektivitas dan keadilan adalah dengan melakukan fokus pada program-program prioritas dengan memperbaiki kualitas belanja;
3. Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional;
4. Politik perencanaan dan anggaran harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai;
5. Teknis perencanaan dan anggaran memastikan tujuan sasaran pembangunan nasional;

6. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi *money follow program*; dan
7. Memangkas program yang nomenklturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya;

B. Hubungan dengan Dokumen perencanaan lainnya

Beberapa dokumen perencanaan yang telah disusun dijadikan sebagai dasar penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 sehingga melengkapi dan memperkaya dokumen RPJM dalam berbagai sektor, untuk Grand Desain Pembangunan Kependudukan maka fokus pada masalah kependudukan, Pengarusutamaan Gender memprioritaskan bahwa penerima manfaat dapat seimbang antara laki-laki dan perempuan serta disparitas wilayah, Penanggulangan Bencana memfokuskan pada penanganan bencana alam seperti tsunami, banjir sesuai kondisi geologi Kabupaten Aceh Barat. Dengan demikian, terhadap hubungan antar dokumen perencanaan diharapkan akan terciptanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 1.5.
Hubungan RPJM dengan Dokumen Lainnya



Sumber : Bappeda Kab. Aceh Barat, Tahun 2017

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud:

- a. Menjadi pedoman jangka menengah bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menentukan strategi dan arah pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas sesuai dengan potensi dan kondisi riil yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.



1.4.2 Tujuan

RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas berdasarkan fungsi pemerintah sesuai dengan wilayah, ruang dan waktu;
2. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mencapai masyarakat yang Islami dan tangguh;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan; dan
4. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan RPJM yang memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam bab ini menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu serta kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah disepakati.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu, diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.



BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Menjelaskan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sub bab aspek geografi dan demografi membahas mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana dan demografi

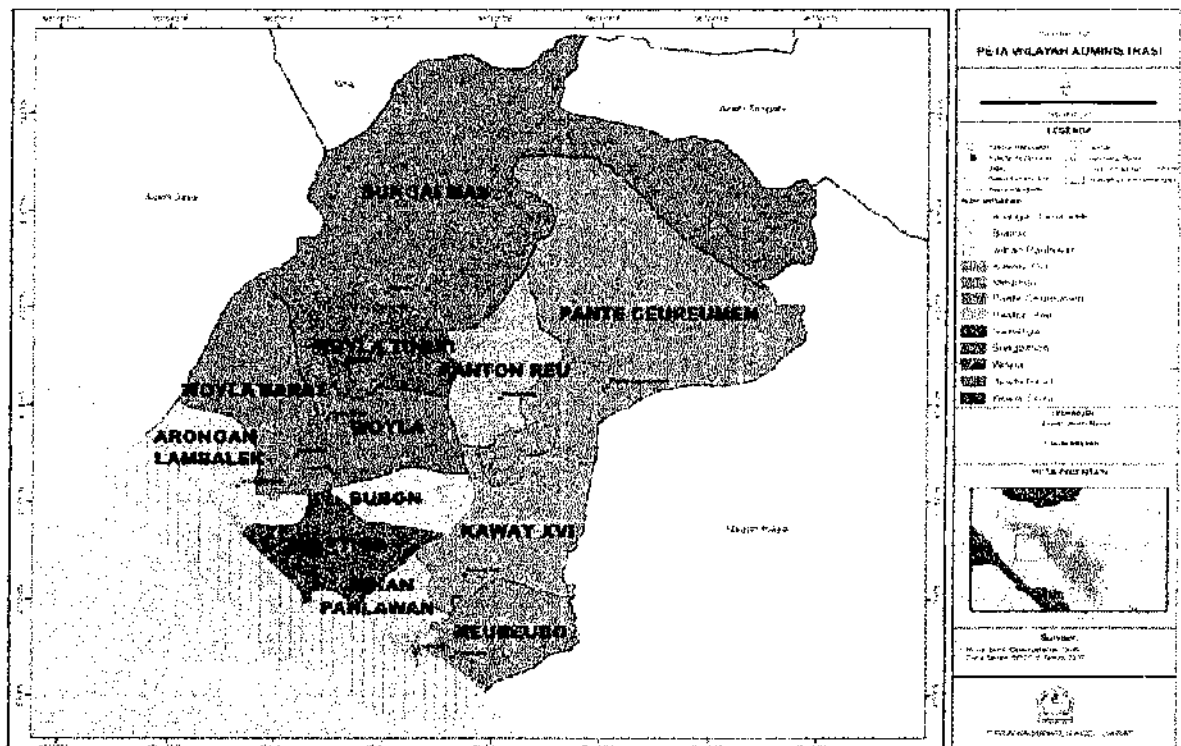
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Aceh Barat dengan ibukota Meulaboh berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Barat memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Aceh Jaya, Pidie dan Aceh Tengah;
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya;
Sebelah Timur	: Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya; dan
Sebelah Barat	: Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Jaya.

Gambar 2. 1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat



Kabupaten Aceh Barat memiliki luas wilayah darat 2.927,95 km², lautan sejauh 12 mil seluas 957,38 km² dan garis pantai sepanjang 54,84 km. Secara administrasi, Kabupaten Aceh Barat terbagi dalam 12 Kecamatan, 36 kemukiman, dan 322 gampong. Untuk lebih jelas tentang luas wilayah Kabupaten Aceh Barat menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

[Handwritten signature]



Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Samatiga merupakan kecamatan yang memiliki kemukiman terbanyak yaitu 6 mukim, sementara jumlah gampong terbanyak berada pada Kecamatan Kaway XVI dan Woyla dengan jumlah masing-masing 44 dan 43 gampong.

Tabel 2.1.
**Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Gampong menurut Kecamatan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Dari Luas Kabupaten	Jumlah Mukim	Jumlah Gampong
1	J. Pahlawan	Meulaboh	44,91	1,53	4	21
2	Samatiga	Suak Timah	140,69	4,81	6	32
3	B u b o n	Layueng	129,58	4,43	3	17
4	A. Lambalek	Drien Rampak	130,06	4,44	2	27
5	Woyla	Kuala Bhee	249,04	8,51	3	43
6	Woyla Barat	Pasie Mali	123,00	4,20	2	24
7	Woyla Timur	Tangkeh	132,60	4,53	2	26
8	Kaway XVI	Peureumeue	510,18	17,42	4	44
9	Meureubo	Meureubo	112,87	3,85	2	26
10	P.Ceureumen	Pante Ceureumen	490,25	16,74	4	25
11	Panton Reu	Meutulang	83,04	2,84	2	19
12	Sungai Mas	Kajeung	781,73	26,70	2	18
Total Luas			2.927,95	100,00	36	322

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017.

Kabupaten Aceh Barat terletak pada bagian pesisir barat Aceh, diapit pegunungan bukit barisan dibagian utara dan berhadapan dengan Samudera Indonesia di bagian selatan. Secara geografis, Kabupaten Aceh Barat terletak pada koordinat 04°06' - 04°47' Lintang Utara dan 95°52' - 96°30' Bujur Timur.

B. Kondisi Topografi

Kondisi fisik Kabupaten Aceh Barat sebagian besar terdiri dari daerah perbukitan dengan bentuk topografi di bagian utara adalah daerah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan dan termasuk dalam ekosistem Leuser. Berdasarkan kajian lereng dengan menggunakan skala Maberry, maka dapat dikatakan daerah Aceh Barat memiliki lahan yang sesuai untuk pengembangan wilayah karena memiliki sudut lereng berkisar antara 0 sampai 3 persen. Ditinjau dari kontur wilayah, sebagian wilayah di Kecamatan Sungai Mas dan Pante Ceureumen memiliki ketinggian di atas 1500 m dpl, sedangkan sekitar 20 persen dari keseluruhan wilayah yang merupakan dataran pesisir berada pada ketinggian sekitar 25 m dpl yang mencakup Kecamatan Johan Pahlawan dan Meureubo.

C. Kondisi Geologi

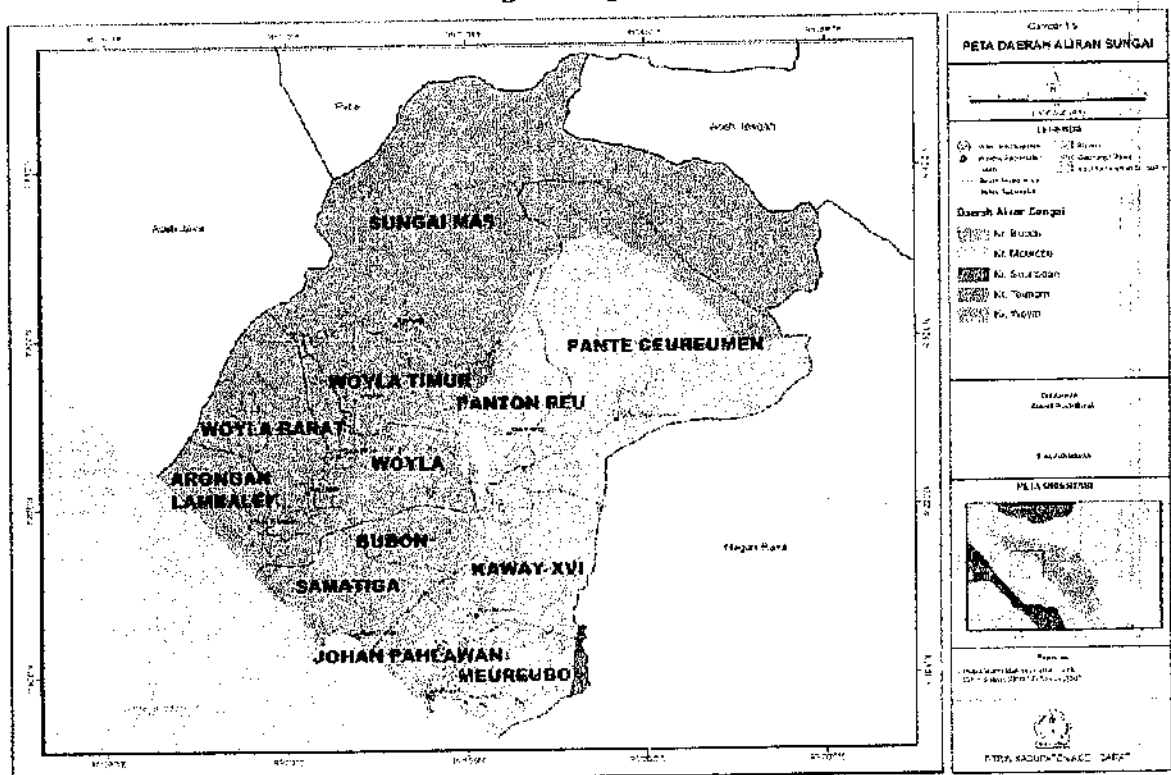
Kabupaten Aceh Barat berada diantara dua patahan (sebelah Timur - Utara dan sebelah Barat - Selatan Kota) dan berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia yang berjarak ± 130 km dari garis pantai barat sehingga kabupaten ini rawan terhadap tsunami. Berdasarkan data yang didapat dari hasil penelitian Departemen Pertambangan dan Energi, Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi bahan galian/tambang, antara lain batu bara (di Desa Bukit Jaya Kecamatan Meureubo dan Kaway XVI), emas di Kecamatan Sungai Mas, sedangkan wilayah Kecamatan Woyla dan Pante Ceureumen banyak terdapat batu

D. Kondisi Hidrologi

Potensi sumber daya air yang dimiliki sangat besar karena dialiri oleh 2 (dua) sungai besar yaitu Krueng Woyla dan Krueng Meureubo dengan kapasitas alirannya lebih dari 250 m³/detik. Dengan karakteristik dan pola aliran sungai ini, terdapat permasalahan berupa adanya banjir periodik pada musim penghujan. Banjir periodik tersebut terjadi sebagai limpasan air sungai, terutama yang perbedaan tinggi dengan muara (permukaan laut) tidak terlalu besar, seperti pada sungai-sungai di bagian tengah dan timur wilayah. Limpasan sungai tersebut bermuara ke Samudera Indonesia. Area yang mengalami banjir periodik tersebut adalah pada alur limpasan sungai : Krueng Woyla dan anak-anak sungainya yaitu mulai dari wilayah Kecamatan Sungai Mas, Woyla Timur, Woyla Barat, Arongan Lambalek dan Samatiga; Krueng Meureubo dan anak-anak sungainya, mulai dari Kecamatan Pante Ceuremen, Kaway XVI, Meureubo dan Johan Pahlawan; dimana pertemuan Krueng Keureuto dengan anaknya Krueng Peuto ini adalah di Kecamatan Lhok Bubon; Krueng Bubon, yaitu mulai dari Kecamatan Bubon dan Samatiga. Dari sejumlah sungai di atas, yang paling luas cakupan masalah banjirnya adalah Krueng Woyla dan Meureubo. Khususnya Krueng Meureubo dimana pada area banjirnya terdapat simpul perkotaan Meulaboh sebagai ibukota Kabupaten Aceh Barat. Selain kawasan perkotaan Meulaboh (Kecamatan Johan Pahlawan), wilayah Kecamatan Meurebo dan Kecamatan Kaway XVI. Sementara, Krueng Woyla cakupan banjir yang sering melanda wilayah hilir sungai yaitu Kecamatan Arongan Lambalek dan sebagian Kecamatan Samatiga. Untuk mengatasi masalah banjir tersebut, selain langkah-langkah pembangunan tanggul, pelurusan atau penyodetan aliran, pelebaran dan pendalaman sungai, patut dipertimbangkan langkah pembangunan waduk atau kolam retensi pada aliran Krueng Meureubo tersebut, di bagian hulu dari wilayah Kecamatan Pante Ceuremen.

Gambar 2.4.

Peta Hidrologi Kabupaten Aceh Barat

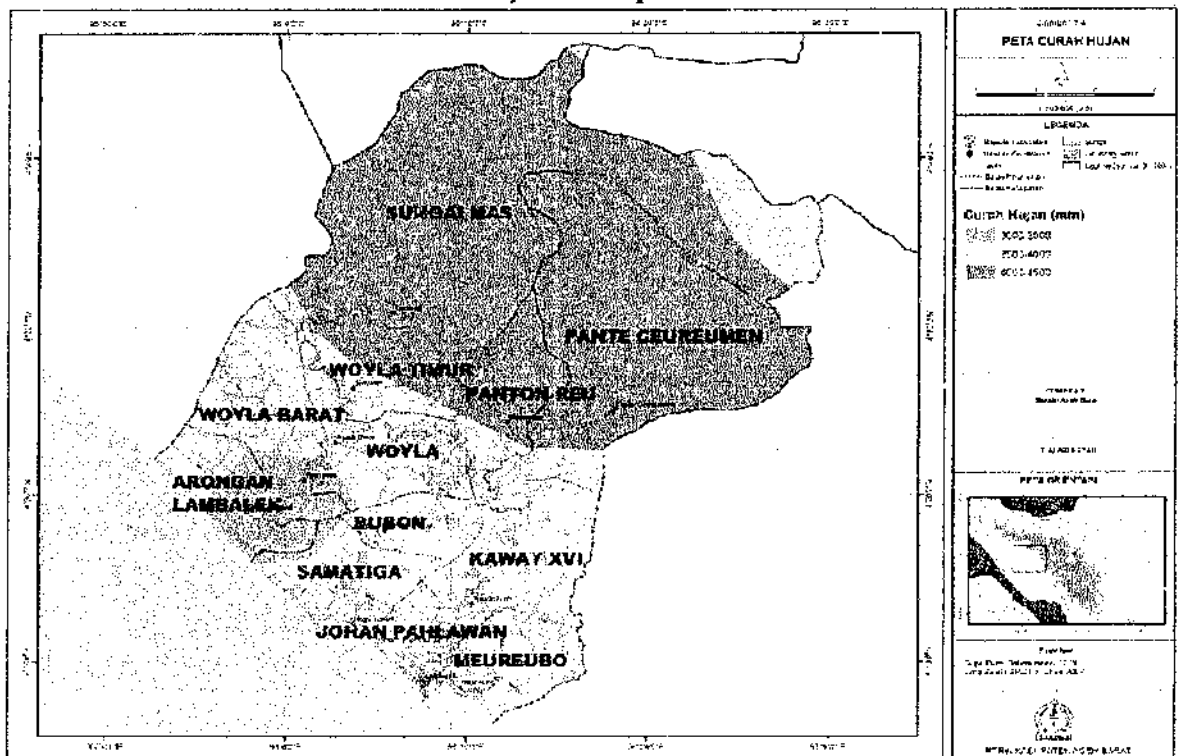


E. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Aceh Barat termasuk dalam kategori daerah sub-tropis yang terdiri dari 2 (dua) musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan yang

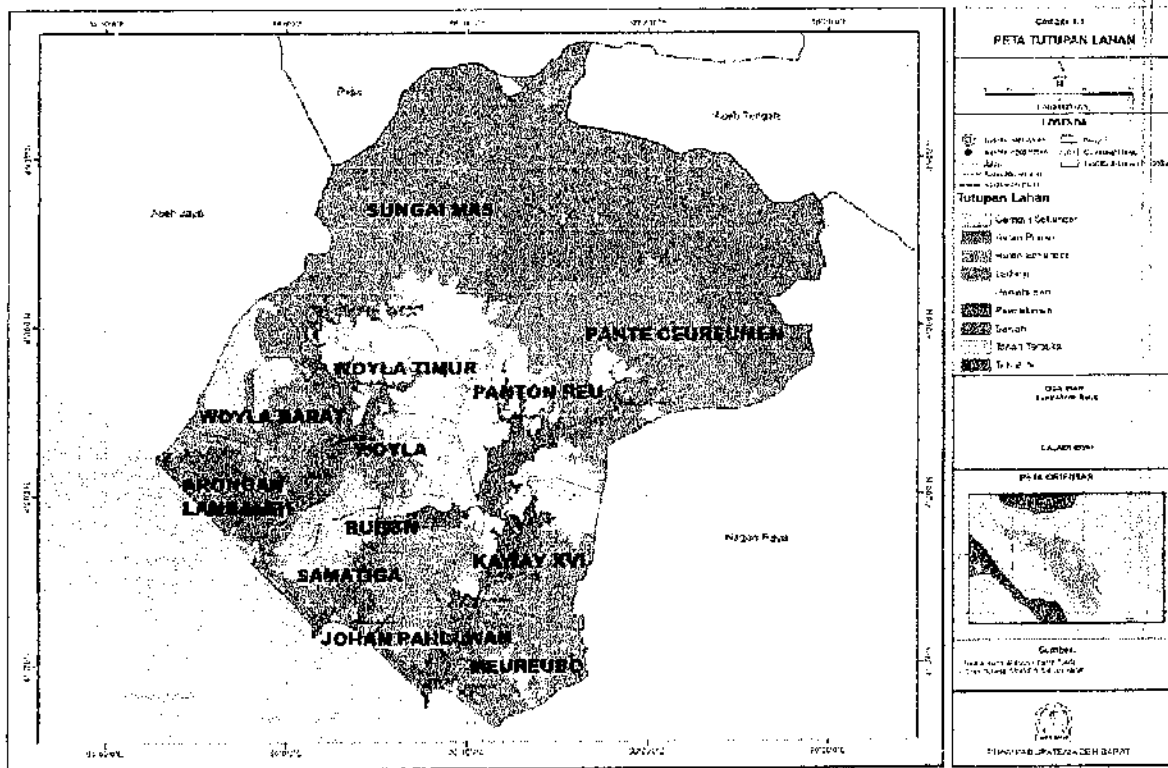
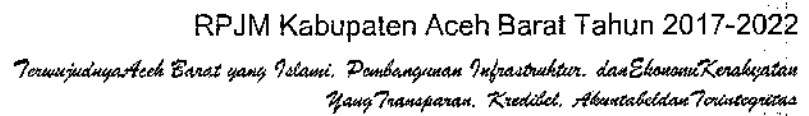
disertai gelombang laut pasang biasanya terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Februari setiap tahunnya. Tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November mencapai 649,4 mm. Curah hujan terendah pada umumnya terjadi pada Oktober mencapai 97,9 mm, rata - rata curah hujan di Kabupaten Aceh Barat 255,1 mm. Sedangkan, musim kemarau berlangsung antara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26 - 31,2 °C pada siang hari dan 23 - 25 °C pada malam hari. Sedangkan, rata - rata lamanya penyinaran matahari minimum terjadi bulan Agustus yaitu 20 persen, dan penyinaran maksimum 58 persen pada bulan Februari. Sedangkan, tekanan serta kelembapan udara rata-rata setiap bulannya mencapai 1.010,1 atm dan 86 persen.

Gambar 2.5.
Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Barat



F. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Barat pada umumnya digunakan untuk keperluan areal perkampungan dan pemukiman penduduk, areal perkebunan, sawah, ladang tegalan, areal budidaya perikanan darat, semak belukar dan hutan. Alokasi ruang terbesar berupa hutan primer yaitu mencapai luas 115.235,90 Ha atau 39,36 persen dan lahan perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar (Swasta Nasional) seluas 51.014,20 Ha atau 17,42 persen. Sedangkan, seluas 166.250,10 Ha atau 43,22 persen digunakan untuk keperluan lain sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan kebutuhan penggunaan lahan oleh masyarakat setempat.





2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, kawasan lindung dan kawasan budidaya di pantai barat-selatan khususnya Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Kawasan Lindung di Wilayah Kabupaten Aceh Barat

No.	Kawasan	Lokasi	Arah Pengembangan	Penekanan
1.	Kawasan Lindung	Gunung Leuser	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional	Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
2.	Kawasan Lindung wilayah Sungai	Wilayah sungai Woyla – Batee	Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya alam	Konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya alam dan pengendalian daya rusak air

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Barat, 2013.

Tabel 2.4.
Kawasan Andalan dan Strategis Wilayah Kabupaten Aceh Barat

No	Kawasan	Lokasi	Arah Pengembangan	Penekanan
1	Kawasan Andalan	Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Perikanan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Pertambangan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan
2	Kawasan Strategis Ekosistem Leuser	Kawasan Strategis Ekosistem Leuser	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional	Kepentingan Lingkungan Hidup Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

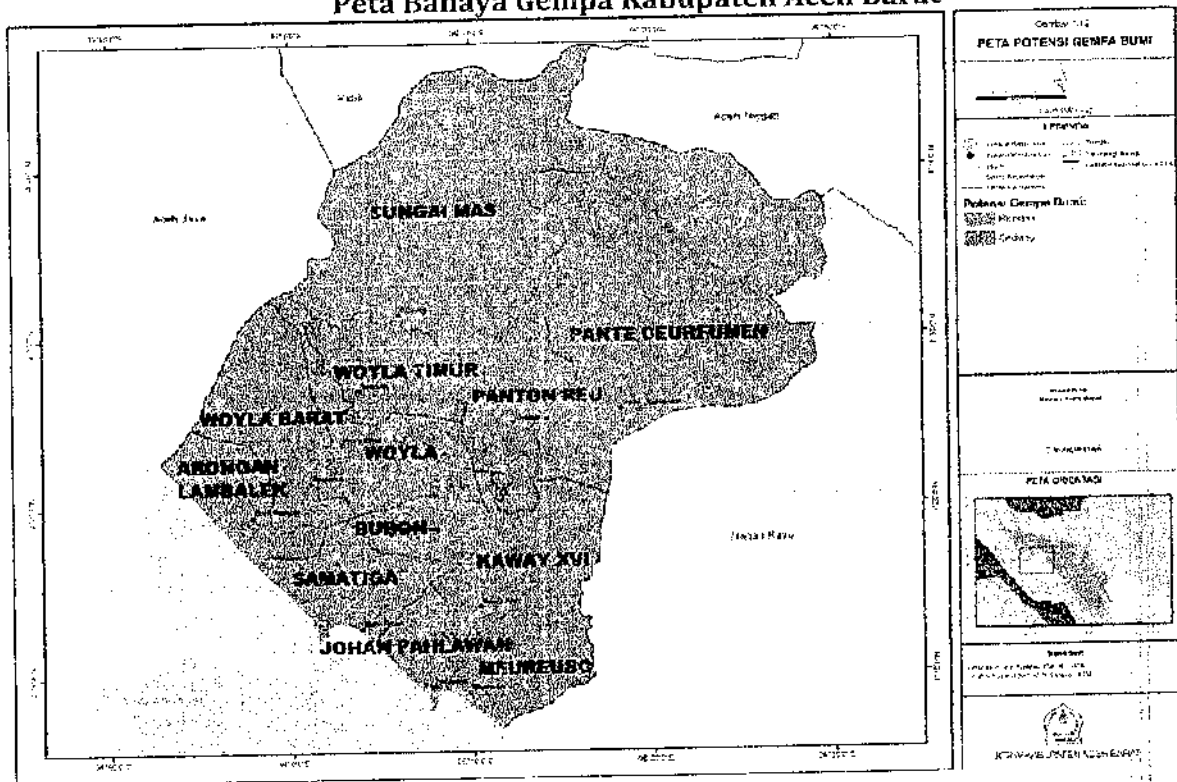
Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Barat, 2013.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

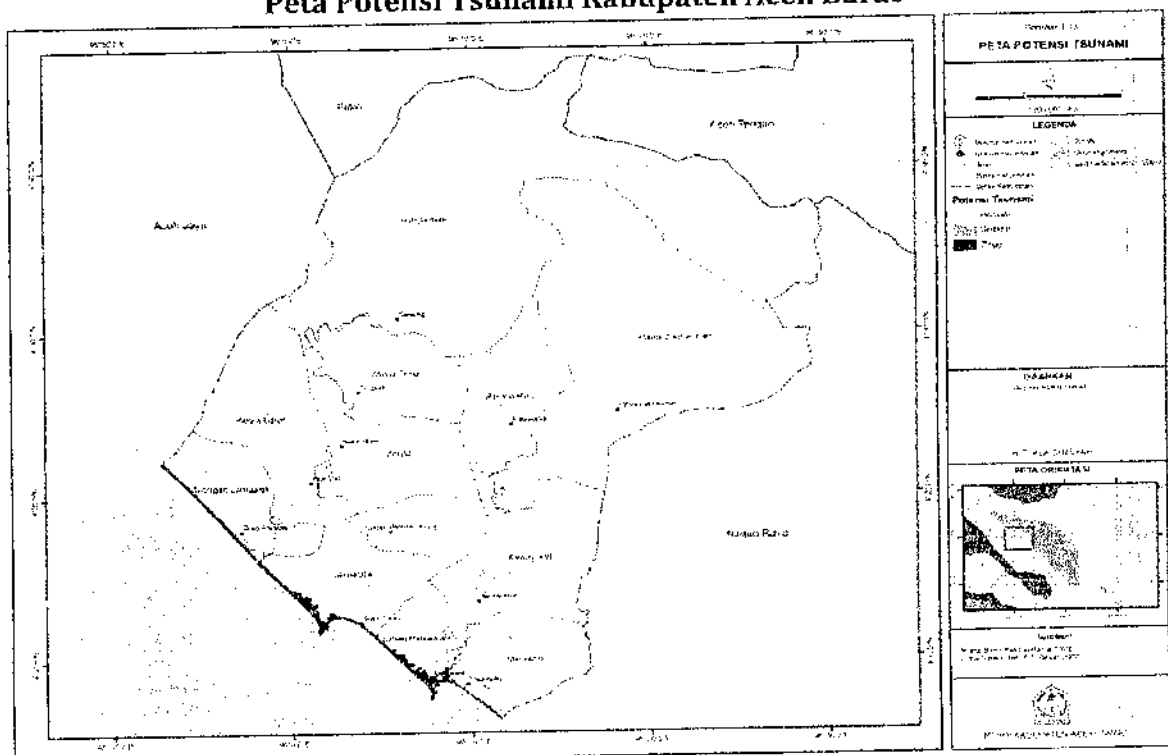
Wilayah Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi. Potensi bencana geologi berupa gempa bumi merupakan potensi kebencanaan yang relatif sama tingginya dengan daerah lain di sepanjang Patahan Semangko yang membentang di seluruh wilayah pantai barat Aceh. Potensi kebencanaan ini dapat menimbulkan kerusakan yang parah karena sebagian besar wilayah perkotaan berkembang di pesisir pantai barat. Potensi kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat meliputi :

- Potensi bencana geologi; berupa bencana gempa bumi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat.
- Potensi bencana tsunami; umumnya tersebar di sepanjang pesisir pantai barat yang berjarak 1 km dari bibir pantai. Daerah yang memiliki resiko dampak parah yaitu pada perkotaan Meulaboh.
- Potensi bencana longsor; daerah yang diprediksi masih akan mengalami ancaman bencana longsor adalah Kecamatan Pantai Ceuremen dan Kecamatan Sungai Mas.

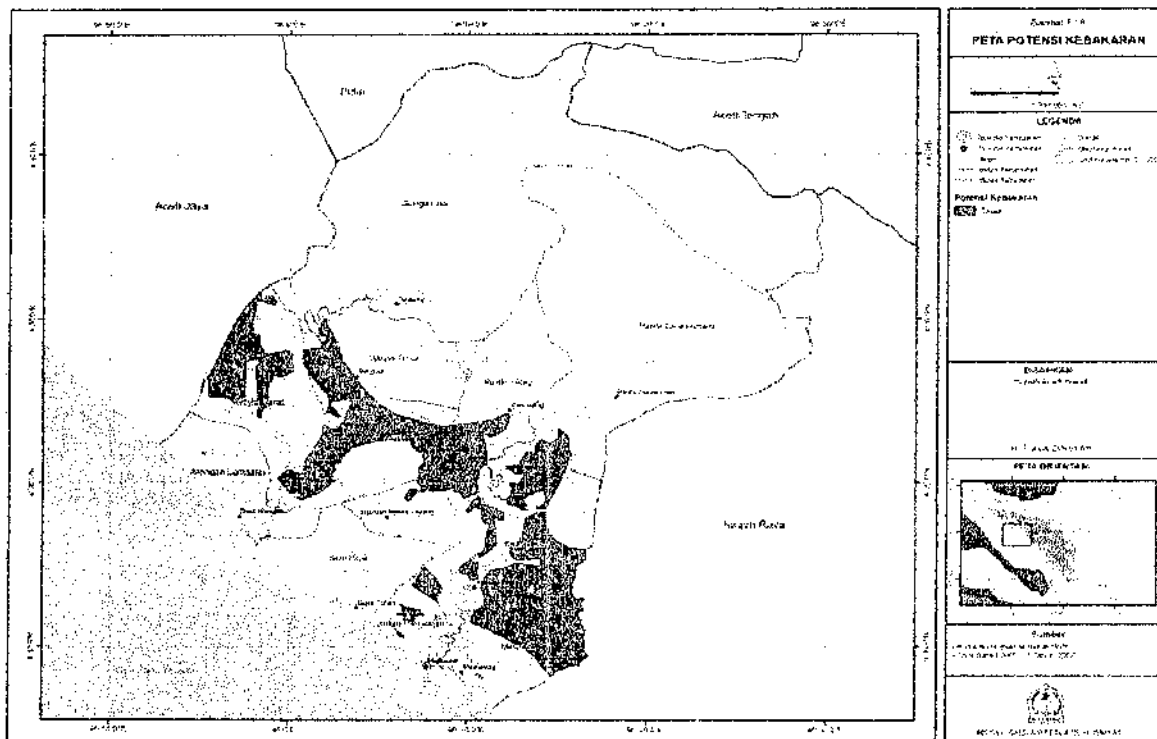
Gambar 2.7.
Peta Bahaya Gempa Kabupaten Aceh Barat



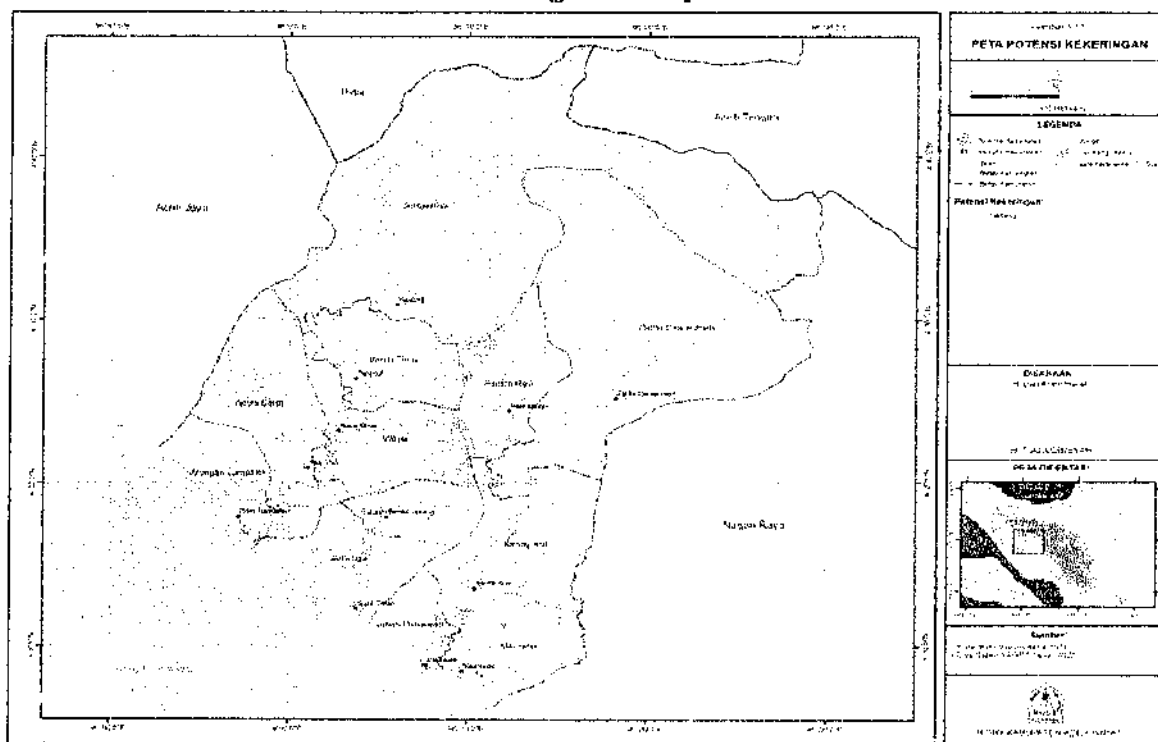
Gambar 2.8.
Peta Potensi Tsunami Kabupaten Aceh Barat



Gambar 2.9.
Peta Potensi Kebakaran Kabupaten Aceh Barat



Gambar 2.10.
Peta Potensi Kekeringan Kabupaten Aceh Barat



- Potensi puting beliung; daerah yang diprediksikan memiliki potensi puting beliung adalah Kecamatan Pantai Ceuremen, Kecamatan Sungai Mas dan sebagian Kecamatan Pantan Rheu.
- Potensi bencana banjir; berupa banjir rob (pasang surut) di sekitar perkotaan Meulaboh dan banjir bandang di wilayah DAS Krueng Meureubo dan Krueng Woyla.
- Potensi abrasi dan erosi di Kabupaten Aceh Barat berada pada Kecamatan Johan Pahlawan.



- Potensi kekeringan; terjadi akibat curah hujan di suatu kawasan jauh dibawah curah hujan normal dalam waktu lama. Bencana ini dipicu oleh perubahan siklus iklim global yang ditandai dengan meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan. Potensi kekeringan ini berada di Kecamatan Meureubo, Johan Pahlawan, Samatiga dan sebagian Arongan Lambalek.
- Potensi bencana kebakaran; berupa kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Samatiga, Arongan Lambalek, Woyla, Woyla Timur, Woyla Barat, dan Bubon.

2.1.4 Demografi

A. Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yakni tahun 2006 hingga 2016 terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Tahun 2006, penduduk Kabupaten Aceh Barat berjumlah 151.594 jiwa dan terus meningkat hingga mencapai 197.921 jiwa di tahun 2016. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016

Tahun	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2012	92.573	89.791	182.364
2013	95.037	92.422	187.459
2014	96.528	93.716	190.244
2015	98.001	95.790	193.791
2016	100.336	97.585	197.921

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017.

Jika ditinjau dari segi penyebarannya, maka penduduk Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2016 masih terkonsentrasi di Kecamatan Johan Pahlawan yakni sebesar 63.975 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Meureubo dan Kaway XVI masing-masing sebesar 30.253 dan 21.644 jiwa. Untuk lebih jelasnya, sebaran jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

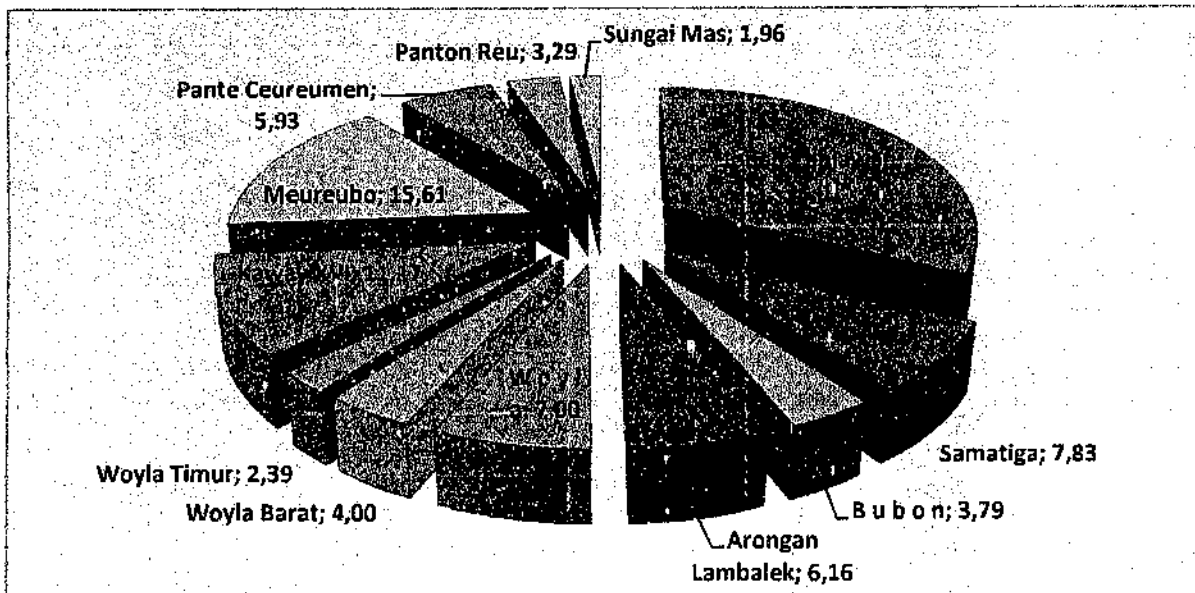
Tabel 2.6.

Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah	persen
		Laki - laki	Perempuan		
1	Johan Pahlawan	32.441	31.534	63.975	33,01
2	Samatiga	7.614	7.558	15.172	7,83
3	Bubon	3.684	3.655	7.339	3,79
4	Arongan Lambalek	6.113	5.815	11.928	6,16
5	Woyla	6.813	6.752	13.565	7,00
6	Woyla Barat	3.893	3.858	7.751	4,00
7	Woyla Timur	2.339	2.301	4.640	2,39
8	Kaway XVI	10.970	10.674	21.644	11,17
9	Meureubo	15.471	14.782	30.253	15,61
10	Pante Ceureumen	5.865	5.621	11.486	5,93
11	Panton Reu	3.213	3.160	6.373	3,29
12	Sungai Mas	1.920	1.875	3.795	1,96
Jumlah		100.336	97.585	197.921	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017.

Gambar 2.11.
Sebaran Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016



Sumber : Bappeda Kab. Aceh Barat, 2017

B. Komposisi Penduduk

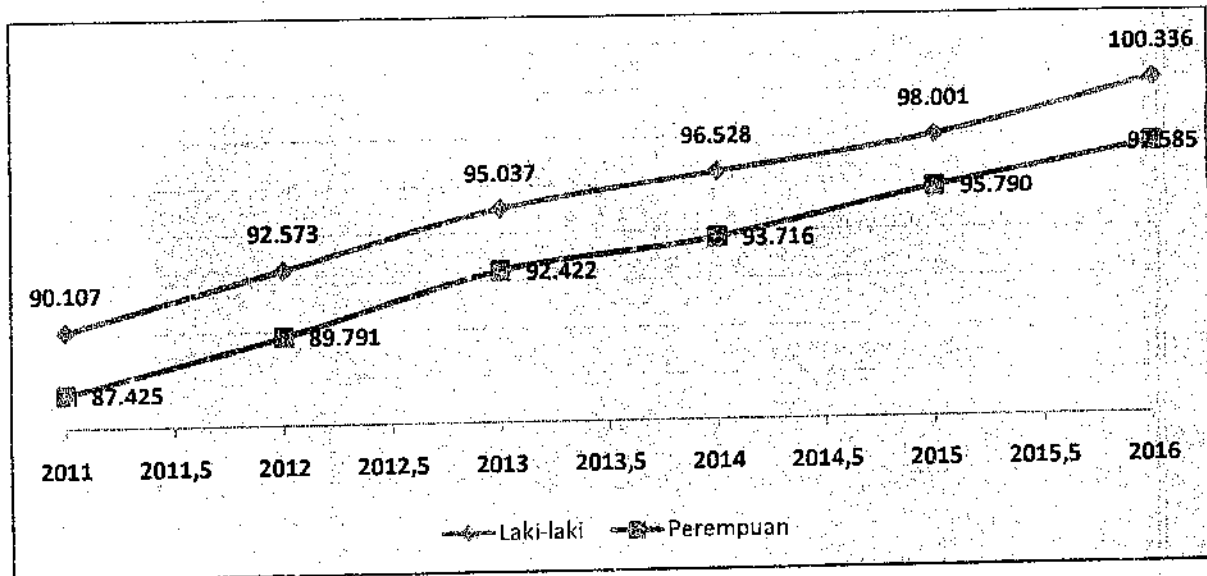
Jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2016 sebanyak 49.050 Kepala Keluarga, dengan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan (*sex ratio*) sebesar 103 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.7. Dari tabel terlihat jumlah rumah tangga di Kecamatan Johan Pahlawan adalah yang tertinggi yaitu sebanyak 16.088 KK, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Sungai Mas dengan jumlah rumah tangga hanya 1.002 KK.

Tabel 2.7.
**Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016**

No.	Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
			Laki - laki	Perempuan	Jumlah	
1	Johan pahlawan	16.088	32.441	31.534	63.975	103
2	Samatiga	4.179	7.614	7.558	15.172	101
3	B u b o n	1.760	3.684	3.655	7.339	101
4	Arongan Lambalek	3.144	6.113	5.815	11.928	105
5	Woyla	3.559	6.813	6.752	13.565	101
6	Woyla Barat	2.095	3.893	3.858	7.751	101
7	Woyla Timur	1.228	2.339	2.301	4.640	102
8	Kaway XVI	5.116	10.970	10.674	21.644	103
9	Meureubo	7.173	15.471	14.782	30.253	105
10	Pante Ceureumen	2.083	5.865	5.621	11.486	104
11	Panton Reu	1.623	3.213	3.160	6.373	102
12	Sungai Mas	1.002	1.920	1.875	3.795	102
Jumlah		49.050	100.336	97.585	197.921	103

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017.

Gambar 2.12.
Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat
menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2016



Sumber : Bappeda Kab. Aceh Barat, 2017

C. Struktur Usia

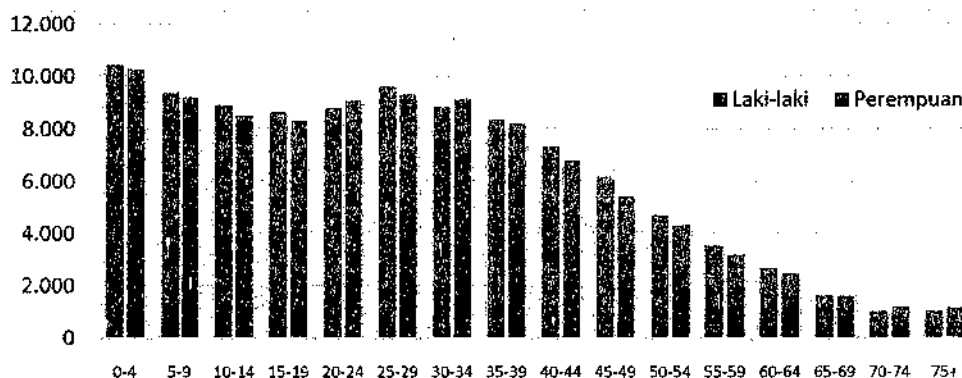
Komposisi penduduk pada tahun 2016 berdasarkan kelompok umur masih didominasi oleh kelompok usia produktif yaitu sejumlah 134.012 jiwa atau 67,71 persen. Jumlah usia produktif ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah ini telah bertambah sebanyak 14.452 jiwa dari tahun 2012. Untuk lebih jelas terhadap jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-4	10.419	10.230	20.649	
2	5-9	9.348	9.161	18.509	
3	10-14	8.852	8.482	17.334	
4	15-19	8.577	8.272	16.849	
5	20-24	8.760	9.037	17.797	
6	25-29	9.569	9.280	18.849	
7	30-34	8.773	9.090	17.863	
8	35-39	8.327	8.178	16.505	
9	40-44	7.288	6.796	14.084	
10	45-49	6.166	5.414	11.580	
11	50-54	4.673	4.264	8.937	
12	55-59	3.443	3.120	6.563	
13	60-64	2.583	2.402	4.985	
14	65-69	1.615	1.605	3.220	
15	70-74	973	1.142	2.115	
16	75+	970	1.112	2.082	
Jumlah		2016	100.336	97.585	197.921
		2015	98.001	95.790	193.791
		2014	96.528	93.716	190.244
		2013	95.037	92.422	187.459
		2012	92.573	89.791	182.364

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Gambar 2.13.
Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016



Sumber : Bappeda Kab. Aceh Barat, 2017.

Dilihat dari tabel diatas, komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang pada setiap kelompok umur yang ada. Jumlah penduduk tertinggi berada pada kelompok umur 0-4 tahun, sedangkan kelompok umur terendah berada pada kelompok umur 75 tahun keatas. Dari data yang ada juga dapat diketahui bahwa Kabupaten Aceh Barat memiliki bonus demografi karena kelompok usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dari usia non produktif dengan perbandingan persentase sebesar 67,71 persen dan 32,29 persen. Adapun persentase penduduk usia kerja (usia produktif laki-laki) tahun 2016 yaitu sebesar 67,93 persen dan perempuan sebesar 67,48 persen.

Untuk menghadapi jumlah usia produktif yang terus meningkat, diperlukan adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat guna mengantisipasi gejolak yang akan timbul didalam masyarakat. Kebijakan berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan pembukaan lapangan kerja baru kepada masyarakat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Kebijakan lainnya yaitu dapat berupa kemudahan dalam memperoleh akses pendidikan dan pelatihan, sehingga keterampilan yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan tersebut dapat meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing di dunia kerja

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, Kelompok Usia Sekolah dan
Jenis Kelamin di Kab Aceh Barat Tahun 2016

No	Kecamatan	Kelompok Usia Sekolah						Jumlah	
		7-12 tahun		13-15 tahun		16-18 tahun			
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Johan Pahlawan	3.343	3.302	1.738	1.646	2.054	1.748	7.135	6.696
2	Samatiga	648	645	356	308	358	401	1.362	1.354
3	B u b o n	454	380	203	196	166	190	823	766
4	Arongan Lambalek	708	619	331	328	287	302	1.326	1.249
5	Woyla	762	768	383	411	368	344	1.513	1.523
6	Woyla Barat	453	418	207	219	210	194	870	831
7	Woyla Timur	291	264	119	136	83	126	493	526
8	Kaway XVI	1.233	1.197	544	510	666	601	2.443	2.308
9	Meureubo	1.771	1.705	878	828	747	777	3.396	3.310
10	Pante Ceureumen	662	720	367	322	604	283	1.633	1.325
11	Panton Reu	415	423	176	162	148	144	739	729
12	Sungai Mas	252	205	66	81	69	65	387	351
	Jumlah	10.992	10.646	5.368	5.147	5.760	5.175	22.120	20.968

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan pada kelompok usia sekolah yang ada. Pada setiap kelompok usia sekolah SD, SMP dan SMA, jumlah laki-laki juga lebih banyak dari perempuan. Hal ini terkait dengan komposisi penduduk Kabupaten Aceh Barat yang hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan pada masing-masing kelompok umur.

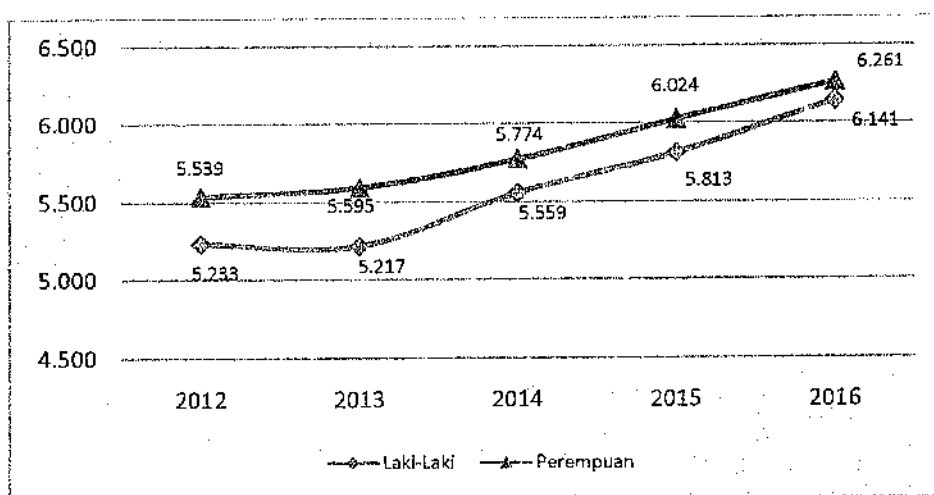
Jumlah lanjut usia (lansia) di Kabupaten Aceh Barat tahun 2011-2015 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Usia Harapan Hidup di Kabupaten Aceh Barat juga meningkat dari tahun ke tahun. Hampir sama dengan komposisi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah lanjut usia laki-laki dan perempuan juga hampir berimbang. Ditinjau dari kuantitas, jumlah lanjut usia perempuan lebih banyak dari laki-laki. Namun, dari perkembangan setiap tahunnya, terlihat bahwa mulai tahun 2013, perkembangan jumlah lanjut usia laki-laki lebih signifikan dari lanjut usia perempuan. Hal ini menunjukkan Usia Harapan Hidup laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

Tabel 2.10.
Jumlah Lanjut Usia Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan
1	2012	5.233	5.539
2	2013	5.217	5.595
3	2014	5.559	5.774
4	2015	5.813	6.024
5	2016	6.141	6.261

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017.

Gambar 2.14.
**Perkembangan Jumlah Lanjut Usia Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2012-2016**



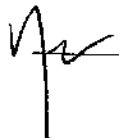
D. Jenis Pekerjaan

Tahun 2015 sebesar 38,83 persen penduduk Kabupaten Aceh Barat bekerja di sektor Pertanian, Pemburuan dan Kehutanan, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakatnya bertempat tinggal di daerah pedesaan, diikuti pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 16,1 persen, dan jasa- jasa lainnya sebesar 26,85 persen. Lapangan usaha yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor Lembaga Keuangan yakni 0,67 persen seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.11.
Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Aceh Barat menurut Bidang Usaha Tahun 2012 ~ 2015

No	Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015	
		Jumlah Penduduk	persen	Jumlah Penduduk	persen	Jumlah Penduduk	persen	Jumlah Penduduk	persen
1	Pertanian, Pemburuan dan Kehutanan	1.437	45,89	1.973	50,93	2.188	50,64	31.971	38,83
2	Pertambangan dan Penggalian	119	3,80	100	2,58	220	5,09	2.974	3,61
3	Industri Pengolahan	79	2,52	76	1,96	115	2,66	3.161	3,84
4	Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-	-	-	986	1,19
5	Bangunan dan Kontruksi	-	-	9	0,23	9	0,21	5.172	6,28
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	348	11,11	388	10,02	446	10,32	13.255	16,1
7	Angkutan dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	2.153	2,61
8	Lembaga Keuangan	251	8,0	354	9,14	330	7,64	554	0,67
9	Jasa-jasa lainnya	897	28,65	974	25,14	1.013	23,44	22.105	26,85
	Jumlah	3.131	100,00	3.874	100,00	4.321	100,00	82.331	100,00

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat (data diolah), 2011-2015



Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur, dapat dihitung jumlah penduduk usia kerja secara terpisil antara laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk usia kerja selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.12.
Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2015

Tahun	Penduduk Usia Kerja		Persentase	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
2012	62.863	60.649	50,64	49,36
2013	65.847	65.020	50,32	49,68
2014	65.386	63.048	50,91	49,09
2015	66.460	64.550	50,73	49,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2016.

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Aceh Barat menurut kelompok umur sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan lapangan kerja yang tersedia pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13.
Jumlah Pencari Kerja menurut Kelompok Umur Tahun 2015

No	Kelompok Umur (Tahun)	Pencari Kerja		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	15 - 19	1.742	293	2.035
2	20 - 29	14.456	7.056	21.512
3	30 - 44	23.073	11.443	34.516
4	45 - 54	9.917	4.645	14.562
Jumlah		49.188	23.437	72.625

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2016.

Sedangkan, jumlah pencari kerja menurut tingkat atau klasifikasi pendidikan di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2015 masih didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan tingkat SLTA (57,63 persen) dan Diploma (27,01 persen). Dari Tabel 2.12 dan 2.13 terlihat bahwa pencari kerja yang ada di Kabupaten Aceh Barat tahun 2015 masih didominasi oleh laki-laki. Dengan demikian, dari sisi pekerjaan belum tercapai adanya kesetaraan gender, untuk lebih jelas jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.14.
Jumlah Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Pencari Kerja							
		2012		2013		2014		2015	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	SD dan tidak Tamat SD	4	-	8	-	3	-	12	-
2	SLTP	333	223	330	221	323	208	337	221
3	SLTA	3.555	1.332	3.953	1.443	3.996	1.490	4.203	1.808
4	DIPLOMA	1.165	850	1.589	1.021	1.149	1.028	1.602	1.215
5	Sarjana/Pasca Sarjana	267	143	417	360	413	377	506	525
Jumlah		5.324	2.548	6.297	3.045	5.884	3.103	6.660	3.769

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat, 2016

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

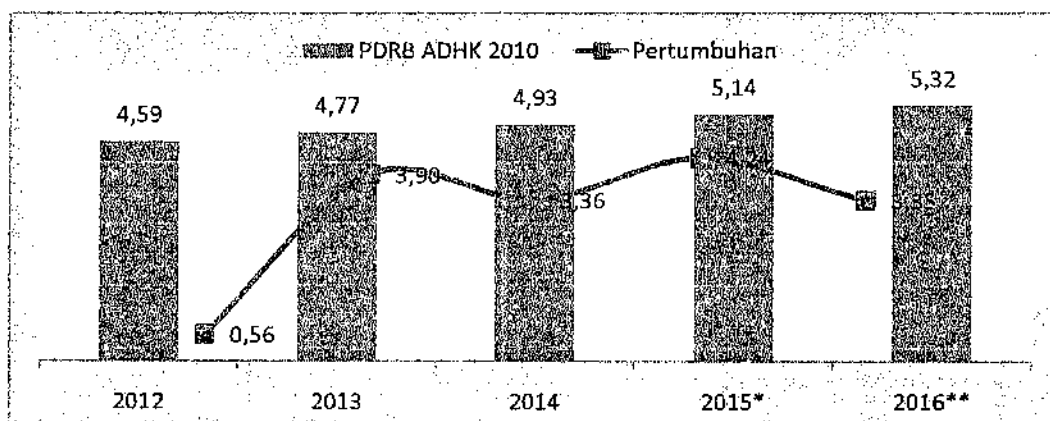
A. Pertumbuhan PDRB

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir cenderung menurun, namun demikian angka pertumbuhan masih dalam posisi positif. Sebagai salah satu negara yang baru saja mengalami perombakan politik, serangkaian kebijakan baru tentunya akan banyak mempengaruhi proyeksi ekonomi kedepan. Laju perekonomian Indonesia mengalami perlambatan, tahun 2012 pertumbuhan ekonomi berada pada posisi 4,6 persen, angka ini menunjukkan penurunan dari tahun 2010 dan 2011 yang masing-masing sebesar 4,9 persen dan 4,7 persen. Kondisi ini terus menurun hingga ke posisi 3,6 persen pada tahun 2014, dan pada Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 persen.

Kinerja perekonomian Aceh mencerminkan kondisi yang semakin membaik. Selama tiga tahun terakhir, kondisi ekonomi Aceh tanpa memperhitungkan migas mencapai pertumbuhan positif. Meski masih di bawah capaian nasional, ekonomi Aceh tanpa migas pada tahun 2014 tumbuh sebesar 1,65 persen. Secara bersamaan, kinerja ekonomi Aceh dengan migas juga menunjukkan pertumbuhan yang optimis selama tahun 2011-2014 yaitu dari 4,38 persen pada tahun 2011, lalu naik menjadi 4,95 persen pada tahun 2012 dan berlanjut sampai dengan tahun 2014 mencapai sebesar 4,13 persen, sedangkan 2015 mencapai 4,34 persen. Struktur PDRB Aceh ADHB pada tahun 2014 (dengan migas) menunjukkan bahwa dua sektor yang merupakan *leading* sektor bagi perekonomian Aceh ialah sektor pertanian yang mencapai 26,92 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 14,75 persen. Sektor dengan kontribusi terbesar ketiga dalam struktur perekonomian Aceh ialah sektor pertambangan dan penggalan yang mencapai 10,71 persen.

Berdasarkan harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat mengalami fluktuasi. Pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2012 sebesar 0,56 persen dengan nilai PDRB sebesar 4,59 persen dan pertumbuhan tertinggi terjadi dari tahun 2013 dan tahun 2015 masing-masing sebesar 3,90 dan 4,24 persen dengan nilai mencapai 4,77 dan 5,14 triliun rupiah. Pada Tahun 2016, PDRB konstan wilayah ini menyentuh angka 5,32 triliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,35 persen.

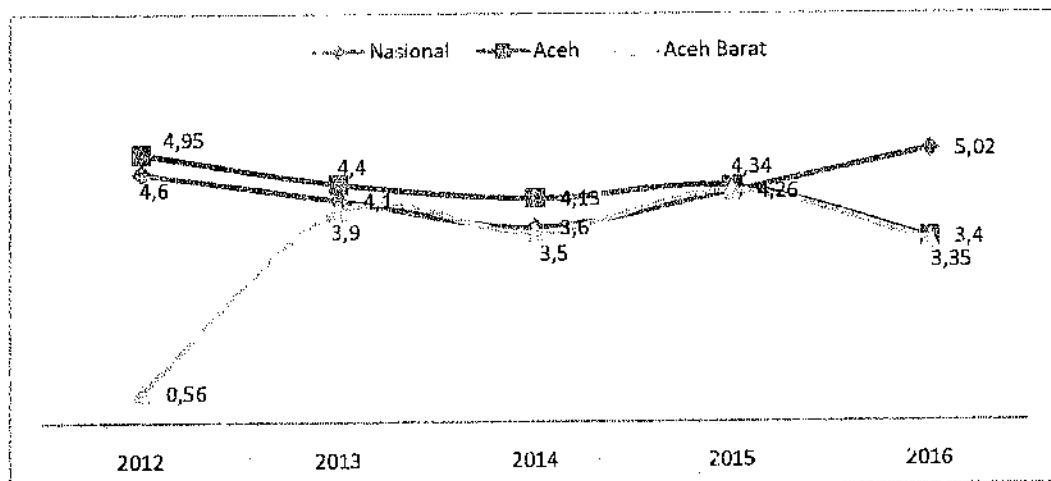
Gambar 2.15.
Nilai PDRB (Rp. Trilyun) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016



Handwritten signature

Pada Tahun 2012-2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat masih dibawah angka Provinsi Aceh dan Nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kedepan fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan berbagai program yang telah direncanakan baik bersumber dari Dana APBK, DAK maupun Dana Desa.

Gambar 2.16.
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat
dengan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2012-2016**



Tabel 2.15.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2016

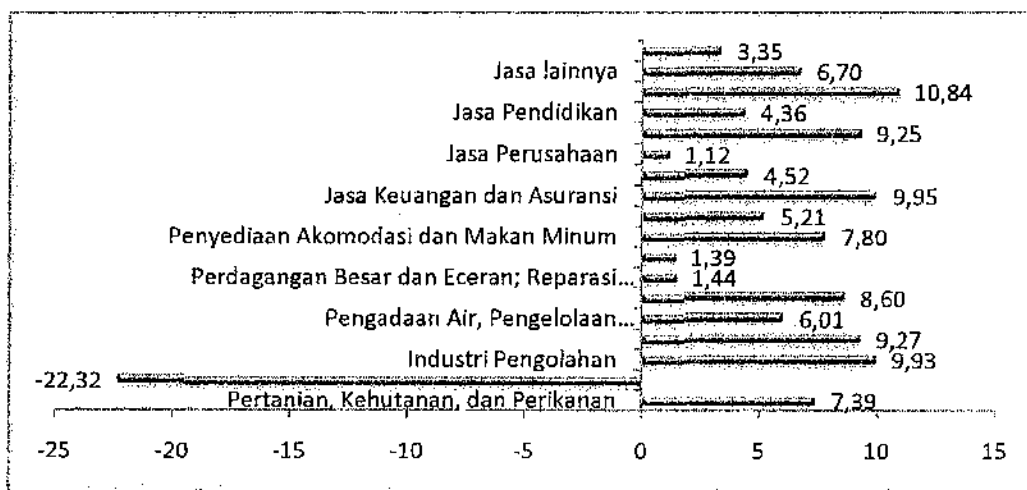
Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,17	5,96	4,59	7,10	7,39
Pertambangan dan Penggalian	-21,05	-2,97	-3,95	0,86	-22,32
Industri Pengolahan	9,86	6,51	4,61	2,88	9,93
Pengadaan Listrik dan Gas	8,55	3,92	5,19	6,93	9,27
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,41	9,11	9,08	8,19	6,01
Konstruksi	5,58	6,16	6,64	4,53	8,60
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,30	3,31	2,82	1,27	1,44
Transportasi dan Pergudangan	3,40	5,00	3,75	3,92	1,39
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,71	3,83	4,71	3,34	7,80
Informasi dan Komunikasi	6,73	4,74	5,50	4,21	5,21
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,95	0,88	-1,56	-2,70	9,95
Real Estate	1,10	1,83	3,48	2,99	4,52
Jasa Perusahaan	1,81	1,83	1,35	2,38	1,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,35	4,42	4,46	5,29	9,25
Jasa Pendidikan	4,45	3,53	3,33	5,92	4,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,40	5,72	5,81	7,15	10,84
Jasa lainnya	4,31	3,05	4,04	5,36	6,70
PDRB	0,56	3,90	3,36	4,24	3,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017.

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Gambar 2.17.
Pertumbuhan Ekonomi Tiap Kategori di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 (persen)



Tabel 2.16.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2016 (juta rupiah)

No.	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp	persen	Rp	persen	Rp	persen	Rp	persen	Rp	persen
1.	Pertanian	1.359.791,14	29,60	1.440.795,23	30,18	1.506.928,07	30,54	1.613.927,74	31,38	1.733.237,60	32,61
2.	Pertambangan & Penggalian	535.895,13	11,70	520.005,50	10,89	504.486,00	10,12	510.791,41	9,80	391.328,70	7,36
3.	Industri Pengolahan	75.158,24	1,60	80.078,20	1,68	83.746,19	1,70	85.159,69	1,68	94.713,30	1,78
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6.483,24	0,10	6.737,56	0,14	7.087,18	0,14	7.578,60	0,15	8.280,80	0,16
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	579,03	0	631,76	0,01	689,14	0,01	745,56	0,01	790,40	0,01
6.	Bangunan/Konstruksi	489.776,00	10,70	519.921,81	10,89	554.425,55	11,24	579.531,20	11,27	629.370,90	11,84
7.	Perdagangan	773.210,77	16,80	798.786,85	16,73	821.309,48	16,65	831.743,06	16,17	843.753,80	15,87
8.	Transportasi & Pergudangan	281.682,97	6,10	295.778,05	6,20	308.866,22	6,22	321.206,87	6,20	323.341,10	6,08
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	46.849,23	1,00	48.643,56	1,02	50.932,52	1,03	52.635,59	1,02	56.793,70	1,07
10.	Informasi dan Komunikasi	153.813,76	3,30	161.104,74	3,37	169.967,19	3,44	177.121,45	3,44	186.349,50	3,51
11.	Jasa Keuangan & Asuransi	113.040,19	2,50	114.036,81	2,39	112.253,94	2,28	109.222,83	2,12	120.087,80	2,26
12.	Real Estate	157.969,09	3,40	160.859,93	3,37	166.464,52	3,37	171.449,85	3,33	179.203	3,37
13.	Jasa Perusahaan	23.243,42	0,50	23.668,77	0,50	23.988,30	0,49	24.558,68	0,48	24.883,70	0,47
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	358.089,54	7,80	373.930,40	7,83	390.593,53	7,92	411.265,18	8,00	449.307,20	8,45
15.	Jasa Pendidikan	93.319,64	2,00	96.613,96	2,02	99.829,61	2,02	105.737,33	2,06	110.347,50	2,08
16.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	97.930,34	2,10	103.534,04	2,17	109.554,47	2,22	117.388,70	2,28	130.113,60	2,45
17.	Jasa Lainnya	27.721,18	0,60	28.566,67	0,60	29.720,77	0,60	31.313,87	0,61	33.411,90	0,63
	PDRB Aceh Barat	4.594.543,92	100	4.773.668,84	100	4.933.842,70	100	5.143.377,64	100	5.315.210,50	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017.



Tabel 2.17.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2016 (juta rupiah)

No	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp	persen	Rp	persen	Rp	persen	Rp	persen	Rp	persen
1.	Pertanian	1.432.045,07	30,19	1.564.591,52	30,96	1.696.235,72	31,02	1.885.817,86	32,34	2.080.326,80	33,45
2.	Pertambangan & Penggalian	470.180,03	9,91	400.108,12	7,92	375.878,35	6,86	329.848,84	5,66	233.191,50	3,75
3.	Industri Pengolahan	80.097,78	1,69	92.277,21	1,82	103.316,57	1,88	108.364,53	1,86	122.064	1,96
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6.091,51	0,13	6.245,27	0,12	6.659,73	0,12	7.252,34	0,12	8.105,40	0,13
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	857,35	0,02	1.015,58	0,02	1.181,51	0,02	1.351,47	0,02	1.613,70	0,03
6.	Bangunan/Konstruksi	493.367,07	10,4	536.996,73	10,63	619.565,30	11,3	661.257,57	11,34	727.700,30	11,70
7.	Perdagangan	813.274,41	17,14	875.802,51	17,33	964.016,05	17,58	991.757,31	17,01	1.073.339,40	17,26
8.	Transportasi & Pergudangan	309.568,51	6,53	348.189,16	6,79	373.371,44	6,81	396.422,84	6,8	374.066,40	6,01
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	48.540,72	1,02	52.799,67	1,04	58.064,46	1,06	61.627,08	1,06	71.210,60	1,14
10.	Informasi dan Komunikasi	160.752,41	3,39	169.963,29	3,36	180.876,30	3,3	189.367,54	3,25	199.899,20	3,22
11.	Jasa Keuangan & Asuransi	131.591,32	2,77	140.009,51	2,77	139.396,89	2,52	136.403,87	2,34	153.283,80	2,46
12.	Real Estate	158.962,16	3,35	161.980,00	3,2	170.126,22	3,08	182.014,13	3,12	192.731,40	3,10
13.	Jasa Perusahaan	23.438,74	0,49	24.021,49	0,47	24.541,90	0,44	25.616,97	0,44	26.468,40	0,43
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	383.020,71	8,07	430.227,56	8,51	491.645,97	8,9	548.146,34	9,4	617.785,40	9,93
15.	Jasa Pendidikan	95.002,63	2	102.729,78	2,03	112.633,39	2,04	123.080,35	2,11	135.413,90	2,18
16.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	109.276,51	2,3	122.617,88	2,42	136.519,92	2,47	148.191,44	2,54	166.384,30	2,68
17.	Jasa Lainnya	27.860,63	0,59	28.754,07	0,57	29.976,67	0,55	32.527,46	0,56	35.634,80	0,57
	PDRB Aceh Barat	4.743.927,54	100	5.053.124,33	100	5.468.953,00	100	5.835.042,00	100	6.219.219,20	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017.

Tabel 2.18.
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat
ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2012-2016

No	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Pertanian	30,19	29,60	30,96	30,18	30,94	30,50	32,35	31,33	33,45	32,61
2	Pertambangan & Penggalian	9,91	11,68	7,92	10,89	6,86	10,21	5,66	9,92	3,75	7,36
3	Industri Pengolahan	1,69	1,64	1,82	1,68	1,88	1,69	1,86	1,65	1,96	1,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,14	0,12	0,14	0,12	0,14	0,12	0,15	0,13	0,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,03	0,01
6	Bangunan/Konstruksi	10,40	10,66	10,63	10,89	11,30	11,22	11,34	11,25	11,70	11,84
7	Perdagangan	17,14	16,83	17,33	16,73	17,58	16,62	17,01	16,15	17,26	15,87
8	Transportasi & Pergudangan	6,53	6,13	6,79	6,20	6,81	6,25	6,80	6,24	6,01	6,08
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,02	1,02	1,04	1,02	1,06	1,03	1,06	1,02	1,14	1,07
10	Informasi & Komunikasi	3,39	3,35	3,36	3,37	3,30	3,44	3,25	3,44	3,22	3,51
11	Jasa Keuangan & Asuransi	2,77	2,46	2,77	2,39	2,52	2,27	2,34	2,12	2,46	2,26
12	Real Estate	3,35	3,44	3,20	3,37	3,08	3,37	3,12	3,33	3,10	3,37
13	Jasa Perusahaan	0,49	0,51	0,47	0,50	0,44	0,49	0,44	0,48	0,43	0,47
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	8,07	7,79	8,51	7,83	8,90	7,91	9,40	7,98	9,93	8,45
15	Jasa Pendidikan	2,00	2,03	2,03	2,02	2,04	2,02	2,11	2,05	2,18	2,08
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,30	2,13	2,42	2,17	2,47	2,22	2,54	2,28	2,68	2,45
17	Jasa Lainnya	0,59	0,60	0,57	0,60	0,54	0,60	0,56	0,61	0,57	0,63
	PDRB Aceh Barat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017.



Tabel 2.19.
Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2010-2016

No.	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1.	Pertanian	7,11	5,17	9,26	5,96	8,41	4,59	11,27	7,1	10,23	7,39
2.	Pertambangan & Penggalian	-31,07	-21,05	-14,90	-2,97	-7,56	-2,98	-5,96	1,25	-32,96	-22,32
3.	Industri Pengolahan	11,90	9,86	14,89	6,51	12,11	4,61	5,76	1,69	11,86	9,93
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,26	8,55	2,52	3,92	6,64	5,19	9,42	6,93	11,23	9,27
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	39,44	9,41	18,46	9,11	16,34	9,08	14,39	8,19	19,40	6,01
6.	Bangunan/Konstruksi	7,89	5,58	8,84	6,16	15,38	6,64	6,73	4,53	10,05	8,60
7.	Perdagangan	4,91	2,30	7,7	3,31	10,64	2,82	2,88	1,27	8,23	1,44
8.	Transportasi & Pergudangan	7,82	3,40	10,86	5	6,64	4,42	4,14	4	-1,85	1,39
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,1	3,71	8,77	3,83	9,97	4,71	7,86	3,34	13,71	7,80
10.	Informasi & Komunikasi	7,19	6,73	5,73	4,74	6,42	5,5	4,69	4,21	5,56	5,21
11.	Jasa Keuangan & Asuransi	13,5	2,95	6,39	0,88	-0,44	-1,56	-2,14	-2,7	12,37	9,95
12.	Real Estate	4,29	1,1	1,9	1,83	5,96	3,48	6,05	2,99	5,89	4,52
13.	Jasa Perusahaan	2	1,81	2,49	1,83	2,17	1,35	4,38	2,38	3,32	1,12
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	8,72	4,35	12,32	4,42	13,58	4,46	12,18	5,29	12,70	9,25
15.	Jasa Pendidikan	4,63	4,45	8,13	3,53	9,64	3,33	9,28	5,92	10,02	4,36
16.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	10,10	5,4	12,21	5,72	11,34	5,81	8,55	7,15	12,28	10,84
17.	Jasa Lainnya	4,35	4,31	3,21	3,05	4,25	4,04	8,51	5,36	9,55	6,70
	PDRB Aceh Barat	1,52	0,56	6,52	3,90	8,23	3,36	6,69	4,24	6,58	3,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Dari hasil Tipologi Klassen dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) sektor yang maju dan tumbuh pesat di Kabupaten Aceh Barat yakni sektor: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Konstruksi dan (3) Jasa Pendidikan. Ketiga sektor ini jika dikembangkan dengan prioritas maka akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam struktur perekonomian Kabupaten Aceh Barat masih terdapat 5 (lima) sektor lainnya yang masih relatif tertinggal dan butuh upaya yang serius untuk pengembangannya seperti sektor: (1) Transportasi dan pergudangan; (2) Penyediaan akomodasi dan makanan; (3) Jasa Perusahaan; (4) Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya.

Adapun yang menjadi basis perekonomian di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) selama 7 tahun terakhir adalah sektor: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan; (3) Pengadaan Listrik dan Gas; (4) Konstruksi; (5) Perdagangan Besar dan Eceran; (6) Penyediaan akomodasi makan dan minum; (7) Jasa Keuangan dan Asuransi; (8) *Real Estate*; dan (9) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Adapun sektor non Basis di Kabupaten Aceh Barat adalah: (1) Industri Pengolahan; (2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (3) Transportasi dan Pergudangan; (4) Informasi dan komunikasi; (5) Jasa Perusahaan; (6) Jasa Pendidikan; (7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (8) Jasa lainnya.

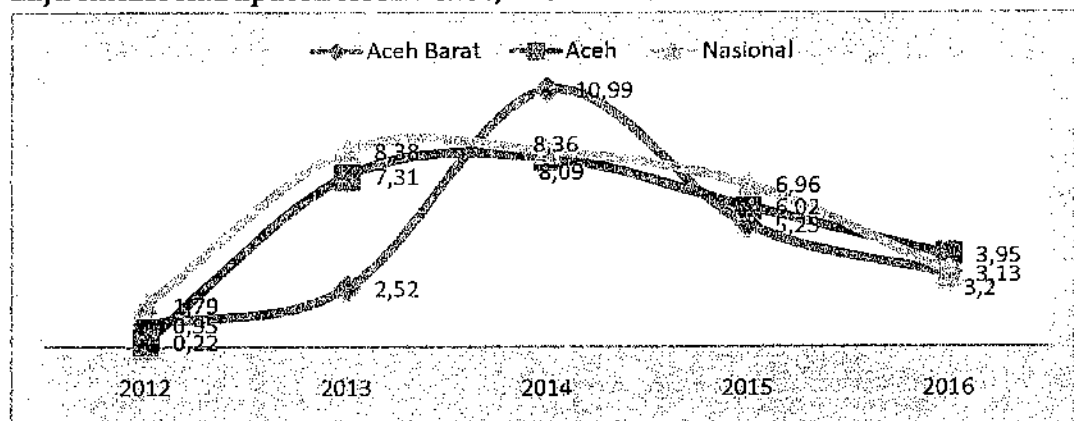
Sedangkan yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan penggabungan analisis Tipologi Klassen, *Location Quotient* (LQ) dan analisis Shift Share, terdapat 3 (tiga) sektor yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian di Kabupaten Aceh Barat adalah sektor: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pengadaan Listrik dan Gas dan (3) Konstruksi.

B. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Untuk dapat melihat perbandingan inflasi Kabupaten Aceh Barat yang dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat tabel dan gambar berikut.

Gambar 2.18.

Laju Inflasi Kabupaten Aceh Barat, Provinsi dan Nasional Tahun 2012-2016



Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Aceh Barat dan BPS Provinsi Aceh, 2017.

**Tahun 2012-2013 Aceh Barat masih menggunakan laju implisit.



No	Kecamatan	Kondisi (Meter)			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
12	Kecamatan Sungai Mas	297	193	150	100
	Jumlah Total	3.160	950	1.645	433

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Barat, 2017.

b. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Pelayanan irigasi di Wilayah Aceh Barat khususnya pada Daerah Irigasi (DI), yang terdiri atas 72 daerah irigasi yang melayani hampir seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Barat yang menjadi kewenangan kabupaten. Sedangkan daerah irigasi yang menjadi kewenangan pusat berupa DI Lhok Guci seluas kurang lebih 13.000 (tiga belas ribu) hektar berada di Kecamatan Pante Ceureumen, Panton Reu, Woyla, Woyla Timur, Woyla Barat, Kaway XVI dan Samatiga. Pelayanan daerah irigasi untuk mendukung kegiatan sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan lahan basah (area persawahan) yang banyak tersebar di 12 kecamatan. Daerah cakupan pelayanan irigasi ini bersumber dari aliran air sungai serta anak-anak sungai dan geunang yang ada di wilayah Aceh Barat.

Tabel 2.69.
Daerah Irigasi Kabupaten Aceh Barat

No	Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Wilayah
Kewenangan Nasional			
1	D.I. Lhok Guci	13.000,00	1.Kecamatan Pante Ceureumen;
			2.Kecamatan Panton Reu;
			3.Kecamatan Woyla;
			4.Kecamatan Woyla Timur;
			5.Kecamatan Woyla Barat;
			6.Kecamatan Kaway XVI; dan
			7.Kecamatan Samatiga.
Kewenangan Kabupaten			
1	D.I. Alue Diam	200	Gampong Pasie Janeng Kecamatan Woyla Timur
2	D.I. Alue Lhok	700	Gampong Alue Lhok Kecamatan Kaway XVI
3	D.I. Alue Reusak	150	Gampong Reusak Kecamatan Samatiga;
4	D.I. Balee	100	Gampong Balee Kecamatan Meureubo
5	D.I. Blang Geunang	100	Gampong Blang Geunang Kecamatan Kaway XVI
6	D.I. Blang Teungoh	200	Gampong Blang Teungoh Kecamatan Panton Reu
7	D.I. Canggai	100	Gampong Canggai Kecamatan Pante Ceureumen
8	D.I. Drien Caleu	150	Gampong Drien Calue Kecamatan Kaway XVI
9	D.I. Gaseu	150	Gampong Gaseu Kecamatan Sungai Mas
10	D.I. Geunang Geudong	250	Gampong Putim Kecamatan Kaway XVI
11	D.I. Geunang Pulong	75	Gampong Pante Ceureumen Kec. Pante Ceureumen
12	D.I. Jambak	80	Gampong Jambak Kecamatan Pante Ceureumen
13	D.I. Kinco	180	Gampong Alue Keumang Kec. Pante Ceureumen
14	D.I. Krueng Tinggai	200	Gampong Krueng Tinggai Kecamatan Bubon
15	D.I. Krueng Tujoh	120	Gampong Ranub Dong Kecamatan Meureubo
16	D.I. KeutambangTunong	70	Gampong Keutambang Kec. Pante Ceureumen
17	D.I. Lawet	104	Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen
18	D.I. Lhok Seuredam	150	Gampong Leklek Kecamatan Panton Reu
19	D.I. Meunuang	100	Gampong Meunuang Kec Pante Ceureumen
20	D.I. Meunasah Rayeuk	200	Gampong Meunasah Rayeuk Kec. Kaway XVI
21	D.I. Mon Pasong	200	Gampong Mon Pasung Kecamatan Woyla Barat

Jumlah gampong terpencil di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 602 Tahun 2014 berjumlah 64 gampong. Dengan pesatnya pembangunan jalan, jumlah gampong terpencil ini sudah dapat ditekan. Berdasarkan hasil survey, jumlah gampong terpencil di Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 berjumlah 39 gampong. Meningkatnya pembangunan jalan di Kabupaten Aceh Barat telah mampu mengurangi keberadaan gampong terpencil yang ada.

Jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 adalah 281 unit dengan panjang 7.019 meter yang terdiri atas jembatan rangka baja, jembatan gantung dan jembatan lainnya. Sebesar 36,81 persen dari jembatan yang ada merupakan jembatan dalam kondisi baik, 23,04 persen dalam kondisi sedang, sisanya sebesar 40,05 persen merupakan jembatan rusak dan rusak berat. Untuk dapat melihat rincian panjang jembatan menurut panjang jembatan menurut jenis dan kondisinya dapat dilihat dari Tabel berikut.

Tabel 2.67.
Panjang Jembatan berdasarkan Jenis Jembatan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No	Kecamatan	Panjang Jembatan (Meter)		
		Rangka Baja	Jembatan Gantung	Jembatan Lainnya
1	J.Pahlawan	-	-	238,00
2	Samatiga	-	32,00	414,00
3	Bubon	-	-	425,00
4	Arongan LB	-	150,00	62,50
5	Woyla	-	120,00	277,00
6	Woyla Barat	120,00	240,00	28,00
7	Woyla Timur	-	360,00	124,00
8	Kaway XVI	240,00	480,00	292,00
9	Meureubo	-	-	216,00
10	Pt. Ceureumen	100,00	580,00	144,00
11	Panton Rheu	-	680,00	45,00
12	Sungai Mas	150,00	360,00	230,00
Jumlah		610,00	3.002,00	2.495,50

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Barat, 2017.

Tabel 2.68.
Kondisi Jembatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No	Kecamatan	Kondisi (Meter)			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Kecamatan Johan Pahlawan	82	24	92	100
2	Kecamatan Samatiga	366	30	30	20
3	Kecamatan Bubon	132	208	35	50
4	Kecamatan Woyla	231	103	63	-
5	Kecamatan Woyla Timur	91	20	368	5
6	Kecamatan Woyla Barat	120	-	258	10
7	Kecamatan Arongan Lambalek	16,5	16	70	10
8	Kecamatan Meureubo	126	40	50	120
9	Kecamatan Kaway XVI	643	310	41	18
10	Kecamatan Pante Ceureumen	546	-	278	-
11	Kecamatan Panton Reu	509	6	210	-

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

a. Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Jalan merupakan sarana penghubung yang sangat penting. Baik buruknya kondisi jalan akan menentukan kelancaran transportasi. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 adalah 873,77 km. Dari jumlah yang ada, jalan yang merupakan kewenangan kabupaten adalah sepanjang 677,24 km atau sebesar 77,51 persen. Bila dirinci menurut jenis permukaan, 55 persen dari semua jalan yang ada dalam Kabupaten ini sudah berlapiskan aspal. Sisanya berlapiskan kerikil dan tanah diharapkan dalam beberapa tahun kedepan, semua jalan dalam Kabupaten Aceh Barat sudah berlapiskan aspal dan dalam kondisi baik.

Tabel 2.64.
Panjang Jalan dan Pemerintahan yang berwenang Mengelolanya
di Kabupaten Aceh Barat (Km) Tahun 2012-2016

Tahun	Pemerintah yang Berwenang Mengelola			
	Negara	Propinsi	Kabupaten	Jumlah
2012	71,61	90,80	884,49	1.046,9
2013	72,41	95,80	884,49	1.052,7
2014	72,41	95,80	884,49	1.052,7
2015	56,28	106,62	867,79	1.030,69
2016	56,28	140,25	677,24	873,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Tabel 2.65.
Panjang Jalan dan jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Aceh Barat (km) Tahun 2012-2016

Tahun	Jenis Permukaan Jalan			Jumlah
	Aspal	Tidak Diaspal	Lainnya	
2012	509,57	537,33	-	1.046,9
2013	520,37	532,33	-	1.052,7
2014	544,37	508,33	-	1.052,7
2015	520,39	524,33	2,10	1.030,69
2016	479,72	392,99	1,07	873,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Tabel 2.66.
Panjang Jalan dan Kondisi Jalan
di Kabupaten Aceh Barat (km) Tahun 2012-2016

Tahun	Kondisi Jalan				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
2012	469,57	264,15	120,65	192,53	1.046,9
2013	480,37	264,15	115,65	192,53	1.052,7
2014	524,37	228,15	107,65	192,53	1.052,7
2015	406,98	140,87	223,01	275,96	1.030,69
2016	403,83	37,62	237,28	195,05	873,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Dari jalan yang ada di Kabupaten Aceh Barat tahun 2016, jalan dalam kondisi baik sepanjang 403,83 km atau sebesar 46 persen dari panjang jalan yang ada. Sedangkan 53,59 persen lainnya merupakan jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat berjumlah 468,33 km.



Tabel 2.63.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2016

NO	KECAMATAN	Usia Lanjut (60TAHUN+)													
		JUMLAH						MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN							
		2015			2016			2015				2016			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	persen	L	P	L+P	persen
1	Johan Pahlawan	1.369	1.287	2.656	2.259	2.261	4.520	856	884	1740	66,48	2259	2261	4520	100,00
2	Meureubo	739	783	1.522	1.308	1.298	2.606	561	501	1.062	69,78	1.308	1.298	2.606	100,00
3	Kaway XVI	714	903	1.617	2.031	1.891	3.922	514	626	1.140	70,50	2.031	1.891	3.922	100,00
4	Samatiga	623	617	1.240	432	421	853	341	369	710	57,26	432	421	853	100,00
5	Buhon	244	273	517	175	161	336	211	167	378	73,11	175	161	336	100,00
6	Woyla	452	474	926	301	280	581	261	201	462	49,89	301	280	581	100,00
7	Woyla Timur	143	147	290	0	0	0	69	83	152	52,41				
8	Arongan Lambalek	375	257	632	466	461	927	272	159	431	68,20	466	461	927	100,00
9	Woyla Barat	250	252	502	0	0	0	119	181	300	59,76				
10	Panton Reu	164	211	375	0	0	0	89	62	151	40,27				
11	Pante Ceureumen	384	369	753	143	131	274	267	289	556	73,84	143	131	274	100,00
12	Sungai Mas	102	125	227	0	99	99	64	89	153	67,40		99	99	100,00
JUMLAH		5.559	5.698	11.257	7.115	7.003	14.118	3.624	3.611	7.235	64,27	7.115	7.003	14.118	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2016-2017

Handwritten signature



yang sama, juga terjadi kematian akibat penyakit AIDS (termasuk dari kasus yang ditemukan pada tahun sebelumnya.

Di tahun 2016, jumlah HIV berjumlah 3 kasus yang terdiri atas 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan pada kelompok umur 25-49 tahun. Sedangkan kasus AIDS berjumlah 8 kasus yang terdiri atas 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan pada kelompok umur yang sama. Di tahun ini juga terjadi 7 kasus kematian akibat AIDS yang terdiri atas 6 kasus kematian laki-laki dan 1 kasus kematian perempuan.

11. Pelayanan Kesehatan Lansia

Masalah lanjut usia (lansia) perlu mendapatkan perhatian karena jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya. Jumlah usia lanjut di Kabupaten Aceh Barat tahun 2015 berjumlah 11.257 orang yang terdiri atas 5.559 orang laki-laki dan 5.698 orang perempuan. Dari jumlah lansia yang ada, sejumlah 64,27 persen yang mendapatkan pelayanan kesehatan lansia yang terdiri atas 3.624 orang laki-laki dan 3.611 orang perempuan.

Jumlah lansia ini meningkat sebesar 2.861 orang di tahun 2016 menjadi 14.118 orang yang terdiri atas 7.115 orang laki-laki dan 7.003 orang perempuan yang semuanya mendapatkan pelayanan kesehatan lansia sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2.62.
Jumlah Kasus HIV dan AIDS menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2016

NO	KELOMPOK UMUR	HIV						AIDS						JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS					
		2015			2016			2015			2016			2015			2016		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	≤ 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	15 - 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	20 - 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	25 - 49	2	1	3	1	2	3	5	1	6	7	1	8	6	1	7	6	1	7
6	≥ 50	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
JUMLAH		2	1	3	1	2	3	3	1	7	7	1	8	7	1	8	6	1	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2016-2017



Ditinjau target nasional pencapaian SDGs untuk sanitasi layak bagi 40 persen penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100 persen, target ini sangat sulit untuk dapat dipenuhi. Hal ini didasarkan pada kondisi tahun 2014 yang menunjukkan bahwa 40 persen penduduk berpendapatan terbawah hanya 6,77 persen diantaranya yang memiliki sanitasi yang layak, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel. 2.60.

Persentase Fasilitas Sanitasi yang Layak Bagi 40 Persen Penduduk berpendapatan terbawah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2014

Tahun	Persentase
2012	66,35
2013	43,74
2014	6,77

Sumber: TPN2K, 2017

Sedangkan untuk penggunaan fasilitas buang air besar penduduk berpendapatan rendah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.61.

Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Kecamatan	Penggunaan fasilitas buang air besar				Jumlah
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada	
Arongan Lambalek	1,025	114	22	786	1,947
Bubon	499	35	23	255	812
Johan Pahlawan	1,721	48	33	272	2,074
Kaway XVI	1,330	138	78	1,624	3,170
Meureubo	1,337	28	82	609	2,056
Pante Ceuremen	641	90	67	1,237	2,035
Panton Reu	252	89	4	926	1,271
Samatiga	709	153	30	344	1,236
Sungai Mas	81	14	111	358	564
Woyla	734	158	38	1,667	2,597
Woyla Barat	269	33	25	986	1,313
Woyla Timur	120	34	17	696	867
Jumlah	3,718	934	530	9,760	19,942
Persentase (persen)	43.72	4.68	2.66	48.94	100

Sumber: TPN2K, 2017

Sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat tidak memiliki fasilitas buang air besar. Fasilitas jamban umum dan jamban bersama juga sangat sedikit dalam hal jumlah dan masyarakat penggunaannya. Meskipun demikian, sudah ada 43,72 persen penduduk miskin yang telah memiliki fasilitas jamban sendiri.

10. Penyakit Seksual

Penyakit menular seksual yang ditemukan di Kabupaten Aceh Barat tahun 2015 terdiri atas 3 kasus HIV dan 7 kasus AIDS. Kasus HIV ditemukan pada 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan pada kelompok umur 25-49 tahun. Di samping itu, untuk kasus AIDS yang dijumpai pada 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. 6 orang diantaranya berada pada kelompok umur 25-49 tahun dan 1 orang pada kelompok umur ≥ 50 tahun. Di tahun

Tabel 2.59.
Penduduk dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No	Kecamatan	Puskesmas	JENIS SARANA JAMBAN						Jumlah Pengguna	persen
			Cemplung		Leher Angsa		Plengseran			
			Sarana	Pengguna	Sarana	Pengguna	Sarana	Pengguna		
1	Johan Pahlawan	Johan Pahlawan	-	-	1,481	6,322	-	-	6322	15.1
2	Johan Pahlawan	Suak Ribee	14	53	3,999	15,476	-	-	15529	104.3
3	Meureubo	Meureubo	379	1,21	4,263	15,82	-	-	17030	236.3
4	Kaway XVI	Peureumeu	904	1,934	2,123	1,807	-	-	3741	28.1
5	Samatiga	Cot Seumeureng	-	-	2,658	9,518	-	-	9518	209.0
6	Bubon	Kuta Padang Layung	145	603	1,178	4,676	6	25	5304	45.3
7	Woyla	Kuala Bhee	91	704	818	3,613	3	94	4411	58.0
8	Woyla Timur	Tangkeh	-	-	91	-	-	-		
9	Arongan Lblk	Drien Rampak	621	4,415	2,211	7,079	-	-	11494	101.0
10	Woyla Barat	Pasi Mali	218	-	58	155	-	-	155	4.2
11	Panton Reu	Meutulang	-	30	234	-	-	-	30	
12	Pante Ceureumen	Pante Ceureumen	-	-	573	496	-	-	576	15.5
13	Sungai Mas	Kajeung	51	-	163	158	65	67	225	
JUMLAH			2,423	8,949	19,85	65,12	74	186	74,335	38.4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2017



9. Sanitasi

Penggunaan jamban sehat di Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 masih sangat terbatas. Jumlah penduduk yang sudah menggunakan jamban sehat berjumlah 74.335 orang atau hanya 38,4 persen dari jumlah penduduk yang ada. Dari jamban yang ada, sejumlah 65.120 orang penduduk menggunakan jamban jenis leher angsa, 43.415 orang penduduk menggunakan jenis jamban leher angsa, dan 8.949 orang penduduk menggunakan jenis jamban cemplung.

Meskipun 38,4 persen penduduk sudah menggunakan jamban, namun belum semua prasarana ini telah memenuhi syarat kesehatan. Sebagai contoh, penggunaan jamban model leher angsa. Dari 32,056 unit sarana yang ada, hanya 61,9 persen diantaranya yang memenuhi syarat kesehatan. Untuk jamban model plengseran dan cemplung masing-masing 74 persen dan 92,9 persen yang memenuhi syarat kesehatan sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel. 2.58.
Sumber Air Minum 40persen Penduduk Berpendapatan Rendah
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Kecamatan	Sumber Air Minum												Jumlah
	Air Kemasan Bermerek	Air Sungai/Danau/Waduk	Air Hujan	Lainnya	Air Isi Ulang	Leding Meteran	Leding Eceran	Sumur Bor/Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tidak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata air Tdk Terlindung	
A.Lambalek	1	39	6	3	32	3		4	1,255	602	1	1	1,947
Bubon	1	47	5	14	12	2		56	500	170	5		812
J. Pahlawan	7	1	27	8	1,122	173	14	146	496	78	1	1	2,074
Kaway XVI	3	216	2	13	90	73		741	1,23	791	1	10	3,17
Meureubo	7	15	4	6	434	7	2	186	1,11	284		1	2,056
P. Ceuremen	3	55	11	57	13	12	1	28	1,151	676	2	26	2,035
Panton Reu	3	270	1	6	2	6		139	173	653	12	6	1,271
Samatiga		6	2	9	118	3		36	732	326		4	1,236
Sungai Mas		102			1	2	3	1	8	151	21	275	564
Woyla	1	264	16	25	41	5	2	344	772	1,089	6	32	2,597
Woyla Barat		235	6	10	10	2		36	437	570	3	4	1,313
Woyla Timur	2	164	2	1	1	3		151	256	229	33	25	867
Jumlah	28	1,414	82	152	1,876	291	22	1,868	8,12	5,619	85	385	19,942
Persentase (persen)	0,14	7,09	0,41	0,76	9,41	1,46	0,11	9,37	40,72	28,18	0,43	1,93	100

Sumber: TPN2K, 2015

Tabel 2.57.
Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No	KECAMATAN	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN												PERPIPAAN (PDAM, BPSAM)		MATA AIR TERLINDUNG	
		Sumur Gali Terlindung		SUMUR GALI DENGAN POMPA		SUMUR BOR DENGAN POMPA		TERMINAL AIR		MATA AIR TERLINDUNG		PENAMPUNGAN AIR HUJAN		Jml	Pengguna	Jml	Pengguna
		Jml	Pengguna	Jml	Pengguna	Jml	Pengguna	Jml	Pengguna	Jml	Pengguna	Jml	Pengguna				
1	Johan Pahlawan	757	2240	0	0	860	2483	11	0	0	0	0	0	2	2229	6952	22.97
2	Meureubo	3870	14328	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	14328	48.33
3	Kaway XVI	2004	196.00	196	134	0	0	-	0	1	0	0	0	0	0	330	1.55
4	Samatiga	2650	947	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	10	607	1208	8.11
5	Bubon	1267	5494	0	0	0	0	-	0	0	0	138	655	0	0	6149	85.33
6	Woyla	529	1995	76	126	480	0	-	0	0	0	0	0	0	0	2121	15.92
7	Woyla Timur	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8	Arongan Lambalek	3734	11494	0	0	47	11494	-	0	0	0	0	0	0	0	22988	196.34
9	Woyla Barat	673	648	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	648	8.53
10	Panton Reu	286	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11	Pante Ceureumen	397	10064	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10064	88.45
12	Sungai Mas	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Jumlah		16167	47406	272	260	1387	13977	11	0	1	0	138	655	12	2836	64788	33.43

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Barat, 2017

8. Air Minum

Sumber air minum penduduk Kabupaten Aceh Barat terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Adapun yang termasuk ke dalam jaringan perpipaan berasal dari PDAM, sedangkan yang termasuk bukan jaringan perpipaan terdiri atas sumur gali terlindung, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, mata air terlindung serta penampungan air hujan.

Adapun jumlah penduduk yang sudah mendapatkan akses sumur gali terlindung sebanyak 55.906 orang pengguna, sumur gali dengan pompa 260 orang pengguna, sumur bor dengan pompa sebanyak 13.977 orang pengguna, terminal air sebanyak 10.186 orang pengguna, penampungan air hujan 655 orang pengguna dan perpipaan (PDAM, BPSPAM) sebanyak 2.836 orang pengguna. Penggunaan air minum ini, tidak semuanya memenuhi syarat kesehatan. Dari semua sumber air minum yang ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016, hanya 33,43 persen yang memenuhi syarat (akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak) dengan jumlah 64.788 orang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel.

Jika dipilah dari kelompok 40 persen (4 desil) penduduk berpendapatan terbawah, persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang layak tahun 2014 hanya 18,95 persen. Jika ditinjau target nasional untuk pencapaian SDGs yakni meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40 persen penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100 persen, target ini masih sulit untuk dijangkau. Meskipun demikian, di gampong-gampong yang ada di Kabupaten Aceh Barat sudah dilaksanakannya percepatan dalam penyediaan fasilitas air bersih/air minum melalui penggunaan Dana Desa. Berikut disajikan data penyediaan air minum layak untuk 40 persen penduduk berpendapatan terbawah.

Tabel. 2.56.

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang layak dari kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terbawah

Tahun	Persentase
2012	19,36
2013	24,88
2014	18,95

Sumber: TPN2K, 2017

Sedangkan untuk sumber air minum bagi penduduk berpendapatan rendah sejumlah 40,72 persen penduduk miskin Kabupaten Aceh Barat mengkonsumsi air sumur terlindung sebagai sumber air minum sehari-hari. Sebesar 28,18 persen menggunakan sumur tidak terlindung, sisanya masih ada penduduk yang mengkonsumsi air sungai, air hujan dan mata air tidak terlindung sebagai sumber air minum sehari-hari.

Tabel 2.55.
**Cakupan imunisasi DPT-HB/DPT-HB-Hib, Polio, Campak dan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016**

NO	PUSKESMAS	JUMLAH BAYI			BAYI DIIMUNISASI															
					DPT-HB3/DPT-HB-Hib3				POLIO 4 ^a				CAMPAK				IMUNISASI DASAR LENGKAP			
					L		P		L+P				L		P		L+P			
		L	P	L+P	Jml	Jml	Jml	persen	Jml	Jml	Jml	persen	Jml	Jml	Jml	persen	Jml	Jml	Jml	persen
1	J.Pahlawan	486	480	966	168	177	345	36	175	184	359	37.16	186	198	384	39.75	190	198	388	40.16
2	Suak Ribee	193	182	375	145	150	295	79	135	120	255	68	161	157	318	84.8	161	157	318	84.80
3	Meureubo	325	307	632	225	209	434	69	225	209	434	68.67	260	264	524	82.91	260	264	524	82.91
4	Peureumeu	231	222	453	114	111	225	50	142	110	252	55.62	166	134	300	66.22	120	82	202	44.59
5	Cot Seumeureng	160	157	317	146	130	276	87	152	133	285	89.90	148	123	271	85.48	148	123	271	85.48
6	K.P Layung	77	77	154	29	34	63	41	42	47	89	57.79	36	36	72	46.75	28	36	64	41.55
7	Kuala Bhee	142	142	284	83	79	162	57	85	79	164	57.74	89	75	164	57.74	64	64	128	45.07
8	Tangkeh	49	48	97	26	19	45	46	26	19	45	46.39	21	14	35	36.08	19	11	30	30.92
9	Drien Rampak	128	121	249	64	65	129	52	97	69	166	66.66	98	72	170	68.27	98	72	170	68.27
10	Pasi Mali	82	82	164	33	25	58	35	46	37	83	50.61	28	27	55	33.53	25	24	49	29.87
11	Meutulang	67	66	133	24	36	60	45	40	56	96	72.18	46	61	107	80.45	46	61	107	80.45
12	Pt.Ceureumen	111	111	222	72	63	135	61	98	72	170	76.57	98	72	170	76.57	98	72	170	76.57
13	Kajeung	40	40	80	12	12	24	30	13	18	31	38.75	10	10	20	25	9	10	19	23.75
JUMLAH		2.091	2.035	4.126	1.141	1.110	2.251	55	1.276	1.153	2.429	58,87	1.347	1.243	2.590	62,77	1.266	1.174	2.440	59,13

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2017

7. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan "Universal Child Immunization" (UCI) adalah desa/kelurahan dimana 80 persen dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Di tahun 2016, 200 gampong yang ada di Kabupaten Aceh Barat merupakan Desa UCI. Adapun persentase desa UCI terbanyak berada pada Kecamatan Pante Ceureumen dengan persentase 96,00 persen dan terendah berada di Kecamatan Sungai Mas dengan persentase sebesar 16,7 persen.

Tabel 2.54.
Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan UCI	persen Desa/Kelurahan UCI
1	Johan Pahlawan	21	9	87.3
2	Meureubo	28	23	82.1
3	Kaway XVI	43	33	76.7
4	Samatiga	32	30	93.8
5	Kuta Padang layung	17	5	29.4
6	Woyla Induk	43	17	39.5
7	Woyla Timur	26	10	33.5
8	Arongan Lambalek	27	17	63.0
9	Woyla Barat	24	14	58.3
10	Panton Reu	19	15	78.9
11	Pante Ceureumen	25	24	96.0
12	Sungai Mas	18	3	16.7
		323	200	61.9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2017

Dilihat data cakupan imunisasi HB-0, BCG, DTP-HB3, POLIO, CAMPAK, DPT-HB-Hib3, serta imunisasi dasar lengkap menurut jenis kelamin terlihat bahwa imunisasi terbanyak terdapat pada bayi laki-laki dibanding dengan perempuan. sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

No	Unit Kerja	Dokter Spesialis			Dokter Umum			Dokter Gigi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
10	Puskesmas Drien Rampak	-	-	-	-	1	1	-	-	-
11	Puskesmas Pasi Mali	-	-	-	1	-	1	-	-	-
12	Puskesmas Meutulang	-	-	-	1	3	4	-	-	-
13	Puskesmas Pante Ceureumen	-	-	-	-	2	2	1	-	1
14	Puskesmas Kajeung	-	-	-	-	1	1	-	-	-
15	Labkesda Aceh Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah I (Puskesmas)		-	-	-	6	19	25	2	1	3
1	RS Cut Nyak Dhien Meulaboh	14	8	22	10	12	22	2	2	4
Sub Jumlah II (Rumah Sakit)		14	8	22	10	12	22	2	2	4
Sarana Pelayanan Kesehatan Lain										
Klinik di Institusi Diknakes/Diklat				-			-			-
Klinik di Dinas Kesehatan Kab/Kota				-			-			-
Jumlah		14	8	22	16	31	47	4	3	7
Rasio Terhadap 100.000 Penduduk				11,35			24,25			3,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tenaga kesehatan terbanyak adalah perawat dan bidan dengan jumlah 585 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah gizi dan sanitasi yang hanya berjumlah masing-masing 20 orang. Dengan demikian, akses pada pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2016 belum dapat terlaksana secara maksimal akibat terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan yang dimiliki dan belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil.

Adapun penyebaran sarana kesehatan berdasarkan kecamatan dan penempatan tenaga medis (dokter) berdasarkan UPTD Puskesmas di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut.

Tabel 2.53.
Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis Pada Puskesmas
Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No	Kecamatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poskesdes / Polindes	Dokter Umum	Dokter Gigi	Jml
1	Johan Pahlawan	2	4	5	5	1	6
2	Samatiga	1	6	4	2	-	2
3	Bubon	1	2	3	1	-	1
4	Arongan Lambalek	1	3	6	2	-	2
5	Woyla	1	3	5	1	1	2
6	Woyla Barat	1	3	8	1	-	1
7	Woyla Timur	1	5	2	1	-	1
8	Kaway XVI	1	8	7	2	-	2
9	Meureubo	1	6	10	1	-	2
10	Pante Ceureumen	1	3	9	1	1	2
11	Panton Rheu	1	2	5	1	1	2
12	Sungai Mas	1	2	2	2	-	1
Jumlah		13	47	66	20	3	23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Kecamatan Sungai Mas sebanyak 2 orang. Sedangkan, jumlah penduduk miskin yang belum menjadi peserta mandiri BPS kesehatan sebanyak 19.401 orang atau sebesar 97,29 persen.

6. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis (dokter) terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat sudah meningkat. Rasio ketersediaan dokter di Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 adalah 35,09 per 100.000 penduduk dimana 1 orang dokter melayani 2.850 jiwa penduduk. Untuk tenaga para medis yang paling besar rasionya adalah perawat dan bidan yaitu sebesar 302,91 per 100.000 penduduk atau 1 orang perawat/bidan melayani 2.849 jiwa penduduk menurun dibandingkan tahun lalu. Sedangkan, tenaga para medis lainnya mempunyai rasio antara 119,20 per 100.000 penduduk. Untuk mengetahui tentang jumlah tenaga kesehatan dan rasionya terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51.
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016

No	Unit Kerja	Tenaga Kesehatan						
		Medis (Dokter)	Perawat dan Bidan	Farmasi	Gizi	Teknisi Medis	Sanitasi	Kesmas
1	Puskesmas	31	450	30	13	24	14	25
2	RSUD CND	34	290	43	9	16	4	16
3	Dinas Kesehatan	3	7	2	2	1	4	26
Jumlah	2016	52	585	41	29	24	20	57
	2015	68	747	75	24	41	24	67
	2014	68	747	75	24	41	22	67
	2013	39	535	83	25	38	24	70
	2012	47	563	61	26	41	23	48
	2011	50	727	58	26	100	24	37
Rasio 100.000 Penduduk per	2016	35,09	302,91	21,16	14,96	13,42	10,32	30
	2015	35,09	385,4	38,7	12,4	21,2	12,4	34,6
	2014	35,74	392,65	39,42	12,62	21,55	11,56	35,22
	2013	20,8	285,4	44,28	13,34	20,27	12,8	37,34
	2012	25,77	308,72	33,45	14,26	22,48	12,61	26,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Tabel 2.52.
Jumlah Tenaga Medis menurut Jenis Kelamin pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No	Unit Kerja	Dokter Spesialis			Dokter Umum			Dokter Gigi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	1	1	2	-	-	-
2	Puskesmas Johan Pahlawan	-	-	-	1	2	3	-	1	1
3	Puskesmas Suak Ribee	-	-	-	-	1	1	1	-	1
4	Puskesmas Meureubo	-	-	-	-	1	1	-	-	-
5	Puskesmas Peureumeu	-	-	-	-	2	2	-	-	-
6	Puskesmas Cot Seumeureng	-	-	-	-	2	2	-	-	-
7	Puskesmas Kuta Padang Layung	-	-	-	-	2	2	-	-	-
8	Puskesmas Kuala Bhee	-	-	-	2	-	2	-	-	-
9	Puskesmas Tangkeh	-	-	-	-	1	1	-	-	-

Jumlah jaminan kesehatan bagi penduduk berpendapatan rendah tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49.

Jaminan Kesehatan pada 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Kecamatan	Memiliki KIS/BPJS Kesehatan		Jumlah
	Ya	Tidak	
Arongan Lambalek	1,305	642	1,947
Bubon	385	427	812
Johan Pahlawan	1,492	582	2,074
Kaway XVI	2,380	790	3,170
Meureubo	1,484	572	2,056
Pantai Ceuremen	1,245	790	2,035
Panton Reu	608	663	1,271
Samatiga	755	481	1,236
Sungai Mas	425	139	564
Woyla	1,932	665	2,597
Woyla Barat	798	515	1,313
Woyla Timur	579	288	867
Jumlah	13,388	6,554	19,942
Persentase	67.13	32.87	100

Sumber: TPN2K, 2015

Pada tahun 2015, di Kabupaten Aceh Barat jumlah penduduk miskin yang sudah memiliki KIS/BPJS kesehatan sebanyak 13.388 orang dari jumlah total penduduk miskin sebanyak 19.942 orang atau sebesar 67,13 persen. Sedangkan, sisanya sebesar 6.554 atau 32,87 persen belum memiliki KIS/BPJS.

Tabel 2.50.

Peserta mandiri BPJS Kesehatan 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Kecamatan	Ya	Tidak	Jumlah
Arongan Lambalek	13	1,934	1,947
Bubon	12	800	812
Johan Pahlawan	28	2,046	2,074
Kaway XVI	37	3,133	3,170
Meureubo	24	2,032	2,056
Pantai Ceuremen	159	1,876	2,035
Panton Reu	56	1,215	1,271
Samatiga	6	1,230	1,236
Sungai Mas	2	562	564
Woyla	40	2,557	2,597
Woyla Barat	43	1,270	1,313
Woyla Timur	121	746	867
Jumlah	541	19,401	19,942
Persentase	2.71	97.29	100

Sumber: TPN2K, 2015

Penduduk miskin yang menjadi peserta mandiri BPS kesehatan pada tahun 2015 sebanyak 541 orang atau sebesar 2,71 persen. Peserta BPS mandiri yang banyak terdapat di Kecamatan Kaway XVI dengan jumlah 159 orang, dan yang paling sedikit terdapat di



No	Kecamatan	RSU	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poskesdes
8	Kaway XVI	-	1	8	7
9	Meureubo	-	1	6	10
10	Pante Cureumen	-	1	3	9
11	Panton Rheu	-	1	2	5
12	Sungai Mas	-	1	2	2
Jumlah	2016	4	13	47	66
	2015	4	13	47	65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dari tahun sebelumnya berupa penambahan 2 (dua) unit puskesmas rawat inap, 27 unit puskesmas keliling dan 1 (satu) unit Puskesmas Pembantu. Disamping itu juga terdapat penambahan 1 (satu) unit Balai Pengobatan TNI dan 1 (satu) unit Balai Pengobatan Swasta.

Tabel 2.48.
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No	Fasilitas Kesehatan	Pusat	Prov	Kab	TNI/POLRI	BUMN	Swasta	Jumlah
RUMAH SAKIT								
1	Rumah Sakit Umum	-	-	1	1	-	2	4
2	Rumah Sakit Khusus	-	-	-	-	-	-	-
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA								
1	Puskesmas Rawat Inap	-	-	9	-	-	-	9
	- Jumlah Tempat Tidur	-	-	70	-	-	-	70
2	Puskesmas Non Rawat Inap	-	-	4	-	-	-	4
3	Puskesmas Keliling	-	-	27	-	-	-	27
4	Puskesmas Pembantu	-	-	48	-	-	-	48
SARANA PELAYANAN LAIN								
1	Rumah Bersalin	-	-	-	-	-	29	29
2	Balai Pengobatan/Klinik	-	-	-	2	-	7	9
3	Praktik Dokter Bersama	-	-	-	-	-	-	-
4	Praktik Dokter Perorangan	-	-	-	-	-	-	-
5	Praktik Pengobatan Tradisional	-	-	-	-	-	1	1
6	Bank Darah Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-	-
7	Unit Transfusi Darah	-	-	1	-	-	-	1
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN								
1	Industri Farmasi	-	-	-	-	-	-	-
2	Industri Obat Tradisional	-	-	-	-	-	-	-
3	Usaha Kecil Obat Tradisional	-	-	-	-	-	-	-
4	Produksi Alat Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
5	Pedagang Besar Farmasi	-	-	-	-	-	-	-
6	Apotek	-	-	-	-	-	12	12
7	Toko Obat	-	-	-	-	-	15	15
8	Penyalur Alat Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2017.



Tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan. Jumlah kasus balita gizi buruk Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 berjumlah 17 kasus dengan 11 kasus pada balita laki-laki dan 6 kasus dialami oleh balita perempuan, sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2.46.

Jumlah Balita yang Menderita Gizi Buruk menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas di Aceh Barat Tahun 2015-2016

NO	KECAMATAN	KASUS BALITA GIZI BURUK					
		2015			2016		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Johan Pahlawan	1	0	1	2	2	4
2	Meureubo	3	3	6	3	4	7
3	Kaway XVI	0	0	0	1	0	1
4	Samatiga	1	1	2	1	0	1
5	Bubon	0	0	0	0	0	0
6	Woyla	0	0	0	1	0	1
7	Woyla Timur	0	0	0	0	0	0
8	Arongan Lb	0	1	1	1	0	1
9	Woyla Barat	0	1	1	0	0	0
10	Panton Reu	2	0	2	1	0	1
11	Pante Cereumen	1	0	1	1	0	1
12	Sungai Mas	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		8	6	14	11	6	17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2017

5. Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu

Jumlah rumah sakit yang ada saat ini di Kabupaten Aceh Barat berjumlah 4 unit yakni Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien, Rumah Sakit TNI-AD, Rumah Sakit Montela dan Rumah Sakit Harapan Sehat yang semuanya berlokasi di pusat Kota Meulaboh. Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk di Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 sangat kecil yakni 0,02 dimana 1 (satu) unit rumah sakit melayani 49.480 jiwa penduduk.

Rasio untuk puskesmas adalah 7,32 per 100.000 penduduk atau 1 unit Puskesmas melayani 13.656 jiwa penduduk, puskesmas pembantu memiliki rasio sebesar 24,78 per 100.000 penduduk atau 1 unit Puskesmas Pembantu melayani 4.035 jiwa penduduk. Jumlah sarana kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47.

Jumlah Sarana Kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No	Kecamatan	RSU	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poskesdes
1	Johan Pahlawan	4	2	4	5
2	Samatiga	-	1	6	4
3	Bubon	-	1	2	3
4	Arongan Lambalek	-	1	3	6
5	Woyla	-	1	3	5
6	Woyla Barat	-	1	3	8
7	Woyla Timur	-	1	5	2

3. Angka Harapan Hidup

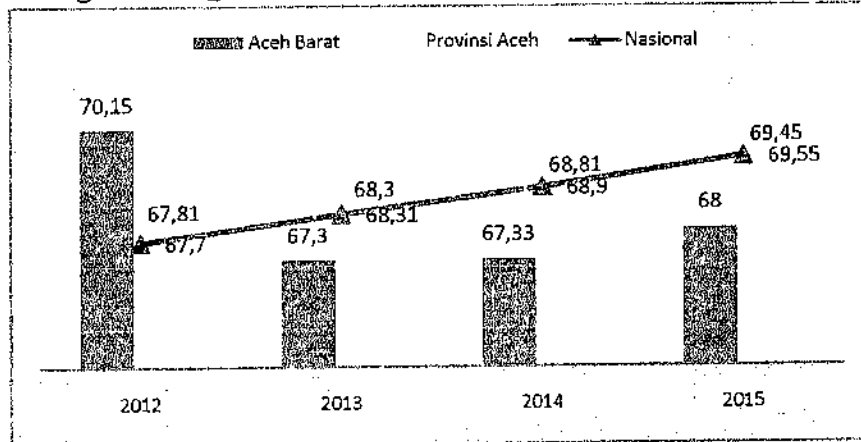
Dalam kurun waktu 2017-2015, Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 70,15 tahun. Angka ini terus menurun hingga menjadi 67,33 tahun pada tahun 2014, namun demikian angka tersebut telah mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Turun naiknya angka usia harapan hidup ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk yang belum maksimal. Jika dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup Provinsi Aceh dan Nasional, terlihat bahwa Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat masih rendah.

Tabel 2.45.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat
dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2012-2015

Tahun	Angka Harapan Hidup		
	Aceh Barat	Provinsi Aceh	Nasional
2012	70,15	67,81	67,70
2013	67,30	68,30	68,31
2014	67,33	68,81	68,90
2015	68,00	69,45	69,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2016

Gambar 2.26.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat
dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2012 - 2015



Dari gambar diatas terlihat bahwa tahun 2007-2012, usia harapan hidup di Kabupaten Aceh Barat lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Aceh maupun nasional. Namun sejak tahun 2013-2015, usia harapan hidup Kabupaten Aceh Barat turun dibawah rata-rata usia harapan hidup Provinsi Aceh maupun nasional.

4. Balita Gizi Buruk

Tingkat persentase prevalensi balita kekurangan gizi yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2015 berjumlah 14 kasus yang terdiri atas 8 orang balita laki-laki dan 6 orang balita perempuan atau 0,17 persen dari balita yang ditimbang dengan jumlah 8.324 balita. Dari kasus yang ada, semuanya mendapatkan perawatan, namun di tahun yang sama 2 orang diantaranya meninggal dunia akibat adanya penyakit penyerta yakni *tuberculosis* dan yang lainnya menderita *cerebral palsy*.

Tabel 2.44.
Jumlah Kunjungan Ibu Hamil, Persalinan Ditolong Nakes dan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas
Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No.	Kecamatan	Puskesmas	Ibu Hamil				Ibu Bersalin/Nifas							
			Jumlah	K1		K4		Jumlah	Persalinan Ditolong Nakes		Mendapat Yankes Nifas		Ibu Nifas Mendapat Vitamin A	
				Jumlah	persen	Jumlah	persen		Jumlah	persen	Jumlah	persen	Jumlah	persen
1	Johan Pahlawan	Johan Pahlawan	1.074	937	87,2	866	80,6	1.015	731	72,0	733	72,2	733	72,22
	Johan Pahlawan	Suak Ribee	416	410	98,6	381	91,6	394	290	73,6	290	73,6	290	73,60
2	Meureubo	Meureubo	704	598	84,9	548	77,8	663	499	75,3	499	75,3	499	75,26
3	Kaway XVI	Peureumeu	504	456	90,5	429	85,1	504	394	78,2	393	78,0	393	77,98
4	Samatiga	Cot Seumeureng	354	338	95,5	295	83,3	333	255	76,6	255	76,6	255	76,58
5	Bubon	Kuta Padang Layung	171	135	78,9	110	64,3	162	105	64,8	108	66,7	108	66,67
6	Woyla	Kuala Bhee	328	292	89,0	261	79,6	298	179	60,1	180	60,4	180	60,40
7	Woyla Timur	Tangkeh	108	92	85,2	96	88,9	102	71	69,6	80	78,4	80	78,43
8	Arongan Lambalek	Drien Rampak	277	227	81,9	178	64,3	262	159	60,7	160	61,1	160	61,07
9	Woyla Barat	Pasi Mali	185	132	71,4	155	83,8	170	111	65,3	115	67,6	115	67,65
10	Panton Reu	Meutulang	149	132	88,6	117	78,5	140	105	75,0	108	77,1	108	77,14
11	Pante Ceureumen	Pante Ceureumen	244	202	82,8	176	72,1	233	162	69,5	163	70,0	163	69,96
12	Sungai Mas	Kajeung	97	63	64,9	53	54,6	84	53	63,1	61	72,6	61	72,62
	Jumlah		4.611	4.014	87,1	3.665	79,5	4.360	3.114	71,4	3.145	72,1	3.145	72,13

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2017

Tabel 2.43.

Jumlah Kematian Ibu menurut Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah lahir hidup	Kematian ibu															
			Jumlah kematian ibu hamil				Jumlah kematian ibu bersalin				Jumlah kematian ibu nifas				Jumlah kematian ibu			
			< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	Jumlah	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	Jumlah	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	Jumlah	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	Jumlah
1	Johan Pahlawan	1.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	Meureubo	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Kaway XVI	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
4	Samatiga	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Buhon	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
6	Woyla	198	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2
7	Woyla Timur	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Arongan Lambalek	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
9	Woyla Barat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Panton Reu	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pante Ceureumen	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sungai Mas	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH		3.431	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	1	5	0	5	1	6
Angka Kematian Ibu																		175

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2017

Jumlah kematian ibu tahun 2016 yang berjumlah 6 kasus terdiri atas 2 kasus kematian karena edema paru dan *shock hipovolemik sepsis*, 3 kasus kematian disebabkan pendarahan *post partum* dan 1 kasus kematian disebabkan infeksi *purpuralis/nifas*. Secara Nasional, target SDGs di tahun 2019 terhadap AKI sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini optimis dapat tercapai dengan prediksi RPJM untuk AKI Tahun 2019 sebesar 150 per 100.000 kelahiran hidup. Penurunan kematian ibu sangat penting bagi pembangunan karena merupakan prasyarat serta indikator sebagai hasil sebuah capaian kemajuan dalam pembangunan sebuah negara.

Kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan di Kabupaten Aceh Barat masih belum optimal. Masih ada ibu hamil yang tidak melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan. Tahun 2015, Kunjungan K1 dan K4 masing-masing sebesar 88,00 persen dan 81,20 persen, sedangkan di tahun 2016 jumlah kunjungan ini turun masing-masing menjadi 87,1 dan 79,5 persen. Dalam hal persalinan, di tahun 2015, sebesar 97,70 persen ibu telah melaksanakan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Sama halnya dengan kunjungan K1 dan K4, persentase persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan juga mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 71,4 persen.

Jika disandingkan dengan target nasional dalam pencapaian SDGs, dimana cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40 persen penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70 persen, target ini optimis dapat dijangkau, mengingat cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40 persen penduduk berpendapatan terbawah di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2016 sudah mencapai 98,48 persen.

Disamping itu, target SDGs lainnya untuk meningkatkan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 persen; dan meningkatkan persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 persen diprediksikan dapat dicapai, namun butuh kerja keras, mengingat cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 baru sebesar 66,00 persen.


Upaya efektif dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional dengan fasilitasi kesehatan yang baik, meningkatkan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan penanganan komplikasi maternal.

Tabel 2.42.

Persentase Kelahiran yang ditolong Tenaga Terlatih pada 40 persen Penduduk Berpendapatan Terbawah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016

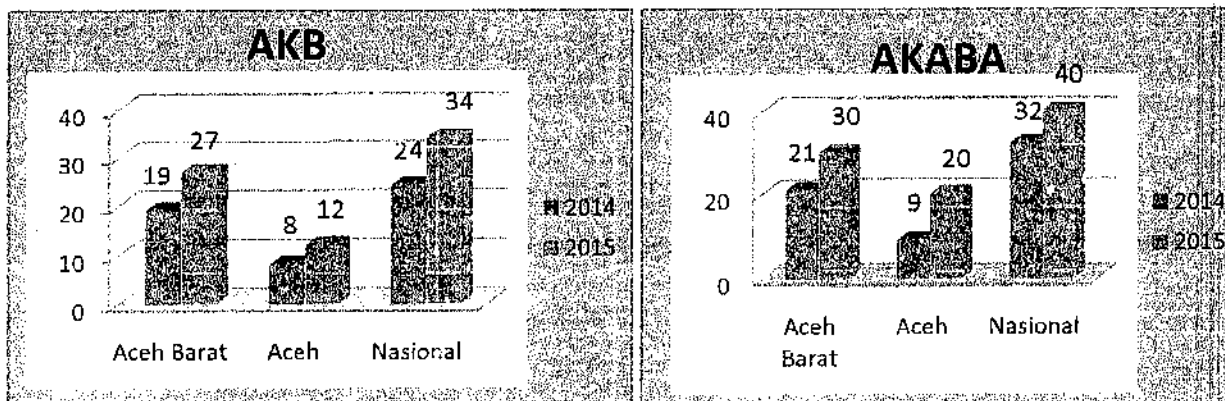
Tahun	Persentase
2012	81,92
2013	62,35
2014	91,59
2015	88,42
2016	98,48

Sumber: TPN2K, 2017



hingga 60 kasus kematian dengan AKABA sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup. Sama halnya dengan kematian bayi, selama 8 (delapan) tahun terakhir, di tahun 2015 adalah jumlah tertinggi kasus kematian balita. Kasus kematian balita terendah terjadi di tahun 2010 dengan jumlah kematian balita sebanyak 26 kasus. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2.25.
Capaian Indikator AKB dan AKABA di Kabupaten Aceh Barat terhadap
Capaian Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2015



Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2016.

2. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. AKI meliputi kematian yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan dan nifas. Perhitungan AKI di setiap kecamatan sulit dilakukan karena jumlah LH tidak mencapai 100.000 LH dan masih ada kemungkinan *under reported*. Jumlah kematian ibu melahirkan selama 8 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan jumlah kematian tertinggi sebanyak 6 kasus yang terjadi di tahun 2009, 2012, 2014 dan 2016. Kematian ibu terendah terjadi di tahun 2015 dengan jumlah 3 kasus sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2016

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Johan Pahlawan	-	1	3	1	1
2	Samatiga	1	-	-	-	-
3	Bubon	-	-	-	-	1
4	Arongan Lambalek	2	-	-	1	1
5	Woyla	-	-	-	-	2
6	Woyla Barat	-	-	-	-	-
7	Woyla Timur	-	-	-	-	-
8	Kaway XVI	-	1	-	-	1
9	Meureubo	2	-	2	-	-
10	Pante Ceureumen	-	1	-	1	-
11	Sungai Mas	-	1	-	-	-
12	Panton Rheu	1	-	1	-	-
Jumlah		6	4	6	3	6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2017



2016 menjadi 57 kasus dengan Angka Kematian Bayi sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus terendah terjadi tahun 2011 dengan jumlah kematian bayi sebanyak 37 kasus.

Jumlah ini memang masih dibawah target nasional untuk pencapaian SDGs sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2019, namun tetap saja merupakan catatan merah bagi setiap daerah untuk tiap 1 (satu) kasus bayi yang meninggal. Untuk itu, perlu penanganan serius oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 2.39.

Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 – 2016

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Johan Pahlawan	19	22	11	17	16
2	Samatiga	8	7	6	5	5
3	B u h o n	-	2	3	3	1
4	Arongan Lambalek	5	4	4	9	2
5	Woyla	5	7	8	7	1
6	Woyla Barat	-	6	4	7	4
7	Woyla Timur	1	1	4	6	4
8	Kaway XVI	4	8	8	4	6
9	Meureubo	10	7	5	19	10
10	Pante Ceureumen	3	4	3	3	4
11	Sungai Mas	1	3	3	6	1
12	Panton Rheu	-	1	7	4	3
Jumlah		56	72	66	90	57
Angka Kematian Bayi		NA	NA	NA	27	17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2010-2017.

Tabel 2.40.

Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 – 2016

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Anak Balita				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Johan Pahlawan	19	22	11	19	17
2	Samatiga	8	7	6	8	5
3	B u h o n	-	2	3	3	1
4	Arongan Lambalek	5	4	4	10	4
5	Woyla	5	7	8	7	1
6	Woyla Barat	-	6	4	8	4
7	Woyla Timur	1	1	4	6	4
8	Kaway XVI	4	8	8	5	6
9	Meureubo	10	7	5	19	10
10	Pante Ceureumen	3	4	3	4	4
11	Sungai Mas	1	3	3	7	1
12	Panton Rheu	-	1	7	5	3
Jumlah		56	72	66	101	60
AKABA		NA	NA	NA	30	17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2016

Sementara, Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan, tahun 2015 AKABA Kabupaten Aceh Barat mencapai 30 per 1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 101 kasus kematian balita. Tahun 2016 jumlah kematian balita turun

Dari tabel diatas jumlah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Raudhatul Athfal terbanyak terdapat di Kecamatan Johan Pahlawan. Hal ini disebabkan oleh karena jumlah anak umur 0-6 tahun di daerah perkotaan yang sedang mengikuti TK/KB/RA lebih tinggi jumlahnya dibandingkan pedesaan.

Tabel berikut memperlihatkan Jumlah Anak Usia 0-6 Tahun yang sedang mengikuti PAUD menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016.

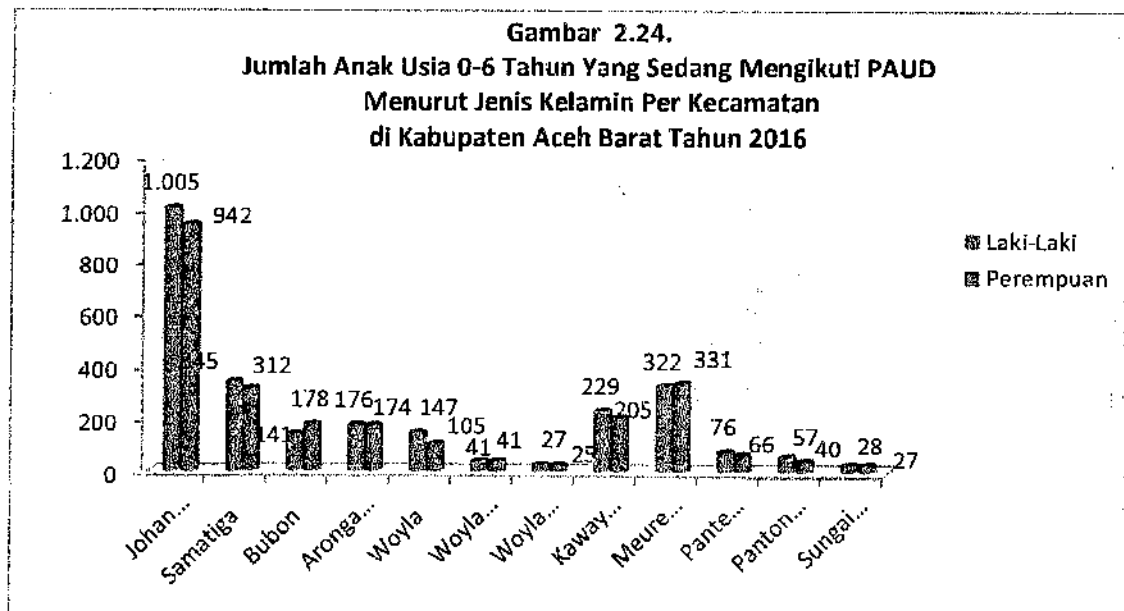
Tabel 2.38.

Jumlah anak Usia 0-6 Tahun yang sedang Mengikuti PAUD Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jumlah anak usia 0-6 tahun yang sedang mengikuti PAUD		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Johan Pahlawan	1005	942	1.947
2.	Samatiga	345	312	657
3.	Bubon	141	178	319
4.	Arongan Lambalek	176	174	350
5.	Woyla	147	105	252
6.	Woyla Barat	41	41	82
7.	Woyla Timur	27	25	52
8.	Kaway XVI	229	205	453
9.	Meureubo	322	331	653
10.	Pante Ceureumen	76	66	142
11.	Panton Reu	57	40	97
12.	Sungai Mas	28	27	55
	Jumlah	2.594	2.446	5.040

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, 2017

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah laki-laki usia 0-6 tahun yang mengikuti PAUD di Kabupaten Aceh Barat saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan.



B. Kesehatan

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Aceh Barat selama 8 (delapan) tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi. Jumlah kasus kematian bayi tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah kematian sebesar 90 kasus. Jumlah ini mengalami penurunan di tahun



Kecamatan	Memiliki KIP/BSM		Jumlah
	Ya	Tidak	
Panton Reu	80	1,191	1,271
Samatiga	126	1,110	1,236
Sungai Mas	5	559	564
Woyla	539	2,058	2,597
Woyla Barat	122	1,191	1,313
Woyla Timur	24	843	867
Jumlah	2,918	17,024	19,942
Persentase	14.63	85.37	100.00

Sumber: TNP2K, 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa penduduk miskin yang memiliki KIP atau BSM sebanyak 2.918 orang atau 14,63 persen. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak memiliki KIP/BSM terdapat pada Kecamatan Kaway XVI sebanyak 506 orang, dan kecamatan yang penduduk miskinnya memiliki KIP/BSM sedikit terdapat di Kecamatan Sungai Mas sebanyak 5 orang.

9. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Oleh karena itu, peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang. Arti penting mendidik anak sejak usia dini dilandasi dengan kesadaran bahwa masa anak-anak adalah masa keemasan bagi perkembangan anak (*golden age*), karena dalam rentang usia dari 0 sampai 5 tahun, perkembangan fisik, motorik dan berbahasa atau linguistik seorang anak akan tumbuh dengan pesat.

Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal berbentuk TK (Taman Kanak-Kanak), RA (Raudhatul Athfal), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal berbentuk KB (Kelompok Bermain), atau bentuk lain yang sederajat. Tabel berikut menunjukkan Jumlah Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 - 2017.

Tabel 2.37.
Jumlah PAUD Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 - 2017

No	Kecamatan	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		TK	KB	RA	TK	KB	RA	TK	KB	RA	TK	KB	RA	TK	KB	RA
1	Johan Pahlawan	33	25	1	34	25	3	34	28	3	35	29	3	36	32	4
2	Meureubo	15	8	1	16	8	1	16	10	1	16	9	1	21	12	4
3	Samatiga	19	17	0	19	17	0	21	20	0	20	20	0	22	20	1
4	Bubon	7	4	0	7	4	0	7	5	0	9	5	0	11	6	1
5	Arongan Lambalek	7	5	0	7	5	0	8	6	0	10	5	0	9	4	1
6	Woyla	6	3	0	7	3	0	8	3	0	7	3	0	10	3	0
7	Woyla Barat	3	3	0	3	3	0	4	4	0	3	4	0	4	4	0
8	Woyla Timur	1	0	0	1	1	0	2	2	0	5	2	0	6	2	0
9	Kaway XVI	17	2	0	17	2	0	17	2	0	18	2	0	21	5	0
10	Pante Ceureumen	3	2	0	3	2	0	6	2	0	3	2	0	8	4	0
11	Panton Reu	2	0	0	2	0	0	4	0	0	5	1	0	10	1	0
12	Sungai Mas	1	3	0	1	3	0	3	4	0	4	5	0	4	4	0
	Jumlah	114	72	2	117	73	4	130	86	4	135	87	4	162	97	11

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, 2017



8. Rasio Murid terhadap Guru

Rasio murid terhadap guru pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Aceh Barat berkisar antara 7 sampai dengan 13. Rasio murid terhadap guru tertinggi berada pada jenjang pendidikan SD dan SMP dengan rasio sebesar 7, yang berarti 1 orang guru mengajar 7 orang murid. Padahal, 8,78 artinya 1 orang guru mengajar 9 orang murid. Rasio terendah berada pada jenjang pendidikan SMA sebesar 13. Hal ini menunjukkan bahwa di tingkat SMA rata-rata 1 orang guru mengajar 13 orang murid.

Dengan demikian, ketersediaan guru di Kabupaten Aceh Barat sudah sangat memadai bahkan sudah berlebih. Permasalahan kekurangan guru di Kabupaten Aceh Barat disebabkan karena penyebaran guru yang tidak merata. Sebagian besar guru terkonsentrasi di Kota Meulaboh yang berdampak pada minimnya jumlah guru pada daerah-daerah gampong. Di samping hal tersebut di atas, masalah yang timbul adalah terbatasnya jumlah guru pada spesifikasi ilmu tertentu/guru bidang studi. Rasio murid terhadap guru menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Barat secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35.

Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

NO	Kecamatan	Rasio Murid Terhadap Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan						
		SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK
1	Johan Pahlawan	11	19	10	12	18	14	9
2	Samatiga	5	6	3	11	5		8
3	Bubon	7	5	7	3	8	-	-
4	Arongan Lambalek	6	8	11	6	11	5	3
5	Woyla	7	4	7	12	21	6	4
6	Woyla Barat	5	4	7	3	9	-	-
7	Woyla Timur	4	9	4	-	5	-	-
8	Kaway XVI	7	8	6	12	12	5	8
9	Meureubo	5	11	7	11	8	6	2
10	Pante Cereumen	7	5	7	12	13	-	8
11	Panton Reu	5	10	5	12	10	-	-
12	Sungai Mas	5	19	8	-	6	-	-
Rata-Rata		7	10	7	11	13	9	7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Jika dilihat dari Basis Data Terpadu Tahun 2015, jumlah penduduk berpendapatan terendah yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.36.

Jumlah Kepemilikan KIP/BSM Penduduk Berpendapatan Rendah
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Kecamatan	Memiliki KIP/BSM		Jumlah
	Ya	Tidak	
Arongan Lambalek	450	1,497	1,947
Bubon	149	663	812
Johan Pahlawan	383	1,691	2,074
Kaway XVI	506	2,664	3,170
Meureubo	344	1,712	2,056
Pantai Ceuremen	190	1,845	2,035



Tabel 2.34.

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 7-12 thn	Rasio	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 13-15 thn	Rasio	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 16-18 thn	Rasio
1	Arongan Lambalek	17	1.301	130,67	3	652	46,01	3	580	51,72
2	Bubon	7	819	85,47	3	396	75,76	1	358	27,93
3	Johan Pahlawan	38	6.477	58,67	15	3.325	45,11	13	3.615	35,96
4	Kaway XVI	20	2.386	83,82	7	1.041	67,24	4	1.190	33,61
5	Meureubo	22	3.406	64,59	9	1.686	53,38	6	1.463	41,01
6	Pante Geureumen	13	1.365	95,24	5	686	72,89	2	741	26,99
7	Panton Reu	9	823	109,36	3	334	89,82	1	293	34,13
8	Samatiga	20	1.272	157,23	6	656	91,46	3	737	40,71
9	Sungai Mas	9	448	200,89	1	146	68,49	1	144	69,44
10	Woyla	14	1.503	93,15	5	787	63,53	4	699	57,22
11	Woyla Barat	12	854	140,52	5	421	118,76	1	400	25,00
12	Woyla Timur	10	546	183,15	3	253	118,58	1	216	46,30
JUMLAH		191	21.200	90,09	65	10.383	62,60	40	10.436	38,33

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, 2015



7. Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Aceh Barat adalah 71,06 per 10.000 penduduk. Artinya terdapat 71 unit sekolah dalam 10.000 penduduk usia sekolah atau 1 unit sekolah melayani 141 orang penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah untuk SD/MI adalah 92,96. Hal ini berarti 93 unit SD/MI tersedia untuk melayani 10.000 orang penduduk usia 7-12 tahun atau 1 unit SD/MI melayani 108 orang penduduk usia 7-12 tahun. Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs adalah 59,12 artinya 1 unit SMP/MTs melayani 169 orang penduduk usia 13-15 tahun. Sedangkan rasio ketersediaan SMA/MA adalah 38,62 yang berarti 1 unit SLTA/MA melayani 259 orang penduduk usia 16-18 tahun sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.34.

Jika dibandingkan dengan standar nasional rasio siswa per sekolah SD/MI sebesar 180 dan standar nasional rasio siswa per sekolah SMP/MTs sebesar 270 (d disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan Dasar), terlihat bahwa kapasitas satuan pendidikan dasar yang ada di Kabupaten Aceh Barat masih mampu menampung peningkatan jumlah anak usia sekolah sampai 5 tahun mendatang. Semakin dekat nilai capaian indikator ini pada standar nasional, akan mengindikasikan semakin efisiennya pemanfaatan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar untuk mendukung kebijakan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

6. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur tertentu. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Aceh Barat dalam 2 (dua) tahun terakhir mengalami kenaikan di semua kelompok usia. APS tahun 2016 kelompok usia 7-12 tahun naik sebesar 0,38 persen dari tahun 2015. Sementara, kelompok umur 13-15 tahun naik sebesar 0,65 persen dan APS kelompok umur 16-18 tahun hanya naik sebesar 0,23 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh, angka partisipasi sekolah Kabupaten Aceh Barat tahun 2014 untuk semua kelompok umur berada di atas angka rata-rata partisipasi sekolah Provinsi Aceh sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.32.

Perkembangan APS Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tahun 2012 - 2016

No	Kelompok Umur	Kabupaten Aceh Barat					Provinsi Aceh				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	7-12 tahun	99,25	99,87	100	99,41	99,79	99,63	99,66	99,84	NA	NA
2	13-15 tahun	91,04	97,36	98,41	97,89	98,54	94,41	95,2	97,38	NA	NA
3	16-18 tahun	87,87	77,49	86,23	84,56	84,79	74,44	74,6	80,89	NA	NA

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2016 dan Dinas Pendidikan, 2017

Tabel 2.33.

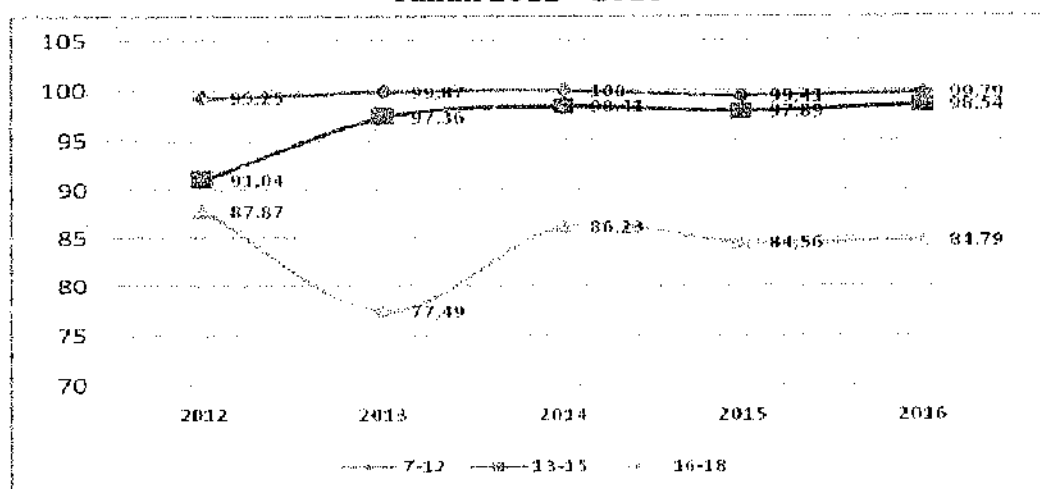
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah 2011-2016

Tahun	Laki-Laki			Perempuan			APS Kab. Aceh Barat		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
2012	99,82	92,32	69,05	98,83	92,00	73,65	99,25	91,04	87,87
2013	95,74	83,09	79,14	94,95	86,11	71,76	99,87	97,36	77,49
2014	104,2	97,70	61,44	103,83	99,58	70,88	100,00	98,41	86,23
2015	105,32	98,12	71,97	104,11	100,45	75,24	99,41	97,89	84,56
2016	99,90	97,56	79,71	99,73	98,24	83,91	99,79	98,54	84,79

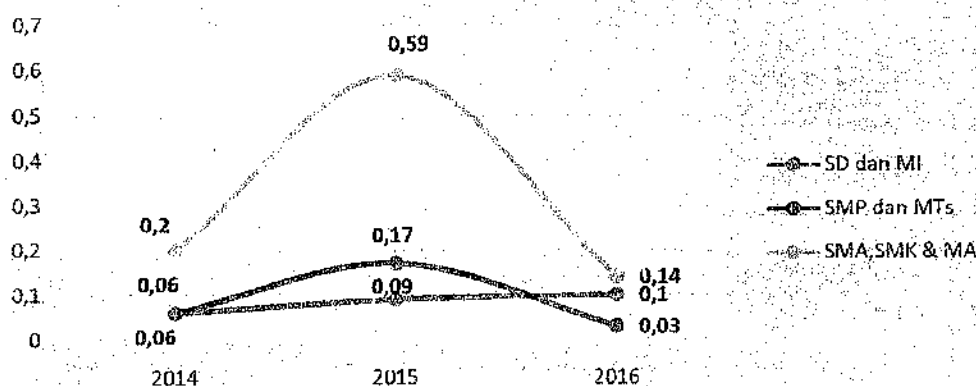
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2016 dan Dinas Pendidikan, 2017

Gambar 2.23.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kab. Aceh Barat Tahun 2012 - 2016



Gambar 2.22.
Perkembangan Angka Putus Sekolah Tahun 2014-2016



Jika dibandingkan dengan data APM pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTsN, dan SMA/MA/SMK yang berkisar 73,09-99,75 persen, terlihat bahwa sekitar 0,25-26,91 persen anak usia sekolah di Kabupaten Aceh Barat yang tidak bersekolah. Namun, pada satu sisi lainnya, angka putus sekolah di Kabupaten Aceh Barat yang berkisar antara 0 - 0,15 persen di setiap jenjang pendidikan menunjukkan bahwa anak yang putus sekolah tidaklah banyak. Hal ini disebabkan karena masih banyak anak-anak di Kabupaten Aceh Barat yang mendapatkan pendidikannya diluar sekolah formal seperti di pesantren/dayah dan sebagian lagi ada yang melanjutkan pendidikannya di luar daerah.

Berikut disajikan data jumlah siswa/i putus sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Aceh Barat tahun ajaran 2014/2015, dimana untuk tingkat SD/MI/ sederajat jumlah siswi perempuan yang putus sekolah lebih banyak dari pada siswa laki-laki. Sedangkan untuk SMP dan SMK, jumlah siswa laki-laki yang putus sekolah lebih banyak dari siswi perempuan.

Tabel 2.31.
Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Aceh Barat Tahun Ajaran 2014/2015

No	Kecamatan	SD/ sederajat				SMP/ sederajat				SMA/ sederajat					
		SD		MI		SMP		MTs		SMA		MA		SMK	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Arongan Lambalek	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
2	Bubon	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Johan Pahlawan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
4	Kaway XVI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Meureubo	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pante Ceureumen	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panton Reu	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Samatiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sungai Mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Woyla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Woyla Barat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Woyla Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		6	7	0	1	5	1	0	0	0	0	1	1	16	0
2014		0,07	0,08	0	0,04	0,15	0,03	0	0	0	0	0,1	0,12	1,14	0
2013		0,22	0,08	0,1	0,24	0,15	0,19	0	0	0,16	0,07	0	0,44	0	0
2012		0,18	0,1	0	0	0,09	0,13	0	0	0,51	0,35	0	0	0	0
2011		0,19	0,15	0,1	0	0,1	0,15	0	0	0,45	0,2	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, 2016.

Tabel 2.29.
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2016

APM berdasarkan Jenjang Pendidikan	2012		2013		2014		2015		2016	
	Aceh Barat	Aceh	Aceh Barat	Aceh	Aceh Barat	Aceh	Aceh Barat	Aceh	Aceh Barat	Aceh
APM SD/MI										
Laki-Laki	94,97		99,29		100					
Perempuan	94,37		99,33		99,5					
Jumlah	94,68	90,5	99,3	85,1	99,75	92,5	95,33	98	95,58	98,2
APM SMP/MTs										
Laki-Laki	73,17		82,28		83,52					
Perempuan	85,24		74,33		81,14					
Jumlah	79,21	67,9	77,84	69,9	82,33	80,7	84,05	85,6	85,91	85,7
APM SMA/MA										
Laki-Laki	69,72		69,34		71,41					
Perempuan	65,35		73,57		75,06					
Jumlah	67,86	58,6	71,44	56,3	73,09	62,1	77,55	69,2	75,49	70

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2017

5. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 ditingkat SLTP/MTsN dan SLTA/MA mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan Gerakan Ayo Sekolah mulai berjalan baik. Hanya saja, di tingkat SD/MI Angka Putus Sekolah mengalami sedikit kenaikan sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2.30.
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014-2016

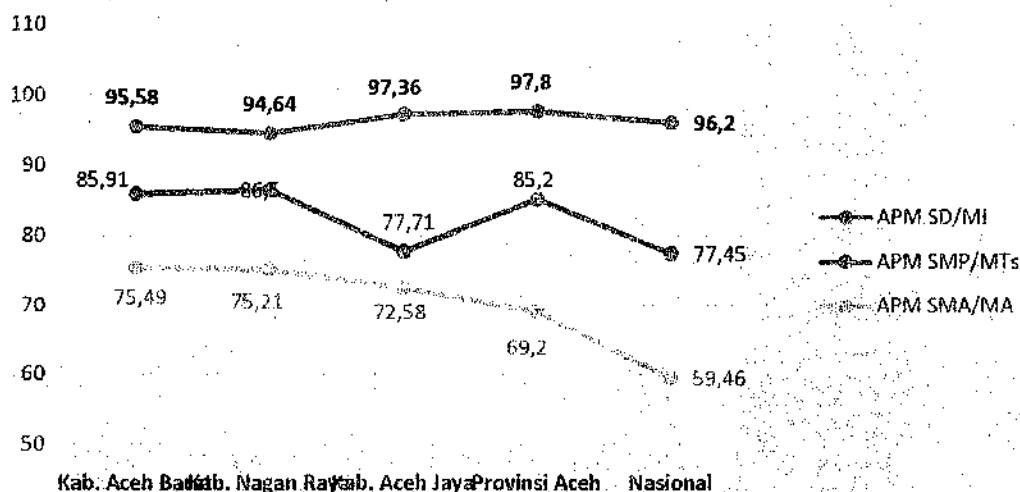
No		Angka Putus Sekolah*		
		SD dan MI	SMP dan MTs	SMA, SMK & MA
1	Johan Pahlawan	0,07	0,00	0,36
2	Samatiga	0,13	0,00	0,00
3	Woyla	0,03	0,00	0,35
4	Kaway XVI	0,04	0,00	0,00
5	Sungaimas	0,00	0,35	0,00
6	Bubon	0,56	0,00	0,00
7	Arongan Lambalek	0,11	0,24	0,00
8	Meureubo	0,00	0,00	0,00
9	Pante Ceureumen	0,00	0,00	0,00
10	Woyla Barat	0,00	0,00	0,00
11	Woyla Timur	0,11	0,00	0,00
12	Panton Reu	0,00	0,00	0,00
Rata-rata Kabupaten				
	2014	0,06	0,06	0,20
	2015	0,09	0,17	0,59
	2016	0,10	0,03	0,14

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, 2015-2017.



Gambar 2.21.

Perbandingan APM dengan Kab. Tetangga, Provinsi dan Nasional Tahun 2016



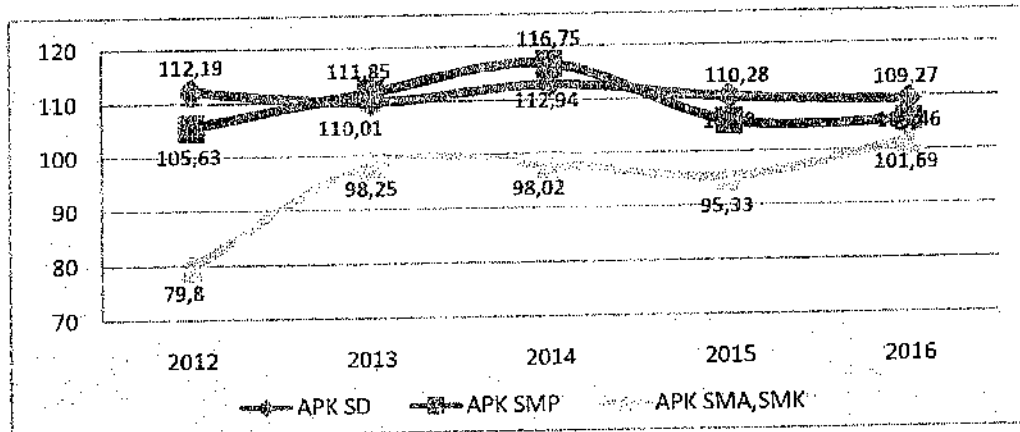
Selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan APM di Kabupaten Aceh Barat dari setiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni tingkat SLTP/MTs Tahun 2015 sebesar 84,05 persen naik sebesar 1,86 persen menjadi 85,91 persen di Tahun 2016. Sedangkan pada jenjang pendidikan tingkat SLTA/MA tahun 2016 sebesar 77,49 persen atau turun sebesar 2,06 persen dari tahun 2015 yaitu sebesar 77,55 persen. Peningkatan Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs terjadi akibat mulai meningkatnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Jika dibandingkan dengan APM Provinsi Aceh Tahun 2016, APM Kabupaten Aceh Barat tingkat SD/MI lebih rendah. Namun, APM tingkat SMP/MTs dan tingkat SMA/MA Kabupaten Aceh Barat lebih unggul dari Provinsi Aceh.

Dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang dan jenis pendidikan dapat terlihat dari perbandingan antara APM laki-laki dan perempuan di semua jenjang pendidikan. Dari tabel diatas terlihat bahwa perbandingan APM SD/MI tahun 2014 antara siswa laki-laki dan perempuan yakni 100 dan 99,50. Demikian juga halnya dengan APM SMP/MTs yakni 83,52 dan 81,14 serta APM SMA/MA yakni 71,41 dan 75,06. Dengan demikian, partisipasi dalam hal pendidikan, secara efektif telah menuju pencapaian kesetaraan gender.

Untuk pencapaian target nasional pencapaian SDGs yakni: (1) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78persen; (2) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2persen,dan(3) meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63persen, target ini telah dapat dituntaskan di Kabupaten Aceh Barat mengingat target RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 lebih tinggi dari target dan nasional dan capaian Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 yang sudah melebihi target SDGs dimana: (1) Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat sebesar 95,58 persen; (2) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat sebesar 85,91 persen, dan (3) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat sebesar 101,72 persen.

Gambar 2.20.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016



Tabel 2.27.

Capaian Indikator Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan

No	Jenis Indikator	Satuan	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Perbedaan Gender APK (PG APK)	persentase	2,41	-2,02	-11,24	-2,15
2	Indeks Paritas Gender APK (IPG APK)	indeks	0,97	1,02	1,03	1,02
3	persen Siswa swasta	persentase	5,60	21,1	8,72	9,53

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, 2016

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 mencapai angka tertinggi yaitu 95,58 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan APM Provinsi Aceh juga 2 (dua) kabupaten tetangga terdekat lainnya, termasuk APM Nasional sebesar 96,20 persen. Sementara itu, Kabupaten Nagan Raya mengungguli Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP/MTs yaitu 86,50 persen. Demikian juga dengan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/MA, yang masih diungguli oleh Kabupaten Nagan Raya sebesar 86,50 persen di atas APM Kabupaten Aceh Barat sebesar 85,81 persen. Jika dibandingkan dengan Angka APM Nasional, angka APM Kabupaten Aceh Barat masih unggul pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA.

Tabel 2.28.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Aceh Barat Dibandingkan dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Aceh Tahun 2016

APM berdasarkan Jenjang Pendidikan	Kab. Aceh Barat	Kab. Nagan Raya	Kab. Aceh Jaya	Provinsi Aceh	Nasional
APM SD/MI	95,58	94,64	97,36	97,80	96,20
APM SMP/MTs	85,91	86,50	77,71	85,20	77,45
APM SMA/MA	75,49	75,21	72,58	69,20	59,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2017

Tabel 2.25.
Perkembangan Rata-Rata Lama Belajar dan Lama Sekolah
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2015

Tahun	Laki-Laki			Perempuan		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
2012	6,07	3,02	3,01	6,04	3,01	3,00
2013	6,07	3,02	3,01	6,04	3,01	3,00
2014	6,07	3,02	3,01	6,04	3,01	3,00
2015	6,07	3,02	3,01	6,04	3,01	3,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, 2016

*Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2016

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa (berapapun usianya) yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD dan SLTP Tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015. Angka Partisipasi Kasar SD tahun 2016 sebesar 109,27 persen atau turun sebesar 1,01 persen dari tahun 2015 yakni 110,28 persen. Jika dibandingkan dengan APK nasional untuk tingkat SD tahun 2016 sebesar 108,00, APK tingkat SD/MI di Kabupaten Aceh Barat ini masih tergolong lebih tinggi.

Pada jenjang pendidikan tingkat SLTP, Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2016 sebesar 105,46 persen atau turun sebesar 0,34 persen dibandingkan tahun 2015 yaitu 105,80 persen. Sedangkan, Angka Partisipasi Kasar di tingkat jenjang pendidikan SLTA tahun 2016 sebesar 101,69 persen atau meningkat sebesar 6,36 persen dari tahun 2015 yaitu 95,33 persen. Jika dibandingkan dengan APK Nasional untuk tingkat SMP dan SMA yang masing-masing sebesar 100,72 dan 76,45, APK Kabupaten Aceh Barat lebih tinggi dari APK Nasional.

Tabel 2.26.
Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Aceh Barat dan Nasional Tahun 2012 - 2016

Tahun	Kabupaten Aceh Barat			Nasional		
	APK SD	APK SMP	APK SMA, SMK	APK SD	APK SMP	APK SMA, SMK
2012	112,19	105,63	79,80	104,23	89,29	68,45
2013	110,01	111,85	98,25	107,63	85,69	66,27
2014	112,94	116,75	98,02	108,78	88,43	73,95
2015	110,28	105,80	95,33	109,94	90,63	77,39
2016	109,27	105,46	101,69	108,00	100,72	76,45

Sumber: Dinas Pendidikan dan BPS Kab. Aceh Barat, Statistik Nasional 2017



sebesar 3,70 persen hingga menjadi 98,62 persen. Perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan angka melek huruf yang pesat di Kabupaten Aceh Barat sebesar 3,70 persen dimana di akhir tahun 2016 hanya 1,38 persen saja penduduk Kabupaten Aceh Barat yang masih buta huruf. Perkembangan Angka Melek Huruf dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.23.**Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016**

Tahun	Jumlah Penduduk usia diatas 15 tahun bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun	Angka Melek Huruf *(persen)
2012	122.156	128.639	94,96
2013	126.457	130.867	95,12
2014	133.535	135.693	98,41
2015	136.004	138.146	98,52
2016	139.477	141.429	98,62

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, 2017

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 adalah 8,73 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pada saat Pemerintah Pusat sudah mencanangkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, di Kabupaten Aceh Barat Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun belumlah tuntas.

Dibandingkan dengan kabupaten tetangga yakni Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Jaya, rata-rata lama belajar di Kabupaten Aceh Barat lebih tinggi. Meskipun demikian, angka Rata-Rata Lama Sekolah Aceh Barat lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Aceh yang juga belum tuntas dalam pelaksanaan Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun.

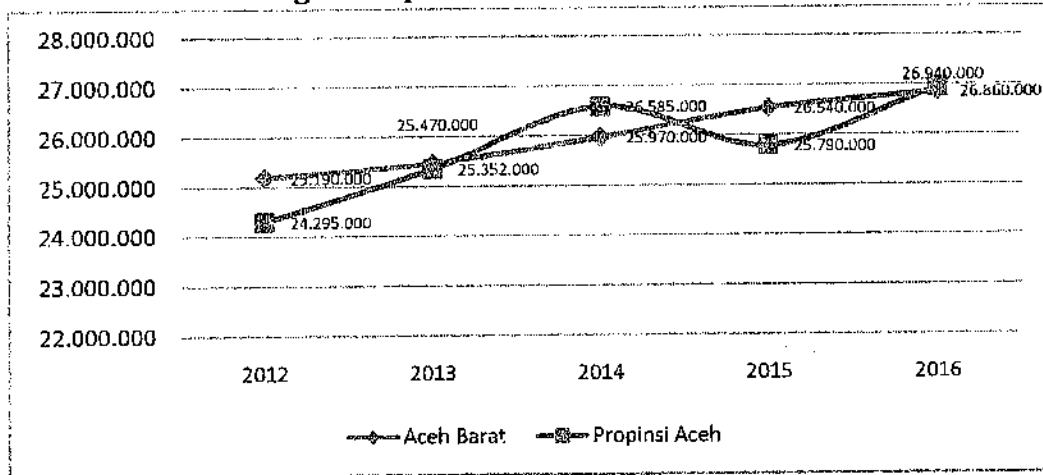
Tabel 2.24.**Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Aceh Barat Dibandingkan dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Aceh Tahun 2012-2016**

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah			
	Kab. Aceh Barat	Kab. Nagan Raya	Kab. Aceh Jaya	Provinsi Aceh
2012	7,77	8,11	8,73	8,36
2013	7,83	8,40	8,77	8,44
2014	8,17	7,93	7,88	8,71
2015	8,47	8,22	7,89	8,77
2016	8,73	NA	NA	NA

Sumber : BPS Aceh, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya, 2012-2016

Sedangkan jika ditinjau dari sisi lama belajar, masih ada siswa yang mengalami tinggal kelas. Hal ini ditunjukkan dengan lama belajar di atas 6 tahun di tingkat SD. Demikian juga dengan tingkat SMP dan SMA, dimana angka rata-rata lama belajar di atas 3 tahun. Prestasi yang baik ditunjukkan oleh siswa SMA dari kalangan perempuan selama 5 tahun terakhir berhasil menamatkan SMA dalam kurun waktu 3 tahun tanpa tinggal kelas.

Gambar 2.19.
Perbandingan Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Aceh Barat dengan Propinsi Aceh Tahun 2012-2016



D. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan mengevaluasi Gini Rasio yang memiliki kisaran nilai 0 - 1. Jika bernilai nol artinya pemerataan sempurna dan sebaliknya jika bernilai satu berarti ketimpangan tidak sempurna. Gini Rasio lebih kecil dari 0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

Tabel 2.22.
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Kabupaten Tetangga Tahun 2014-2015

Kabupaten/Provinsi	2014	2015
Aceh Barat	0,31	0,36
Aceh Jaya	0,31	0,34
Nagan Raya	0,28	0,27
Aceh	0,32	0,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2017

Data di atas menunjukkan bahwa angka gini rasio Kabupaten Aceh Barat maupun kabupaten tetangga dan Provinsi Aceh masih dibawah 0,4 yang berarti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tergolong rendah.

Jika ditinjau target nasional pencapaian SDGs dimana Indeks Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 secara optimis ditargetkan dapat dicapai, mengingat tahun 2015 angka ini secara tuntas telah tercapai.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Barat usia 15 tahun ke atas di tahun 2012 adalah 94,96 persen. Angka ini mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir



Tabel 2.20.
**Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh Barat	0,95	2,52	10,99	5,25	3,13
Provinsi	0,22	7,31	8,09	6,02	3,95
Nasional	1,79	8,38	8,36	6,96	3,20

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat dan BPS Provinsi Aceh, 2017.

Catatan: Tahun 2012-2013 Kabupaten Aceh Barat menggunakan angka implisit

Dari data di atas, terlihat bahwa di Tahun 2007 hingga 2013 Kabupaten Aceh Barat masih menggunakan laju implisit dengan nilai implisit tertinggi berada di tahun 2008 yakni sebesar 11,18 persen. Tingginya laju implisit pada tahun tersebut diakibatkan dampak krisis ekonomi global dimana pada tahun itu inflasi Provinsi Aceh mencapai 11,92 persen. Mulai tahun 2009 hingga 2013 terjadi penurunan laju implisit di Kabupaten Aceh Barat, namun tetap saja masih berada di atas inflasi Provinsi Aceh. Tahun 2014 laju implisit Aceh Barat mencapai angka 10,99 persen, di atas angka inflasi Aceh yang hanya 8,09 persen dan nasional sebesar 8,36 persen. Tingginya laju implisit di tahun ini menjadi salah satu penyebab dijadikannya Kota Meulaboh sebagai Kota Inflasi di Aceh di samping Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe. Tahun 2015 kenaikan harga produsen di Aceh Barat hanya sebesar 2,35 persen. Hal ini menandakan bahwa kenaikan harga produsen disini telah stabil. Sementara itu, selama tahun 2016 inflasi di Kabupaten Aceh Barat turun hingga mencapai 3,13 persen dibawah angka inflasi Aceh sebesar 3,95 persen dan inflasi nasional sebesar 3,20 persen.

C. Pendapatan Regional Perkapita

Pada tahun 2016 pendapatan regional per kapita penduduk Kabupaten Aceh Barat ADHK mencapai Rp26.860.000,00 atau sebesar Rp18.650,00 per kapita per hari. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,00 persen dari tahun 2015 yang nilainya sebesar Rp26.540.000,00 atau sebesar Rp18.400,00 per kapita per hari. Jika dibandingkan dengan pendapatan regional per kapita Provinsi Aceh diluar migas, pendapatan regional per kapita Kabupaten Aceh Barat masih lebih tinggi sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.21.
**Perbandingan Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Aceh Barat dengan
Provinsi Aceh Tahun 2012-2016 (rupiah)**

Pendapatan Regional Perkapita	Aceh Barat	Propinsi Aceh
2012	25.190.000	24.295.000
2013	25.470.000	25.352.000
2014	25.970.000	26.585.000
2015	26.540.000	25.790.000
2016	26.860.000	26.940.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2017

Catatan : Pendapatan Regional Perkapita Propinsi Aceh termasuk Migas

Handwritten signature



No	Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Wilayah
22	D.I. Pasi Teungoh	170	Gampong Pasi Tengoh Kecamatan Meureubo
23	D.I. Paya Baro	150	Gampong Paya Baro Kecamatan Woyla Timur
24	D.I. Paya Lhok	300	Gampong Mugo Rayeuk Kecamatan Pantan Reu
25	D.I. Paya Peunaga	150	Gampong Paya Peunaga Kecamatan Meureubo
26	D.I. Peunaga Cut	175	Gampong Peunaga Cut Ujong Kec. Meureubo
28	D.I. Pucok Laot	200	Gampong Alue Penyareng Kecamatan Meureubo
29	D.I. Pucok Pancu	200	Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan
30	D.I. Pungki	150	Gampong Pungki Kecamatan Woyla Timur
31	D.I. Reudeup	100	Gampong Reudeup Kecamatan Meureubo
32	D.I. Sangkaden	175	Gampong Pulo Tengoh Kec. Pante Ceureumen
33	D.I. Seklemen	150	Gampong Paya Baro RP Kecamatan Meureubo
34	D.I. Simpang	125	Gampong Simpang Kecamatan Kaway XVI
35	D.I. Suak Lango	100	Gampong Lango Kecamatan Pante Ceureumen
36	D.I. Tamping	150	Gampong Tamping Kecamatan Pantan Reu
37	D.I. Tanjong Seumantok	400	Gampong Seumantok Kec. Pante Ceureumen
38	D.I. Tumpok Ladang	150	Gampong Tumpok Ladang Kec. Kaway XVI
39	D.I. Gunong Unyat	150	Gampong Meutulang Kecamatan Pantan Reu
40	D.I. Geunang Meugo Cut	50	Gampong Meugo Cut Kecamatan Pantan Reu
41	D.I. Geunang Kuala Manyeu	115	Gampong Kuala Manyeu Kecamatan Pantan Reu
42	D.I. Cot Manggi	250	Gampong Cot Manggi Kecamatan Pantan Reu
43	D.I. Baro Paya	200	Gampong Mugo Rayeuk Kecamatan Pantan Reu
44	D.I. Geunang Lhok Seureudam	48	Gampong Leklek Kecamatan Pantan Reu
45	D.I. Alue Tambo	100	Gampong Beureugang Kecamatan Kaway XVI
46	D.I. Alue Lhee	100	Gampong Alue Lhee Kecamatan Kaway XVI
47	D.I. Teupin Panah	100	Gampong Teupin Panah Kecamatan Kaway XVI
48	D.I. Alue Peudeung	200	Gampong Alue Peudeung Kec Kaway XVI
49	D.I. Meunasah Ara	130	Gampong Meunasah Ara Kecamatan Kaway XVI
50	D.I. Alue Tampak	65	Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI
51	D.I. Geunang Pasi Jambu	45	Gampong Pasi Jambu Kecamatan Kaway XVI
52	D.I. Geunang Pucok Pungki	200	Gampong Pucok Pungki Kecamatan Kaway XVI
53	D.I. Anoe Puteh	75	Gampong Masjid Kecamatan Kaway XVI
54	D.I. Geunang Paya Lhok	275	Gampong Tanjong Meulaboh Kec. Kaway XVI
55	D.I. Keutambang	110	Gampong Keutambang Kec. Pante Ceureumen
56	D.I. Keuleumbah	100	Gampong Keuleumbah Kecamatan Woyla
57	D.I. Ie Sayang	100	Gampong Ie Sayang Kecamatan Woyla Barat
58	D.I. Karak	250	Gampong Karak Kecamatan Woyla Barat
59	D.I. Geunang Meurapet	250	Gampong Karang Hampa Kec. Arongan Lambalek
60	D.I. Rambong	50	Gampong Rambong Kecamatan Woyla Barat
61	D.I. Tangkeh	150	Gampong Tangkeh Kecamatan Woyla Timur
62	D.I. Tuwie Eumpeuk	200	Gampong Tuwie Eumpeuk Kec. Woyla Timur
63	D.I. Leuhan	50	Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan
64	D.I. Lueng Kanto	165	Gampong Suak Pante Breuh Kecamatan Samatiga
65	D.I. Paya Lumpat	50	Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga
66	D.I. Pinem	50	Pinem Kecamatan Samatiga
68	D.I. Tanoh Mirah	75	Gampong Tanoh Mirah Kecamatan Sungai Mas
69	D.I. Ramitie	100	Gampong Ramiti Kecamatan Sungai Mas
70	D.I. Tuwi Saya	200	Gampong Tuwi Saya Kecamatan Sungai Mas
71	D.I. Sakuy	50	Gampong Sakuy Kecamatan Sungai Mas
72	D.I. Alue Raya	100	Gampong Alue Raya Kecamatan Samatiga

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Barat, 2012.

Tabel 2.70.

Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2016

NO	Tahun/Kondisi	2012		2013		2014		2015		2016	
		Baik	Buruk	Baik	Buruk	Baik	Buruk	Baik	Buruk	Baik	Buruk
1	Luas Daerah Irigasi	6.500	9.055	6.687	8.668	7.071	8.484	7.360	8.195	8.137	7.418
2	Persentase (persen)	41,79	58,21	42,99	55,72	45,46	54,54	47,32	52,68	52,31	47,69

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat, 2017.

Perkembangan kondisi daerah irigasi di Kabupaten Aceh Barat selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan setiap tahunnya. Namun, jika ditinjau dari persentase keseluruhan perbaikan yang ada belum menunjukkan peningkatan secara signifikan. Hal ini menjadi tantangan terbesar bagi Kabupaten Aceh Barat terutama untuk mendukung prioritas Kabupaten Aceh Barat menuju daerah swasembada pangan nasional.

Rasio jaringan irigasi digunakan untuk menilai efektifitas pengelolaan jaringan irigasi yang ditunjukkan oleh rasio antara luas areal terairi terhadap luas baku. Dalam hal ini semakin tinggi rasio tersebut semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas pengelolaan jaringan irigasi Aceh Barat belum maksimal dengan angka Indeks Areal Terairi sebesar 35,62 persen, untuk mencapai efektifitas pengelolaan jaringan irigasi masih memerlukan penyediaan jaringan irigasi sebesar 64,38 persen lagi pada masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan di bidang irigasi adalah antara lain: 1) belum berfungsinya jaringan irigasi secara maksimal; 2) terbatasnya pembangunan jaringan irigasi untuk menggantikan alih fungsi lahan beririgasi; 3) belum optimalnya peningkatan jaringan irigasi teknis; 4) tingkat kerusakan jaringan irigasi masih tinggi; 5) belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan dan 6) terbatasnya debit andalan di beberapa daerah irigasi.

Ketersediaan air merupakan hal yang penting untuk meningkatkan intensitas taman mencapai 100 persen. Namun hal ini belum dapat dicapai karena belum berfungsinya jaringan irigasi teknis dan semi teknis secara maksimal. Disamping itu, pada daerah yang memiliki lahan potensial menjadi sawah beririgasi belum didukung oleh jaringan irigasi yang memadai sehingga perlu ditingkatkan melalui penambahan saluran dan bangunan. Untuk menggantikan alih fungsi lahan beririgasi perlu dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru. Pembangunan jaringan irigasi ini sangat penting dalam mendukung upaya pemantapan ketahanan pangan daerah.

2. Penataan Ruang

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, dengan kriteria:

1. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
2. Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur;
3. Didominasi komunitas tumbuhan.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30.

Tabel 2.71.
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 s.d 2012

No	Uraian	2011	2012
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau + Kebun Campuran (ha)	60.017	59.517
2.	Luas kawasan budidaya (ha)	179.189,19	179.189,19
3.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	33,49persen	33,22persen

Sumber : Olahan data primer

b. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Di Kabupaten Aceh Barat, jumlah bangunan ber IMB pada tahun 2014 sebanyak 29.656 unit, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.72.
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 s.d 2014

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	496	567	647	669	717
2.	Jumlah Bangunan	28.188	28.906	29.656	30.418	31.183
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	1,76 persen	1,96 persen	2,18 persen	2,20 persen	2,35 persen

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Aceh Barat, 2016

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Mulai tahun 2014 tercatat 322 gampong telah dijangkau jaringan listrik. Untuk pelayanan prasarana energi listrik tersebut ke depan sifatnya adalah lebih kepada peningkatan dan perluasan jaringan dan pelayanan.

Pada tahun 2015 dengan jumlah rumah tangga sebesar 48.027keluarga, seluruh rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat sudah mendapatkan fasilitas pelayanan listrik dengan persentase sebesar 80,08 persen. Di tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah rumahtangga yang mendapatkan pelayanan sebesar 523 rumahtangga dengan persentase menjadi 80,18 persen. Secara lebih lengkap perkembangannya mulai dari tahun 2012-2015 dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.73.
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Provinsi/Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	30.030	30.998	37.685	38.805	39.328



No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
2	Jumlah Rumah Tangga	45.268	46.247	47.225	48.027	49.050
3	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7)	66persen	67persen	79,8persen	80,08persen	80,18persen

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2012-2017

Tabel 2.74.
Kondisi Pelayanan Energi Listrik
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

Kecamatan	JumlahDesa	Berlistrik	Belum Berlistrik	Persen
1. Johan Pahlawan	21	21	-	100,00
2. Samatiga	32	32	-	100,00
3. B u b o n	17	17	-	100,00
4. Arongan Lambalek	27	27	-	100,00
5. Woyla	43	43	-	100,00
6. Woyla Barat	24	24	-	100,00
7. Woyla Timur	26	26	-	100,00
8. Kaway XVI	44	44	-	100,00
9. Meureubo	26	26	-	100,00
10. Pante Ceureumen	25	25	-	100,00
11. Pantou Reu*)	19	19	-	100,00
12. Sungai Mas	18	18	-	100,00
Jumlah/ Total	322	322	-	100,00

Sumber: BPS dan PT. PLN Persero Wilayah – 1 Cab. Meulaboh, 2016

Secara khusus di kawasan perkotaan, kebutuhan listrik cukup besar dan telah terpenuhi dengan sistem jaringan yang telah menyebar di tiap wilayah kota, gardu-gardu induk telah tersedia untuk melayani kompleks permukiman baru. Jaringan listrik terbagi atas jaringan distribusi primer, sekunder dan tersier, kesemua itu dihubungkan pada gardu induk. Kebutuhan akan daya listrik di wilayah Kabupaten Aceh Barat beragam antara 450 - 3000 KWh kebutuhan ini diklasifikasi berdasarkan kegiatan masyarakat seperti untuk kebutuhan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran/ pemerintahan, publik, industri dan lainnya. Kebutuhan energi listrik untuk permukiman daya yang dibutuhkan antara 450 - 1300 KWh sedangkan selebihnya adalah kegiatan-kegiatan usaha pengolahan yang ada. Tahun 2015 melalui wilayah NAD cabang Meulaboh sudah terlayani listrik oleh PT. PLN dengan jumlah pelanggan sebanyak 121.146 dengan jumlah KWH terjual sebesar 74.573.236 KWh. Saat ini telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2x110 MW yang berlokasi di desa Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya (Perbatasan Aceh Barat-Nagan Raya) yang akan melayani kebutuhan listrik untuk Aceh.

Tabel 2.75.
Akses Penerangan Listrik untuk 40 persen Penduduk yang berpendapatan terbawah
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016

Tahun	Persentase (persen)
2012	98,44
2013	96,51
2014	96,20
2015	97,70
2016	99,10

Sumber: TPN2K, 2017

Berdasarkan Basis Data Terpadu diketahui bahwa Akses Penerangan Listrik untuk Penduduk 40 persen berpendapatan terbawah di Kabupaten Aceh Barat tahun 2012 sudah mencapai 98,44 persen. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 99,10 persen di tahun 2016. Untuk pencapaian target nasional pencapaian SDGs tahun 2019 yakni Meningkatkan akses penerangan untuk penduduk 40 persen berpendapatan terbawah menjadi 100 persen pada tahun 2019, optimis dapat dicapai.

Tabel 2.76.

Sumber Penerangan Utama 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Kecamatan	Sumber penerangan utama			Jumlah
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	
Arongan Lambalek	1,862	5	80	1,947
Bubon	765	5	42	812
Johan Pahlawan	2,030	10	34	2,074
Kaway XVI	3,036	25	109	3,170
Meureubo	2,022	8	26	2,056
Pantai Ceuremen	1,881	9	145	2,035
Panton Reu	1,147	7	117	1,271
Samatiga	1,199	3	34	1,236
Sungai Mas	524	6	34	564
Woyla	2,341	23	233	2,597
Woyla Barat	1,205	7	101	1,313
Woyla Timur	823	17	27	867
Jumlah	18,835	125	982	19,942
Persentase (persen)	94.45	0.63	4.92	100

Sumber: TPN2K, 2015

Sebesar 94,45 persen penduduk miskin Kabupaten Aceh Barat sudah mendapatkan fasilitas penerangan utama dari Listrik PLN. Meskipun demikian, masih ada 982 keluarga yang sumber penerangannya bukan dari listrik.

Tabel 2.77.

Daya Listrik Terpasang (PLN) 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Kecamatan	Daya Listrik Terpasang (PLN)							Jumlah
	450 watt	900 watt	1.300 watt	2.200 watt	>2.200 watt	Tanpa Meteran	NULL	
Arongan Lambalek	1,084	704	5	6		63	85	1,947
Bubon	603	134		1		27	47	812
Johan Pahlawan	877	1,093	9		2	49	44	2,074
Kaway XVI	2,312	552	12	9	2	149	134	3,170
Meureubo	1,165	809	7	3	1	37	34	2,056
Pante Ceuremen	1,432	314	2	31	1	101	154	2,035
Panton Reu	792	285	1	7		62	124	1,271
Samatiga	906	246	5	2		40	37	1,236
Sungai Mas	477	18	2			27	40	564

Kecamatan	Daya Listrik Terpasang (PLN)							Jumlah
	450 watt	900 watt	1.300 watt	2.200 watt	>2.200 watt	Tanpa Meteran	NULL	
Woyla	1,882	254	9	5		191	256	2,597
Woyla Barat	895	243	1	1		65	108	1,313
Woyla Timur	638	117	1	2		65	44	867
Jumlah	13,063	4,769	54	67	6	876	1,107	19,942
Persentase	65.50	23.91	0.27	0.34	0.03	4.39	5.55	

Sumber: TPN2K, 2015

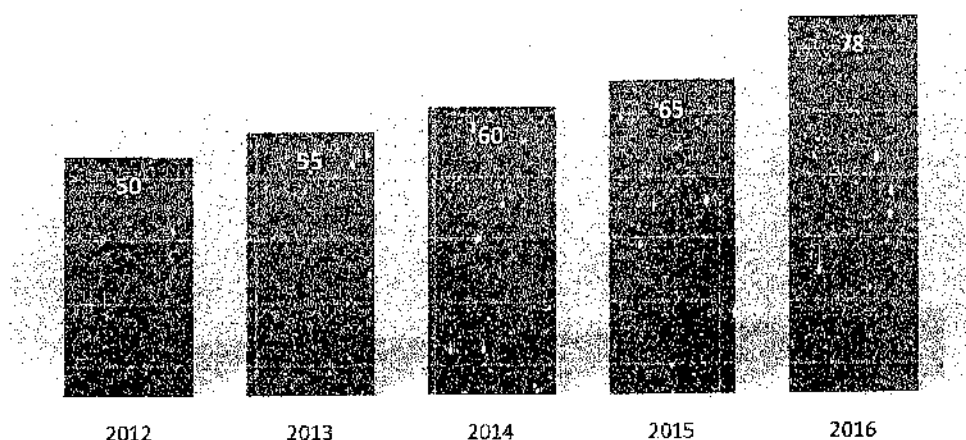
Daya listrik terpasang pada rumah tangga miskin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 didominasi dengan daya listrik 450 watt sebanyak 65 persen dan daa 900 watt sebanyak 23,91 persen. Hanya sedikit keluarga yang menggunakan daya yang lebih tinggi.

2. Persentase Rumah layak huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk, perkembangan persentase rumah layak huni mulai tahun 2012 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 27.

Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2016



Tabel 2.78.

Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Kecamatan	Status kepemilikan bangunan tempat tinggal					Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	
Arongan Lambalek	1,885	8	48		6	1,947
Bubon	751	7	36	10	8	812
Johan Pahlawan	1,625	223	209	2	15	2,074
Kaway XVI	2,858	32	266	6	8	3,170
Meureubo	1,913	16	108	3	16	2,056
Pantai Ceuremen	1,901	13	103	5	13	2,035
Panton Reu	1,133	5	82	33	18	1,271
Samatiga	1,144	11	77		4	1,236



Kecamatan	Status kepemilikan bangunan tempat tinggal					Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	
Sungai Mas	534	2	24	2	2	564
Woyla	2,491	13	90	2	1	2,597
Woyla Barat	1,232	5	76			1,313
Woyla Timur	803	3	58	2	1	867
Jumlah	18,270	338	1,177	65	92	19,942
Persentase (persen)	91,62	1,69	5,90	0,33	0,46	

Sumber: Basis Data Terpadu, 2015

Jika ditinjau dari 4 desil masyarakat berpendapatan terendah (masyarakat miskin) di Kabupaten Aceh Barat, terlihat bahwa 91,62 persen diantaranya sudah memiliki bangunan tempat tinggal sendiri. Sejumlah 1,69 persen penduduk masih menyewa/kontrak rumah tempat tinggal dan 5,90 persen penduduk miskin bebas sewa dan 0,33 persen menempati rumah dinas.

Adapun jenis lantai dari rumah rumah penduduk miskin sebagian besar sudah lantai semen yakni 88,80 persen. Di samping itu, juga sudah ada rumah penduduk (40 persen berpendapatan terbawah) yang menggunakan lantai marmer/granit, keramik dan ubin/tegel. Namun demikian, juga masih ada rumah penduduk yang berlantai kayu dan bahkan 1.579 unit bangunan rumah masih berlantai tanah. Untuk atap rumah penduduk, sebagian besar rumah sudah menggunakan atap seng. Namun semikian, masih ada sebesar 7,92 persen rumah penduduk yang beratapkan ijuk/rumbia sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.79.

Jenis Lantai Terluas 40persen Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Kecamatan	Jenis Lantai Terluas										Jumlah
	Marmer/Granit	Lainnya	Keramik	Parket/Vinil/Permadani	Ubin/Tegel/Teraso	Kayu/Papan Kualitas Tinggi	Semen/Bata Merah	Bambu	Kayu/Papan Kualitas Rendah	Tanah	
A.Lambalek	13		3		2	2	1,783	3	1	140	1,947
Bubon	4		2	1			726			79	812
J. Pahlawan	8	134	9	47		137	1,679	1		59	2,074
Kaway XVI	13	1	5	10	3	8	2,92	1		209	3,17
Meureubo	16		2	1	2	93	1,828	4	2	108	2,056
P. Ceuremen	6		8	5		2	1,899	1	1	113	2,035
Panton Reu	7		4	5	2	4	1,143		1	105	1,271
Samatiga	2					4	1,167		2	61	1,236
Sungai Mas	1		3	3			511			46	564
Woyla	2		9	22		2	2,182	12		368	2,597
Woyla Barat	5	2	2	2	1	1	1,07	1		229	1,313
Woyla Timur		1		1		3	800			62	867
Grand Total	77	138	47	97	10	256	17,708	23	7	1,579	19,942
Persentase	0.39	0.69	0.24	0.49	0.05	1.28	88.80	0.12	0.04	7.92	100.0

Sumber: TPN2K, 2015.

Tabel 2.80.
Jenis Atap Terluas 40persen Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Kecamatan	Kualitas atap terluas										Jumlah
	Beton/Genteng Beton	Lainnya	Genteng Keramik	Genteng Metal	Genteng Tanah Liat	Asbes	Seng	Sirap	Bambu	Jerami/Ijuk/Daundanan/Rumbia	
A.Lambalek	13		3		2	2	1,783	3	1	140	1,947
Bubon	4		2	1			726			79	812
J. Pahlawan	8	134	9	47		137	1,679	1		59	2,074
Kaway XVI	13	1	5	10	3	8	2,92	1		209	3,17
Meureubo	16		2	1	2	93	1,828	4	2	108	2,056
P. Ceuremen	6		8	5		2	1,899	1	1	113	2,035
Panton Reu	7		4	5	2	4	1,143		1	105	1,271
Samatiga	2					4	1,167		2	61	1,236
Sungai Mas	1		3	3			511			46	564
Woyla	2		9	22		2	2,182	12		368	2,597
Woyla Barat	5	2	2	2	1	1	1,07	1		229	1,313
Woyla Timur		1		1		3	800			62	867
Jumlah	77	138	47	97	10	256	17,71	23	7	1,579	19,942
Persentase	0.39	0.69	0.24	0.49	0.05	1.28	88.80	0.12	0.04	7.92	100

Sumber: TPN2K, 2015.

E. Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Rasio Polisi Pamong Praja, Linmas dan Poskamling

Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan.

Tabel 2.81.
Rasio Jumlah Pos Kamling Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	7,84	7,95	8,25	8,10	8,00
2	Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	55,5	34,4	53,2	33,2	31,8
3	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16

Sumber: Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat, 2017

Turunnya rasio jumlah Polisi Pamong Praja dan Petugas linmas disebabkan karena tidak adanya penambahan dalam jumlah personil. Sementara di sisi lainnya, jumlah penduduk terus meningkat. Untuk tahun 2018 mendatang, akan dibentuk petugas linmas untuk setiap gampongnya dengan sumber anggaran bersumber dari dana desa.

2. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

Cakupan patroli petugas Satpol PP adalah jumlah patroli petugas satpol pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam. Sedangkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah hasil dari perbandingan jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dengan jumlah pelanggaran K3. Berikut disajikan cakupan patroli dan penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2016.

Tabel 2.82.
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Cakupan patroli petugas Satpol PP	720	720	720	720	720
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	91	86	97	94	89

Sumber: Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat, 2017



Tabel 2.83.
Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2016

No	Jenis Kasus	2012	2013		2014		2015		2016	
		Kasus	Kasus	diselesaikan	Kasus	diselesaikan	Kasus	diselesaikan	Kasus	diselesaikan
1	Curanmor	53	56	9	53	48	48	8	8	37
2	Penipuan	22	21	11	19	49	49	18	18	31
3	Pengrusakan	8	7	5	5	16	16	4	4	11
4	Penganiayaan Ringan	32	41	38	39	46	46	28	28	46
5	Penganiayaan Berat	2	4	1	2	0	0	0	0	1
6	Pencurian Biasa	23	45	17	36	62	62	21	21	87
7	Pencurian Berat	19	17	8	9	3	3	22	22	32
8	Kebakaran	6	6	3	1	4	4	2	2	1
9	Pembakaran	2	1	1	3	2	2	2	2	1
10	Penggelapan	11	17	9	18	42	42	1	1	25
11	Perkosaan	4	1	1	0	1	1	11	11	2
12	Pencurian dengan Kekerasan	3	0	0	7	1	1	0	0	6
13	Pengeroyokan	3	1	0	9	8	8	2	2	1
14	Korupsi	0	1	0	1	2	2	3	3	2
15	Penghinaan	0	2	1	1	5	5	3	3	4
16	Penculikan	0	1	0	1	0	0	1	1	5
17	Pembunuhan	2	2	3	0	0	1	0	0	1
18	Penadahan	0	1	1	2	1	3	1	1	2
19	Perbuatan Cabul	4	13	9	9	6	0	3	3	3
20	Pemalsuan Surat	3	0	2	7	3	4	0	0	1
21	Senpi/Handak	1	0	0	1	0	0	1	1	2
22	Lain Lain	79	42	20	49	36	22	11	11	23
	Jumlah	277	279	139	272	45	319	120	125	123
	Jumlah penduduk	182.364	187.459		190.244		193.791		197.921	
25	Angka kriminalitas (23)/(24)	15,1	14,9		14,29		16,46		16,23	

Sumber: Polres Aceh Barat, 2017

3. Angka kriminalitas

Angka kriminalitas Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2011 berkisar antara 0,0006 – 0,0014. Jumlah kriminalitas tertinggi dalam 5 tahun terakhir adalah 243 kasus yang terjadi di tahun 2009 dengan kasus terbanyak adalah pencurian sebagaimana terdapat dalam tabel diatas.

4. Jumlah Demonstrasi

Periode tahun 2007 hingga 2011 terjadi beberapa kali demonstrasi di Kabupaten Aceh Barat. Demonstrasi yang terjadi baik di bidang politik, pendidikan maupun bidang ekonomi masih bersifat kooperatif dan tidak bersifat anarkis yang merupakan demonstrasi damai sehingga tidak menimbulkan kerusuhan dan kerusakan terhadap objek dan lingkungan sekitarnya.

F. Sosial

1. Kemiskinan

Untuk melihat ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan kebutuhan dasar minimumnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tingkat pengeluaran masyarakat. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau biasa disebut dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini merupakan penjumlahan garis kemiskinan makanan dan non makanan.

Gambaran tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Barat ditahun ini 2015 mengalami penurunan dengan angka kemiskinan mencapai 21,46 persen dengan jumlah penduduk miskin 41.360 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 22,97 persen dengan penduduk miskin 43.900 jiwa maka angka ini berkurang 1,51 persen dengan jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 2.540 jiwa. Angka ini kembali berhasil diturunkan menjadi 20,38 persen di tahun 2016 dengan pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.250 jiwa.

Begitu pula halnya Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat tahun 2014 sejumlah Rp417.641,00 per kapita sedangkan tahun 2016 mengalami peningkatan sejumlah Rp441.909,00 per kapita, kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan (proxy) yang bergerak terjadi pada kelompok atau rumah tangga yang berada pada posisi miskin dan hampir miskin dengan rata-rata konsumsi per kapita Aceh Barat sebesar Rp172.909,00 dengan jumlah Rp684.446,00 pada tahun 2014 menjadi kenaikan sebesar Rp857.354,95 pada tahun 2015.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya melaksanakan kebijakan-kebijakan daerah setiap tahunnya dengan prioritas Penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program dan kegiatan baik program/kegiatan bantuan langsung ke masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, program lainnya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin dan berkelanjutan terhadap pembangunan dikota maupun sampai ke tingkat desa/gampong demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Tabel 2.84.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012- 2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Garis Kemiskinan (Rp)	407.442	413.061	417.641	424.227	441.909
Jumlah Penduduk Miskin	41.600	44.300	43.900	41.360	40.110
persen penduduk miskin	22,76	23,70	22,97	21,46	20,38

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2017

Dalam 5 (lima) tahun terakhir persentase penduduk miskin Kabupaten Aceh Barat sudah menampakkan adanya pengurangan, kecuali pada tahun 2013. Di tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.700 orang dengan persentase penduduk miskin sebesar 23,70 persen, akibat adanya pemutusan hubungan kerja pada beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan hingga tahun 2016 menjadi 40.110 orang dengan persentase kemiskinan sebesar 20,38 persen. Kondisi ini menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah yang semakin membaik dan adanya peran pemanfaatan dana desa dalam tahun 2015.

Dari data pengeluaran beras bulog untuk program raskin tahun 2015 diketahui bahwa jumlah penduduk miskin terbesar berada pada Kecamatan Kaway XVI dengan jumlah 26.718 KK dengan jumlah beras yang diterima sebesar 400.770 Kg, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terkecil berada di Kecamatan Sungai Mas dengan jumlah 5.055 KK dengan jumlah beras yang diterima sebesar 75.825 Kg. Untuk tahun 2016, jumlah keluarga miskin terbanyak berada di Kecamatan Samatiga dengan jumlah 2.223 KK dengan jumlah bantuan beras sebesar 33.435 Kg sebagaimana yang terpapar dalam tabel berikut.

Tabel 2.85.
Banyaknya Pengeluaran Beras Bulog untuk Program Raskin menurut Kecamatan
dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2016

Kecamatan	2015		2016	
	KK miskin	Beras (Kg)	KK miskin	Beras (Kg)
Johan Pahlawan	18.444	276.660	1.157	23.355
Samatiga	9 750	146.250	2.229	33.435
Bubon	9.636	144.540	1.732	25.980
Arongan Lambalek	17.565	263.475	803	12.045
Woyla	23.256	348.840	1.939	29.085
Woyla Barat	13.890	208.350	1.158	17.370
Woyla Timur	9.501	142.515	421	6.315
Kaway XVI	26.718	400.770	794	11.910
Meureubo	20.811	312.165	1.532	22.980
Pante Ceureumen	18.681	280.215	1.464	21.960
Panton Reu	11.577	173.655	813	12.195
Sungai Mas	5.055	75.825	965	14.475
Jumlah	175.134	2.773.260	15.407	231.105

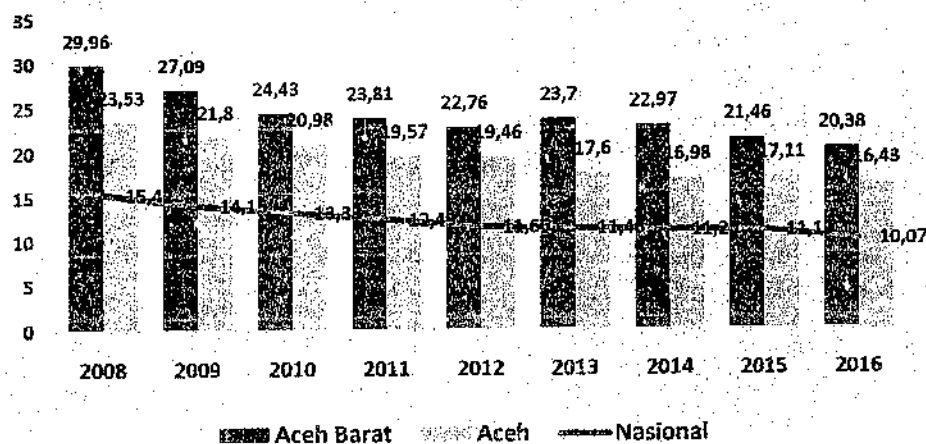
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Tabel 2.86.
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat dengan
Provinsi Aceh dan Nasional**

No	Wilayah	Tingkat Kemiskinan (persen)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh Barat	22,76	23,70	22,97	21,46	20,38
2	Aceh	19,46	17,60	16,98	17,11	16,43
3	Nasional	11,66	11,46	11,25	11,13	10,07

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat dan BPS Provinsi Aceh

Gambar 2. 28.
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat
dengan Provinsi Aceh dan Nasional**



Jika ditinjau sasaran nasional berdasarkan target SDGs yakni menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8 persen. Jika kita telaah kembali angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat, maka target nasional ini akan sulit untuk dicapai. Adapun target capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat tahun 2019 sebesar 17,98 persen. Dilihat dari Basis Data Terpadu Tahun 2015, data penduduk berpendapatan rendah untuk indikator kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87.
**Bahan Bakar untuk Memasak pada 40persen Penduduk Berpendapatan Terendah
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015**

Kecamatan	Bahan bakar untuk memasak									Jumlah
	Listrik	Gas > 3 Kg	Gas 3 Kg	Gas Kota/Biogas	Minyak Tanah	Briket	Arang	Kayu Bakar	Tidak Memasak	
Arongan Lambalek	14	111	627	1	7	1		1,173	13	1,947
Bubon	36	11	262	1	1	1	3	496	1	812
Johan Pahlawan	15	113	1,187		73	2	1	659	24	2,074
Kaway XVI	31	62	980	3	15	3	1	2,058	17	3,17
Meureubo	17	25	943	2	10	3	1	1,047	8	2,056
Pantai Ceuremen	10	58	662	4	6	10	1	1,281	3	2,035
Panton Reu	4	21	268	9	4	2	2	960	1	1,271
Samatiga	14	35	381	1	4	1		785	15	1,236
Sungai Mas	3	18	69		1	1		471	1	564



Kecamatan	Bahan bakar untuk memasak									Jumlah
	Listrik	Gas > 3 Kg	Gas 3 Kg	Gas Kota/Biogas	Minyak Tanah	Briket	Ara ng	Kayu Bakar	Tidak Memas ak	
Woyla	12	47	411	9	3	1	2	2,103	9	2,597
Woyla Barat	3	12	272			3	1	1,017	5	1,313
Woyla Timur	7	54	148			3	1	653	1	867
Jumlah	166	567	6,21	30	124	31	13	12,703	98	19,942
Persentase	0.83	2.84	31.14	0.15	0.62	0.16	0.07	63.70	0.49	100

Sumber: TPN2K, 2015.

Sebesar 63,70 persen keluarga miskin di Kabupaten Aceh Barat masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak. Pada urutan kedua, sebesar 31,14 persen penduduk menggunakan gas 3 kg sebagai bahan bakar memasak.

Berbagai bantuan telah diupayakan oleh Pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam pengentasan kemiskinan daerah. Penduduk miskin sudah mendapatkan berbagai bantuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban hidup sehari-hari. Berikut bantuan yang diberikan kepada penduduk miskin Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015.

Tabel 2.88.

Bantuan yang diberikan kepada 40persen Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Kecamatan	Jenis Bantuan			
	PKH	KKS-KPS	Rastra	KUR
Arongan Lambalek	113	1,014	1,870	24
Bubon	94	345	653	26
Johan Pahlawan	103	650	1,780	48
Kaway XVI	535	1,496	2,696	75
Meureubo	133	955	1,851	19
Pantai Ceuremen	476	1,140	1,880	71
Panton Reu	240	806	1,092	23
Samatiga	14	413	750	13
Sungai Mas	69	166	380	4
Woyla	394	1,144	2,147	11
Woyla Barat	212	494	1,104	5
Woyla Timur	110	533	826	5
Jumlah	2,493	9,156	17,029	324
Persentase	12.50	45.91	85,39	1,62

Sumber: TPN2K, 2015.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada Tahun 2015 terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), KKS-KPS, Rastra, dan KUR. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Aceh Barat tahun 2015 sebesar 12,50 persen dengan keluarga jumlah keluarga berpendapatan terendah sebanyak 2.493. sedangkan untuk program KKS-KPS jumlah keluarga berpendapatan terendah yang terdaftar dalam program ini sebanyak 9.156 atau sebesar 45,91 persen, dengan jumlah keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Kaway XVI.

Sedangkan untuk bantuan rastra pada Tahun 2015 sebesar 85,39 persen dengan jumlah keluarga berpendapatan terendah yang terdaftar sebanyak 17.029. Bantuan ini



diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Kemudian untuk program KUR pada Tahun 2015 sebesar 1,62 persen dengan jumlah keluarga berpendapatan terendah sebanyak 324.

Tabel 2.89.
**Jenjang Pendidikan Tertinggi 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015**

Kecamatan	Jenjang pendidikan tertinggi (yang pernah/sedang diduduki saat pendataan)									
	SD/SDLB	Perguruan Tinggi	Paket A	Madrasah Ibtidaiyah	SMP/SMPLB	Paket B	Madrasah Tsanawiyah	SMA/SMK/SMALB	Paket C	Madrasah Aliyah
Arongan Lambalek	3,204	144	12	229	1,332	8	76	994	10	22
Bubon	1,247	99	10	92	465	7	62	532	4	16
Johan Pahlawan	3,534	292	16	75	1,839	5	52	1,869	8	22
Kaway XVI	4,918	449	35	72	2,21	8	132	2,223	14	15
Meureubo	3,987	258	19	60	1,496	12	40	1,501	23	19
Pantai Ceuremen	2,899	285	21	78	1,096	12	42	1,129	26	7
Panton Reu	1,99	121	7	35	603	2	17	643	10	5
Samatiga	1,738	235	21	242	713	3	173	677	9	197
Sungai Mas	715	42	5	49	291		41	204	6	14
Woyla	4,151	245	22	52	1,405	5	78	1,523	10	27
Woyla Barat	1,767	100	15	67	734	1	13	661	2	4
Woyla Timur	1,164	82	5	58	442	3		422	7	4
Jumlah	31,314	2,352	188	1,109	12,626	66	726	12,378	129	352
Persentase	41.86	3.14	0.25	1.48	16.88	0.09	0.97	16.55	0.17	0.47

Sumber: TPN2K, 2015.

Tabel 2.90.
**Jenis Pekerjaan Utama 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015**

Kecamatan	Pekerjaan Utama											
	Pertanian (Padi/ Palawija)	listrik & Gas	Bangunan / Konstruksi	Perdag angan	Hotel & Rumah Makan	Transportasi & Pergudangan	Informasi & Komunikasi	Keuangan & Asuransi	Jasa Pendidik an	Jasa Kesehat an	Jasa Kemasyarakatan, Pemerintahan & Perorangan	Hortil kultura
Arongan Lambalek	3,137	4	70	111	5	18			15	5	14	9
Bubon	726	2	42	55	1	19		1	3	2	11	3
Johan Pahlawan	304	16	556	467	153	189	8	3	19	7	487	22
Kaway XVI	3,591	7	181	290	54	119	1	3	57	20	65	13
Meureubo	869	19	394	214	83	63	3	6	26	9	140	45
Pantai Ceuremen	2,54	4	66	99	2	38		3	8	11	25	53
Panton Reu	449		59	72	7	29		1	9	4	33	2
Samatiga	805	3	138	101	9	33		1	13	4	20	7
Sungai Mas	468		38	12	1	8	1		5	3	11	
Woyla	2,918	2	72	178	6	12		3	41	15	22	6
Woyla Barat	2,263	1	17	51	2		1	1	17	4	23	3
Woyla Timur	1,131	1	20	27		4	1		5	2	14	2
Jumlah	19,201	59	1,653	1,677	323	532	15	22	218	86	865	165
Persentase	25.55	0.08	2.20	2.23	0.43	0.71	0.02	0.03	0.29	0.11	1.15	0.22

Sumber: TPN2K, 2015.

Dari tabel diatas terlihat bahwa terlihat bahwa jenjang pendidikan keluarga miskin yang ditamatkan masih banyak yang berpendidikan SD/SDLB dengan persentase sebesar 41,86 persen atau sebanyak 31.314 orang. Namun, ada sebesar 3,14 persen atau sebanyak 2.352 orang penduduk miskin yang menamatkan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi.

Rata-rata pekerjaan utama yang ditekuni oleh penduduk miskin atau yang berpendapatan rendah adalah dibidang pertanian (padi/palawija), dengan persentase sebesar 25,55 atau sebanyak 19.201. Sedangkan pekerjaan yang sedikit ditekuni oleh penduduk miskin adalah di bidang komunikasi dan perikanan budidaya dengan persentase masing-masing sebesar 0,02 dan 0,01 persen.

2. Penyandang Cacat

Jumlah penyandang cacat yang ada di Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 berjumlah 443 orang yang terdiri dari 128 orang tuna netra, 117 orang tuna rungu/wicara, 91 orang tuna grahita dan 107 orang cacat ganda. Jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, terdapat peningkatan jumlah penyandang cacat di Kabupaten Aceh Barat tahun 2015 sebanyak 13 orang. Jika ditinjau dari jenis kecacatan, secara umum terjadi penurunan jumlah tuna netra, tuna rungu-wicara, begitu juga dengan tuna grahita. Namun, pada sisi lain terjadi peningkatan jumlah pada jenis cacat ganda. Belum tersedia data terpilah antara laki-laki dan perempuan. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel. 2.91.
Jumlah Penyandang Cacat Dalam Kabupaten Aceh Barat
Menurut Kecamatan Tahun 2014-2016

No	Kecamatan	Jenis Kecacatan				Jumlah
		Tuna Netra	Tuna Rungu-Wicara	Tuna Grahita	Cacat Ganda	
1	Johan Pahlawan	7	1	19	5	32
2	Samatiga	5	10	6	4	25
3	B u b o n	2	1	-	-	3
4	Arongan Lambalek	2	13	13	-	28
5	Woyla	5	3	6	-	14
6	Woyla Barat	-	4	4	7	15
7	Woyla Timur	12	20	7	5	44
8	Kaway XVI	23	18	25	20	86
9	Meureubo	31	10	8	53	102
10	Pante Ceureumen	17	21	-	12	50
11	Panton Reu	10	6	-	-	16
12	Sungai Mas	14	10	3	1	28
Jumlah	2016	128	117	91	107	443
	2015	128	117	91	107	443
	2014	215	158	157	57	430

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat, 2017

Pada Tahun 2015, penduduk miskin penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna daksa/cacat tubuh seperti menderita penyakit *epilepsy* (ayan), kelainan tulang belakang, gangguan pada tulang dan otot, serta mengalami amputasi sebanyak 253 orang atau sebesar 0,34 persen. Kemudian, Cacat Fisik & Metal, Tuna Netra/Buta, Tuna Netra, Rungu & Wicara, dan Tuna Rungu, Wicara, Netra & Cacat Tubuh masing-masing sebesar 0,02 persen. Jenis kecatatan untuk penduduk berpendapatan terendah yang terdata dalam basis data terpadu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92.
**Jenis Kecacatan 40persen Penduduk Berpendapatan Terendah
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015**

Kecamatan	Tuna Daksa/Cacat Tubuh	Cacat Mental Retardasi	Mantan Penderita Gangguan Jiwa	Cacat Fisik & Metal	Tuna Netra/Buta	Tuna Rungu	Tuna Wicara	Tuna Rungu & Tuna Wicara	Tuna Netra & Cacat Tubuh	Tuna Netra,Rungu & Wicara	Tuna Rungu, Wicara & Cacat Tubuh	Tuna Rungu, Wicara, Netra & Cacat Tubuh	Jumlah
Arongan Lambalek	31	8	9	20	13	9	9	1	9			4	113
Bubon	13	4	1	3	6	6	2	7	2	1	2	1	48
Johan Pahlawan	48	25	3	14	10	3	6	3	1		3	6	122
Kaway XVI	24	17	9	29	21	24	7	5	4	4	10	1	155
Meureubo	37	19	13	21	22	4	7	4	11		1		139
Pantai Ceuremen	35	6	12	15	15	19	7	4	9	2	4	2	130
Panton Reu	9	7	1	7	25	15	4	6	2	1	5	3	85
Samatiga	4	13	7	6	8	7	4	2	2	1	1	1	56
Sungai Mas	18	3	6	19	12	10	4	2	4				78
Woyla	10	3	10	10	15	15	5	3	3	1	2		77
Woyla Barat	16	7	2	4	1	4	4	3	3				44
Woyla Timur	8	4	4	2	2	1	2	2	1	5			31
Jumlah	253	116	77	150	150	117	61	42	51	15	28	18	1078
Persentase	0.34	0.15	0.10	0.20	0.20	0.16	0.08	0.06	0.07	0.02	0.04	0.02	

Sumber: TPN2K, 2015.

3. Penyandang Masalah Sosial

Dari 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, adapun jenis masalah sosial yang terdata di Kabupaten Aceh Barat meliputi 4 hal yakni: fakir miskin, yatim/piatu, lanjut usia dan gelandangan. Jumlah penyandang masalah sosial tahun 2015 secara keseluruhan berjumlah 22.104 orang yang terdiri atas 15.031 orang fakir miskin, 3.206 orang yatim/piatu, 3.858 orang lanjut usia dan 9 orang gelandangan. Dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, terlihat bahwa adanya penurunan jumlah PMKS sebesar 761 orang dalam setahun terakhir sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2.93.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis Masalah Sosial				Jumlah	
		Fakir- miskin	Yatim Piatu	Lanjut Usia	Gelandangan		
1	Johan Pahlawan	1 929	958	1 138	7	4 032	
2	Samatiga	1 266	129	411	-	1 806	
3	B u b o n	559	137	15	-	711	
4	Arongan Lambalek	1 722	315	206	-	2 243	
5	Woyla	1 992	392	551	-	2 935	
6	Woyla Barat	1 556	83	442	-	2 081	
7	Woyla Timur	875	246	174	-	1 295	
8	Kaway XVI	1 893	284	212	2	2 391	
9	Meureubo	1 639	414	430	-	2 483	
10	Pante Ceureumen	-	-	-	-	-	
11	Panton Reu	1 102	137	78	-	1 317	
12	Sungai Mas	498	111	201	-	810	
Jumlah		2015	15 031	3 206	3 858	9	22 104
		2014	15 566	4 205	3 061	33	22 865

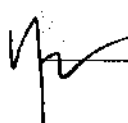
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat, 2017

2.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

1. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Aceh Barat tahun 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi. TPT tahun 2009 sebesar 4,63 persen dengan jumlah pengangguran 3.216 orang dan di tahun 2015 menjadi 6,77 persen dengan jumlah pengangguran 5.975. Berkurangnya jumlah pengangguran di Kabupaten Aceh Barat salah satunya disebabkan karena dibukanya kembali kesempatan kerja di beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Aceh Barat tahun 2015 adalah 63,67 persen dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 88.306 orang. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 sebesar 5,86 persen dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 83.349 orang. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

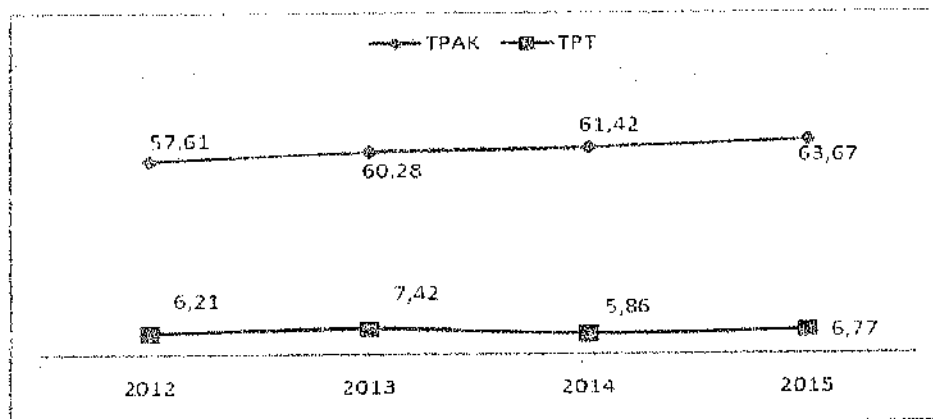


Tabel 2.94.
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2015

Uraian	2012	2013	2014	2015
Jumlah penduduk Usia 15 tahun ke atas	128.639	130.867	136.693	138.685
1. Angkatan Kerja	74.115	78.889	83.349	88.306
a. Bekerja	69.510	73.034	78.462	82.331
b. Pengangguran	4.605	5.855	4.887	5.975
2. Bukan Angkatan Kerja	54.524	51.978	52.334	50.379
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) persen	57,61	60,28	61,42	63,67
Persentase TPT	6,21	7,42	5,86	6,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Gambar 2. 29.
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2015



Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat setiap tahunnya, secara otomatis juga meningkatkan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Aceh Barat. Sama halnya dengan TPAK, jumlah penduduk yang meningkat bisa saja juga meningkatkan tingkat pengangguran yang ada. Namun, salah satu tujuan pembangunan yang dilakukan adalah untuk menurunkan angka pengangguran. Berbagai kebijakan telah diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Dalam 5 tahun ke depan, terdapat berbagai peluang dalam menurunkan angka ini. Secara makro, pesatnya pembangunan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat juga merupakan peluang dalam membuka lapangan usaha, seperti peran Kabupaten Aceh Barat sebagai pusat pendidikan dan kesehatan regional. Disamping itu, kebijakan untuk pemberian modal usaha di tingkat gampong juga diharapkan dapat menekan angka pengangguran yang ada.

2. Angkatan Kerja

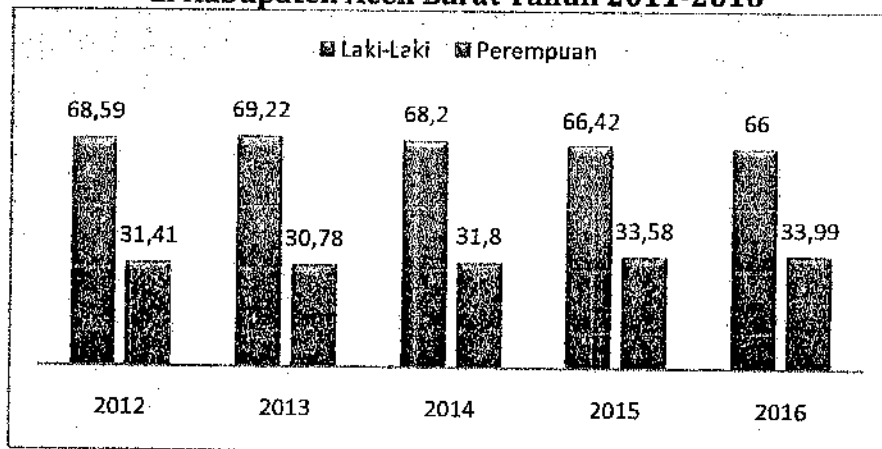
Tidak semua penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja. Sebagian dari penduduk usia kerja ini juga merupakan bukan angkatan kerja. Adapun jumlah angkatan kerja di Kabupaten Aceh Barat secara terpilah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95.
Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016

Tahun	Angkatan Kerja		Persentase	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
2012	50.835	23.280	68,59	31,41
2013	54.609	24.280	69,22	30,78
2014	56.842	26.507	68,20	31,80
2015	58.654	29.652	66,42	33,58
2016	53.783	27.706	66,00	33,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2012-2017

Gambar 2.30.
Perkembangan Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2016



B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan, Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I-IV.

Tabel 2.96.
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2013- 2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Pekerja perempuan di pemerintah	3.267	3.271	3.458	3.367
2	Jumlah PNS (Laki-Laki dan Perempuan)	5.854	5.876	6.145	5.896
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	56 persen	56 persen	56 persen	57 persen

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2014-2017

Jika dilihat dari tabel diatas, ternyata jumlah PNS perempuan dari tahun 2013 sampai dengan 2016 lebih banyak dibanding laki-laki, pada tahun 2016 PNS perempuan berjumlah 3.367 orang sedangkan jumlah pegawai laki-laki hanya berjumlah 2.529. Hal ini salah satunya disebabkan tingginya kebutuhan PNS di bidang pendidikan dan kesehatan yang biasanya diisi oleh kaum hawa.

2. Rasio KDRT

Kejadian KDRT di Kabupaten Aceh Barat yang dilaporkan dan tercatat pada tahun 2016 sejumlah 51 kejadian dan seluruh kasus yang terjadi telah berhasil diselesaikan. Sedangkan rasio KDRT Tahun 2016 sebesar 0,108 persen, turun sebesar 0,004 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,112 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97.
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2013-2016

Kecamatan	2013		2014		2015		2016	
	Terjadi	Diselesaikan	Terjadi	Diselesaikan	Terjadi	Diselesaikan	Terjadi	Diselesaikan
Johan Pahlawan	14	12	8	1	28	28	27	27
Samatiga	0	0	0	0	1	1	1	1
B u b o n	1	1	2	0	1	1	2	2
Arongan Lambalek	0	0	0	0	1	1	0	0
Woyla	0	0	0	0	1	1	3	3
Woyla Barat	0	0	0	0	1	1	0	0
Woyla Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaway XVI	-	0	0	0	2	2	2	2
Meureubo	1	1	3	2	18	18	15	15
Pante Geureumen	0	0	0	0	0	0	0	0
Panton Reu	0	0	0	0	0	0	0	0
Sungai Mas	1	1	1	1	0	0	1	1
Jumlah	17	15	14	4	53	53	51	51
Jml Rumah Tangga	46.247		47.225		47.143		47.143	49.050
Rasio	0,037		0,030		0,112		0,108	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

C. Tanaman Pangan

Tanaman Pangan merupakan salah satu subsektor dalam pertanian yang mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang) serta palawija (jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar). Luas panen padi sepanjang tahun 2016 mencapai 25.476 hektar yang terdiri dari padi sawah sebesar 24.946 hektar dan padi ladang seluas 530 hektar, jumlah ini berkurang dibanding tahun sebelumnya.

Dengan luas panen tersebut dihasilkan produksi padi sebesar 147.553,24 ton yang berasal dari 145.963,24 ton padi sawah dan 1.590 ton padi ladang Jumlah ini juga menurun dibanding tahun 2015. Kecamatan Kaway XVI, Woyla dan Samatiga merupakan daerah penghasil padi sawah terbesar di Aceh Barat Sedangkan untuk padi ladang, Kecamatan Sungai Mas adalah pusatnya.

Sedangkan untuk Palawija, komoditi terbesar di kabupaten ini adalah ubi kayu dan kacang tanah Produksi kedua komoditi ini di tahun 2016 masing-masing sebesar 753,84 ton dan 749,69 ton. Produksi ubi kayu ini mengalami penurunan sama seperti produksi kacang tanah yang mengalami penurunan yang berarti. Sedangkan produktivitas kedua komoditi ini tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.98.
Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang menurut Kecamatan
di Kabupaten Aceh Barat (Hektar) Tahun 2016

Kecamatan	Padi Sawah	Padi Ladang
Johan Pahlawan	676	-
Samatiga	2.664	-
Bubon	1.439	-
Arongan Lambalek	2.360	-
Woyla	3.287	-
Woyla Barat	2.186	-
Woyla Timur	1.298	250
Kaway XVI	5.061	-
Meureubo	2.204	-
Pante Ceureumen	1.921	-
Panton Reu	1.046	-
Sungai Mas	804	280
Aceh Barat	24.946	530

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Tabel 2.99.
Produksi Tanaman Padi dan Palawija Menurut Jenis
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2016

Tahun	Produksi (Ton)						
	Padi	Jagung	Kedelai	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Hijau
2012	49.847,00	356,06	19,19	1.249,61	688,73	954,62	14,14
2013	67.734,00	520,28	44,5	1.075,27	716,03	1.662,10	13,19
2014	86.199,00	489,16	151,18	1.553,46	671,74	902,7	37,63
2015	152.058,03	305,98	84,83	1.245,05	277,7	1.007,08	14,4
2016	147.553,24	385,64	2,03	753,84	364,73	749,69	3,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

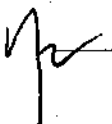
D. Pertanian

Jumlah Permohonan pembuatan sertifikat tanah, pemisahan/pemecahan/penggabungan tanah serta peralihan sertifikat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100.
Jumlah Permohonan Hak Tanah yang diterima
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 - 2016

Tahun	Permohonan Sertifikat	Pemisahan/Pemecahan/penggabungan Tanah	Peralihan Sertifikat
2013	902	161	943
2014	222	198	963
2015	953	199	989
2016	296	148	780

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017



E. Lingkungan Hidup

Capaian Realisasi indikator bidang lingkungan hidup dari tahun 2012 – 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Dari tabel dapat dilihat bahwa capaian indikator persentase penanganan sampah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini didukung dengan pengadaan sarana dan prasarana persampahan yang terus dipenuhi agar menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas sampah.

Tabel 2.101.
Capaian Realisasi Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	0	32	32	32	32
2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	0	6	6	6	6
3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100 persen	57,89 persen	60 persen	57 persen	75 persen
4	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	0	0	0	14 Kasus	10 Kasus
5	Timbulan sampah yang ditangani	0	60	65	67	70
6	Persentase cakupan area pelayanan	0	0	0	0	75
7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	30	35,25	52,3	58,7	59,54

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, 2017

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada tahun 2016 ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan 93,145 lembar akta kelahiran, angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya hanya 5.589 lembar. Peningkatan yang sangat signifikan ini disebabkan karena adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah bahwa setiap anak harus memiliki akta kelahiran. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102.
Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Standar Nasional per Kecamatan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 – 2016

Kecamatan	Tahun		
	2014	2015	2016
Johan Pahlawan	2.534	1.702	32.279
Samatiga	407	382	7.515
Bubon	186	179	3.521
Arongan Lambalek	409	475	4.627
Woyla	299	291	5.198
Woyla Barat	180	202	2.569
Woyla Timur	120	101	2.125
Kaway XVI	602	726	9.783



Kecamatan	Tahun		
	2014	2015	2016
Meureubo	950	854	16.544
Pante Ceureumen	428	355	4.243
Panton Reu	194	188	2.446
Sungai Mas	99	134	2.295
Jumlah	6.408	5.589	93.145

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Sedangkan untuk penerbitan akta kematian, pada tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada mengeluarkan sebanyak 130 lembar, angka ini meningkat dari tahun 2015 yang hanya sebanyak 86 lembar. Jika dilihat berdasarkan penerbitan di setiap kecamatan, kecamatan yang paling banyak mengusulkan pembuatan akta kematian adalah Kecamatan Johan Pahlawan dengan jumlah 69 lembar, dan kecamatan yang sama sekali tidak mengusulkan pembuatan akta kematian adalah Kecamatan Woyla Timur. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103.
Jumlah Penerbitan Akta Kematian per Kecamatan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 - 2016

Kecamatan	Tahun		
	2014	2015	2016
Johan Pahlawan	95	49	69
Samatiga	7	13	19
Bubon	0	0	3
Arongan Lambalek	2	0	1
Woyla	1	4	2
Woyla Barat	0	1	1
Woyla Timur	1	1	0
Kaway XVI	16	7	16
Meureubo	18	8	14
Pante Ceureumen	9	2	2
Panton Reu	0	1	1
Sungai Mas	1	0	2
Jumlah	150	86	130

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Tabel 2.104.
Jumlah Penerbitan KTP Standar Nasional Per Kecamatan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 - 2016

Kecamatan	Tahun		
	2014	2015	2016
Johan Pahlawan	3.027	3.379	2.794
Samatiga	435	423	323
Bubon	146	179	158
Arongan Lambalek	357	315	219
Woyla	326	411	288
Woyla Barat	180	164	146
Woyla Timur	117	165	131
Kaway XVI	776	714	528
Meureubo	1.543	1.412	1.095
Pante Ceureumen	695	361	273
Panton Reu	215	150	133
Sungai Mas	99	91	70
Jumlah	7.916	7.764	6.158

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Sedangkan untuk data kepemilikan akte kelahiran untuk penduduk berpendapatan terendah berdasarkan basis data terpadu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.105.
Kepemilikan Akte Kelahiran oleh 40persen Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Kecamatan	Memiliki Akte Kelahiran
Arongan Lambalek	1,422
Bubon	630
Johan Pahlawan	2,532
Kaway XVI	2,638
Meureubo	2,326
Pantai Ceuremen	1,436
Panton Reu	682
Samatiga	773
Sungai Mas	263
Woyla	920
Woyla Barat	515
Woyla Timur	362
Jumlah	14,499

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Jumlah penduduk miskin yang sudah memiliki akte kelahiran pada tahun 2015 sebanyak 14.499 orang, masih terdapat sebanyak 5.443 orang yang belum memiliki akte kelahiran.

G. Perhubungan

1. Perhubungan Darat

Sistem pergerakan transportasi darat yang ada yaitu sistem pergerakan transportasi internal wilayah Kabupaten Aceh Barat yaitu pergerakan yang melayani cakupan wilayah secara internal. Pergerakan yang menghubungkan interaksi antara kawasan pedesaan dan perkotaan, serta dari pusat-pusat sentra kegiatan skala desa menuju simpul kegiatan pelayanan skala kecamatan dan antar kecamatan menuju pusat kegiatan skala regional kabupaten; Sistem pergerakan transportasi eksternal (intra regional) wilayah Kabupaten Aceh Barat yaitu pergerakan yang melayani cakupan wilayah secara intra regional wilayah umumnya untuk angkutan umum dilayani oleh kendaraan L-300 (angkutan orang) dan berbagai jenis truk untuk angkutan barang. Pergerakan yang menghubungkan interaksi antara simpul kecamatan dan Kabupaten menuju wilayah diluar Kabupaten Aceh Barat (kabupaten tetangga dan ibukota provinsi) baik ibukota Provinsi Aceh dan Sumut.

Sistem transportasi dipengaruhi oleh aktivitas penduduk dan akan berpengaruh pada penciptaan aktivitas di sepanjang jalur jalan yang memiliki aksesibilitas yang tinggi, sementara berkembangnya permukiman memberikan bangkitan lalu lintas dengan model yang berbeda dan akan menimbulkan permasalahan lalu lintas dikemudian hari terutama keberadaan persimpangan. Saat ini karena volume yang ada tidak terlalu besar maka kegiatan pengaturan hanya dilakukan oleh petugas.

Ada beberapa faktor yang menjadi karakteristik dasar pergerakan lalu lintas kota-kota di wilayah Aceh Barat: Faktor peruntukan lahan dan perkembangan Tata Guna Lahan yang akan datang dan perkembangan perkotaan; Karakteristik Sosial Ekonomi dari penduduk yang melakukan perjalanan; Sistem dan Jumlah angkutan lokal yang melayani. Sistem transportasi jalan raya dengan jenis angkutan yang digunakan adalah angkutan

pribadi dan umum. Untuk pergerakan angkutan umum skala regional yaitu dilakukan dengan menggunakan Bus 3/4 dan Angkutan L-300. Sedangkan angkutan barang yang melintasi wilayah ini baik dari tujuan Banda Aceh – Calang – Melaboh – Jeuram terus menuju Aceh Singkil, umumnya berupa truk besar dan sedang dan kendaraan bak terbuka, angkutan ini melakukan perlintasan maupun sebagai angkutan pemasok kebutuhan pasar lokal. Angkutan barang yang biasa melalui wilayah ini merupakan angkutan sembako dan material bangunan.

Pola pergerakan transportasi eksternal (Aceh Barat) lebih dikenal dengan pergerakan regional dilayani oleh beberapa moda angkutan yang digunakan untuk melayani kegiatan masyarakat berupa Bus besar, Bus sedang dan L-300. Pergerakan yang melintasi dalam Kota Meulaboh didominasi oleh angkutan penumpang. Bila meninjau dari kegiatan masyarakat dikaitkan dengan kepadatan volume jalan maka hanya pada waktu-waktu tertentu beberapa ruas jalan mengalami kepadatan. Kepadatan yang dihasilkan dari besarnya volume tidak dalam waktu yang cukup lama dan tidak menyebabkan kendaraan berhenti total. Karena kota Meulaboh merupakan wilayah dengan pelayanan kabupaten maka ada beberapa kegiatan pelayanan yang akan berkembang di Kota Meulaboh dan dapat memicu pergerakan, diantaranya : Kantor-kantor pelayanan seperti Kantor Bupati, Kantor pelayanan Telkom, PDAM, Polres, Kantor Kodim dan kantor-kantor dinas pemerintahan; Sekolah : Perguruan tinggi, SMU/SMK/MA Negeri dan Swasta, SLTPN/MTsN dan Swasta, SD / MI Negeri dan Swasta, TK dan Madrasah; Pelayanan Jasa : Perdagangan regional (pertokoan dan pasar), kantor pos, bank dan pelayanan jasa lainnya.

Pergerakan regional dilayani oleh jalan dari Arteri Primer dihubungkan ke Kolektor Primer yang menghubungkan antar kecamatan atau kecamatan ke kabupaten/kota misalnya kegiatan yang ada dikota-kota di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Diharapkan pergerakan ini membentuk suatu konstelasi pergerakan. Pelayanan Internal atau pergerakan Lokal melayani pergerakan dari Pusat Kota ke tiap Desa dengan kepadatan lalu lintas yang rendah, ini dipengaruhi oleh penggunaan lahan di wilayah pedesaan.

Tabel 2.106.
Tingkat Mobilitas Orang/Barang Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2015

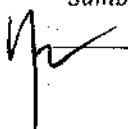
No	Tahun	Tingkat mobilitas orang / barang (arus penumpang angkutan umum berdasarkan skala pergerakan regional yang melayani trayek AKDP & AKAP)					
		Laki - laki	(persen)	Perempuan	(persen)	Jumlah	(persen)
1	2013	50.426	61,00	32.239	39,00	82.665	100,00
2	2014	50.633	59,00	35.185	41,00	85.818	100,00
3	2015	33.934	40,01	50.879	59,99	84.813	100,00

Sumber : UPTD Terminal Kabupaten Aceh Barat, 2016

Tabel 2.107.
**Tingkat Mobilitas Orang / Barang yang Dilayani oleh Angkutan Pedesaan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014-2015**

No	Trayek	Tingkat Mobilitas Orang / Barang Arus Penumpang Angkutan Umum Berdasarkan Skala Pergerakan Regional Yang Melayani Trayek Angkutan Pedesaan (Angdes)					
		Laki - laki	(persen)	Perempuan	(persen)	Jumlah	(persen)
1	2014	35.868	61,00	22.932	39,00	58.800	100,00
2	2015	37.044	60,00	24.696	40,00	61.740	100,00

Sumber : UPTD Terminal Kabupaten Aceh Barat, 2016



2. Perhubungan Laut

Prasarana perhubungan laut berupa pelabuhan umum, pelabuhan Jeti dan pelabuhan penyeberangan serta pelabuhan khusus yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat. Pelabuhan umum dan pelabuhan jeti digunakan sebagai sarana transportasi barang dari dan/atau ke Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan untuk melayani penumpang dan barang Meulaboh – Sinabang (Simeulue) digunakan pelabuhan penyeberangan.

Tabel 2.108.

Arus Penumpang pada Pelabuhan Umum Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014

Tahun	Tingkat mobilitas orang / barang (arus penumpang angkutan umum berdasarkan skala pergerakan regional)					
	Laki - laki	(persen)	Perempuan	(persen)	Jumlah	(persen)
2014	1.170	65,00	650	35,00	1.800	100,00

Sumber : Dishubtel Kabupaten Aceh Barat, 2015

3. Perhubungan Udara

Fasilitas bandar udara yang terdekat dengan wilayah Kabupaten Aceh Barat yaitu Bandar udara, yaitu Bandar Cut Nyak Dhien yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya yang dahulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Prasarana perhubungan udara ini yang melayani penerbangan umum/sipil yang melayani rute penerbangan Nagan Raya – Medan - Jakarta.

H. Komunikasi dan Informatika

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Sedangkan jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

1. Jumlah Jaringan Komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Pada Tahun 2016 di Kabupaten Aceh Barat untuk jaringan telepon stasioner dilayani oleh PT. Telkom dan untuk jaringan telepon genggam dilayani oleh 2 buah operator yaitu Telkomsel dan XL.

Tabel 2.109.

Jaringan Komunikasi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2016

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah jaringan telepon genggam	3	3	5	3	2	2
2	Jumlah jaringan telepon stasioner	1	1	1	1	1	1
3	Total jaringan komunikasi	4	4	6	4	3	3

Sumber : Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Aceh Barat, 2017

Sedangkan perkembangan pengguna HP/Telepon di Kabupaten Aceh Barat dari Tahun 2012 sampai dengan 2016 terus meningkat, hal ini disebabkan oleh banyaknya produk HP/Telepon Genggam yang ditawarkan produsen saat ini sangat banyak dengan harga yang relatif dapat terjangkau oleh masyarakat, sehingga dapat di beli oleh seluruh lapisan masyarakat.



Tabel 2.110.
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2012 - 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	75,00	80,00	82,00	83,00	85,00

Sumber : Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Aceh Barat, 2017

2. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah.

Tabel 2.111.
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	3	3	3	3	3
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	5	7	9	7	5
3	Total jenis surat kabar(1+2)	8	10	12	10	8

Sumber : Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Aceh Barat, 2017

I. Keluarga Berencana

Program yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas keluarga adalah Program Kependudukan Keluarga Berencana. Pembangunan Keluarga atau lebih dikenal dengan singkatan KKBPK. Program KKBPK mempunyai lima kelompok binaan yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK/R) dan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112.
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana
Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	KKB	PPKBD
Johan Pahlawan	19	21
Samatiga	3	32
Bubon	1	17
Arongan Lambalek	2	25
Woyla	3	42
Woyla Barat	1	24
Woyla Timur	1	26
Kaway XVI	2	42
Meureubo	4	26
Pante Ceureumen	1	25
Panton Reu	1	19
Sungai Mas	1	18
Jumlah	39	317

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Tabel 2.113.

Jumlah Remaja Usia 15 – 24 Tahun yang Mendapat Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi, HIV/AIDS, dan Keluarga Berencana Menurut Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Penyuluhan Kespro	Penyuluhan HIV/AIDS	Penyuluhan KB
Johan Pahlawan	1.025	1.025	1.025
Samatiga	304	304	304
Bubon	75	75	75
Arongan Lambalek	65	65	65
Woyla	71	71	71
Woyla Barat	43	43	43
Woyla Timur	35	35	35
Kaway XVI	135	135	135
Meureubo	285	285	285
Pante Ceureumen	42	42	42
Panton Reu	34	34	34
Sungai Mas	25	25	25
Jumlah	2.139	2.139	2.139

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Kesehatan reproduksi ikut dipengaruhi oleh keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS) tersebut dalam penggunaan alat kontrasepsi. Pada tahun 2016, terdapat 23.215 PUS yang menggunakan alat kontrasepsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114.

Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

NO	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif			
			IUD	MOW	MOP	Kondom
1	Johan Pahlawan	8.399	258	164	2	964
2	Samatiga	1.983	40	10	-	267
3	Bubon	1.620	9	4	-	4
4	Arongan Lambalek	2.165	19	-	-	112
5	Woyla	3.535	28	16	-	101
6	Woyla Barat	1.735	35	1	-	97
7	Woyla Timur	1.367	-	-	-	58
8	Kaway XVI	4.269	174	3	-	500
9	Meureubo	4.403	168	5	-	360
10	Pante Ceureumen	953	7	2	-	4
11	Panton Reu	1.102	32	-	-	288
12	Sungai Mas	733	-	-	-	-
	Aceh Barat	32.264	770	205	2	2.755

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Sedangkan penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 untuk data keluarga berencana sesuai dengan basis data terpadu dapat dilihat tabel berikut.



Tabel 2.115.
**Kepesertaan KB pada 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015**

Kecamatan	Ya	Tidak
Arongan Lambalek	419	797
Bubon	229	308
Johan Pahlawan	727	685
Kaway XVI	1,033	964
Meureubo	697	604
Pantai Ceuremen	653	673
Panton Reu	423	431
Samatiga	277	445
Sungai Mas	102	228
Woyla	805	900
Woyla Barat	282	507
Woyla Timur	169	388
Jumlah	5,816	6,930
Persentase	29.16	34.75

Sumber : TPN2K, 2015

Tabel 2.116.
**Alasan Tidak mengikuti KB pada 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015**

Kecamatan	Sedang Hamil	Alasan Fertilitas	Tidak Menyetujui KB	Tidak Tahu tentang KB	Takut Efek Samping	Pelayanan KB Jauh	Tidak Mampu / Mahal	Ingin Punya Anak	Lainnya	NULL	Jumlah
Arongan Lambalek	40	133	38	15	15	3	5	454	94	1,15	1,947
Bubon	13	2	17	14	70		7	100	85	504	812
Johan Pahlawan	54	74	27	3	134	1	2	218	172	1,389	2,074
Kaway XVI	67	2	4	4	76		9	467	335	2,206	3,17
Meureubo	44	38	10	1	61	1	2	195	252	1,452	2,056
Pantai Ceuremen	52	30	19	21	65	1	9	404	72	1,362	2,035
Panton Reu	29	8	10	9	47		3	265	60	840	1,271
Samatiga	21	13	7	10	75		1	179	139	791	1,236
Sungai Mas	9	5	3	2	14	1	2	139	53	336	564
Woyla	49	10	19	25	98	1	47	472	179	1,697	2,597
Woyla Barat	21	5	27	25	39	3	2	180	205	806	1,313
Woyla Timur	19	5	51		6		1	197	109	479	867
Jumlah	418	325	232	129	700	11	90	3,27	1,755	13,01	19,942
Persentase	2.10	1.63	1.16	0.65	3.51	0.06	0.45	16.40	8.80	65.25	100.00

Sumber : TPN2K, 2015



Jumlah kepesertaan KB penduduk miskin pada Tahun 2015 sebanyak 5.816 orang atau sebesar 29,16 persen. Dengan jumlah kepesertaan terbanyak berada di Kecamatan Kaway XVI sebanyak 1.033 orang dan peserta yang paling sedikit berada di Kecamatan Sungai Mas sebanyak 102 orang. sedangkan jumlah penduduk yang belum mengikuti program KB sebanyak 6.930 atau sebesar 34,75 persen. Ketidakikutsertaan ini dikarenakan dengan berbagai alasan yang disampaikan seperti sedang hamil sebesar 418 orang atau 2,10 persen, fertilitas sebanyak 325 orang atau 1,63 persen dan berbagai macam alasan lainnya.

Tabel 2.117
Jenis KB yang digunakan pada 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Kecamatan	IUD	MOW	MOP	Implant	Suntik	Pil	Kondom	Tradisional
Arongan Lambalek	11	1	1	3	344	23	6	30
Bubon	3	4	1	26	187	2		6
Johan Pahlawan	37	8	1	29	502	103	4	43
Kaway XVI	7	7	1	20	822	145		31
Meureubo	18			39	523	81	1	35
Pantai Ceuremen	4	2	1	10	552	61		23
Panton Reu	4	3		6	400	3		7
Samatiga	10	3		8	220	11	2	23
Sungai Mas	1		2		98	1		
Woyla	47	4		18	702	30	1	3
Woyla Barat	6	1	1	3	262	2		7
Woyla Timur				5	156	5		3
Jumlah	148	33	8	167	4.768	467	14	211
Persentase	0.74	0.17	0.04	0.84	23.91	2.34	0.07	1.06

Sumber: TPN2K, 2015

Jenis kontrasepsi yang banyak digunakan oleh penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat adalah jenis kontrasepsi suntik sebanyak 4.768 orang atau 23,91 persen, sedangkan jenis kontrasepsi yang sedikit digunakan adalah MOP sebanyak 8 orang atau 0,17 persen.

J. Kepemudaan dan Olah Raga

Pada tahun 2016 capaian indikator kepemudaan dan olahraga, seperti persentase organisasi pemuda yang aktif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus meningkat dari tahun 48 persen menjadi 55 persen.

Tabel 2.118.
Capaian Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2014 s.d 2016

NO	Uraian	2014	2015	2016
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	48	55	55
2	Persentase wirausaha muda	0	0	0,167
3	Cakupan pembinaan olahraga	13,04	17,39	13,04
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	30	60	60
5	Cakupan pembinaan atlet muda	24	24	24
6	Jumlah atlet berprestasi	2	0	7
7	Jumlah prestasi olahraga	11	0	9

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, 2017

K. Kebudayaan dan Adat Istiadat

Jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, kegiatan seni budaya yang ada saat ini belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini belum tersedia sebuah gedung kesenian

sebagai tempat atraksi budaya atau tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesenian di Kabupaten Aceh Barat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119.
**Jumlah Gampong Yang Melaksanakan Peradilan Adat
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010-2016**

No	Gampong	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pembinaan Adat	322	322	322	322	322
2	Pelestarian Adat	322	322	322	322	322
3	Reusam Gampong	100persen	100persen	100persen	100persen	100persen

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, 2017

Tabel 2.120.
Perkembangan Seni dan Budaya Kab. Aceh Barat Tahun 2010-2016

No	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah grup kesenian	17	17	18	19	19
2	Jumlah gedung kesenian	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, 2017

Tabel 2.121.
**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016
Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat**

No	Kecamatan	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian
1	Johan Pahlawan	20	-
2	Samatiga	4	-
3	B u b o n	3	-
4	Arongan lambalek	2	-
5	W o y l a	1	-
6	Woyla Barat	1	-
7	Woyla Timur	-	-
8	Kaway XVI	5	-
9	Meureubo	18	-
10	Pante Ceureumen	1	-
11	Sungai Mas	-	-
12	Panton Rheu	2	-
	Jumlah	57	

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, 2017

L. Perpustakaan

Data pengunjung perpustakaan memperlihatkan bahwa jumlah pengunjung perempuan lebih banyak dari pada pengunjung laki-laki. Persentase pengunjung laki-laki masih lebih dari 30 persen. Bahkan untuk keseluruhan jumlah pengunjung selama kurun waktu lima tahun terakhir, persentase jumlah pengunjung laki-laki mencapai 39 persen dari keseluruhan jumlah pengunjung perpustakaan. Hal ini bisa saja menunjukkan minat baca perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

Tabel 2.122.
Data Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Tahun	Jenis Kelamin				Jumlah (Orang)
	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase	
2011	5.708	40 persen	8.473	60 persen	14.181
2012	6.451	43 persen	8.476	57 persen	14.927



Tahun	Jenis Kelamin				Jumlah (Orang)
	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase	
2013	8.354	37 persen	13.927	63 persen	22.281
2014	8.519	36 persen	15.303	64 persen	23.822
2015	10.144	41 persen	14.433	59 persen	24.577
Jumlah	39.176	39 persen	60.612	61 persen	99.788

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Aceh Barat, 2016

Tabel 2.123.
Anggota Perpustakaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Tahun	Jenis Kelamin				Jumlah (Orang)
	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase	
2011	18	9 persen	185	91 persen	203
2012	44	23 persen	144	77 persen	188
2013	48	23 persen	158	77 persen	206
2014	39	22 persen	140	78 persen	179
2015	57	23 persen	186	77 persen	243
Jumlah	206	20 persen	813	80 persen	1019

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Aceh Barat, 2016

Dari data pada tabel di atas, terlihat bahwa jumlah anggota perpustakaan yang berjenis kelamin perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Jumlah anggota perpustakaan laki-laki masih kurang dari 30 persen. Namun demikian bisa dilihat bahwa prosentase tersebut meningkat dari tahun ke tahun walaupun masih jauh dari harapan. Hal ini memerlukan survey lebih lanjut mengapa perempuan memiliki minat lebih besar untuk menjadi anggota perpustakaan dibandingkan laki-laki dikaitkan juga dengan angka melek huruf yang ada. Dikaitkan dengan tingkat kunjungan, perbandingan tingkat kunjungan laki-laki lebih baik daripada jumlah anggota perpustakaan dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 2.124.
Data Pengguna Layanan Perpustakaan Keliling di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Tahun	Jenis Kelamin				Jumlah (Orang)
	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase	
2013	2.502	45 persen	3.036	55 persen	5.538
2014	3.715	42 persen	5.160	58 persen	8.875
2015	4.663	50 persen	4.649	50 persen	9.312
Jumlah	10.880	46 persen	12.845	54 persen	23.725

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Aceh Barat, 2016

Ditinjau dari tampilan data Pengguna Layanan Perpustakaan Keliling yang difokuskan kepada siswa Sekolah Dasar Sederajat di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Barat, terlihat bahwa perbandingan pengguna layanan laki-laki dan perempuan cukup seimbang. Permasalahan yang dihadapi adalah jumlah mobil dan petugas layanan perpustakaan yang masih terbatas dibandingkan kelompok sasaran yang harus dilayani menyebabkan akses terhadap koleksi perpustakaan keliling jadi terbatas yakni satu mobil untuk satu kali layanan. Hal ini menyebabkan sering kali murid perempuan mengalami kesulitan harus bersaing dengan murid laki-laki dalam mengakses buku yang akan dibaca.

Perlu dilakukan penambahan jumlah mobil dan petugas layanan perpustakaan keliling sehingga satu kali layanan dapat menggunakan dua unit mobil sehingga masing-masing kelompok pengguna dapat memanfaatkan layanan dengan optimal.

Tabel 2.125.
Data Pengelola Perpustakaan Gampong Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Tahun	Jenis Kelamin				Jumlah (Orang)
	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase	
2012	55	87 persen	8	13 persen	63
2013	55	87 persen	8	13 persen	63
2014	58	83 persen	12	17 persen	70
2015	88	62 persen	53	38 persen	141

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Aceh Barat, 2016

Dari tampilan data di atas, terlihat bahwa pengelola perpustakaan gampong di wilayah Kabupaten Aceh Barat belum seimbang. Hal ini bisa jadi disebabkan karena sebagian besar pengelola perpustakaan gampong khususnya kepala perpustakaannya adalah aparat gampong yang sebagian besar juga adalah laki-laki. Namun demikian, pada tahun 2015 dilakukan penataan struktur pengelola perpustakaan gampong yang mensyaratkan minimal 3 orang pengelola, terlihat prosentase pengelola perpustakaan gampong perempuan mulai meningkat bahkan mencapai 38 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya di bawah 20 persen. Hal ini bisa jadi disebabkan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Aceh Barat agar melibatkan perempuan dalam pengelolaan perpustakaan gampong.

M. Kearsipan

Realisasi indikator kearsipan yang telah dicapai selama 4 (empat) tahun terakhir untuk indikator pengelolaan arsip secara baku terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.126.
Realisasi Indikator Kearsipan Tahun 2012 - 2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Pengelolaan arsip secara baku (persen)	23 persen	29 persen	35 persen	46 persen	56
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Aceh Barat, 2016

N. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Pada Tahun 2016, persentase koperasi aktif meningkat dari tahun 2015 dari 54,90 persen menjadi 62,50 persen. Secara lebih pada tabel berikut.

Tabel 2.127.
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No	Uraian	2015	2016
1	Jumlah koperasi aktif	196	205
2	Jumlah koperasi	357	328
3	Persentase koperasi aktif	54,90	62,50

Sumber : Dinas Perdagangan, 2017

2. Persentase UKM non BPR/LKMUKM

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

Persentase UKM non BPR/LKM sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan, di Tahun 2016 persentase UKM non BPR/LKM sebesar 50 persen, angka ini meningkat sebesar 5 persen dari tahun 2015 sebesar 45 persen. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.128.
Persentase UKM non BPR/LKM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah seluruh UKM	285	285	288	285
2	Jumlah BPR/LKM	5	8	12	15
3	Persentase UKM non BPR/LKM	35	40	45	50

Sumber : Dinas Perdagangan, 2017

0. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Pertumbuhan ekonomi identik dengan berapa besar investasi yang masuk dan berapa banyak jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut menanamkan modalnya di suatu daerah berikut serapan tenaga kerja local dan asing, untuk Kabupaten Aceh Barat jumlah total PMDN dan PMA Tahun 2016 terdapat sebanyak 15 investor.

Tabel 2.129.
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Investor (PMDN, PMA)	14	14	15	15	15

Sumber : Bagian Ekonomi Setdakab Aceh Barat, 2017

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dari tahun ke tahun nilai investasi semakin meningkat seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.130.
Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN/PMA Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2012- 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA (Milyar Rupiah)	647,70	2.253,01	2.949,36	4.171,16	3,808

Sumber : Bagian Ekonomi Setdakab. Aceh Barat,2017

P. Syariat Islam

1. Jumlah Masjid dan Meunasah

Jumlah masjid dan meunasah yang ada di Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 berjumlah 471 unit yang terdiri atas 303 unit masjid dan 168 unit meunasah. Untuk melihat sebaran masjid dan meunasah menurut kecamatan, dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.131.
Jumlah Masjid dan Meunasah menurut Kecamatan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No.	Kecamatan	Mesjid	Meunasah	Jumlah
1	Johan Pahlawan	32	51	83
2	Samatiga	31	16	47
3	Bubon	16	7	23
4	Arongan lambalek	30	9	39
5	Woyla	32	9	41
6	Woyla Barat	21	3	24
7	Woyla Timur	17	23	40
8	Kaway XVI	40	3	43
9	Meureubo	28	30	58
10	Pante Ceureumen	27	5	32
11	Panton Rheu	19	3	22
12	Sungai Mas	10	9	19
	Jumlah	303	168	471

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

2. Jumlah Pondok Pesantren, Santri dan Teungku

Pesantren yang ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 berjumlah 81 unit dengan total jumlah santri sebanyak 8.309 orang dibawah bimbingan 942 orang teungku. Untuk dapat melihat rincian jumlah pondok pesantren, santri dan teungku menurut kecamatan, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.132.
Jumlah Pondok Pesantren, Santri dan Teungku
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No.	Kecamatan	Pesantren	Santri	Teungku
1	Johan Pahlawan	13	1.728	188
2	Samatiga	5	670	75
3	Bubon	5	259	60
4	Arongan lambalek	19	663	68
5	Woyla	10	788	67
6	Woyla Barat	4	170	9
7	Woyla Timur	5	244	25
8	Kaway XVI	12	1.806	226
9	Meureubo	13	1.554	167
10	Pante Ceureumen	3	219	25
11	Panton Rheu	2	144	20
12	Sungai Mas	2	64	12
	Jumlah	81	8.309	942

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

3. Jumlah TKQ/TPQ dan Santri

Jumlah TKQ/TPQ yang ada di Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 berjumlah 675 unit dengan jumlah santri sebanyak 15.750 dibandingkan pada tahun 2011 berjumlah 321 unit yang tersebar dalam 12 kecamatan dengan jumlah santri sebesar 12.045 orang sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.133.
Jumlah TKQ/TPQ dan Santri di Kab. Aceh Barat Tahun 2015

No.	Kecamatan	TKQ/TPQ	Santri
		2015	2015
1	Johan Pahlawan	121	2.771
2	Samatiga	35	1.229
3	Bubon	47	1.594
4	Arongan lambalek	45	1.943
5	Woyla	43	1.220
6	Woyla Barat	48	1.934
7	Woyla Timur	42	139
8	Kaway XVI	120	1.186
9	Meureubo	72	1.697
10	Pante Ceureumen	40	776
11	Panton Rheu	37	857
12	Sungai Mas	25	404
	Jumlah	675	15.750

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

4. Pelaksanaan Syariat dan Syiar Islam

Dalam hal pelaksanaan syariat dan syiar Islam, hampir semua aspek telah responsif gender. Untuk tenaga tajhiz mayat, jumlah tenaga laki-laki dan perempuan sudah seimbang yakni masing-masing 1 (satu) orang untuk setiap gampongnya. Tenaga da'i dan da'iah, qari dan qariah, guru TPA/TPQ, pimpinan wirid yasin dan pondok pesantren yang terpisah antara laki-laki dan perempuan sudah tersedia. Hanya saja dalam kapasitas sumberdaya tim ahli rukyatul hilal dan pimpinan kelompok majelis taklim, belum ada yang dipimpin oleh perempuan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2.134.
Pelaksanaan Syariat dan Syiar Islam di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No	Tolak Ukur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tingkat kapasitas sumberdaya tenaga tajhiz mayat	321	321	642
2	Tingkat kapasitas tenaga da'i dan da'iah yang profesional dan berkompeten	38	10	48
3	Tingkat kapasitas profesionalisme dan kompetensi qari dan qariah	24	21	45
4	Jumlah guru TPA/TPQ	400	100	500
5	Tingkat kapasitas sumberdaya tim ahli rukyatul hilal	16	0	16
6	Jumlah pimpinan kelompok majelis taklim	321	0	321
7	Jumlah pimpinan kelompok wirid yasin	8	313	321
8	Jumlah Dayah			81 dayah
9	Jumlah Dayah Tersertifikasi			40 dayah
10	Jumlah dayah khusus (santri laki-laki/perempuan)	2 dayah	2 dayah	4 dayah
11	Jumlah dayah gabungan (santri laki-laki dan perempuan)			77 dayah
12	Jumlah Hafiz Al-Qur'an	6 orang	1 orang	7 orang

Sumber: Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kab. Aceh Barat, 2017

Tabel 2.135.
Data Dayah/Pesantren beserta Jumlah santri dan Guru di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

No	Nama Lembaga	Nama Pimpinan	Alamat		Jumlah Santri			Jumlah Guru		
			Desa	Kecamatan	L	P	Jlh	L	P	Jlh
1	Dayah Inti Nurul Falah	Drs. Adami, MA	Seuneubok	Johan Pahlawan	132	144	276	13	10	23
2	Dayah Darussa'adah	Ustz. Hj. Syarifah	Leuhan	Johan Pahlawan	140	145	285	20	10	30
3	Dayah Babussalam	Tgk. Muslim Has	Ujong Baroh	Johan Pahlawan	90	123	213	11	15	26
4	Dayah Istiqamatuiddin Darussunnah	Tgk. Mawardi	Suak Nie	Johan Pahlawan	70	0	70	14	0	14
5	Dayah Serambi Mekkah	Tgk. H. At Tarmizi Hamid	Blang Beurandang	Johan Pahlawan	246	280	526	25	7	32
6	Dayah Darul Huda	Tgk. M. Nazir Assami	Lapang	Johan Pahlawan	60	10	70	7	0	7
7	Dayah Baitul Muttaqin	Tgk. Mawardi, TMD	Leuhan	Johan Pahlawan	20	0	20	2	0	2
8	Dayah Al-Fatah	Tgk. Umar	Seuneubok	Johan Pahlawan	20	35	55	1	1	2
9	Dayah PELMAHA Sirajul Mukhlisin	Tgk. Bukhari	Kampung Belakang	Johan Pahlawan	30	0	30	3	0	3
10	Dayah Miftahul Jannah Hidayatullah	Tgk. Ahmad Syakir, S.Pd.I	Lapang	Johan Pahlawan	10	0	10	3	2	5
11	Dayah Darul Muta'alimin.	Ustz. Hj. Umi Zikriati	Seuneubok	Johan Pahlawan	60	0	60	7	1	8
12	Dayah Modern Bulisc	Tgk. Ustazi, M.Pd.I	Suak Indra puri	Johan Pahlawan	28	30	58	15	10	25
13	Dayah Raudhatul Mubaraqah Darul Munawwarah	Tgk. H. Safwan Ali	Seuneubok	Johan Pahlawan	45	10	55	9	2	11
14	Dayah Aswal Hidayatussalam	Tgk. Hasan Umar	Pasi Jambu	Kaway XVI	57	61	118	10	6	16



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Islami Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel Akuntabel dan Toleranitas*

No	Nama Lembaga	Nama Pimpinan	Alamat		Jumlah Santri			Jumlah Guru		
			Desa	Kecamatan	L	P	Jlh	L	P	Jlh
15	Dayah Madrasah Tarbiyah Islamiyah	Tgk. Nurdin, J	Peunia	Kaway XVI	25	27	52	3	2	5
16	Dayah Darul Faizin	Tgk. Sayuthi Syuib	Alue On	Kaway XVI	85	15	100	10	3	13
17	Dayah Madinatuddiniyah Babussa'adah	Tgk. M. Nasir Usman	Pasi Ara	Kaway XVI	28	43	71	4	2	6
18	Dayah Riyadhus Shalihin	Tgk. Ridwan	Meunasah Ara	Kaway XVI	0	235	235	30	10	40
19	Dayah Safinatun Najah	Tgk. H. Budiman Usni	Meunuang Tanjong	Kaway XVI	44	28	72	3	6	9
20	Dayah Darussalamah	Tgk. Basri Juned	Alue Tampak	Kaway XVI	75	67	142	11	2	13
21	Dayah Serambi Aceh	Tgk. H. Mahmuddin, Us	Meunasah Rayeuk	Kaway XVI	600	0	600	84	0	84
22	Dayah Diniyah Darussalam	Umi Hanisah, S.Ag	Meunasah Buloh	Kaway XVI	60	167	227	3	8	11
23	Dayah Istiqamatuddin Sirajul Huda	Tgk. Abd. Rahman	Padang Mancang	Kaway XVI	19	33	52	5	1	6
24	Dayah Madinatuddiniyah Al-Munawwarah	Tgk. H. Abdurrahman, Lc	Marek	Kaway XVI	103	0	103	14	0	14
25	Dayah Baitul Makmur	Tgk. H. Abu Usman Nurul Fauzi	Alue Lhok	Kaway XVI	20	14	34	5	4	9
26	Dayah Nuuruddaarissalam T Umar	Tgk. Muliadi	Langung	Meureubo	20	8	28	3	3	6
27	Dayah Amanah Al-Amilin	Tgk. Yasri Az Zahidi	Peunaga Pasi	Meureubo	15	22	37	8	2	10
28	Dayah Inti Darul Aitami	Tgk. Salman SAF	Ujong Tanjong	Meureubo	142	256	398	4	12	16
29	Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah	Tgk. Khairul Azhar, S.Ag	Ujong Tanjong	Meureubo	30	35	65	8	0	8
30	Dayah Thariqussalam (Putra)	Tgk. H. Zulfikri, LC	Langung	Meureubo	87	0	87	0	30	30
31	Dayah Darul Hikmah Islamiyah	Tgk. H. Saidi Ansari	Peunaga Rayeuk	Meureubo	301	208	509	18	8	26
32	Dayah Annuwarud Bahissalam	Tgk. M. Nasir Ali	Paya Peunaga	Meureubo	40	0	40	5	1	6
33	Dayah Thariqussalamah (Putri)	Tgk. H. Zulfikri, LC	Gunong Kleng	Meureubo	0	10	10	0	10	10
34	Dayah Darul Hikmah	Tgk. Abd. Rahman, MA	Ujong Drien	Meureubo	85	38	123	6	7	13
35	Dayah Miftahussalam	Tgk. Nasrijal	Peunaga Cut Ujong	Meureubo	10	5	15	0	10	10
36	Dayah Darul Waliyyah	Tgk. Muhammad Azhari, S.Ag	Ranto Panyang	Meureubo	69	49	118	9	5	14
37	Dayah Yayasan Ma'had Tahfidhul Qur'an	Tgk. Sulaiman Ibsa, S. Sos.I	Meureubo	Meureubo	55	49	104	7	7	14
38	Dayah Nurul Hidayah	Tgk. Sanusi	Gunong Kleng	Meureubo	10	10	20	2	2	4
39	Dayah Nurul Hikmah Al-Azizi	Tgk. Madhi, KMC	Teupin Peuraho	Arongan Lambalek	21	17	38	12	2	14
40	Dayah Darul Huda	Tgk. Abdul Rani Adian	Teupin Peuraho	Arongan Lambalek	75	24	99	8	3	11
41	Dayah. Babul Taqwa	Tgk. Asnawi, II	Panton Makmu	Arongan Lambalek	50	16	66	4	4	8



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel dan Inovatif

No	Nama Lembaga	Nama Pimpinan	Alamat		Jumlah Santri			Jumlah Guru		
			Desa	Kecamatan	L	P	Jlh	L	P	Jlh
42	Dayah Babul Ulum	Tgk. Syarifuddin Ibas	Seneubok Teungoh	Arongan Lambalek	22	25	47	2	2	4
43	Dayah Raudhatul Jinan	Tgk. M. Jamil	Kubu	Arongan Lambalek	50	40	90	4	4	8
44	Dayah Bustanul 'Ulum	Tgk. Abd. Razaq	Ujong Simpang	Arongan Lambalek	29	35	64	5	1	6
45	Dayah Darul Mustawa	Tgk. Mawardi	Peulanteu LB	Arongan Lambalek	88	25	113	7	0	7
46	Dayah Babul Khairat	Tgk. Abdul Hamid	Drien Rampak	Arongan Lambalek	41	50	91	7	1	8
47	Dayah Nurul Hilal	Tgk. Bustami Husen, S.Pd.I	Alue Batee	Arongan Lambalek	38	17	55	1	1	2
48	Dayah Darut Thalibin	Tgk. Cut Jailani Puteh	Gunong Panah	Buhon	27	28	55	3	2	5
49	Dayah Nurul Islam	Tgk. Ismail Nur	Kuta Padang	Bubon	52	67	119	11	4	15
50	Dayah Darul Aman	Tgk. H.Abu Usman Nurul Fauzi	Peulanteu	Bubon	0	18	18	24	12	36
51	Dayah Darussalamah	Tgk. Banta Syam	Cot Lada	Bubon	30	17	47	1	1	2
52	Dayah Bustanuthayyibu	Tgk. Zulkifli. IB	Blang Sibeutong	Bubon	18	2	20	2	0	2
53	Dayah Ar-Raudhatun Nabawiyah	Tgk. H. Mustafa Habli, Lc	Mesjid Baro	Samatiga	180	84	264	25	5	30
54	Dayah Darul Huda	Tgk. Cut Sani Fauzi	Reusak	Samatiga	20	0	20	1	0	1
55	Dayah Ashhabul Yatama	Tgk. Adlin, S.Ag	Cot Seumereng	Samatiga	120	53	173	15	0	15
56	Dayah Sabilussalam	Tgk. H. Mukhtaruddin	Deuah	Samatiga	115	48	163	12	2	14
57	Dayah Al-Ihsan	Tgk. Al-Hamidi	Krueng Tinggai	Samatiga	30	20	50	15	0	15
58	Dayah Nahrul Ulum Diniyah Islamiyah	Tgk. Mohd. Negru, MH	Geudong	Sungai Mas	23	20	43	6	2	8
59	Dayah Nurul Mu'arif	Tgk. Kaswadi	Kajeung	Sungai Mas	25	30	55	3	1	4
60	Dayah Miftahul Jannah	Tgk. M. Yunus Thaha	Lueng Jawa	Woyla	80	70	150	7	3	10
61	Dayah Syamsul Fata	Tgk. Muslem	Ie Itam Baroh	Woyla	43	45	88	6	1	7
62	Dayah Nahrul Ulum Diniyah Islamiyah	Tgk. Abdullah, S	Aron Tunong	Woyla	32	28	60	5	0	5
63	Dayah Babul Maghfirah	Tgk. Anshari	Blang Mee	Woyla	20	10	30	3	0	3
64	Dayah Sinar Darussalam	Tgk. Zainal Amin	Cot Lagan	Woyla	43	30	73	5	3	8
65	Dayah Darul Muhtadin	Tgk. Marzuki	Bakat	Woyla	10	15	25	3	2	5
66	Dayah Miftahul Ula	Tgk. Sofyan Alaidin, MK	Ie Itam Tunong	Woyla	27	20	47	5	3	8
67	Dayah Raudhatul Muta'alimin	Tgk. Zainal Abidin	Alue Sikaya	Woyla	45	50	95	4	2	6
68	Dayah Darul Mukhlisin	Tgk. Arman Has	Pasi Aceh	Woyla	30	20	50	5	0	5
69	Dayah Ar-Raudhatul Aw-waliyah	Tgk. Indra Budiman	Drien Mangko	Woyla	110	60	170	7	3	10
70	Dayah Darul Ulum	Tgk. Bakhtiar	Blang Luah	Woyla Timur	20	19	39	5	0	5
71	Dayah	Tgk. Ar-	Blang Makmu	Woyla	35	0	35	2	2	4

No	Nama Lembaga	Nama Pimpinan	Alamat		Jumlah Santri			Jumlah Guru		
			Desa	Kecamatan	L	P	Jlh	L	P	Jlh
	Raudhatul Mukhlisin	Rasyidin		Timur						
72	Dayah Raudhatul Ula	Tgk. Abdur Rafur	Pasi Janeng	Woyla Timur	43	22	65	3	1	4
73	Dayah Raudhatul Ulum Diniyah Islamiyah	Tgk. Abdul Murad, HS	Tangkeh	Woyla Timur	42	25	67	3	3	6
74	Dayah Raudhatul Jannah	Tgk. Ruslan	Seuradeuk	Woyla Timur	25	13	38	4	2	6
75	Dayah Misbahussalam	Ustz.Umi Nurani Manan	Mon Pasong	Woyla Barat	53	54	107	3	2	5
76	Dayah A'Lamul Huda	Tgk. Asnawi . H	Karak	Woyla Barat	33	30	63	3	1	4
77	Dayah Qalbun Mukhlisin	Tgk. Mawardi	Kuala Manyeu	Panton Reu	9	18	27	4	2	6
78	Dayah Bustanul Mu'arif	Tgk. Sabirin Nawi	Mugo Rayeuk	Panton Reu	52	65	117	8	6	14
79	Dayah Istiqamatuddin	Tgk. Maliki	Manjeng	Pantee Ceureumen	27	49	76	4	3	7
80	Dayah Istiqamatuddin Babul Muarif Nurul Hamdi	Tgk. Muhammadin	Tegal Sari	Pantee Ceureumen	32	20	52	6	2	8
81	Dayah Darul Hasanah	Tgk. Hasanuddin Abbas, S.Pd	Pante Ceureumen	Pantee Ceureumen	53	38	91	7	3	10
JUMLAH					4.849	3.494	8.343	652	290	942

Sumber: Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, 2016

Dari 81 dayah yang ada, hanya 2 (dua) pesantren yang memiliki program Hafiz Al Quran, yakni Dayah Bulisch di Gampong Suak Indrapuri dan Dayah Pelma Sirajul Mukhlisin di Gampong Kampung Belakang. Pimpinan dayah/pesantren dari kalangan perempuan berjumlah 4 orang dan laki-laki sebanyak 77 orang. Dari segi jumlah santri lebih banyak santri laki-laki dari pada perempuan. Hal ini disebabkan karena minat belajar laki-laki di pondok pesantren/dayah lebih tinggi dibanding perempuan, mengingat sistem belajar mondok (menginap).

5. Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah

Realisasi penyaluran zakat, infak dan sedekah yang disalurkan Baitul mal di tahun 2016 mencapai 11,877 milyar rupiah Sebanyak 7,255 milyar rupiah diantaranya disalurkan kepada 12,140 fakir dan miskin dan 803 juta rupiah dibagikan kepada fisabilillah Selain itu, 715 juta rupiah diberikan kepada ibnu sabil. Para muallaf di Kabupaten Aceh Barat juga menerimanya dengan jumlah total dana sebesar 118 juta rupiah Sisanya sebesar 2,982 milyar rupiah diinfakkan (1,928 milyar rupiah) dan dibagikan kepada amil (1,055 milyar rupiah).

Tabel 2.136.
Realisasi Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Menurut Kecamatan dan Penerima pada Badan Baitul Mal
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No	Kecamatan	Fakir		Miskin		Fisabilillah		Ibnu Sabil		Muallaf		Gharim		Infaq		Amil		Total	
		Org	Dana	Org	Dana	Org	Dana	Org	Dana	Org	Dana	Org	Dana	Org	Dana	Org	Dana	Org	Dana
1	Johan Pahlawan	924	583.200.000	1558	43.000.000	175	90.000.000	279	225.050.000	31	80.200.000	-	-	1081	7.999.990.872	158	934.163.228	4.206	3.655.604.100
2	Samatiga	471	97.000.000	732	5.000.000	193	59.100.000	41	30.750.000	6	4.200.000	-	-	275	100.000.000	32	12.800.000	1.750	908.850.000
3	Bubon	235	48.200.000	358	90.500.000	116	43.800.000	46	34.500.000	4	2.800.000	-	-	167	59.200.000	17	6.800.000	943	485.800.000
4	Arongan lamhalek	237	49.400.000	388	34.000.000	188	72.000.000	44	33.000.000	5	3.500.000	-	-	310	124.000.000	27	10.800.000	1.199	626.700.000
5	Woyla	471	97.000.000	782	75.500.000	279	100.500.000	77	57.750.000	4	2.800.000	-	-	357	149.700.000	43	17.200.000	2.013	1.100.450.000
6	Woyla Barat	236	48.800.000	362	91.000.000	140	44.400.000	14	10.500.000	1	700.000	-	-	161	55.650.000	24	9.600.000	938	460.650.000
7	Woyla Timur	235	48.200.000	359	95.000.000	155	51.300.000	29	21.750.000	-	-	-	-	168	61.250.000	26	10.400.000	972	487.900.000
8	Kaway XVI	706	45.200.000	1079	84.500.000	330	142.800.000	174	134.250.000	7	13.500.000	-	-	325	151.600.000	43	17.200.000	2.664	1.489.050.000
9	Meureubo	471	97.000.000	842	55.500.000	203	82.500.000	153	121.250.000	11	7.700.000	-	-	475	217.465.000	28	11.200.000	2.183	1.292.615.000
10	Pante Ceureume n	236	148.800.000	358	96.000.000	156	50.400.000	45	33.750.000	1	700.000	-	-	262	100.750.000	25	10.000.000	1.083	540.400.000
11	Panton Rheu	236	148.200.000	351	84.500.000	119	39.300.000	13	9.750.000	1	700.000	-	-	175	62.600.000	19	7.600.000	913	452.650.000
12	Sungai Mas	235	29.600.000	310	60.000.000	93	27.700.000	14	3.000.000	3	2.100.000	-	-	136	46.350.000	18	7.200.000	768	375.950.000
	Jumlah	4693	2.940.600.000	7479	4.314.500.000	2147	803.800.000	929	715.300.000	74	118.900.000	-	-	3.892	9.128.555.872	460	1.054.963.228	19.632	11.876.619.100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

6. Penegakan Syariat Islam

Sepanjang tahun 2016 terjadi penurunan kasus pelanggaran syariat dari 337 kasus di tahun 2015 menjadi 233 kasus sepanjang tahun 2016 Penurunan kasus yang paling tajam adalah pelanggaran busana yang tidak sesuai syariat islam, dari 282 temuan pelanggaran di tahun 2015 menjadi 191 pelanggaran busana di tahun 2016 Selain itu di tahun yang sama terjadi 3 pelanggaran perjudian dan 35 kasus khalwat.

Tabel 2.137.
Jumlah Pelanggar Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No.	Uraian	2015	2016
1	Syiar Busana	282	191
2	Minuman Keras	2	4
3	Judi	8	3
4	Khalwat	45	35
	Jumlah	337	233

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

7. Majelis Ulama

Dari data berikut dapat digambarkan bahwa belum ada ketelibatan perempuan dalam Keanggotaan MPU. Hal ini terjadi karena dalam mekanisme rekrutmen anggota MPU melalui hasil pemilihan dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali untuk satu periode. Disaat pelaksanaan Musda Calon Anggota MPU, diusulkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang calon sehingga terpilih sebanyak 25 orang yang berasal dari utusan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan untuk proses pengusulan diserahkan pada kecamatan tersebut.

Tabel 2.138.
**Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Ulama
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2016**

Tahun	Jumlah Anggota MPU		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2012	25	0	25
2013	25	0	25
2014	25	0	25
2015	25	0	25
2016	25	0	25

Sumber: Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, 2017

Q. Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM Kabupaten Aceh Barat menjadi makin baik yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penduduk Kabupaten Aceh Barat dari 70,32 di tahun 2009 menjadi 70,79 di tahun 2010. Secara rinci nilai tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir (69,97 tahun), angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas (95,13 persen), rata-rata lama bersekolah (8,48 tahun), dan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar Rp.618.690. IPM Kabupaten Aceh Barat berada pada peringkat ke-14 dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Jika dibandingkan dengan lingkup provinsi dan nasional yakni IPM Provinsi Aceh tahun 2010 sebesar 71,70 dan IPM nasional tahun 2010 sebesar

72,27 terlihat bahwa kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat masih dibawah rata-rata Provinsi Aceh dan nasional.

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah (Rasio Lulusan S1, S2 dan S3 Terhadap Jumlah PNS)

Kualitas sumber daya aparatur (PNS) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat masih tergolong rendah yang ditunjukkan oleh rasio tingkat pendidikan PNS terhadap jumlah PNS secara keseluruhan. Pada tahun 2011 rasio PNS lulusan pendidikan jenjang S1, S2 dan S3 terhadap jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah 0,34 yang berarti terdapat 34 orang PNS yang berpendidikan S1, S2 dan S3 secara kumulatif di dalam 100 orang PNS. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010 yang mempunyai rasio sebesar 0,37 atau terdapat 37 orang PNS berpendidikan S1, S2 dan S3 secara kumulatif di dalam 100 orang PNS.

Penyebab dari kecilnya porsi PNS yang berpendidikan S1, S2 dan S3 di Kabupaten Aceh Barat adalah kecilnya perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap pemberian kesempatan belajar (beasiswa) kepada PNS dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur selama beberapa tahun terakhir. Selama ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat hanya menyediakan beasiswa bagi para PNS dengan jumlah sangat terbatas sehingga personil PNS yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi jumlahnya sangat sedikit. Selain itu penyebab lainnya adalah banyaknya PNS yang sudah berpendidikan lebih tinggi terutama jenjang S2 yang mengajukan pindah tugas ke luar Kabupaten Aceh Barat. Pada umumnya PNS yang mengajukan pindah tugas ini adalah orang-orang yang berasal dari luar Kabupaten Aceh Barat sehingga setelah lulus PNS mereka lebih memilih untuk mengabdikan di daerah asalnya masing-masing. Untuk mengetahui rasio PNS lulusan S1, S2 dan S3 terhadap jumlah PNS di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.139.
Rasio Lulusan S1, S2 dan S3 di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010-2016

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah lulusan (S1+S2+S3)	2.148	2.085	2.116	2.198	2.345	2.487	2.826
2.	Jumlah PNS	5.831	6.130	6.115	5.854	5.876	6.145	5.896
3.	Rasio Lulusan Terhadap PNS (1/2)	0,37	0,34	0,35	0,37	0,40	0,40	0,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Selain pendidikan formal dengan berbagai bidang keahlian, pendidikan struktural bagi para PNS yang menduduki jabatan struktural juga belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, yaitu hanya 4 kali selama periode tahun 2007-2015 (1 kali pada tahun 2007, 1 kali pada tahun 2012 dan 2 kali pada tahun 2013). Akibat dari sedikitnya pelaksanaan diklat struktural ini adalah banyaknya pejabat struktural di Kabupaten Aceh Barat yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur.

Jumlah PNS tahun 2015 lebih banyak pegawai perempuan dari pada jumlah pegawai laki-laki, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 2.140.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

No	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	Perempuan	
1	Sampai dengan SD	25	11	26
2	SLTP/ sederajat	65	8	73
3	SMA/ sederajat	804	850	1.654
4	Diploma I, II	177	440	617
5	Diploma III/ Sarjana Muda	189	511	700
6	Sarjana/ Magister/ Doktor	1.269	1.557	2.826
Jumlah 2015		2.529	3.367	5.896

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Angka rasio ketergantungan ini menggambarkan tingkat tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan di Kabupaten Aceh Barat dalam 5 tahun terakhir (2012 hingga 2016) bersifat fluktuatif, Tahun 2016 rasio ketergantungan di Kabupaten Aceh Barat sebesar 0,4769 atau 47,69 persen, angka ini menurun sebesar 0,0023 dari tahun 2015 sebesar 0,4792 atau 47,92 persen, ini artinya bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung 47 jiwa tidak produktif sehingga pendapatan keluarga tersebut habis untuk memenuhi kebutuhan pokok. Secara lengkap dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 141.
Rasio Ketergantungan di Kab. Aceh Barat Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	52.234	54.540	54.906	55.645	56.492
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	6.618	6.795	6.904	7.136	7.417
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	58.852	61.335	61.810	62.781	63.909
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	123.512	126.124	128.434	131.010	134.012
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,4765	0,4863	0,4812	0,4792	0,4769

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

R. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2012 – 2016 terus mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.142.
Realisasi Indikator Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012 – 2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	13,84	13,84	13,84	100	100
PKK aktif (persen)	13,84	13,84	13,84	100	100
Posyandu aktif (persen)	92,5	93,4	94,3	94,8	94,8
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	25	35	35	35	65
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (persen)	50	55	60	60	60

Sumber: Olahan Data

S. Mitigasi Bencana

Risiko dan kerentanan terhadap bencana yang dihadapi masyarakat merupakan produk dari situasi sosial serta lingkungan fisik mereka, kerentanan dan kapasitas perorangan dan kelompok sosial berkembang seiring dengan waktu dan menentukan kemampuan mereka untuk menghadapi bencana dan pulih darinya, jaringan sosial, hubungan kekuasaan, pengetahuan dan keterampilan, peran gender, kesehatan, kekayaan, dan lokasi, kesemuanya berdampak pada risiko dan kerentanan terhadap bencana dan kapasitas untuk meresponsnya.

Qanun Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Qanun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana dan Qanun Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, merupakan dasar perwujudan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat. Masih diperlukan integritas dan kapabilitas serta akuntabilitas yang tinggi, sehingga penyelenggaraan program kegiatan penanggulangan kebencanaan di Kabupaten Aceh Barat dapat dilakukan sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

1. Ketersediaan Personil

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana juga mengisyaratkan tujuan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap komponen penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendorong pengarusutamaan gender dengan menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam penanggulangan bencana, serta mendorong terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan laki-laki dalam penanggulangan bencana.

Tabel 2.143.
Data Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 - 2016

Personil	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
PNS	32	4	31	4	32	5	30	6	28	6	28	8
Damkar	54	-	54	-	54	-	67	-	71	-	71	-
Rescue	-	-	17	4	17	4	15	6	15	6	15	6
Jumlah	86	4	102	8	103	9	112	12	114	12	114	12
Jumlah	90		110		112		124		126		128	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat, 2017

Data personil, baik PNS, tenaga pemadam kebakaran dan personil rescue pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan bahwa jumlah personil laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Hal ini disebabkan karena tupoksi dalam penanganan kebencanaan lebih dominan dilakukan oleh laki-laki. Namun demikian, perkembangan personil perempuan meningkat setiap tahunnya dari 4,65 persen tahun 2011 menjadi 14,09 persen di tahun 2016.

2. Pra-Bencana

Pemahaman tentang kerentanan dan risiko ini sangat penting bagi upaya untuk menangani berbagai dampak bencana terhadap laki-laki, perempuan, anak-anak, kaum lanjut usia dan mereka yang mengalami hambatan fisik. Banyak kejadian bencana menunjukkan bahwa perempuan terkena dampak yang lebih buruk dengan proporsi yang sangat tidak seimbang dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan dipandang sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak mereka, perempuan rentan untuk merasa bersalah jika tidak mampu menyelamatkan nyawa anak-anak mereka.

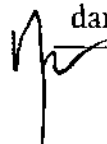
Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam hal kesiapsiagaan (mitigasi) bencana. Upaya ini dilaksanakan oleh kaum laki-laki dan perempuan. Adapun bentuk upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah pelaksanaan simulasi/pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi relawan kecamatan tangguh, relawan/petugas radio komunikasi bencana, pramuka siaga bencana dan simulasi sistem peringatan dini sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 2.144.
Kegiatan Pra Bencana di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2015

Tahun	No	Kegiatan	LK	PR
2011	1	Sosialisasi dan Simulasi SATGAS Peringatan Dini	50	-
2012	1	Simulasi Sistem Peringatan Dini	100	-
	2	Pelatihan Kecamatan Tangguh	216	24
	3	Sekolah Siaga Bencana	357	643
2013	1	Pelatihan Pramuka Siaga Bencana	20	30
	2	Sekolah Siaga Bencana	336	664
	3	Pelatihan Pemuda siaga Bencana	50	-
	4	Pelatihan PKK Siaga Bencana	-	50
	5	Pelatihan Teknis Petugas Radio Siaga Bencana	30	-
	6	Simulasi Petugas Penampungan Zona Aman	83	37
	7	Sosialisasi Qanun Penanggulangan Bencana	33	17
	8	Pelatihan SATGAS Peringatan Dini	77	23
2014	1	Sekolah Siaga Bencana	265	735
	2	Pelatihan Relawan Kecamatan Tangguh	50	-
	3	Pelatihan dan Simulasi Pramuka Siaga Bencana	47	53
	4	Pelatihan Petugas Radio Siaga Bencana	60	-
	5	Pelatihan Simulasi Sistem Peringatan Dini	70	10
	6	Sosialisasi RAD-PRB	50	-
2015	1	Sekolah Siaga Bencana	1108	892
	2	Pelatihan First Aid untuk Pemadam dan Rescue	44	6
	3	Pembekalan petugas TEA	50	-
	4	Evaluasi Sekolah Siaga Bencana	12	38
	5	Simulasi Evakuasi Mandiri Tk. Kecamatan	123	37
Jumlah			3231	3259

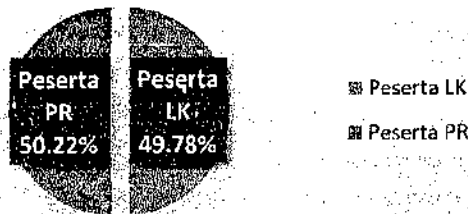
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat, 2016.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bahwa persamaan gender antara laki-laki dan perempuan sudah tercapai. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 di ikuti oleh 6.490 orang peserta dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 3.231 orang dan jumlah peserta perempuan sebanyak 3.259 orang sehingga dapat disimpulkan bahwa



kaum perempuan juga berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan dengan persentase 50.22 persen dan 49.78 persen laki-laki, seperti terlihat dalam gambar berikut.

Gambar 2.31
Keikutsertaan dalam Kegiatan
dari Tahun 2011 s/d 2015



Berpartisipasinya perempuan dalam kegiatan berdampak sangat baik terhadap tersebarluaskannya informasi potensi bencana alam yang akan berdampak pada kesiapan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, juga berdampak terhadap luasnya penyebaran informasi ke kaum perempuan dikarenakan

hanya dapat dilakukan oleh kaum perempuan itu sendiri.

Kegiatan secara umum sudah responsif gender, namun pada beberapa kegiatan seperti pada SATGAS Peringatan Dini masih dipercayakan hanya pada laki-laki dikarenakan pada kelompok ini menitik beratkan pada kekuatan fisik, namun pada satu kelompok yang lain seperti pelatihan PKK Siaga Bencana, pada kelompok ini lebih dititik beratkan pada perempuan karena dianggap membutuhkan kerapian dan ketelitian.

Walaupun masih ada asumsi bahwa kegiatan kebencanaan merupakan kegiatan laki-laki namun dari kegiatan kebencanaan yang dilaksanakan kaum wanita juga ikut berpartisipasi.

3. Tanggap Darurat

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan terhadap tanggap darurat kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki sudah dipertimbangkan:

- Perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan tanggap darurat.
- Kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki dipertimbangkan dalam proses perencanaan dan alokasi sumber daya kedaruratan dan logistik.
- Upaya pemulihan dan peningkatan fisik sosial ekonomi melibatkan perempuan dan laki-laki dalam proses konsultasi dan dialog.
- Pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat terdampak diarahkan untuk membangun keamanan pangan dan berkelanjutan ekonomi keluarga yang memberikan peluang untuk memperoleh keterampilan tambahan dengan prioritas kepada perempuan kepala rumah tangga. Rumah tangga tanpa ibu dan rumah tangga rentan lainnya.
- Kegiatan Tanggap Darurat dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 di ikuti oleh 1.490 orang peserta dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 1.188 orang dan jumlah peserta perempuan sebanyak 302 orang sehingga dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan juga berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan namun keterlibatannya terbatas dengan persentase 20.27 persen perempuan dan 79.73 persen laki-laki, seperti terlihat dalam diagram sebagai berikut:

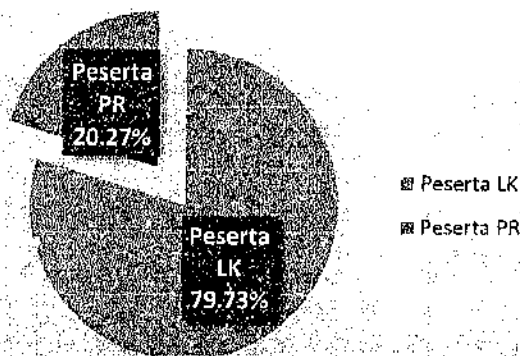
Tabel 2.145.
Kegiatan Tanggap Darurat di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2015

Tahun	No	Kegiatan	Peserta	
			LK	PR
2012	1	Pelatihan TRC Kabupaten	35	15
	2	Pelatihan Satgas Komunikasi	45	5

Tahun	No	Kegiatan	Peserta	
			LK	PR
2013	1	Pelatihan TRC kabupaten	65	15
	2	Simulasi Kebakaran	63	12
	3	Gladi Posko Penanggulangan bencana	85	15
	4	Simulasi Pasca Tsunami	40	10
	5	Pelatihan TRC Kecamatan	85	15
2014	1	Pelatihan TRC Kabupaten	100	20
	2	Simulasi Kebakaran	25	5
	3	Gladi Posko Penanggulangan bencana	90	20
	4	Simulasi Pasca Tsunami	85	25
	5	Pelatihan TRC Kecamatan	110	40
2015	1	Pelatihan TRC Kabupaten	90	30
	2	Simulasi Kebakaran	25	5
	3	Gladi Posko Penanggulangan bencana	90	20
	4	Simulasi Pasca Tsunami	45	10
	5	Pelatihan TRC Kecamatan	110	40
Jumlah			1.188	302

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat, 2016.

Gambar 2.32
Keikutsertaan Perempuan dan Laki-laki dalam Kegiatan Tanggap Darurat Tahun 2011 s/d 2015



Kegiatan tanggap darurat lebih bersifat netral gender. Sulitnya medan yang dilalui dan kurangnya fasilitas yang dimiliki serta terbatasnya SDM perempuan yang menguasai teknis.

Pada kegiatan ini perlu diprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai. Dibutuhkan SDM perempuan yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam penanganan penanggulangan bencana dan peran serta masyarakat dan pengusaha untuk menangani bersama apabila bencana terjadi.

4. Pasca Bencana:

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki sudah mempertimbangkan:

- Perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki dipertimbangkan dalam proses perencanaan dan alokasi sumber daya rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Upaya pemulihan dan peningkatan fisik, sosial ekonomi melibatkan perempuan dan laki-laki dalam proses konsultasi dan dialog.
- Pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat terdampak diarahkan untuk membangun keamanan pangan dan berkelanjutan ekonomi keluarga yang memberikan peluang untuk memperoleh keterampilan tambahan dengan prioritas kepada perempuan kepala rumah tangga, rumah tangga tanpa ibu dan rumah tangga rentan lainnya.

Tabel 2.146.
Kegiatan Pasca Bencana Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2015

No	Jenis Kegiatan
1.	Pembangunan Pengaman Tebing Jembatan Ulee Raket
2.	Pembangunan Jembatan Krueng Sakuy
3.	Pembangunan Abutment Jembatan Krueng Sakuy
4.	Pembangunan Pengaman Pantai Padang Seurahet
5.	Pembangunan Penguatan Tebing Sungai Krueng Meureubo Gampong Babah Krueng Telep Kecamatan Pante Ceureumen
6.	Pembangunan Balai Evakuasi Gampong Alue Seuraleun
7.	Pembangunan Pengaman Bodi jalan Desa Seuradeuk
8.	Pembangunan Rabat Beton Gampong Seuradeuk

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat, 2016.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Aceh Barat berasal dari hasil budidaya dan perikanan tangkap. Budidaya perikanan di daerah ini berupa tambak, kolam dan perairan umum. Perikanan tangkap di laut dan pantai merupakan komoditi unggulan disini.

Hasil produksi tambak selama tahun 2016 mencapai 382,28 ton yang berupa ikan bandeng, udang windu dan ikan nila. Budidaya tambak ini diusahakan dalam kecamatan Samatiga yang sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan laut. Sementara budidaya kolam menghasilkan produksi yang lebih besaryaitu 198,87 ton. Budidaya ini diusahakan di semua kecamatan dalam kabupaten Aceh Barat, budidaya terluas terletak di Kecamatan Meureubo dan Samatiga. Ikan yang banyak dipanen adalah jenis ikan mas, ikan nila dan ikan lele. Hasil budidaya perikanan terbesar dihasilkan dari air tawar yang mencapai 323,16 ton. Kecamatan Meureubo menyumbang produksi terbesar. Diikuti oleh Kecamatan Arongan Lambalek, Kaway XVI dan Pante Ceureumen.

Perikanan tangkap di laut adalah mata pencarian utama penduduk Aceh Barat yang merupakan daerah pesisir. Hasil perikanan ini sangat besar mencapai 19.518,67 ton selama tahun 2016 dengan nilai 530 milyar rupiah. Hasil ini terdiri dari ikan sebanyak 16 ribu ton, udang sejumlah 3 ribu ton, kepiting 28 ton dan cumi-cumi 16 ton. Kecamatan penyumbang hasil perikanan tangkap terbesar adalah daerah yang berbatasan langsung dengan pantai seperti Johan Pahlawan dan Samatiga. Sepanjang tahun 2016 armada penangkapan perikanan laut berjumlah 1.834 unit, meningkat dibanding tahun 2015 yaitu 582 unit. Armada kapal bermotor lebih banyak dipakai oleh nelayan Aceh Barat,

Tabel 2.147.
Jumlah Produksi (Ton) Perikanan Menurut Jenis Usaha Per Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2016

No	Kecamatan	Laut	Budidaya	Tambak	Kolam
1	Johan Pahlawan	9.821,60	33,38	-	25,1
2	Samatiga	5.077,68	387,14	351,97	18,08
3	Bubon	-	27,04	-	18,46
4	Arongan Lambalek	885,58	16,91	-	5,44
5	Woyla	-	26,43	-	16,33
6	Woyla Barat	-	10,37	-	7,07



No	Kecamatan	Laut	Budidaya	Tambak	Kolam
7	Woyla Timur	-	22,86	-	13,36
8	Kaway XVI	-	21,01	-	9,54
9	Meureubo	3.321,88	76,63	30,31	31,02
10	Pante Ceureumen	-	44,65	-	32,01
11	Panton Reu	-	20,48	-	14,96
12	Sungai Mas	-	24,84	-	7,5
Tahun	2016	19.106,74	711,74	382,28	198,87
	2015	17.712,20	409	712,5	198,9
	2014	15.826,20	402,22	35,66	180,99
	2013	4.869,00	349,75	31,01	157,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Tabel 2.148.

**Jumlah Alat Penangkap Ikan menurut Jenis Alat Dan Kecamatan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016**

No	Kecamatan	Pukat Kantong		Jaring Insang			Jaring Angkat		Lain-lain	Rawai	Pancing Tenda
		Pukat Payung	Pukat Pantai	Jaring Hanyut	Jaring Klitik	Tramel Net	Bagan Perahu	Bagan Tancap			
1	J. Pahlawan	15	12	45	6	45	-	-	40	200	250
2	Samatiga	-	-	124	5	261	-	-	110	-	-
3	Eubon	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
4	Arongan Lb	-	-	-	17	145	-	-	68	-	-
5	Woyla	-	-	-	-	10	-	-	16	-	-
6	Woyla Barat	-	-	-	-	10	-	-	60	-	-
7	Woyla Timur	-	-	-	-	10	-	-	1	-	-
8	Kaway XVI	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-
9	Meureubo	-	-	292	48	120	-	-	81	5	10
10	P.Cereumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Panton Reu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sungai Mas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016	15	12	461	76	651	-	-	376	205	260
	2015	15	12	441	76	641	-	-	376	160	90
	2014	18	10	420	81	313	-	-	395	177	66
	2013	18	10	420	71	113	-	-	395	177	66
	2012	15	9	409	65	102	-	-	175	172	64

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

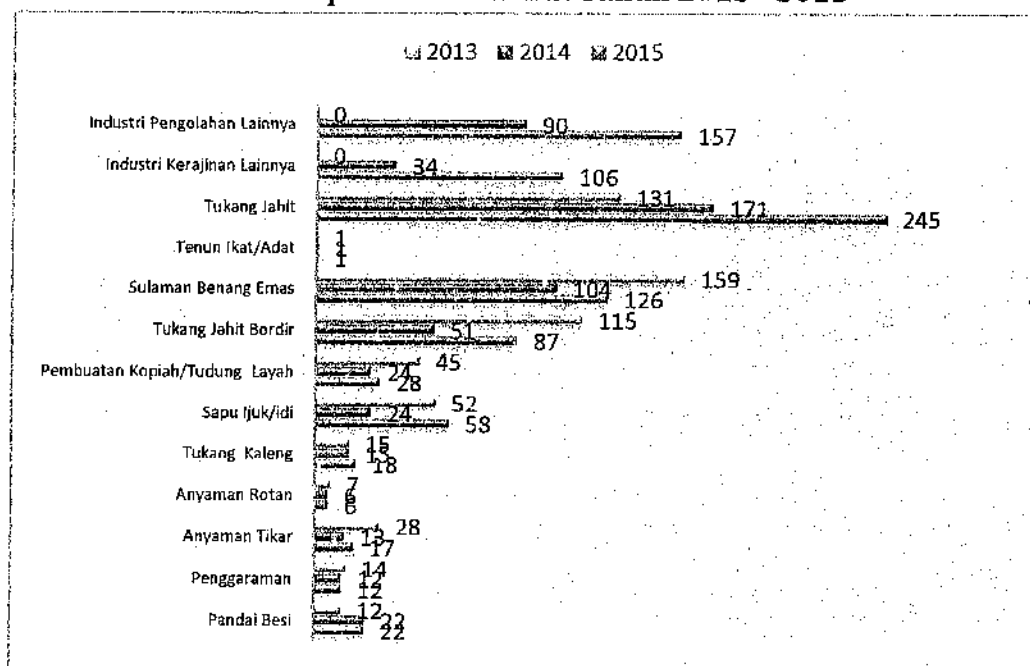
B. Perindustrian

Jumlah industri di Aceh Barat terdiri dari 2 unit industri besar yang menyerap 768 tenaga kerja, 23 usaha industri sedang dengan tenaga kerja sebanyak 90 pekerja Jumlah industri sedang meningkat dibanding tahun 2014. Selain itu di Daerah ini juga terdapat 872 unit industri kecil dengan mempekerjakan 2.560 tenaga kerja dan 1.524 usaha mikro yang menampung 3.862 pekerja. Jumlah industri kecil dan industri mikro berkembang pesat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bila dilihat menurut jenis barang yang dihasilkan, industri dapat dikelompokkan menjadi industri tradisional, industri makanan minuman, industri jasa dan industri

bangunan Jumlah industri tradisional di kabupaten Aceh Barat yang beroperasi pada tahun 2015 sebanyak 883 usaha dengan menyerap tenaga kerja industri pada sejumlah 2.413 pekerja. Sementara itu jumlah industri makanan dan minuman yang berproduksi sepanjang tahun tersebut terdaftar sebanyak 512 unit yang menampung 2.207 orang tenaga kerja. Selain itu, sepanjang tahun 2015, jumlah Industri bahan bangunan yang beroperasi sejumlah 324 usaha dengan tenaga kerjanya sejumlah 1.085 orang. Selanjutnya industri jasa yang tercatat di Aceh Barat adalah 609 usaha dengan tenaga kerja 1.408 orang. Semua jenis industri ini termasuk industri mikro, jumlahnya meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Gambar 2.33.
Jumlah Industri Tradisional menurut Jenis Industri
Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 - 2015



Tabel 2. 149.
Jumlah Industri Tradisional menurut Jenis Industri
Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2015

No	Kecamatan	Pandai Besi	Penggaraman	Anyaman Tikar	Anyaman Rotan	Tukang Kaleng	Sapu Ijuk/ Iidi	Pembuatan Kopyah/ Tudung Layah	Tukang Jahit Bordir	Sulaman Benang Emas	Tenun Ikat/Adat	Tukang Jahit	Industri Kerajinan Lainnya	Industri Pengolahan Lainnya	Jumlah
1	Johan Pahlawan	6	0	0	3	16	0	0	24	17	0	86	20	11	183
2	Samatiga	1	0	5	2	0	5	6	34	87	1	40	35	22	238
3	Bubon	1	0	0	1	0	0	2	0	1	0	4	10	15	34
4	Arongan Lambalek	6	0	0	0	0	1	0	14	0	0	12	3	34	70
5	Woyla	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	20	0	20	50
6	Woyla Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	16	21
7	Woyla Timur	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	2	7
8	Kaway XVI	8	5	5	0	1	1	0	5	18	0	8	2	4	57
9	Meureubo	0	3	3	0	0	50	20	8	1	0	50	30	5	170
10	Pante Ceureumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	2	7
11	Panton Reu	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
12	Sungai Mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	26	43
Jumlah	2015	22	12	17	6	18	58	28	87	126	1	245	106	157	883
	2014	22	12	13	6	15	24	24	51	104	1	171	34	90	567
	2013	12	14	28	7	15	52	45	115	159	1	131	0	0	579

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

C. Perdagangan

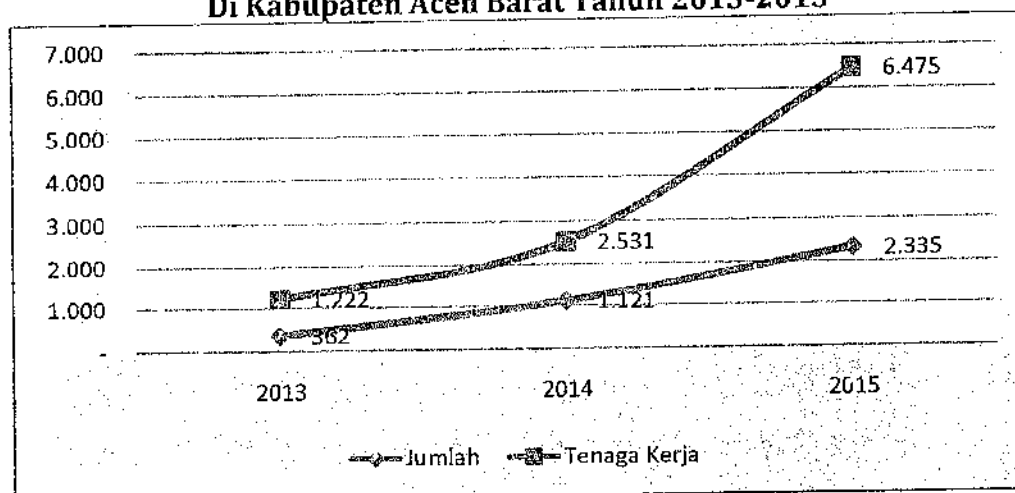
Sektor perdagangan termasuk kedalam 5 besar sektor utama pendukung perekonomian Kabupaten Aceh Barat. Pada tahun 2015, pedagang kecil masih menjadi primadona utama dalam sektor perdagangan di Kabupaten Aceh Barat, sebanyak 1.094 pedagang di Kabupaten Aceh Barat adalah pedagang Kecil, 59 pedagang menengah dan 32 pedagang besar. Sedangkan jumlah sarana perdagangan selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan dengan kenaikan yang sama pada jumlah kios dan warung di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 2. 150.
Jumlah Usaha Perdagangan Dan Tenaga Kerjanya Per Kecamatan Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2015

Kecamatan	2013		2014		2015	
	Jumlah	Tenaker	Jumlah	Tenaker	Jumlah	Tenaker
Johan Pahlawan	275	935	649	1 453	1 162	3 512
Samatiga	7	22	115	230	252	725
Bubon	7	20	60	110	137	530
Arongan Lambalek	9	29	65	137	71	421
Woyla	10	26	55	96	65	102
Woyla Barat	2	6	30	40	41	73
Woyla Timur	1	3	45	61	48	81
Kaway XVI	24	74	120	360	151	3052
Meureubo	20	82	209	400	253	721
Pante Ceureumen	4	13	63	112	69	130
Panton Reu	1	5	30	55	48	81
Sungai Mas	2	7	25	40	38	73
Jumlah	362	1 222	1 121	2 531	2 335	6 475

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Gambar 2.34.
**Jumlah Usaha Perdagangan dan Tenaga Kerjanya
Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2015**



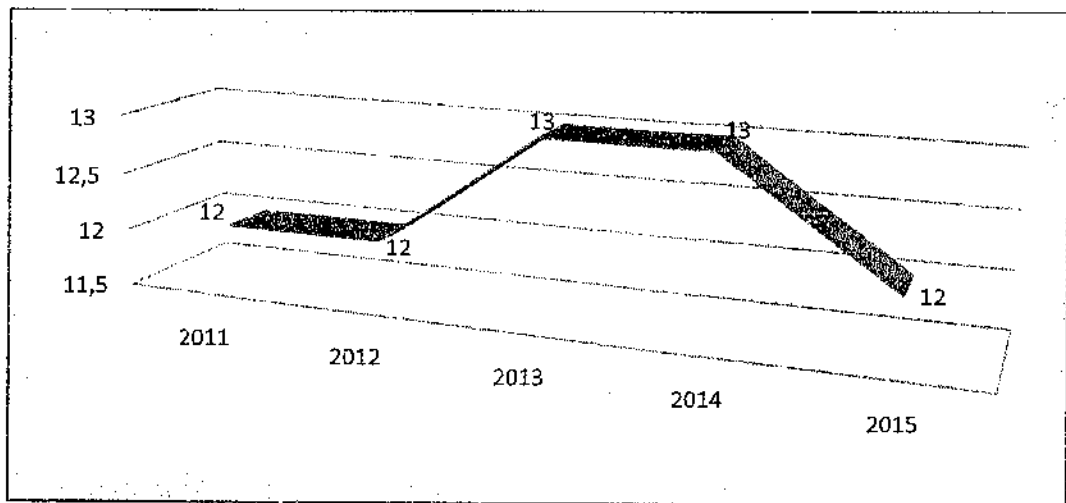
D. Hotel dan Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Perkembangan pariwisata tidak hanya didukung oleh alam dan budaya Indonesia, tetapi juga akomodasi yang disediakan untuk wisatawan. Salah satu sarana pokok pariwisata adalah hotel. Hotel

menyediakan tempat menginap sementara bagi tamu yang datang dari berbagai tempat. Hotel juga berfungsi sebagai tempat pertemuan, pesta dan kegiatan lainnya. Selain hotel, terdapat juga akomodasi tambahan seperti restoran, rumah makan, fasilitas olahraga dan lainnya.

Kabupaten Aceh Barat memiliki 12 unit hotel dan penginapan, jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 13 unit hotel. Terdiri dari hotel bintang 3 sebanyak 1 unit dan sisanya adalah hotel non bintang dan akomodasi lainnya. Selain itu, tercatat 270 unit restoran/rumah makan, dengan jumlah terbesar di Johan Pahlawan sebanyak 118 unit usaha.

Gambar 2.35.
Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya di Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2011 - 2015



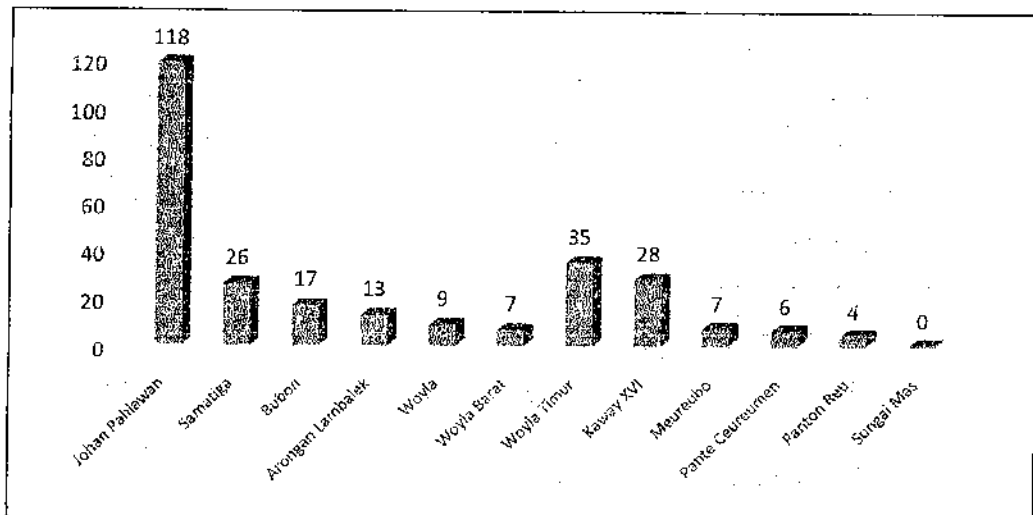
Tabel 2. 151.
Jumlah Restoran/Rumah Makan menurut Kecamatan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

Kecamatan	2016
Johan Pahlawan	118
Samatiga	26
Bubon	17
Arongan Lambalek	13
Woyla	9
Woyla Barat	7
Woyla Timur	35
Kaway XVI	28
Meureubo	7
Pante Ceureumen	6
Panton Reu	4
Sungai Mas	0
Jumlah	270

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Handwritten signature

Gambar 2.36.
Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015



Berikut adalah realisasi capaian indikator pariwisata tahun 2012 – 2016.

Tabel 2. 152.
Capaian Indikator Pariwisata Tahun 2012 - 2016

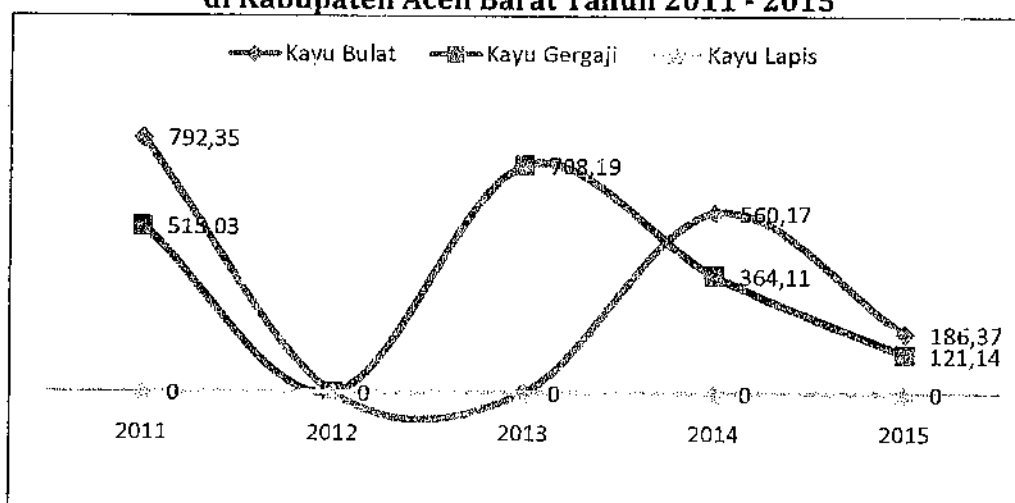
Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Kunjungan wisata	987	1.099	1.118	1.055	1.234
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen)	1,02	1,04	1,06	1,06	1,07

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

E. Kehutanan

Luas kawasan hutan lindung di Aceh Barat mencapai 105.569 hektar dan hutan produksi sebesar 4.894 hektar. Sementara hasil produksi kayu hutan selama tahun 2015 mencapai 1.307,38 meter kubik terdiri dari kayu bulat sebanyak 792,35 meter kubik dan kayu gergajian sebanyak 515,03 meter kubik.

Gambar 2.37.
Produksi Kayu Hutan menurut jenis Produksi (m³)
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 - 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Tabel 2. 153.
Luas Kawasan Hutan dan Perairan menurut Kecamatan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

Kecamatan	Hutan Lindung	Suaka Alam Pelestarian	Hutan Produksi			Luas Hutan Perairan
			Terbatas	Tetap	Terkonversi	
J. Pahlawan	-	-	-	-	-	-
Samatiga	-	-	-	-	-	-
Bubon	-	-	-	-	-	-
Arongan Lambalek	-	-	-	-	-	-
Woyla	-	-	-	-	-	-
Woyla Barat	3,11	-	-	-	-	-
Woyla Timur	-	-	-	-	-	-
Kaway XVI	-	-	-	-	-	-
Meureubo	-	-	-	-	-	-
P.Ceureumen	35.722,00	-	4.894,00	-	-	-
Panton Reu	7,11	-	-	-	-	-
Sungai Mas	69.864,00	-	-	-	-	-
Aceh Barat	105.596,22	-	4.894,00	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

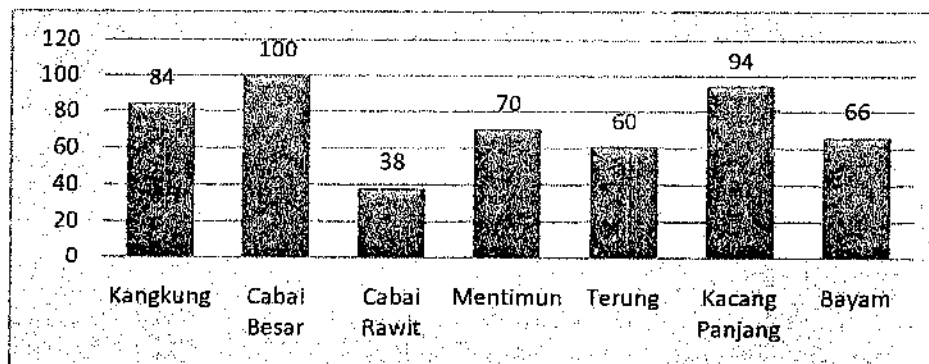
F. Pertanian

Peranan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Barat cukup dominan dan terus meningkat setiap tahunnya

1. Hortikultura

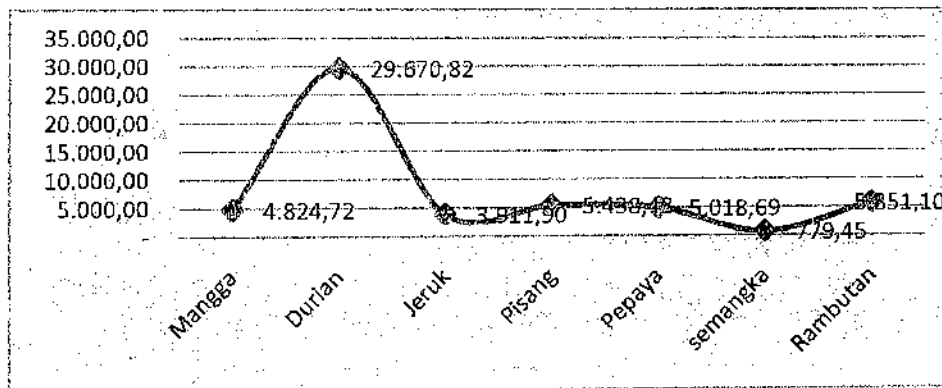
Produksi sayur-sayuran dalam Kabupaten Aceh Barat tidak terlalu besar, komoditi dengan produksi tertinggi adalah cabe dan kacang panjang. Selain padi dan palawija, Aceh Barat juga kaya akan produksi buah-buahan unggulan disini adalah durian, rambutan, jambu, dan mangga. Produksi durian pada tahun 2016 meningkat mencapai 29.670,82 ton, sangat melonjak dibanding tahun sebelumnya. Produksi rambutan sebesar 5.851,10 ton di tahun 2016. Sedangkan produksi pisang dan mangga masing-masing mencapai 5.438,43 dan 4.824,72 ton.

Gambar 2.38.
Luas Panen Tanaman Sayuran menurut Jenis Sayuran di Kabupaten Aceh Barat (Hektar) Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

Gambar 2.39.
Produksi Buah-buahan menurut Jenis Buah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

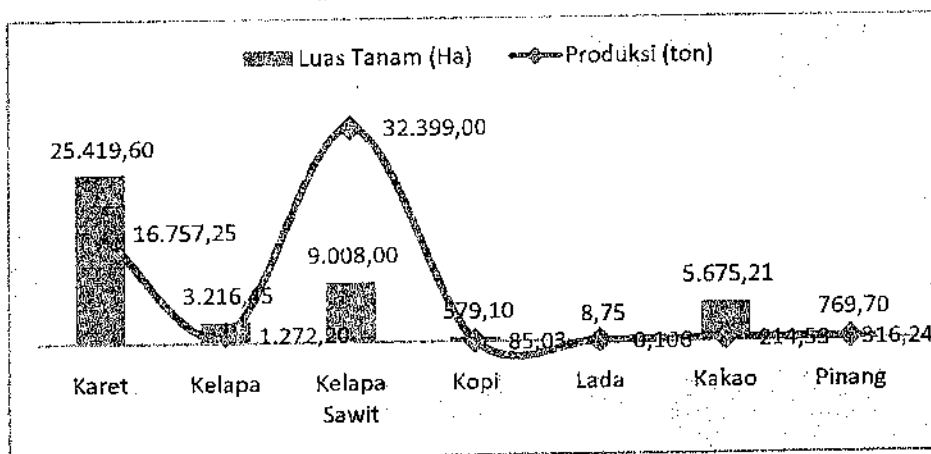
2. Perkebunan

Selama beberapa tahun terakhir ini perekonomian Aceh Barat sangat ditopang oleh sub sektor perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit dan karet, selain dua komoditi tersebut, kabupaten ini juga menghasilkan banyak tanaman perkebunan yang lain, akan tetapi karena keterbatasan data, hanya komoditi kelapa, kako, kapuk, pinang, biji kopi, lada dan pala saja yang tercatat.

Melonjaknya harga karet dan kelapa sawit membuat banyak masyarakat yang mengusahakan tanaman ini sehingga luas arealnya terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016 luas kebun karet dan kelapa sawit mencapai 25.419 dan 9.008 hektar. Dengan luas lahan tersebut dihasilkan produksi karet dan kelapa sawit sebesar 16.757,25 dan 32.399 ton.

Selain itu komoditi kelapa selama tahun 2016 tercatat 1.272,2 ton kelapa dalam produksi, dengan kecamatan Kaway XVI dan Mureubo sebagai penyumbang terbesarnya. Produksi komoditi lainnya seperti kakao, pinang, biji kopi, lada masih kecil, tidak sampai 100 ton per tahunnya.

Gambar 2.40.
Produksi dan luas tanam tanaman perkebunan menurut Jenis tanaman di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

3. Peternakan

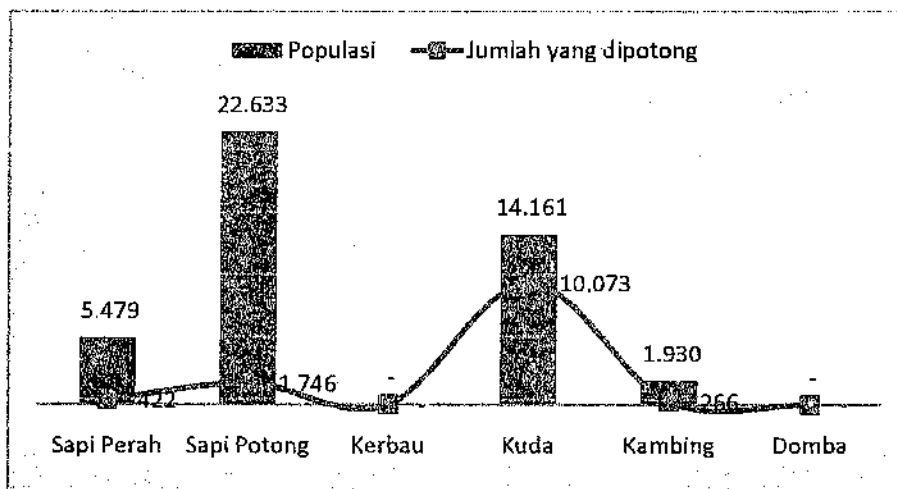
Peternakan dalam Kabupaten Aceh Barat terdiri dari peternakan besar seperti kerbau dan sapi, peternakan kecil berupa kambing dan domba serta peternakan unggas yaitu ayam dan itik. Berbeda dengan sebagian besar kabupaten dalam provinsi Aceh yang

sebagian besar penduduknya mengkonsumsi daging sapi, masyarakat Aceh barat lebih meminati daging kerbau, hal inilah yang membuat populasi kerbau disini lebih mendominasi.

Selain populasi, jumlah pemotongan ternak besar juga penting untuk diperhatikan. Sepanjang tahun 2016, ada 1.746 ekor kerbau yang disembelih, sedangkan jumlah sapi yang disembelih sepanjang tahun hanya 422 ekor.

Pada peternakan unggas, ternak yang dipelihara oleh masyarakat Aceh Barat adalah ayam kampung, ayam pedaging dan itik. Jumlah ayam kampung, ayam pedaging dan itik yang dipelihara masyarakat tahun 2016 masing-masing adalah 137.337, 75.529 dan 32.913 ekor.

Gambar 2.41.
**Produksi dan Jumlah ternak yang dipotong menurut Jenis Ternak
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017

2.4. **Indek Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia:

a. **Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

b. **Angka Melek Huruf**

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

- d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Tabel 2.154.

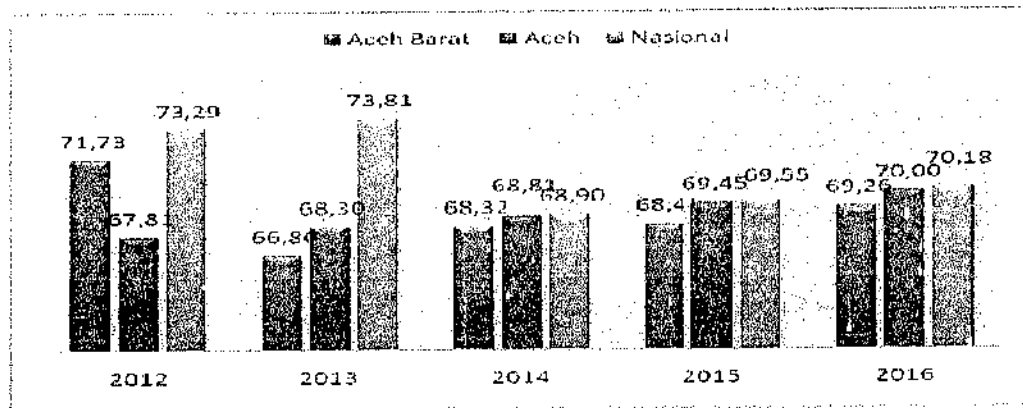
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Barat, Aceh dan Nasional Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh Barat	71,73	66,86	68,32	68,41	69,26
Aceh	67,81	68,3	68,81	69,45	70,00
Nasional	73,29	73,81	68,9	69,55	70,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Aceh Barat dan Nasional, 2012-2016

Gambar 2.42.

Perbandingan IPM Kab. Aceh Barat, IPM Aceh dan IPM Nasional Tahun 2012 - 2016



Selama kurun waktu 2012-2016, data IPM Kabupaten Aceh Barat yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik mengalami penyesuaian di tahun 2013. Tahun 2012 IPM Kabupaten Aceh Barat berada di atas rata-rata IPM Provinsi Aceh dan dibawah rata-rata IPM Nasional. Namun, sejak tahun 2013 sampai dengan 2016, IPM Kabupaten Aceh Barat berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Aceh dan Nasional

2.5. Indek Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

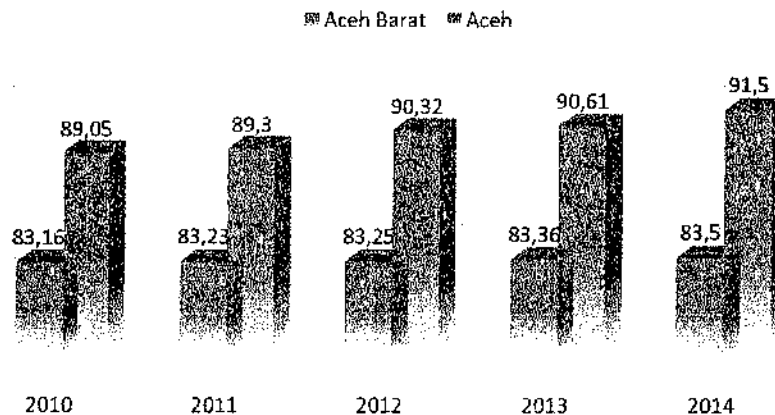
Tabel 2.155.
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Barat dan Propinsi Aceh Tahun 2010-2014

Kab/Prop	Indeks Pembangunan Gender				
	2010	2011	2012	2013	2014
Aceh Barat	83,16	83,23	83,25	83,36	83,50
Aceh	89,05	89,30	90,32	90,61	91,50

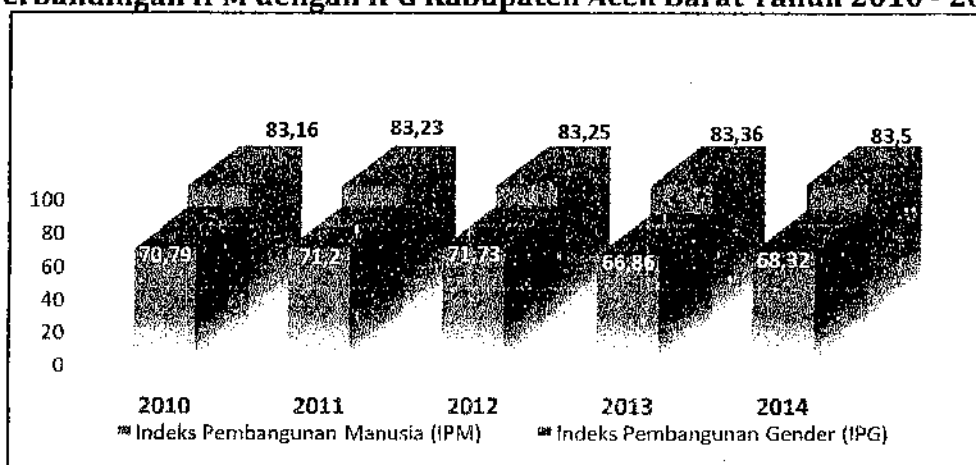
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2015

IPG Kabupaten Aceh Barat masih berada di bawah IPG Provinsi Aceh, dengan perbandingan angka Provinsi Aceh sebesar 91,5 dan Kabupaten Aceh Barat sebesar 83,5. Jika dibandingkan dengan IPM, angka IPG Kabupaten Aceh Barat ini lebih tinggi dari angka IPM. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan gender di Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 2.43.
Perbandingan IPG Kabupaten Aceh Barat dengan IPG Provinsi Aceh



Gambar 2.44.
Perbandingan IPM dengan IPG Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 - 2014



2.6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

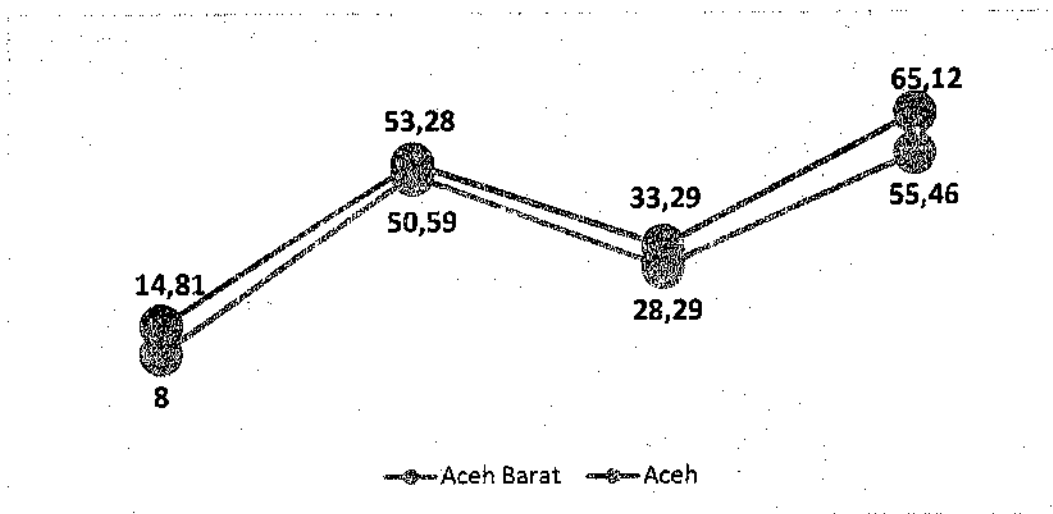
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Tabel 2.156.
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Aceh Barat dan
Propinsi Aceh Tahun 2014

Kab/Prop	Parlemen (persen)	Tenaga Profesional (persen)	Sumbangan Pendapatan (persen)	(IDG)
Aceh Barat	8,00	50,59	28,29	55,46
Aceh	14,81	53,28	33,29	65,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2015

Gambar 2.45
Perbandingan IDG Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Aceh Barat tahun 2014 masih berada di bawah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Aceh. Komponen IDG yang masih rendah di Kabupaten Aceh Barat adalah keterlibatan perempuan di parlemen yang hanya 8 persen dan sumbangan pendapatan perempuan sebesar 28,29 persen

Tabel 2.157.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 – 2016

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar	Integrasi Hasil / Capaian Kinerja (1-5) Tercapai (>)
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB	0,56	3,9	3,5	4,26	3,35	6,3-67	belum tercapai (<)
2	Pengendalian Laju inflasi	0,95	2,52	10,99	5,25	3,77	3,02	belum tercapai (<)
3	PDRB per kapita	25,19	25,47	25,93	26,54	26,86	47,96	belum tercapai (<)
4	Indeks Gini	0,3	0,3	0,31	0,36	0,35	0,39	belum tercapai (<)
5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	1,02	1,06	1,06	1,06	1,07	2	belum tercapai (<)
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	22,76	23,7	22,97	21,46	20,38	11,4	belum tercapai (<)
7	Rasio kesenjangan kemiskinan	3,32	3,68	4,30	4,28	4,72	0,40	belum tercapai (<)
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,66	66,86	67,31	68,41	69,26	70,18	belum tercapai (<)
9	Angka melek huruf	94,96	95,12	98,41	98,52	98,62	95,22	tercapai (>)
10	Angka rata-rata lama sekolah	7,77	7,83	8,17	8,47	8,73	12	belum tercapai (<)
11	Angka usia harapan hidup	70,15	67,30	67,33	68,00	68	70,1	belum tercapai (<)
12	Persentase balita gizi buruk	0,22	0,38	0,21	0,17	0,11	0,22	tercapai (>)
13	Prevalensi balita gizi kurang	0	1,7	5	3	1,6	1,6	Sesuai (=)
14	Cakupan Desa Siaga Aktif	0	19,78	18,09	15,57	15,57	15,57	Sesuai (=)
15	Angka partisipasi angkatan kerja	65,47	65,48	65,5	66,1	66,15	68,06	belum tercapai (<)
16	Tingkat partisipasi angkatan kerja	57,61	60,28	61,42	63,67	64,40	68,06	belum tercapai (<)
17	Tingkat pengangguran terbuka	6,21	7,42	5,86	6,77	6,20	5,3-5,0	belum tercapai (<)
18	Rasio penduduk yang bekerja	93,79	92,58	94,14	93,23	93,56	94,60	belum tercapai (<)
19	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	54,03	55,81	57,82	59,37	59,39	100	belum tercapai (<)
20	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	0	0	46,65	44,69	44,99	50,00	belum tercapai (<)
21	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	0,46	0,46	0,45	0,43	0,43	1	Belum tercapai (<)
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	1	2	2	2	2	2	Belum tercapai (>)
23	Persentase PAD terhadap pendapatan	4,19	6,15	11,51	11,84	11	10	tercapai (>)

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar	Integrasi belum tercapai (+) sesuai (=) tercapai (-)
24	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	tercapai (>)
25	Penguatan cadangan pangan	100persen	100persen	100persen	100persen	100persen	100persen	tercapai (>)
26	Penanganan daerah rawan pangan	0	0	0	0	70	100persen	Belum tercapai (<)
27	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	22,6	23,4	23,47	24,81	25,15	25,15	Sesuai (=)
28	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	30,19	30,96	30,94	32,35	33,38	33,38	Sesuai (=)
29	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	22,6	23,4	23,47	24,81	25,15	25,15	Sesuai (=)
30	Produksi sektor perkebunan (Kakao)	32,57	32,57	32,62	9,8	9,2	9,2	Belum tercapai (<)
	Produksi sektor perkebunan (Sawit)	57.300,37	57.300,37	57.300,37	58.446,38	59.615,31	59.615,31	Sesuai (=)
	Produksi sektor perkebunan (Karet)	14.585,45	14.585,45	15.314,72	16.080,46	16.884,48	16.884,48	Sesuai (=)
31	Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong)	55.272	91.400	16.207	17.017	19.713	19.713	Sesuai (=)
	Produksi Sektor Peternakan (Kerbau)	574.086	511.000	170.998	179.548	175.187	175.187	Sesuai (=)
	Produksi Sektor Peternakan (Kambing)	42.344	12.175	19.606	20.586	90.754	90.754	Sesuai (=)
	Produksi Sektor Peternakan (Domba)	2.438	2.430	689	7.235	1.580	1.580	Sesuai (=)
32	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	30,19	30,96	30,94	32,35	53	53	Sesuai (=)
33	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	2,14	2,12	1,99	1,91	1,87	1,87	Sesuai (=)
34	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	9,91	7,92	6,86	5,66	5,18	5,18	Sesuai (=)
35	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,02	1,04	1,06	1,06	1,07	1,07	Sesuai (=)
36	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	5,46	5,58	5,58	5,66	5,92	5,92	Sesuai (=)
37	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	17,14	17,33	17,63	17,00	17,77	17,77	Sesuai (=)
38	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	1,69	1,82	1,88	1,86	1,92	19,9	belum tercapai (<)
39	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	belum tercapai (<)
40	Pertumbuhan Industri	0,67	11,51	5,81	20,46	20,81	20,66	tercapai (>)
41	Nilai Laki	D	C	CC	CC	CC	BB	belum tercapai (<)
II ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	2.215.102,97	2.335.102,97	2.394.780,08	2.402.156,81	2.502.146,71	5.070.000,00	belum tercapai (<)
2	Nilai tukar petani	105	100,15	102,1	103,15	104,12	101,31	tercapai (>)
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	47,57	43,57	44,32	49,7	60,25	53,6	belum tercapai (<)
4	Produktivitas total daerah	40.356.751	64.053.598	65.777.561	70.036.801	75.035.701	75.035.701	tercapai (>)
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	652	932	652	652	652	652	Sesuai (=)
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	104,80	104,45	101,14	98,81	90,93	100	belum tercapai (<)



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Islami Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan Kredibel Akuntabel dan Berintegritas*

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar	Interpretasi belum tercapai ($<$) sesuai (=) tercapai ($>$)
7	Angka kriminalitas yang tertangani	15,2	14,9	14,3	16,46	17,95	100	belum tercapai ($<$)
8	Rasio ketergantungan	47,65	48,63	48,13	47,92	47,69	48,6	tercapai ($>$)
III	ASPEK PELAYANAN UMUM							
3.1	Layanan Urusan Wajib Dasar							
3.1.1	Pendidikan							
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	25,38	26,11	24,83	27,33	28,40	20	tercapai ($>$)
2	Angka partisipasi kasar							
	Angka partisipasi kasar SD	112,19	110,01	112,94	110,28	109,27	102,42	tercapai ($>$)
	Angka partisipasi kasar SMP	105,63	111,85	116,75	105,8	105,46	100,72	tercapai ($>$)
	Angka partisipasi kasar SMA	79,8	98,25	98,02	95,33	101,69	100	tercapai ($>$)
3	Angka pendidikan yang ditamatkan							
	Tamat SD dan SLTP	68,2	68,77	65,56	64,83	83,65	24,79	tercapai ($>$)
	Tamat SLTA keatas	31,81	31,23	34,44	35,17	89,00	34,27	tercapai ($>$)
4	Angka Partisipasi Murni							
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,68	99,3	99,75	99,41	95,58	96,82	belum tercapai ($<$)
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	79,21	77,84	82,33	94,05	85,91	77,95	tercapai ($>$)
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	67,86	71,44	73,09	77,55	75,49	59,95	tercapai ($>$)
5	Angka partisipasi sekolah							
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99,25	99,87	100	99,41	99,79	99,79	Sesuai (=)
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	91,04	97,36	98,41	97,89	98,54	98,54	Sesuai (=)
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	87,87	87,49	86,23	84,56	84,79	70,83	tercapai ($>$)
6	Angka Putus Sekolah:							
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,17	0,16	0,06	0,09	0,10	0,15	belum tercapai ($<$)
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,07	0,11	0,06	0,17	0,03	0,39	tercapai ($>$)
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,25	0,11	0,20	0,59	0,14	0,84	tercapai ($>$)
7	Angka Kelulusan:							
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	tercapai ($>$)
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,21	99,45	99,79	97,95	98,00	97,95	tercapai ($>$)
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	95,78	94,62	99,83	96,67	95,35	97,94	Belum tercapai ($<$)
8	Angka Melanjutkan (AM):							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) tercapai (>)
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	110,11	112,87	102,86	105,22	105,22	78,08	tercapai (>)
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,37	98,46	99,72	99,88	99,89	102,18	Belum tercapai (<)
	Fasilitas Pendidikan:							
9	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	70,48	71,14	65,96	70	75,25	25,74	tercapai (>)
10	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	77,73	63,38	65,23	82,44	82,45	45,66	tercapai (>)
11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	38,70	38,70	37,97	37,26	36,58	50,00	Belum tercapai (<)
12	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	0	38,70	37,97	37,26	36,58	36,58	Sesuai (=)
13	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	6	6	8	8	8	15	Belum tercapai (<)
14	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	8	8	7	7	7	20	Belum tercapai (<)
15	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	18	18	17	17	17	20	Belum tercapai (<)
16	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	3,43	3,26	3,17	3,89	3,89	15	Belum tercapai (<)
17	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	0	86,91	89,80	92,90	96,22	100	Belum tercapai (<)
18	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki	0	95,12	95,2	95,32	95,41	100	Belum tercapai (<)
19	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	94,96	95,12	98,41	96,32	98,37	95,22	tercapai (>)
20	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	52,99	54,59	63,15	65,21	66,35	65,21	tercapai (>)
3.1.2	Kesehatan							
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	14,34	18	16	22	17	25,5	tercapai (>)
2	Angka kelangsungan hidup bayi	985	979	984	973	984	984	Sesuai (=)
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	17	21	17	27	17	17	Sesuai (=)
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	0	19	11	18	11	11	Sesuai (=)
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	154	119	145	90	175	175	Sesuai (=)
6	Rasio posyandu per satuan balita	17,36	19,83	20,44	20,51	20,00	20,46	tercapai (>)
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pusku per satuan penduduk	0,625	0,597	0,652	0,645	0,637	1,13	Belum tercapai (<)
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	Belum tercapai (<)
9	Rasio dokter per satuan penduduk	0,26	0,21	0,36	0,35	0,36	0,48	Belum tercapai (<)
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	3,79	3,63	4,66	4,58	4,52	4,20	tercapai (>)



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Islami Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transapanan Kredibel Akuntabel dan Terintegritas*

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2013)	2013	2014	2015	2016	Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) tercapai (>)
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	14,78	49,66	34,73	45,76	51	80	Belum tercapai (<)
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	81,66	76,57	78,8	72,22	66,00	90,00	Belum tercapai (<)
13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	52,65	58,57	59,19	59,19	57	82,2	Belum tercapai (<)
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	tercapai (>)
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	83,5	67,7	56	57,3	62	92	Belum tercapai (<)
16	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	87,84	71,64	58,53	55,42	59,14	75,00	Belum tercapai (<)
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	100	100	100	100	100	100	Sesuai (=)
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	0,022	0,034	0,071	0,033	0	100	Belum tercapai (<)
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	23,83	28,28	43,79	25,99	13,56	92,2	Belum tercapai (<)
20	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	4,5	0	0	<5	<5persen	tercapai (>)
21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (persen)	28,83	28,28	43,79	25,99	20,2	70	Belum tercapai (<)
22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (persen)	78,1	70,5	68,5	50,5	23,5	85	Belum tercapai (<)
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	77,96	tercapai (>)
24	Penderita diare yang ditangani	100	100	100	100	100	100	Sesuai (=)
25	Angka kejadian Malaria	0	0	4	0,02	0	0	Sesuai (=)
26	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0	Sesuai (=)
27	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0	0	0	0	Sesuai (=)
28	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,007	0,007	0,007	0,007	0	0,05	tercapai (>)
29	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	45	44	71,5	75	75	85	Belum tercapai (<)
30	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	70,00	68,00	66,50	65,00	63,70	100,00	Belum tercapai (<)
31	Cakupan kunjungan bayi	63,8	65,2	67,17	69,77	70,81	100,00	Belum tercapai (<)
32	Cakupan puskesmas	108	108	108	108	108	100,00	tercapai (>)
33	Cakupan pembantu puskesmas	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	100,00	Belum tercapai (<)
34	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	85,7	86	80	81,2	79,5	100	Belum tercapai (<)

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar	Informasi Belum tercapai (=) atau tercapai (>)
35	Cakupan pelayanan nifas	81,5	80,2	75,1	99,9	72,1	100	Belum tercapai (<)
36	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	0	42,6	16,8	34,5	45	100	Belum tercapai (<)
37	Cakupan pelayanan anak balita	0	59,3	71,4	69,9	69,7	100	Belum tercapai (<)
38	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	0	81,2	86,1	61,2	92,5	100	Belum tercapai (<)
39	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	0	0	76,9	76,9	79,1	100	Belum tercapai (<)
40	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	0	0	0	0	0	100	Belum tercapai (<)
3.1.3	Pekerjaan Umum:							
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,22	0,25	0,26	0,32	0,45	0,60	Belum tercapai (<)
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	Belum tercapai (<)
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	3,00	3,00	2,00	2,00	1	0,00	Belum tercapai (<)
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	22,69	24,75	26,34	32,15	44,81	60	Belum tercapai (<)
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	7,69persen	10,70persen	11,00persen	15,07persen	15,74persen	100persen	Belum tercapai (<)
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0,30persen	0,38persen	0,30persen	0,44persen	0,44persen	0persen	Belum tercapai (<)
7	Persentase rumah tinggal bersantasi	50,00persen	55,00persen	60,00persen	65,00persen	69,00persen	67,80persen	tercapai (>)
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	1,66persen	1,53persen	1,46persen	1,33persen	1,23persen	0persen	Belum tercapai (<)
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	35persen	45persen	60persen	75persen	90persen	100persen	Belum tercapai (<)
10	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	10,50	10,50	11,00	11,50	12,00	50,00	Belum tercapai (<)
11	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	96,92persen	97,74persen	97,95persen	98,07persen	56	100persen	Belum tercapai (<)
12	Rasio Jaringan Irigasi	0,06	0,11	0,12	27,54	0,16	70,00	Belum tercapai (<)
13	Persentase penduduk berakses air minum	84,49	47,83	49,33	50,83	40,00	71,14	Belum tercapai (<)
14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	46,33	47,83	49,33	50,83	65,20	100	Belum tercapai (<)
15	Persentase areal kawasan kumuh	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,00	Belum tercapai (<)



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Islami Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan Kredibel Akuntabel dan Berintegritas*

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar	Interpretasi berdasarkan nilai persentase (0-100%)
16	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	0,02	0,02	0,02	0,03	0	0,25	Belum tercapai (<)
17	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	342,17	348,88	345,35	347,8	348,77	356	Belum tercapai (<)
18	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	3,2	3,13	3,24	3,18	3,16	3,11	tercapai (=)
3.1.4	Penataan Ruang:							
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,02	0,02	0,12	0,18	0,19	0,30	Belum tercapai (<)
2	Luasan RTH publik sebesar 20persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	1,70	1,70	2,21	3,06	4,25	100	Belum tercapai (<)
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	2,02persen	2,00persen	2,01persen	2,08persen	2,07persen	100persen	Belum tercapai (<)
4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	0	0	0	0	sesuai (=)
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00	0,50	sesuai (=)
6	Ketaatan terhadap RTRW	0	0	30	40	40	100	Belum tercapai (<)
3.1.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
1	Rasio rumah layak huni (persen)	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	100persen	Belum tercapai (<)
2	Rasio permukiman layak huni	0,981	0,982	0,983	0,983	0,27	100persen	Belum tercapai (<)
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	50persen	55persen	60persen	65persen	69persen	100persen	Belum tercapai (<)
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	50,00	51,50	53,00	54,50	56,00	100	Belum tercapai (<)
5	Persentase pemukiman yang tertata	51,00	51,00	52,00	55,00	60,00	100	Belum tercapai (<)
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,063	0,061	0,060	0,057	0,055	0	Belum tercapai (<)
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0,04persen	0,04persen	0,04persen	0,04persen	0,04persen	0persen	Belum tercapai (<)
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	9,00	8,43	8,05	7,47	7,00	0,00	Belum tercapai (<)
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	161	167	173	180	100	321	Belum tercapai (<)
10	Jumlah Desa Terpencil	68	68	68	68	39	0	Belum tercapai (<)
3.1.6	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1	Belum tercapai (<)
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	91	86	97	94	89	100	Belum tercapai (<)
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	0,0022	0,0032	0,0032	0,0031	0,0041	0,0041	sesuai (=)

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Tercapai (>)
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	74	76	79	90	89	75	tercapai (>)
5	Persentase Penegakan PERDA	91	86	97	94	89	100	Belum tercapai (<)
6	Jumlah Kasus Korupsi	0	0	0	0	1	0	Belum tercapai (<)
7	Jumlah Konflik	0	0	0	0	1	0	Belum tercapai (<)
8	Rasio Sekolah Siaga Bencana	38,52	38,52	52,86	67,14	81,43	100	Belum tercapai (<)
9	Jumlah Desa Tangguh	133	143	153	163	173	322	Belum tercapai (<)
10	Jumlah Relawan Bersertifikasi	1.325	1.325	1.495	1.650	1.823	2.250	Belum tercapai (<)
3.1.7	Sosial							
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	46persen	48persen	47persen	52persen	35persen	100	Belum tercapai (<)
2	Persentase PMKS yang tertangani	30persen	30persen	30persen	30persen	30persen	100	Belum tercapai (<)
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	15persen	20persen	20persen	25persen	25persen	100	Belum tercapai (<)
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	48persen	50persen	53persen	55persen	57persen	100	Belum tercapai (<)
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	80persen	60persen	65persen	70persen	75persen	100	Belum tercapai (<)
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	20persen	20persen	40persen	60persen	70persen	100	Belum tercapai (<)
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	74persen	55,70persen	60,30persen	64,50persen	70,10persen	100	Belum tercapai (<)
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	1,24persen	0,70persen	0,80persen	1,05persen	1,18persen	100	Belum tercapai (<)
9	Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam	206	743	14.023	337	233	0	Belum tercapai (<)
10	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (Milyar)	6,8	7,3	10,6	11,7	12,6	0	Belum tercapai (<)
3.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
3.2.1	Tenaga Kerja							
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	96,15	86,54	76,92	76,92	76,92	0	Belum tercapai (<)
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0	24,11	168,3	116,25	0	100	Belum tercapai (<)
3	Keselamatan dan perlindungan	50	75	80	76,92	76,92	100	Belum tercapai (<)
4	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan	100	0	0	50	100	100	sesuai (=)



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Tolami Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas*

NO	BIDANG JURUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
	pemerintah daerah							
5	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45	0	0	0	0	0	Belum tercapai (<)
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
9	Rasio lulusan S1/S2/S3	116	115	112	115	115	100	Belum tercapai (<)
10	Persentase mantan kombatan yang terserap dalam lapangan kerja	0	0	0	0	0	0	Belum Terdata
3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	55persen	53persen	53persen	55persen	51persen	30persen	tercapai (>)
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	6,67	6,67	8,00	8,00	8,00	30persen	Belum tercapai (<)
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	45,09persen	47,06persen	47,34persen	45,32persen	49,30persen	30persen	tercapai (>)
4	Rasio KDRT	0,07	0,04	0,06	0,05	0,05	0	Belum tercapai (<)
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	1,99	1,94	1,91	1,74	2,80	0	Belum tercapai (<)
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	19,87	20,08	20,22	21,89	21,89	30,00	Belum tercapai (<)
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar	Interpretasi belum tercapai (+) sesuai (=) tercapai (>)
	mendapatkan layanan bantuan hukum							
12	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
14	Jumlah SKPK dan Desa yang melaksanakan PPRG	0	0	0	0	47	369	Belum tercapai (<)
3.2.3	Pangan							
1	Ketersediaan pangan utama	27,10	36,13	45,31	45,51	38,95	100	Belum tercapai (<)
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	0	0	0	0	3,543	2,400	tercapai (>)
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
3.2.4	Pertanahan							
1	Persentase luas lahan bersertifikat	12,50	13,62	24,16	25,42	26,97	100	Belum tercapai (<)
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	0	60	60	66,67	25,00	100	Belum tercapai (<)
3	Penyelesaian izin lokasi	100	0	100	100	100	100	sesuai (=)
3.2.5	Lingkungan Hidup							
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	ada	Belum tercapai (<)
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	0	0	0	0	0	ada	Belum tercapai (<)
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	0	0	0	0	0	ada	Belum tercapai (<)
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	0	32	32	32	32	32	sesuai (=)
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	0	6	6	6	6	6	sesuai (=)
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	10,00persen	10,00persen	11persen	12persen	13persen	75persen	Belum tercapai (<)
7	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	2 Kali	0	0	0	0	2 Kali	Belum tercapai (<)
8	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	0	0	3 Kali	3 Kali	3 Kali	sesuai (=)
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	0	0	0	14 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	sesuai (=)



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Telami Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan Kredibel Akuntabel dan Terintegrasi

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar	Realisasi Sesuai (=) Belum tercapai (<)
10	Timbulan sampah yang ditangani	0	60	65	67	70	70	Sesuai (=)
11	Persentase cakupan area pelayanan	0	0	0	0	75	100	Belum tercapai (<)
12	Persentase jumlah sampah yang tertangani	30	35,25	52,3	58,7	59,54	100	Belum tercapai (<)
13	Pencemaran Mutu Air	0	0	0	0	40	0	Belum tercapai (<)
3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,5	0,5	0,61	0,78	0,85	1,00	Belum tercapai (<)
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,50	0,33	0,35	0,37	0,55	1,00	Belum tercapai (<)
3	Rasio pasangan berakte nikah	0,45	0,45	0,05	0,07	0,35	1,00	Belum tercapai (<)
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sesuai (=)
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	50,35persen	50,35persen	61,18persen	77,77persen	78,00persen	100	Belum tercapai (<)
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	4,09persen	6,97persen	10,15persen	12,82persen	75,00persen	100 persen	Belum tercapai (<)
3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	40	40	57	60	74,22	100	Belum tercapai (<)
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	100	Belum tercapai (<)
3	Persentase PKK aktif	13,84	13,84	13,84	100	89	100	Belum tercapai (<)
4	Persentase Posyandu aktif	92,50	93,40	94,30	94,80	94,80	100	Belum tercapai (<)
5	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	25	35	35	35	35	65	Belum tercapai (<)
6	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	50	55	60	60	60	100	Belum tercapai (<)
7	Jumlah BUMG yang aktif	75	75	75	75	75	322	Belum tercapai (<)
3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,00	1,40	1,49	1,86	2,10	2,33	Belum tercapai (<)
2	Total Fertility Rate (TFR)	3,50	3,27	3,14	3,00	2,97	2,28	Belum tercapai (<)
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Terdata
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Terdata

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Terdata
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Terdata
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Terdata
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,5	3,18	3,17	3,11	3,46	2,1	Belum tercapai (<)
9	Ratio Akseptor KB	62,96	61,47	64,27	67,07	68,27	74,8	Belum tercapai (<)
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	63,37	63,99	65,23	67,07	71,95	100	Belum tercapai (<)
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	11	10,66	10,66	6,04	6,04	3,5	Belum tercapai (<)
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	19,50	19,50	19,34	18,49	18,00	9,91	Belum tercapai (<)
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	8,20	8,20	9,12	9,66	8,17	22,89	Belum tercapai (<)
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	38,70	39,25	41,75	42,53	49,24	63,78	Belum tercapai (<)
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	83,05	83,4	83,75	84,12	84,45	100	Belum tercapai (<)
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	96,25	96,77	96,77	96,77	97,10	97,10	sesuai (=)
18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	8,33	8,33	8,33	8,33	16,67	50,00	Belum tercapai (<)
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	166,67	166,67	250	300	258,33	258,33	sesuai (=)
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Terdata
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan	57,56	57,56	57,56	57,56	60,61	60,61	sesuai (=)



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
	KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan							
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	67,96	67,96	55,35	50,00	59,33	100,00	Belum tercapai (<)
27	Rata-rata usia kawin pertama wanita	24	24	24	25	25	27	Belum tercapai (<)
28	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0	0	10,14	15,75	17,94	20	Belum tercapai (<)
3.2.9	Perhubungan							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	76.764	83.664	85.813	83.508	114.624	114.624	sesuai (=)
2	Rasio ijin trayek	0,00002	0,00002	0,00006	0,00004	0,00003	0,00003	sesuai (=)
3	Jumlah uji kir angkutan umum	1.963	1.998	2.164	2.389	3.822	3.822	sesuai (=)
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	4	4	5	6	8	8	sesuai (=)
5	Persentase layanan angkutan darat	0,00018	0,00019	0,00012	0,00019	0,0029	0,0029	sesuai (=)
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	20,4	20,4	25,28	26,65	26,67	26,67	sesuai (=)
7	Pemasangan Rambu-rambu	60,00persen	60,40persen	79,80persen	80,40persen	76,90persen	100persen	Belum tercapai (<)
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	216,37	Belum tercapai (<)
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	113,088	105,616	130,617	137,617	91,437	91,437	sesuai (=)
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	76.764	82.665	85.818	83.075	87.075	87.075	sesuai (=)
3.2.10	Komunikasi dan Informatika							
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	5	7	9	10	10	10	sesuai (=)
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	sesuai (=)
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	75,00	80,00	82,00	83,00	85,00	85,00	sesuai (=)
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0	0	0	0	0	100	Belum tercapai (<)
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0	0	0	0	0	100	Belum tercapai (<)
3.2.11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah							
1	Persentase koperasi aktif	52,06	58,03	50	54,9	62,5	70,81	Belum tercapai (<)
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	30	35	40	45	50	50	sesuai (=)

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
3	Persentase BPR/LKM aktif	5	5	8	12	15	15	sesuai (=)
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	43,28	63,66	44,44	82,33	76,44	76,44	sesuai (=)
3.2.12	Penanaman Modal							
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	68	94	103	124	15	15	sesuai (=)
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	647,7	2253,01	2949,36	4171,16	3,808	3,808	sesuai (=)
3	Rasio daya serap tenaga kerja	28,93	26,98	28,01	24,88	23,01	50	Belum tercapai (<)
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	100	71,25	23,61	29,29	4,283	4,283	sesuai (=)
3.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga							
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	45	45	48	55	55	59	sesuai (=)
2	Persentase wirausaha muda	0	0	0	0	16,70	16,70	sesuai (=)
3	Cakupan pembinaan olahraga	0	0	13,04	17,39	13,04	13,04	sesuai (=)
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0	0	30	60	60	60	sesuai (=)
5	Cakupan pembinaan atlet muda	0	0	24	24	24	24	sesuai (=)
6	Jumlah atlet berprestasi	0	0	2	0	9	9	sesuai (=)
7	Jumlah prestasi olahraga	0	0	11	0	9	11	Belum tercapai (<)
3.2.14	Statistik							
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
3.2.15	Persandian							
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	Belum tercapai (<)
3.2.16	Kebudayaan							
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	1	1	1	8	7	tercapai (>)
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	3	10	17	17	sesuai (=)
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	0	2	2	2	2	2	sesuai (=)
3.2.17	Perpustakaan							
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,15	0,17	0,18	0,18	0,19	0,50	Belum tercapai (<)
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,2	0,2	0,28	0,27	0,27	0,50	Belum tercapai (<)

NO	INDIKATOR	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Tercapai (>)
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,31	0,31	0,33	0,35	0,37	1,00	Belum tercapai (<)
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	20.764	23.033	23.822	24.577	25.341	25.341	Sesuai (=)
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	7.734	8.522	9.464	11.379	12.579	12.579	Sesuai (=)
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	8	8	8	7	7	7	Sesuai (=)
3.2.18	Kearsipan							
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	23persen	29persen	35persen	46persen	56persen	100persen	Belum tercapai (<)
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	1	1	1	1	Sesuai (=)
3.3	Layanan Urusan Pilihan							
3.3.1	Pariwisata							
1	Kunjungan wisata	987	1.099	1.118	1.055	1.055	1.332	Sesuai (=)
2	Lama kunjungan Wisata	0	0	0	0	0	0	Sesuai (=)
3	PAD sektor pariwisata	0	0	0,00003	0,00012	0,00013	0,00013	Sesuai (=)
3.3.2	Pertanian							
1	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	30,19	30,96	30,94	32,35	33,38	33,38	Sesuai (=)
2	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	22,6	23,4	23,47	24,81	25,15	25,15	Sesuai (=)
3	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	30,19	30,96	30,94	32,35	53	53	Sesuai (=)
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,23	4,48	5,22	6,03	5,23	5,23	Sesuai (=)
5	Cakupan bina kelompok petani	76	82	85	97	97	100	Belum tercapai (<)
3.3.3	Kehutanan							
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	11,73	11,78	11,84	11,95	11,95	100	Belum tercapai (<)
2	Kerusakan Kawasan Hutan	4,51	4,73	4,97	4,97	4,97	0	Belum tercapai (<)
3	Jumlah Kasus Kebakaran Lahan					1	0	Belum tercapai (<)
3.3.4	Energi dan Sumber Daya Mineral							
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	95,23	87,75	98,29	99,9	99,9	97,62	tercapai (>)
2	Rasio ketersediaan daya listrik	76,9	80	74,1	74,6	74,6	89,53	Belum tercapai (<)
3	Persentase pertambangan tanpa ijin	57,54	59,08	34	51,49	51,49	0	Belum tercapai (<)
3.3.5	Perdagangan							
1	Ekspor Bersih Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	7,43	9,54	9,91	23,07	18,96	18,96	sesuai (=)
3.3.6	Perindustrian							
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	0,18	0,28	3,96	4,79	6,96	10	Belum tercapai (<)
3.3.7	Transmigrasi							
1	Persentase transmigran swakarsa	6,3	5,7	51,3	13,8	13,8	10	Belum tercapai (<)
3.3.8	Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi perikanan	79,42	82,23	83,33	83,34	91,26	91,26	sesuai (=)
2	Konsumsi ikan	91,5	93,6	95,83	98,06	99	99	sesuai (=)
3	Cakupan bina kelompok nelayan	40,58	43,55	49,43	43,14	45,25	45,25	sesuai (=)
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	17	20	21,18	23,33	25	25	sesuai (=)
5	Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	17	20	21,18	23,33	25	25	sesuai (=)
3.4.1	Perencanaan Pembangunan							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
3.4.2	Keuangan							
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	tercapai (>)
2	Persentase SILPA terhadap APBD	5,52	9,62	14,35	9,09	3,27	3,27	sesuai (=)
3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0	0	0	0	0	0	sesuai (=)
4	Persentase belanja pendidikan (20persen)	20	20	20	20	20	20	sesuai (=)
5	Persentase belanja kesehatan (10persen)	10	12	14	16	17	10	tercapai (>)
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	25,67 : 74,33	41,10 : 58,89	52,04 : 7,95	46,69 : 3,31	42,77 : 57,23	42,77 : 57,23	sesuai (=)



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0	0	0	0	0	0	sesuai (=)
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	sesuai (=)
3.4.3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	PIM IV 40 hari	PIM III 50 hari	Prajab 6 hari	PIM IV 45 hari	PIM 120 hari	PIM 120 hari	sesuai (=)
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	28,97persen	38,01persen	38,01persen	39,02persen	40,20persen	40,20persen	sesuai (=)
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	18,80	27,10	27,10	27,90	32,00	32,00	sesuai (=)
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	23	23	23	23	23	32	Belum tercapai (<)
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	257	259	261	261	266	266	sesuai (=)
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.643	1.758	1.722	1.724	1.828	1.828	sesuai (=)
3.4.4	Penelitian dan pengembangan							
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	0	0	0	0	0	100	Belum tercapai (<)
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	0	0	0	0	0	100	Belum tercapai (<)
	Penerapan SIDA:							
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	0	0	0	0	14,89	14,89	sesuai (=)
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	0	0	0	0	100	100	sesuai (=)
3.4.5	Pengawasan							
1	Persentase tindak lanjut temuan	2persen	2persen	2persen	4persen	2persen	100	Belum tercapai (<)
2	Jumlah temuan BPK yang di tindaklanjuti (persen)	56,86	79,31	90,24	75,51	97,67	100	Belum tercapai (<)
3.4.6	Sekretariat Dewan							
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal Kinerja KPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar	interpretasi belum tercapai (-) sesuai (=) tercapai (+)
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)

2.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) untuk menyempurnakan MDG's;

- Lebih komprehensif disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang;
- Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta;
- Menekankan pada Hak Asasi Manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya;
- Inklusif, secara spesifik menyasar kepada yang rentan – no one left behind;
- Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, OMS & media, filantropi dan bisnis, serta pakar dan akademisi;
- MDGs hanya menargetkan pengurangan "setengah", SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator "Zero Goals";
- Tidak hanya memuat Goals tetapi juga Cara Pelaksanaan (Means of Implementation).

Pelaksanaan Tujuan pembangunan Berkelanjutan berdasarkan atas 3 prinsip;

- Universal, dilaksanakan oleh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang;
- Integration, Dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (saling terkait); dan
- No-One Left Behind, Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, Memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan

Gambar 2.46.
Goal, Target, dan Indikator dalam 4 Pilar
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia



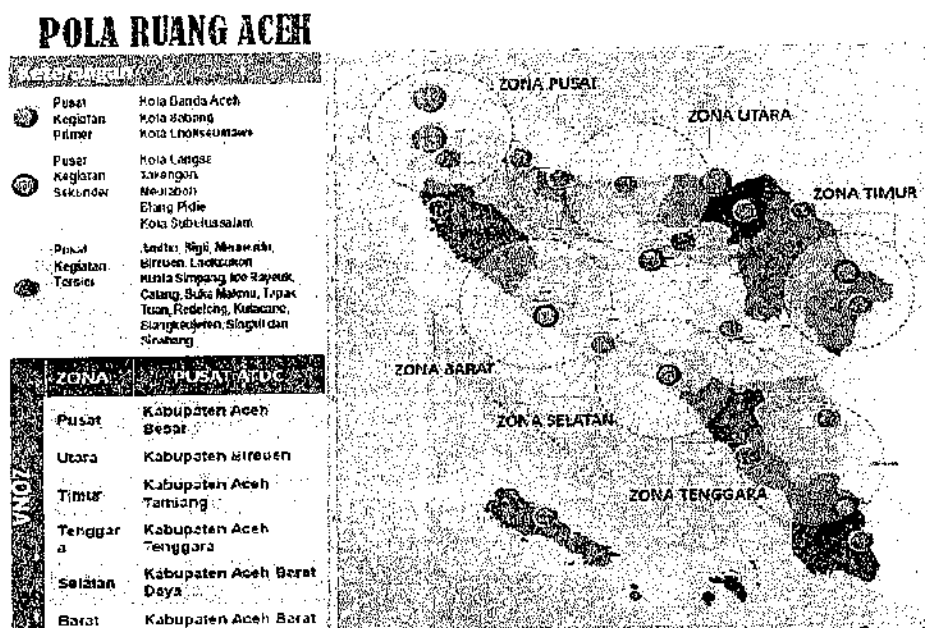
2.8. Telaahan terhadap Dokumen RTRW Kabupaten Aceh Barat

A. Potensi Pengembangan Wilayah

Sebelum melihat potensi pengembangan wilayah pada dokumen RTRW Kabupaten Aceh Barat, ada baiknya terlebih dahulu ditinjau Dokumen Rencana Tata Ruang dalam lingkup wilayah yang lebih luas dan keterkaitannya dengan Kabupaten Aceh Barat. Dokumen tersebut antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Kepulauan (RTR Pulau Sumatera), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA).

Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dapat dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Meulaboh selaku ibukota Kabupaten Aceh Barat dalam struktur ruang perkotaan nasional ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW ini mengandung makna perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota di wilayah pesisir barat selatan Aceh. Meulaboh juga ditetapkan sebagai lokasi pengembangan Pelabuhan Nasional satu-satunya di wilayah barat selatan Aceh. Terkait dengan hidrologi, Wilayah Sungai Woyla-Seunagan menjadi Wilayah Sungai Strategis Nasional. Dalam RTRWN dimaksud juga disebutkan bahwa Taman Nasional Gunung Leuser yang sebagian wilayahnya berada di Aceh Barat, tepatnya di Kecamatan Pante Ceureumen ditetapkan sebagai kawasan lindung yang juga merupakan Kawasan Strategis Nasional dengan nama Kawasan Ekosistem Leuser. Terkait dengan Kawasan Andalan, dalam RTRWN disebutkan bahwa Kawasan Barat Selatan Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Barat memiliki sektor unggulan yang perlu dikembangkan berupa pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan.

Gambar 2.47.
Pola Ruang Propinsi Aceh



2.9. Telaah terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No. 32 Tahun 2009). Seiring dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka



diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya pada pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS dalam UU PPLH Pasal 1 (angka 10) dan dalam Permendagri No 86 tahun 2017 pasal 1 (angka 66) disebutkan bahwa KLHS adalah sebagai "rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program". KLHS ini sangat penting karena pada saat ini kita dihadapkan pada permasalahan degradasi lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan, sehingga dalam setiap program pembangunan saat ini wajib memperhatikan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

Sebagai daerah yang pada saat ini sedang menyusun RPJMD yakni untuk tahun 2017-2022, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat wajib melaksanakan KLHS terhadap RPJMD yang sedang disusun tersebut. KLHS ini dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, sehingga dapat diperkirakan dampak terhadap lingkungan hidup apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dalam RPJMD dimaksud akan dilaksanakan. Asdak (2012) menyatakan bahwa KLHS tidak mengkaji dampak sebuah proyek, melainkan mengkaji dampak sebuah Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Karenanya hasil dari kajian ini tentunya bersifat strategik, untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan KRP yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022. Dengan kata lain, dengan adanya pertimbangan terhadap aspek lingkungan melalui KLHS diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisasi sehingga pembangunan yang berkelanjutan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan dapat diwujudkan di Kabupaten Aceh Barat.

Maksud dari penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 adalah untuk memastikan bahwa Kebijakan, Rencana dan Program atau disingkat KRP yang termuat di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 telah terintegrasi dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan yang menjadi tujuan penyusunan KLHS adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan bahwa KRP yang termuat di dalam Rancangan RPJMD RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni: (a) saling ketergantungan (*interdependency*), yaitu meliputi saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ ekologi; dan (c) prinsip keadilan (*justice*) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.
2. Meningkatkan kualitas RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 sebagai upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan cara

memberikan kontribusi perbaikan materi rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 melalui:

- Pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022 terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
- Perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Barat periode Tahun 2017 - 2022.
- Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022.
- Peningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan KLHS.

Ruang lingkup kegiatan KLHS RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022 tetap mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia No. SE. 04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS meliputi : (1) tahap persiapan; (2) tahap pra-pelingkupan; (3) tahap pelingkupan; (4) tahap identifikasi dan analisis data; (5) tahap kajian pengkajian; (6) tahap perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif; dan (7) tahap rekomendasi.

Adapun kerangka pikir penyusunan KLHS RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.48.
Kerangka Pikir Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022



Atas dasar bagan di atas, secara metodologi ada 4 (empat) tahapan penting yang harus dilalui dalam seluruh tahapan kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022, yaitu:

1. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi hal penting terutama keterlibatan mereka dalam pengkajian Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) dan rumusan alternatif KRP. Dengan keterlibatan ini para pemangku dapat turut memberikan rekomendasi perbaikan terhadap KRP.
2. Melakukan kajian KRP, yaitu melalui kegiatan; (1) Pra Pelingkupan yaitu menginventarisasi daftar panjang permasalahan termasuk lingkup wilayah dan kebutuhan data/informasi; (2) Pelingkupan untuk menetapkan isu strategi dengan cara melakukan penilaian (skoring) berdasarkan indikator yang ditetapkan; dan (3) Mendeskripsikan isu-isu strategis yang ditetapkan dengan menggunakan *baseline data* yang ada untuk kemudian menjadi dasar untuk melakukan analisis KLHS.
3. Analisis KLHS dilakukan melalui berbagai kegiatan :
 - a. Kajian Konsisten untuk mengkaji; (1) prinsip keterkaitan atau ketergantungan (*interdependency*), yaitu meliputi saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (2) prinsip keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan (3) prinsip keadilan (*justice*) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.
 - b. Kajian Pengaruh dengan cara melakukan analisis pengaruh antara indikasi program prioritas RPJM dengan isu strategis dengan cara memberikan nilai; (+) apabila berpengaruh positif; (0) apabila tidak berpengaruh; dan (-) apabila berpengaruh secara negatif. Indikasi program yang dinilai berpengaruh negatif (-) selanjutnya akan dianalisis dan dideskripsikan lebih lanjut dengan 6 (enam) muatan KLHS (analisis pengaruh kumulatif).
 - c. Perumusan mitigasi/ adaptasi dan/ atau alternatif sebagai upaya untuk meminimalkan potensi dampak terhadap kerusakan lingkungan yang diperkirakan muncul dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan para pakar terhadap rumusan mitigasi/ adaptasi dan/ atau alternatif yang sudah disiapkan Pokja Pengendalian Lingkungan KLHS RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022.
4. Rekomendasi hasil KLHS kepada Tim Penyusun RPJM untuk dapat diintegrasikan ke dalam KRP RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022.

Pengintegrasian rekomendasi KLHS oleh tim Penyusun RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022. Pengintegrasian rekomendasi KLHS tersebut dilakukan dalam Rancangan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022. Perbandingan isu strategis RPJM dengan isu strategis KLHS RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022 diperlihatkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.158
Perbandingan dan Keterkaitan Isu strategis RPJM dengan Isu Strategis KLHS

Isu Strategis RPJMD	Isu Strategis KLHS
1. Pelaksanaan Syariat Islam yang belum optimal	1. Kesenjangan sosial
2. Pelaksanaan dan perawatan perdamaian Aceh yang belum optimal	1. Kesenjangan sosial
3. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang masih tinggi	1. Kesenjangan sosial 2. Rendahnya daya saing daerah
4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam unggulan yang menjadi sektor basis	1. Rendahnya daya saing daerah 2. Belum meratanya infrastruktur daerah
5. Masih seringnya terjadi bencana alam	1. Pencemaran lingkungan 2. Alih fungsi lahan 3. Belum tertatanya sistem Pengelolaan lingkungan hidup 4. Degradasi lingkungan 5. Bencana alam 6. Belum meratanya infrastruktur daerah
6. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih lemah	7. Rendahnya daya saing daerah 8. Kesenjangan sosial
7. Belum berkembangnya objek wisata spritual, budaya dan adat istiadat	1. Belum meratanya infrastruktur daerah
8. Masih terbatasnya infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat	1. Belum meratanya pelayanan kesehatan 2. Belum meratanya infrastruktur daerah
9. Ketahanan pangan yang belum optimal	1. Rendahnya daya saing daerah
	2. Alih fungsi lahan
	3. Belum meratanya infrastruktur daerah
	4. Belum tertatanya sistem pengelolaan lingkungan hidup

Sumber : Hasil analisis RPJM dan Hasil KLHS, 2017

Tabel di atas memperlihatkan bahwa isu strategis terkait dengan aspek sosial dan ekonomi serta lingkungan hidup sudah menjadi bagian dari isu strategis RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022.

Berdasarkan kajian konsistensi Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah RPJM Kabupaten Aceh Barat yang sedang disusun terhadap Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi Prinsip Keterkaitan, Keseimbangan, dan Keadilan, maka diusulkan untuk menambahkan beberapa hal;

- *Catatan integrasi terhadap Visi:*

Visi RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 adalah: "TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS". Bagaimana saling keterkaitan, keseimbangan dan keadilan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dijelaskan pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.159
Visi RPJM Kabupaten Aceh Barat dan Kaitannya dengan
Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Visi dan Penjelasannya	Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Visi : “TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS”	
Penjelasan : “Islami” : Pemerintah dan masyarakat Aceh Barat dalam melaksanakan pembangunan sosial kemasyarakatan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islami dan nilai luhur Pancasila dengan mengedepankan amar ma’ruf dan nahi mungkar untuk mewujudkan keadilan sosial (<i>Baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur</i>).	Konsep : (1) lingkungan hidup sehat dan (2) lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman
Penjelasan : “Pembangunan” Pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat, untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.	Konsep : hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua masyarakat
Penjelasan : “Ekonomi Kerakyatan”: Membangun ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan menganut sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Dengan kata lain ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam berpartisipasi aktif meningkatkan perekonomian dalam berbagai usaha-usaha produktif.	Konsep : hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua masyarakat

Sumber : Hasil analisis RPJM dan Hasil KLHS, 2017

- Catatan integrasi terhadap Misi :

Misi RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 pada tabel di atas sudah menggunakan konsep-konsep terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.160
Misi RPJM Kabupaten Aceh Barat dan Kaitannya dengan
Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Misi RPJM Kabupaten Aceh Barat	Usulan Pokja PL
Misi 1 : Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syar’i dan mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang bersih	Misi 1 lebih menekankan aspek sosial dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Misi 2 : Mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila,	Misi 2 lebih menekankan aspek sosial dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip

Misi RPJM Kabupaten Aceh Barat	Usulan Pokja PL
UUD 1945, MoU Helsynki dan UUPA	pembangunan berkelanjutan.
Misi 3 : Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi secara terpadu dalam lintas program SKPK berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan	Misi 3 lebih menekankan aspek ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam program-program pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan SDA agar dapat menjamin keberlanjutan pembangunan.
Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan Sumberdaya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak (honorar) dan Teungku Dayah dalam menghadapi persaingan global	Misi 4 lebih menekankan aspek sosial dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Misi 5 : Mengembangkan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni, budaya, adat dan adat istiadat serta olahraga sesuai dengan potensi kedaerahan (kearifan lokal) agar semua itu dapat terlaksana dengan baik	Misi 5 lebih menekankan aspek sosial dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Misi 6 : Pembangunan Prasarana dan sarana Infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona ketahanan pangan nasional	Misi 6 lebih menekankan aspek ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam program-program pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan SDA agar dapat menjamin keberlanjutan pembangunan.
Misi 7 : Memberikan pelayanan kesehatan menuju masyarakat Aceh Barat yang sehat jasmani dan rohani serta meningkatkan SDM bidang kesehatan	Misi 6 lebih menekankan aspek ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam program-program pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan SDA agar dapat menjamin keberlanjutan pembangunan.
Misi 8 : Meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu serta membuka akses pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada putra dan putri Aceh Barat yang berprestasi dan kurang mampu	Misi 8 lebih menekankan aspek sosial dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sumber : Hasil analisis RPJM dan Hasil KLHS, 2017

- Catatan integrasi terhadap tujuan dan sasaran

Misi RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 sudah menggunakan konsep-konsep terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dijelaskan pada tabel di bawah ini



Tabel 2.161

Tujuan dan Sasaran RPJM Kabupaten Aceh Barat dan Kaitannya dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Dan Sasaran RPJM Kabupaten Aceh Barat	Usulan Pokja PL
Misi 3, Tujuan 1 sasaran 1 menyatakan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Usulan tambahan kalimat : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan
Misi 3, Tujuan 1 Sasaran 5 menyatakan: Meningkatnya iklim investasi	Usulan tambahan kalimat : Meningkatnya investasi dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan
Misi 3, Tujuan 2, Sasaran 1 menyatakan: Meningkatnya pengelolaan potensi pertanian	Usulan tambahan kalimat: Meningkatnya pengelolaan potensi pertanian berkelanjutan
Misi 3, Tujuan 2, Sasaran 2 menyatakan: Meningkatnya pengelolaan potensi kelautan	Usulan tambahan kalimat: Meningkatnya pengelolaan potensi kelautan lestari
Misi 6, Tujuan 1, Sasaran 1 menyatakan: Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah	Usulan tambahan kalimat: Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Sumber : Hasil analisis RPJM dan Hasil KLHS, 2017

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 pada dasarnya sudah menggunakan konsep-konsep terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.162

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Kaitannya dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Usulan/ Tanggapan Pokja PL
Misi 3, Strategi 5 : Meningkatkan peluang investasi, dengan arah kebijakan: 1. Optimalisasi pelaksanaan Syariat Islam; 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi; 3. Stabilitas perdamaian; 4. Pembangunan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan; 5. Peningkatan kesejahteraan Sumber Daya Manusia yang profesional; 6. Pengembangan dan pelestarian budaya dan adat istiadat; 7. Pembangunan infrastruktur, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup; 8. Peningkatan derajat kesehatan; dan 9. Peningkatan kualitas pendidikan.	Dari berbagai strategi yang ada dan arah kebijakan yang ditentukan telah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sumber : Hasil analisis RPJM dan Hasil KLHS, 2017

Terkait dengan kebijakan dan program pembangunan daerah, dari 305 program yang ada dalam dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat tahun 2017-2022, ada 11 (sebelas) program prioritas untuk KLHS, yaitu: (1) Program pembangunan Jalan Dan Jembatan; (2) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong; (3) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan; (4) Program Pembangunan Sarana dan prasarana perhubungan; (5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; (6) Program pengembangan Destinasi Pariwisata; (7) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; (8) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; (9) Program Pengembangan Perikanan Tangkap; (10) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; dan (11) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Selanjutnya pada bab IV sudah dijelaskan, apabila 11 (sebelas) program ini dijalankan maka perlu memperhatikan dampak negatifnya terutama terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga dapat dikurangi dampak negatifnya melalui mitigasi dan/atau alternatif pengurangan dampak.

Proses integrasi kebijakan umum dan program pembangunan adalah Perangkat Daerah yang akan menjalankan 11 (sebelas) program tersebut harus melakukan KLHS lanjutan pada saat penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah bersangkutan atau disebut dengan KLHS Renstra. Adapun SKPD Kabupaten Aceh Barat yang harus melaksanakan KLHS Renstra adalah : (1) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG; (2) DINAS PERHUBUNGAN; (3) DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN; (4) DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA; (5) DINAS PERDAGANGAN; (6) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN; (7) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Selain 10 program di atas, menjawab kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Aceh Barat, maka ada 2 (dua) isu penting yang perlu menjadi catatan karena akan mempengaruhi pencemaran lingkungan:

a) Permasalahan Bencana

Terdapat berbagai macam potensi bencana yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Aceh Barat termasuk dalam daerah rawan bencana tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, angin puting beliung, abrasi, kebakaran hutan lahan serta penyebaran penyakit endemik.

Terkait dengan hal tersebut, dalam dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat 2017-2022 telah dengan tegas disebutkan bahwa berbagai upaya pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan aspek kebencanaan/ kawasan rawan bencana serta pertimbangan arahan tata ruang. Hal ini dapat dilihat pada misi ke-3 yaitu Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi secara terpadu dalam lintas program perangkat daerah berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan.

b) Permasalahan Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan Perkebunan

Kabupaten Aceh Barat merupakan wilayah yang memiliki cukup luas kawasan perkebunan aktif baik yang dimiliki oleh perusahaan maupun perseorangan/ masyarakat. Pertumbuhan lahan perkebunan semakin lama semakin meningkat terutama untuk pemanfaatan lahan perkebunan sawit yang menjadi salah satu komoditi utama perkebunan Kabupaten Aceh Barat.

Terkait dengan hal tersebut selain program untuk mendukung pengembangan sektor tersebut seperti (1) Program dalam program diarahkan untuk: (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; (2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan (3) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan bentuk-bentuk kegiatan berupa:

- Pengendalian pemanfaatan lahan perkebunan;
- Rehabilitasi lahan kritis; dan
- Konservasi sumberdaya alam.

c) Permasalahan Kegiatan Pertambangan

Sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar, pada saat ini telah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap potensi tambang yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Potensi tambang utama yang ada di Kabupaten Aceh Barat adalah batu bara dan emas.

Terkait dengan batu bara, sudah terdapat beberapa perusahaan besar yang melakukan eksploitasi dalam skala yang cukup besar terhadap potensi tambang ini. Meskipun pertimbangan dan izin lingkungan telah dimiliki, namun potensi pencemaran lingkungan masih cukup besar terjadi. Selain batu bara, emas yang juga tersedia di bumi Kabupaten Aceh Barat juga telah mulai dieksplotasi. Kegiatan penambangan emas ini tidak semua legal, dimana cukup banyak juga penambangan emas liar di pelosok Kabupaten Aceh Barat yang tidak dapat pengawasan dari pihak-pihak terkait.

Hal ini tentu menjadi perhatian tertentu dalam upaya pengendalian keseimbangan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Barat. Terkait dengan pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Urusan Pertambangan termasuk juga Kehutanan, merupakan urusan dari Pemerintah Provinsi, maka terkait hal ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan mengupayakan menyampaikan permasalahan-permasalahan tersebut kepada pihak Pemerintah Provinsi Aceh.

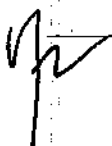
2.10. Telaahan terhadap Dokumen Kebencanaan

Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana/FRPB sebagai tempat koordinasi dan informasi dengan melibatkan seluruh unsur yang mempunyai perhatian kepada kegiatan pengurangan risiko bencana yang kepengurusannya berlaku selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam rangka memudahkan arus informasi bencana, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Satgas Komunikasi dengan melibatkan organisasi dan instansi terkait.

Disamping melaksanakan fungsi penanggulangan bencana, BPBD dapat melakukan kegiatan penanggulangan kebakaran dengan membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran yang terdiri dari berbagai unsur instansi dan organisasi kemanusiaan lainnya.

BPBD dapat dilibatkan dalam upaya koordinasi dan pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban di laut, sungai dan hutan karena faktor kelalaian dan bukan bencana atau musibah kecelakaan pesawat udara dan kapal laut sebagai zona evakuasi bersama.



BPBD berwenang melaksanakan inventarisasi dan sertifikasi relawan ke BNPB sekaligus melakukan pembinaan terhadap relawan.

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Partisipasi dapat dilakukan oleh perseorangan dan kelompok/organisasi.

Dalam memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masyarakat bersama dengan aparat pemerintah kabupaten serta dunia usaha harus membentuk Komunitas Masyarakat Penanggulangan Bencana/KMPB atau Desa Tangguh untuk level gampong dan kecamatan tangguh untuk level kecamatan dengan minimal memuat fungsi kegiatan pra bencana, saat bencana dan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

2.11. Telaahan terhadap Dokumen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

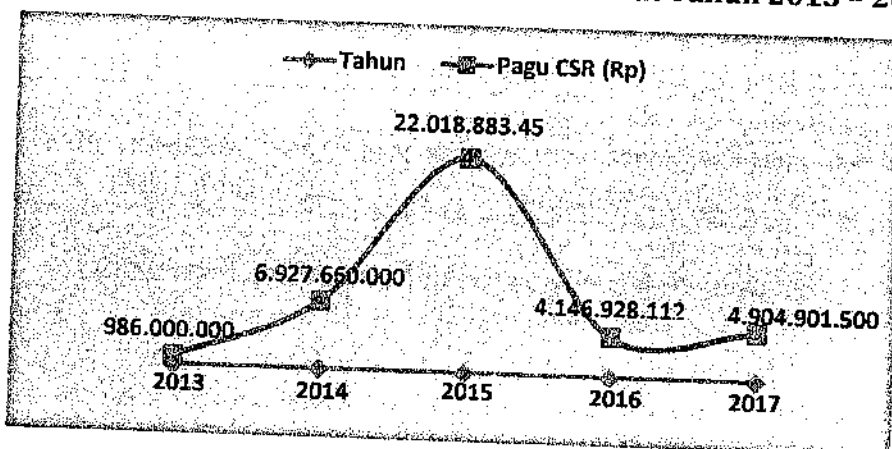
Tahun 2013, Awal pelaksanaan CSR secara terpadu dirintis melalui Nota Kesepahaman No.5/III/NPB/2013, No. 043/Mifa-Kab.AB/NK/VII/2013 tentang Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPMA) antara PT. Mifa Bersaudara dan Pemerintah Aceh Barat.

Tahun 2014, Pemerintah Aceh Barat kembali membangun komunikasi dengan seluruh perusahaan swasta secara intens sehingga dikeluarkan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Hasilnya 14 dari 22 perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat bersedia ikut program CSR untuk kegiatan 2015. Sementara yang lain tidak ikut dengan berbagai alasan. Pada tahun 2015 diterbitkan Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 10 tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang mengatur Peran dan Fungsi masing-masing pihak. Qanun ini menerangkan aturan main terhadap Pelaksanaan CSR sehingga mudah ditiru.

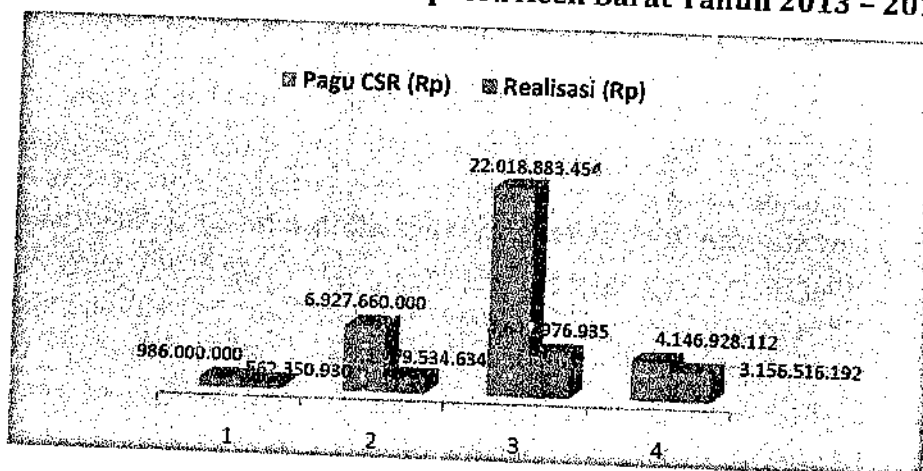
Telah tersusun 83 Program dan 264 Kegiatan CSR yang terarah dan terpadu bagi masyarakat Aceh Barat, dengan rincian Bidang Ekonomi memiliki 23 program dan 66 kegiatan, Bidang Kesehatan memiliki 9 program dan 30 kegiatan, Bidang Pendidikan memiliki 11 program dan 48 kegiatan, Bidang Sosial Budaya, Pemuda dan Olahraga memiliki 17 program dan 49 kegiatan, Bidang Keagamaan memiliki 14 program dan 56 kegiatan dan Bidang Infrastruktur memiliki 9 program dan 15 kegiatan. Total penerima manfaat mencapai 15.285 individu, 5.937 KK, 43 lembaga Pemerintahan dan Ormas, 41 Klub Olahraga dan kesenian, 114 desa serta 58 *stakeholders* dan *vendor* lokal.

Total pendanaan CSR Tahun 2013 yang dirintis bersama PT Mifa awalnya sebesar Rp986.000.000,00 menjadi Rp6.927.660.000,00 pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2015 dari target Rp22.018.883.454,00 terealisasi Rp4.641.976.935,00 (14 perusahaan), Tahun 2016 jumlah perusahaan bertambah menjadi 15 perusahaan dengan pendanaan sebesar Rp4.146.928.112,00 dan terealisasi Rp3.156.516.192,00 Tahun 2017 skema pendanaan sebesar Rp4.904.901.500,00 (15 perusahaan). Penurunan jumlah dana CSR ini terjadi sejak pertengahan 2015 hingga awal 2016 yang dipengaruhi oleh harga batu bara dan perkebunan komoditas utama di pasar saham global.

Gambar 2.49.
Perkembangan Pagu CSR Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 – 2017



Gambar 2.50.
Pagu dan Realisasi CSR Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 – 2016



CSR di Kabupaten Aceh Barat mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Mengurangi Angka Kemiskinan. Membantu mengurangi angka kemiskinan di Aceh Barat sebesar 1,5 persen pada 2016 yaitu dari 22,97 menjadi 21,46 persen.
2. Perbaikan Hubungan antara Perusahaan dan Masyarakat sekitar. Dari Forum CSR menunjukkan hubungan antara perusahaan yang melakukan CSR dengan masyarakat yang semakin baik. Sebelumnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Aceh Barat melaporkan pada Tahun 2014 terdapat lima kasus ketidakharmonisan antara masyarakat dan perusahaan dengan pengerahan massa dengan topik konflik seperti dugaan pendudukan lahan, pencemaran lingkungan, penolakan terhadap kehadiran perusahaan. Pada Tahun 2015 dan 2016 hanya terjadi satu kasus pengerahan massa berupa sengketa tanah atas kepemilikan dan sisanya dapat diselesaikan secara baik melalui Forum CSR.
3. Mengurangi Angka Pengangguran. Tenaga kerja lokal telah diserap lebih dari 3.000 orang pada tahun 2015 (seperti yang dilakukan PT. Cipta Kridatama untuk kebutuhan driver atau operator alat berat). Sebelumnya, setiap kali proses perekrutan dibuka maka dapat dipastikan masyarakat di sekitar lokasi tambang tidak akan bisa bekerja karena mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan.
4. Penurunan Gizi Buruk. Untuk mendorong agar tidak terjadi mal nutrisi pada masyarakat di sekitar perusahaan, CSR diarahkan untuk itu berkontribusi

menyelesaikan masalah tersebut. Tahun 2014 ditemukan 3 kasus gizi buruk di sekitar perusahaan Perkebunan dan Pertambangan namun kini sudah tidak ditemukan lagi pada tahun 2015 dan 2016.

5. Penurunan Angka Kematian Ibu. Sementara itu angka kematian ibu turun dari 5 kasus menjadi 1 kasus pada tahun 2014 dan 0 pada tahun 2015 dan 2016. Beberapa program dan kegiatan yang disahuti oleh perusahaan untuk pengurangan angka AKI ini seperti yang dilakukan PT. Karya Tanah Subur yang memiliki program prioritas di Sektor kesehatan dengan membentuk Posyandu Kasih (Keluarga Aceh yang Sehat, Bergizi, dan Harmonis).
6. Kepuasan Masyarakat Meningkat. CSR Forum juga mencatat bahwa masyarakat semakin puas terhadap pelaksanaan CSR perusahaan, selama ini mereka tidak tahu berapa dan untuk apa dana CSR itu diberikan dan dilaksanakan. Kini mereka tahu dan memahami seberapa besar dana CSR dan untuk apa dana itu akan digunakan. Masyarakat kini dapat melihat pada Rencana Kerja yang sudah dibahas dalam Forum CSR dan sudah ditanda tangani antara Bupati dengan pimpinan perusahaan.
7. Produktivitas Perusahaan Meningkat. Perusahaan juga bisa meningkatkan produksi mereka, misalnya PT. Mifa yang bergerak di sektor pertambangan. Sebelumnya ada larangan dari masyarakat sekitar lokasi pertambangan untuk tidak melakukan produksi jika salah satu anggota masyarakat di sekitar lokasi tambang meninggal dunia dan pada hari Jumat. Karena Jumat dianggap sebagai hari suci umat Islam. Karena telah ada fasilitasi dari CSR, larangan itu kini telah dihapus. Perusahaan bisa beroperasi seperti biasanya kecuali waktu shalat.
8. Peningkatan Usaha Mikro masyarakat di sekitar perusahaan. Karena CSR dilakukan dengan menitik beratkan kepada *Community Development (Comdev)*, sehingga usaha masyarakat semakin tumbuh dan berkembang karena adanya pelatihan, pemberian modal serta penyuluhan.
9. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat. Perusahaan juga berperan aktif meningkatkan pendidikan bagi masyarakat di sekitarnya. Antara lain Pemberian Beasiswa Pendidikan seperti yang dilakukan PT. MIFA Bersaudara. Program ini memberikan beasiswa untuk melanjutkan kuliah bagi siswa/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin. Hingga kini program tersebut telah menyalurkan sebesar Rp679.718.605,00 pada tahun 2013 dan Rp474.149.850,00 pada tahun 2014.

2.12. Telaahan terhadap Dokumen Pengarusutamaan Gender

Tahun 2000, dikeluarkanlah Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan semua Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender.

Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan, sebagaimana yang terlihat pada sejumlah dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 telah terdapat 19 program pembangunan yang responsif gender dan program responsif gender ini meningkat dari tahun ke tahun berikutnya.

Sejak tahun 2016 dan 2017 telah dilaksanakan Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas serta dalam setiap Dokumen Anggaran di SKPK Aceh Barat harus melampirkan *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)*.

Tabel 2.163
Indikator Pengendalian dan Evaluasi PPRG di Daerah

a. Indikator Umum

No	Aspek	Indikator Pengendalian	Indikator Evaluasi
1	Komitmen dan kebijakan	Keberadaan atau ketiadaan <ul style="list-style-type: none"> Regulasi tentang PPRG yang dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG 	Efektifitas pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> Regulasi tentang PPRG yang dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG Kebijakan tentang data terpilah
		<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan tentang data terpilah Jumlah SKPD yang sudah mempraktekkan PPRG 	<ul style="list-style-type: none"> Tren jumlah SKPD yang sudah mempraktekkan PPRG Tantangan mendorong komitmen dan kebijakan PPRG
2	Kelembagaan	Keberadaan atau ketiadaan Pokja PUG <ul style="list-style-type: none"> Program Kerja dan atau Rencana Kerja Pokja PUG Focal Point Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG Laporan Kerja Pokja PUG Tim Teknis ARG 	Efektifitas kerja: <ul style="list-style-type: none"> Pokja PUG Focal Point Tim Teknis ARG Tantangan mendorong efektifitas kerja kelembagaan PUG
3	Sumberdaya dan Anggaran	Keberadaan atau ketiadaan <ul style="list-style-type: none"> SDM perencana SKPD memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG (sesuai PMK yang berlaku, atau kesepakatan daerah) Anggaran untuk pelembagaan PUG 	Peningkatan kualitas dan kuantitas: <ul style="list-style-type: none"> SDM perencana SKPD memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG Anggaran untuk pelembagaan PUG Tantangan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
4	Profil Gender dan Data Terpilah	Keberadaan atau ketiadaan <ul style="list-style-type: none"> Profil Gender daerah Data terpilah berkaitan dengan program terkait 	Efektivitas pemanfaatan: <ul style="list-style-type: none"> Profil gender daerah Data terpilah dalam penentuan program dan kegiatan Tantangan penyusunan serta pemanfaatan profil gender dan data terpilah
5	Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Forum PUG yang melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Keterlibatan masyarakat; perempuan dan laki-laki dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran (musrenbang dan konsultasi publik) 	<ul style="list-style-type: none"> Tren jumlah OMS yang terlibat dalam Forum PUG di daerah Tren jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam musrenbang Tren jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam konsultasi publik RKPd. Tantangan partisipasi masyarakat

b. Indikator PPRG berbasis dokumen

No	Dokumen	Indikator Pengendalian	Indikator Evaluasi
1.	RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> Sistematika RPJMD dan konsistensi isu gender dengan RPJPD Penyajian capaian Gender-related Development Index (GDI)/Indeks 	<ul style="list-style-type: none"> Trend pencapaian Gender-related Development Indeks (GDI)/Indeks

No	Dokumen	Indikator Pengendalian	Indikator Evaluasi
		<p>Pembangunan Gender (IPG) dan Gender <i>Empowerment Measure</i> (GEM)/Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), MDG's, dsb dalam Gambaran Umum Kondisi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis gender dalam penyusunan isu strategis daerah • Prinsip keadilan dan kesetaraan tercermin dalam visi-misi dan arah kebijakan keuangan daerah • Penetapan indikator kinerja daerah menggunakan data terpilah 	<p>Pembangunan Gender (IPG) dan Gender <i>Empowerment Measurement</i> (GEM)/Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), MDG's, dsb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isu gender secara tersurat tercantum dalam isu strategis, visi, misi dan arah kebijakan keuangan daerah • Tingkat realisasi pencapaian program berspektif gender dan kebutuhan pendanaanya berdasarkan indikator kinerja dan data terpilah
2.	RENSTRA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematika Renstra SKPD dan konsistensi isu gender dengan RPJMD • Analisis gender pada visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD • Penetapan indikator kinerja SKPD menggunakan data terpilah 	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan SKPD sudah responsive gender • Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan responsif gender masing-masing SKPD berdasarkan indikator kinerja dan data terpilah
3.	RKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematika RKPD dan konsistensi isu gender dengan RPJMD • Analisis gender pada program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan dana indikatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan yang responsif gender berdasarkan indikator kinerja serta kelompok sasaran dan lokasi kegiatan berdasarkan analisis kesenjangan gender yang terjadi
4.	RENJA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematika Renja SKPD dan konsistensi isu gender dengan Renstra SKPD dan RKPD serta RPJMD • Analisis gender pada program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pagu indikator serta prakiraan maju 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan responsive gender berdasarkan indikator kinerja • Penetapan kelompok sasaran dan lokasi kegiatan berdasarkan tingkat kesenjangan gender
			<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat akomodasi program/kegiatan alternatif dan baru yang lebih responsif gender
5.	KUA-PPAS	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematika KUA-PPAS dan konsistensi isu gender dengan RKPD • Memasukkan isu gender pada prioritas pembangunan daerah, prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat akomodasi program/kegiatan yang responsif gender pada prioritas program



No	Dokumen	Indikator Pengendalian	Indikator Evaluasi
		program masing-masing urusan beserta pagu indikatifnya.	daerah dan prioritas program masing-masing urusan <ul style="list-style-type: none"> Trend jumlah pagu indikatif pada program/kegiatan yang responsif gender
6.	RKA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan GBS dalam penyusunan RKA SKPD Penetapan indikator kinerja dalam menyusun program/kegiatan agar responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah program/kegiatan yang dibuat GBS-nya Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah anggaran program/kegiatan responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan kelompok sasaran dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah Jumlah/trend serapan dana yang benar-benar menasar kelompok dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah
8.	DPA	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan indikator kinerja dalam menyusun program/kegiatan agar responsif gender Jumlah anggaran program/kegiatan responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja Penetapan kelompok sasaran dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah Jumlah/trend serapan dana benar-benar menasar kelompok dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah

2.13. Telaahan terhadap Dokumen Pembangunan Kependudukan

A. Permasalahan Kependudukan

Kependudukan dalam konteks pembangunan sangat penting untuk diselesaikan secara tepat dan bijaksana. Sebagai salah satu modal dasar pembangunan, penduduk perlu dioptimalkan dan dikelola dengan baik agar memiliki daya saing tinggi guna mencapai kesejahteraannya. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya apabila jumlah penduduk tidak diikuti dengan tingkat kualitas yang baik maka akan menjadi beban bagi pembangunan terutama dalam hal pemenuhan kebutuhannya, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat

tahun 2011-2035 yang akan digunakan sebagai arah kebijakan dalam pembangunan dengan melihat aspek Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pembangunan Data Base Kependudukan.

Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan visi yang sama dengan nasional yaitu **“Terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai Aceh Barat yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera”**.

Adapun misi adalah :

1. Menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
2. Mendorong tercapainya jejaring (*networking*) kebijakan antarpemangku kepentingan dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan;
3. Mendorong perkembangan kependudukan ke arah yang seimbang antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya;
4. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau;
5. Membangun potensi dan sinergi aktor kependudukan, baik pada level individu, keluarga maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas penduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan;
6. Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga dan jumlah anak yang ideal;
7. peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan dalam membangun tata kelola kependudukan yang berpusat pada manusia, termasuk membangun sistem informasi dan data kependudukan yang transparan dan akuntabel; dan
8. Membangun kesadaran, sikap, dan kebijakan bagi kesamaan hak dan kewajiban antar kelompok, termasuk kesadaran gender bagi terciptanya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang demi tercapainya tujuan pembangunan.

2.14. Perencanaan Dana Desa

Perencanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018-2022 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJM Gampong) Tahun 2018-2022 yang disusun dengan mempedomani RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 dalam pencapaian visi dan misi Bupati Aceh Barat.

Perencanaan penggunaan Dana Desa sesuai dengan jumlah dana yang diterima oleh masing-masing gampong, setiap dokumen perencanaan yang diajukan oleh perintah gampong dapat berlaku menjadi acuan pelaksanaan apabila mendapat persetujuan dari Camat selaku Tim Anggaran Pemerintah Gampong (TAPG).

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan gampong dalam APBG bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan gampong dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, melakukan pembangunan gampong, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mendorong peningkatan kapasitas



masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa yang diterima oleh gampong harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, berkelanjutan, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat membawa kemajuan bagi gampong serta peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2.15. Pengelolaan Sumber Daya Air

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan serta mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai maka DAS Woyla Batee yang melintasi Kabupaten Aceh Barat merupakan wewenang pusat dan dalam perencanaan program kegiatannya mengacu kepada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) maka dalam penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 perlu memperhatikan hal tersebut di atas.

PSDA disusun dengan lima aspek yaitu :

1. Aspek Konservasi SDA
 - a) Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air;
 - b) Pengawetan Sumber Air; dan
 - c) Pengelolaan Kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
2. Aspek Pendayagunaan SDA
 - a) Penatagunaan SDA;
 - b) Penyediaan SDA;
 - c) Penggunaan SDA;
 - d) Pengembangan SDA; dan
 - e) Pengusahaan Sumber Daya air.
3. Aspek Pengendalian Daya Rusak Air
 - a) Pencegahan daya rusak air;
 - b) Penanggulangan daya rusak air; dan
 - c) Pemulihan.
4. Aspek Sistem Informasi SDA
 - a) Peningkatan peran pemerintah dan Pemda; dan
 - b) Penyediaan informasi yang akurat, benar dan tepat waktu serta dapat diakses oleh berbagai pihak.
5. Aspek Pemberdayaan dan Pengawasan
 - a) Pelibatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
 - b) Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Pendampingan Masyarakat;
 - c) Peningkatan swadaya masyarakat;
 - d) Konservasi SDA; dan
 - e) Pendayagunaan SDA.



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Periode Tahun 2012-2017

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Bab 1, Pasal 1, Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian di bidang keuangan daerah yang meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan yang dipedomani antara lain meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 311). Dimana kinerja keuangan daerah merupakan rasio keuangan dari sistem laporan pertanggung jawaban daerah berupa perhitungan APBK yang terdiri dari :

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK

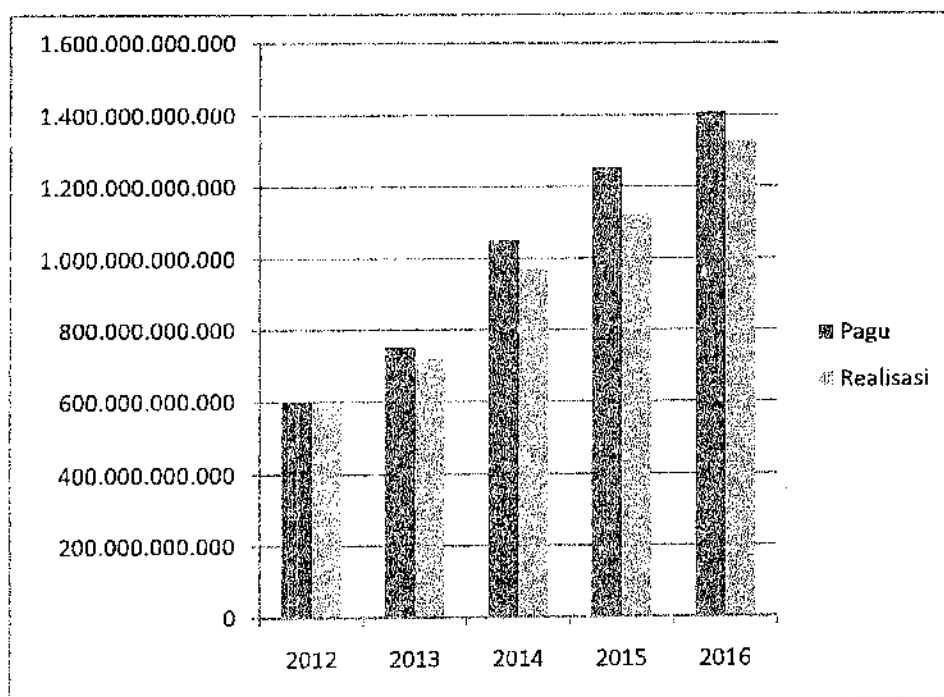
Selama Tahun 2012 - 2016, Pagu dan Realisasi APBK Aceh Barat mengalami peningkatan, yaitu pada Tahun 2012 pagu sebesar Rp597.485.037.884,25 dan pada Tahun 2016 menjadi Rp1.406.174.099.852,29 atau meningkat Rp808.689.061.968,04 atau naik 57,51 persen. Sedangkan realisasi Tahun 2012 sebesar Rp588.981.727.693,27 dan pada Tahun 2016 sebesar Rp1.329.717.090.209,53 atau sebesar 55,71 persen. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar dan tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Perbandingan Pagu dan Realisasi APBK Aceh Barat Tahun 2012-2016

APBK	Pagu	Realisasi
Tahun 2012	597.485.037.884,25	588.981.727.693,27
Tahun 2013	750.599.253.573,66	720.457.769.654,52
Tahun 2014	1.053.129.901.763,81	973.174.505.879,04
Tahun 2015	1.251.480.209.153,87	1.123.320.640.321,60
Tahun 2016	1.406.174.099.852,29	1.329.717.090.209,53
Selisih 2012-2016	808.689.061.968,04	740.735.362.516,26
Persentase	57,51%	55,71%

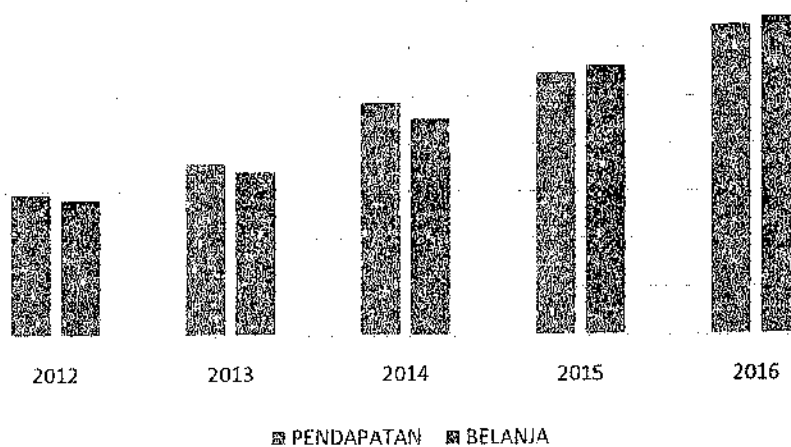
Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2017

Gambar. 3.1
Perbandingan Pagu dan Realisasi APBD Aceh Barat Tahun 2012-2016



Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2017

Gambar. 3.2
Perbandingan Pendapatan dan Belanja 2012-2016 (Realisasi)



Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2017

Sedangkan pertumbuhan APBD Kabupaten Aceh Barat dari Tahun 2012-2016 dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut.



Tabel 3.2
Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2012 s/d Tahun 2016

Kode	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN	588.981.727.693,27	720.457.769.654,52	973.174.505.879,04	1.096.523.414.978,27	1.295.039.278.510,96	21,77
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.727.256.869,07	46.928.106.802,78	112.034.104.121,01	130.428.452.038,37	140.556.757.330,99	54,41
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.087.693.450,98	11.494.461.993,00	11.548.102.478,20	15.185.097.404,26	16.213.679.523,08	27,75
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.243.203.111,00	19.242.181.321,00	67.004.225.338,00	13.529.349.330,00	6.859.002.548,00	-1,35
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.522.369.293,09	3.375.202.713,13	3.687.870.750,49	4.816.071.999,00	4.785.619.099,21	17,36
4.1.4	Zakat	6.885.650.779,00	7.344.925.207,84	10.661.268.418,98	11.779.883.053,89	12.618.522.797,21	16,35
4.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.988.340.235,00	5.471.335.567,81	19.132.637.135,34	85.118.050.251,22	100.079.933.363,49	166,36
4.2	DANA PERIMBANGAN	514.963.812.746,00	610.304.629.500,00	646.402.652.274,00	673.694.900.761,00	752.608.323.882,00	9,95
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.683.505.746,00	33.621.752.500,00	25.293.256.913,00	23.925.620.761,00	22.026.073.759,00	-11,36
4.2.2	Dana Alokasi Umum	440.584.427.000,00	507.582.407.000,00	549.687.325.361,00	565.634.080.000,00	580.525.044.000,00	7,14
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	38.695.880.000,00	69.100.470.000,00	71.422.070.000,00	84.135.200.000,00	150.057.206.123,00	40,33
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	49.290.658.078,20	63.225.033.351,74	214.737.749.484,03	292.400.862.178,90	401.874.197.297,97	68,98
4.3.1	Pendapatan Hibah	988.431.679,98	680.268.731,00	899.950.769,00	1.646.113.879,00	25.541.231.632,71	125,46
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	11.822.683.918,22	12.239.680.620,74	13.151.585.128,03	22.193.490.861,90	27.742.757.279,26	23,77
4.3.4	Dana Penyesuaian	30.363.562.000,00	40.305.084.000,00	74.293.565.000,00	143.112.674.000,00	228.562.863.000,00	65,64
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.115.980.480,00	10.000.000.000,00	126.392.648.587,00	125.447.783.438,00	120.027.345.386,00	110,48
5	BELANJA	563.696.948.271,12	684.806.015.072,00	906.667.815.660,00	1.123.320.640.321,60	1.329.717.090.209,53	23,93
5.1	BELANJA TIDAK	419.011.764.185,12	403.330.253.651,00	434.825.120.415,00	598.871.614.750,35	761.044.224.127,00	16,09

Kode	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan
	LANGSUNG						
5.1.1	Belanja Pegawai	369.758.644.948,00	387.817.118.896,00	420.221.452.008,00	448.136.977.221,35	478.679.456.806,00	6,67
	Belanja Bunga	-	-	-	-	0	0
5.1.4	Belanja Hibah	16.566.704.098,00	2.461.423.692,00	3.904.779.000,00	5.442.943.815,00	26.416.837.500,00	12,37
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.677.766.000,00	6.760.562.000,00	7.045.410.000,00	2.042.600.000,00	1.279.800.000,00	-16,85
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0		0	0	0	0
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	29.983.589.163,00	5.945.236.063,00	3.631.194.507,00	142.284.606.214,00	254.668.129.821,00	70,72
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	25.059.976,12	345.913.000,00	22.284.900,00	964.487.500,00	0	-100
5.1.9	Belanja Utang Pajak	0	0	0	0	0	0
5.2	BELANJA LANGSUNG	144.685.184.086,00	281.475.761.421,00	471.842.695.245,00	524.449.025.571,25	568.672.866.082,53	40,8
5.2.1	Belanja Pegawai	29.199.923.910,00	66.071.927.589,00	45.431.776.967,00	33.700.937.081,00	32.277.419.594,00	2,54
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.897.349.629,00	92.079.331.915,00	197.765.553.872,00	218.927.123.717,00	237.950.668.817,00	40,6
5.2.3	Belanja Modal	54.587.910.547,00	123.324.501.917,00	228.645.364.406,00	271.820.964.773,25	298.444.777.671,53	52,91
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.284.779.422,15	35.651.754.582,52	66.506.690.219,04	-26.797.225.343,33	-34.677.811.698,57	0
6	PEMBIAYAAN DAERAH						0
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.830.417.406,16	30.196.859.916,31	63.560.880.916,20	130.661.700.990,84	102.165.717.347,51	104,6
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.830.417.406,16	30.196.859.916,31	63.560.880.916,20	130.067.571.135,24	102.165.717.347,51	104,6
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman				594.129.855,60	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	1.698.758.300,00	23.994.158.733,00	0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	0	0	0	500.000.000,00	23.994.158.733,00	0



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kreditel, Akuntabel dan Terintegrasi*

Kode	Urutan	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan
	Daerah						
	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	1.198.758.300,00		0
	PEMBIAYAAN NETTO	5.830.417.406,16	30.196.859.916,31	63.560.880.916,20	128.962.942.690,84	78.171.558.614,51	91,35
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	31.115.196.828,31	65.848.614.498,83	130.067.571.135,24	102.165.717.347,51	43.493.746.915,94	8,73

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2017

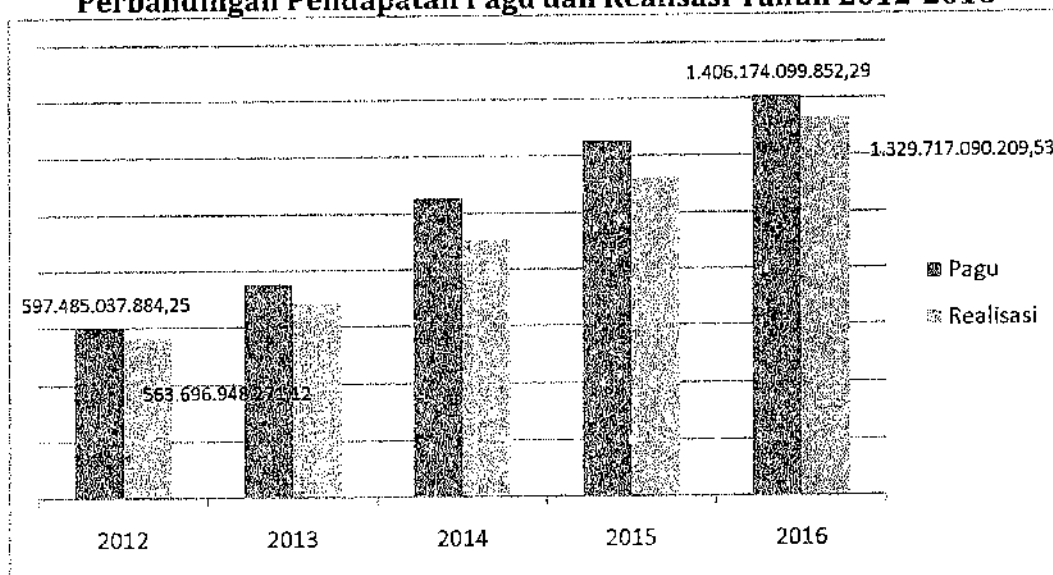
Handwritten signature

Secara umum kinerja keuangan daerah dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama pelaksanaan RPJM Tahun 2012-2017 menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dalam rentang waktu Tahun 2012-2016 pendapatan daerah telah mengalami peningkatan sebesar Rp706.057.550.817,69 atau sebesar 45,48 persen, belanja sebesar Rp766,020.141.938,00 atau sebesar 42,40 persen sedangkan pembiayaan sebesar Rp59,962.591.121,00 atau sebesar 2,16 persen.

a. Pendapatan

Selama Tahun 2012-2016, Pagu Pendapatan Daerah mengalami peningkatan pada Tahun 2012 sebesar Rp591.654.620.478,09 dan pada Tahun 2016 sebesar Rp1.328.002.541.504,78 atau meningkat sebesar Rp736.347.921.026,69 atau 55,45 persen. Sedangkan, untuk realisasi pendapatan mengalami peningkatan pada Tahun 2012 sebesar Rp588.981.727.693,27 dan pada Tahun 2016 Rp1.295.039,268.510,90 atau meningkat sebesar Rp706.057.550.817,69 atau 54,52 persen. Peningkatan ini terjadi karena transfer Dana Otonomi Khusus pada Tahun 2014 ke dalam APBK dan transfer Dana Desa pada Tahun 2015, namun yang lain juga mengalami peningkatan, termasuk zakat infaq dan shadaqah (ZIS).

Gambar. 3.3
Perbandingan Pendapatan Pagu dan Realisasi Tahun 2012-2016



Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2017

Tabel 3.3
Perbandingan Pagu dan Realisasi Pendapatan Tahun 2012-2016

Pendapatan	Pagu	Realisasi
Tahun 2012	591.654.620.478,09	588.981.727.693,27
Tahun 2013	719.484.056.745,35	720.457.769.654,52
Tahun 2014	987.281.287.264,98	973.174.505.879,04
Tahun 2015	1.123.121.406.718,63	1.096.523.414.978,27
Tahun 2016	1.328.002.541.504,78	1.295.039.278.510,96
Selisih 2012-2016	736.347.921.026,69	706.057.550.817,69
Persentase	55,45%	54,52%

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2017



Selama dalam kurun waktu lima tahun mulai Tahun 2012-2016 rata-rata pendapatan didominasi dana perimbangan sebesar Rp639.594.863.832,60 atau 68,42 persen sedangkan urutan kedua didominasi oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp204.305.540.078,24 atau 21,85 persen dan ketiga pendapatan asli daerah sebesar Rp90.934.935.436,04 atau 9,73 persen. Secara rinci pada tabel berikut.

42

Tabel 3.4
Kinerja Anggaran Pendapatan Tahun 2012-2016 (Realisasi)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata	% Rata-Rata
PENDAPATAN	588.981.727.693,27	720.457.769.654,52	973.174.505.879,04	1.096.523.414.978,27	1.295.039.278.510,96	934.835.339.343,21	100,00%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.727.256.869,07	46.928.106.802,78	112.034.104.121,01	130.428.452.038,37	140.556.757.330,99	90.934.935.432,44	9,73%
Hasil Pajak Daerah	6.087.693.450,98	11.494.461.993,00	11.548.102.478,20	15.185.097.404,26	16.213.679.523,08	12.105.806.969,90	1,29%
Hasil Retribusi Daerah	7.243.203.111,00	19.242.181.321,00	67.004.225.338,00	13.529.349.330,00	6.859.002.548,00	22.775.592.329,60	2,44%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.522.369.293,09	3.375.202.713,13	3.687.870.750,49	4.816.071.999,00	4.785.619.099,21	3.837.426.770,98	0,41%
Zakat	6.885.650.779,00	7.344.925.207,84	10.661.268.418,98	11.779.883.053,89	12.618.522.797,21	9.858.050.051,38	1,05%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.988.340.235,00	5.471.335.567,81	19.132.637.135,34	85.118.050.251,22	100.079.933.363,49	42.358.059.310,57	4,53%
DANA PERIMBANGAN	514.963.812.746,00	610.304.629.500,00	646.402.652.274,00	673.694.900.761,00	752.608.323.882,00	639.594.863.832,60	68,42%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.683.505.746,00	33.621.752.500,00	25.293.256.913,00	23.925.620.761,00	22.026.073.759,00	28.110.041.935,80	3,01%
Dana Alokasi Umum	440.584.427.000,00	507.582.407.000,00	549.687.325.361,00	565.634.080.000,00	580.525.044.000,00	528.802.656.672,20	56,57%
Dana Alokasi khusus	38.695.880.000,00	69.100.470.000,00	71.422.070.000,00	84.135.200.000,00	150.057.206.123,00	82.682.165.224,60	8,84%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	49.290.658.078,20	63.225.033.351,74	214.737.749.484,03	292.400.062.178,90	401.874.197.297,97	204.305.540.078,17	21,85%
Pendapatan Hibah	988.431.679,98	680.268.731,00	899.950.769,00	1.646.113.879,00	25.541.231.632,71	5.951.199.338,34	0,64%
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	11.822.683.918,22	12.239.680.620,74	13.151.585.128,03	22.193.490.861,90	27.742.757.279,26	17.430.039.561,63	1,86%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	30.363.562.000,00	40.305.084.000,00	74.293.565.000,00	143.112.674.000,00	228.562.863.000,00	103.327.549.600,00	11,05%
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.115.980.480,00	10.000.000.000,00	126.392.648.587,00	125.447.783.438,00	120.027.345.386,00	77.596.751.578,20	8,30%

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2017

b. Belanja

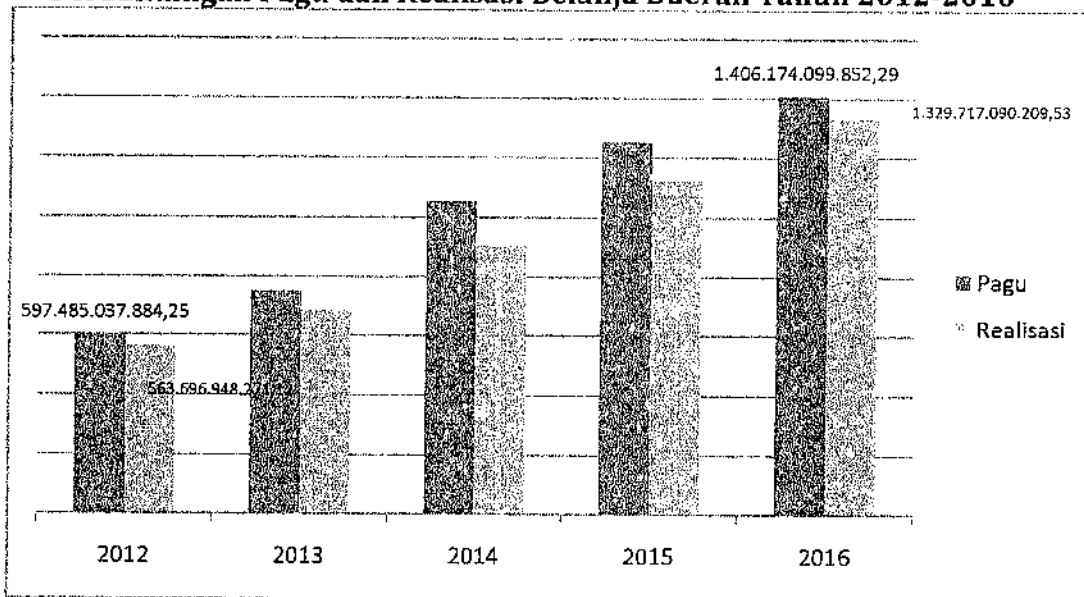
Selama Tahun 2012 - 2016, belanja juga mengalami peningkatan dari Tahun 2012 Rp597.485.037.884,25 menjadi Rp1.406.174.099.852,29 pada Tahun 2016 atau mengalami peningkatan sebesar Rp808.689.061.968,04 atau 57,51%. Sedangkan untuk realisasi belanja pada Tahun 2012 sebesar Rp563.696.948.271,12 pada Tahun 2016 menjadi Rp1.329.717.090.210 terjadi peningkatan sebesar Rp766.020.141.938,00 atau 57,61 persen.

Tabel 3.5
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2012-2016

Belanja	Pagu	Realisasi
Tahun 2012	597.485.037.884,25	563.696.948.271,12
Tahun 2013	750.599.253.573,66	684.806.015.072,00
Tahun 2014	1.053.129.901.763,81	906.667.815.660,00
Tahun 2015	1.251.480.209.153,87	1.096.523.414.978,27
Tahun 2016	1.406.174.099.852,29	1.295.039.278.510,96
Selisih 2012-2016	808.689.061.968,04	766.020.141.938,41
Persentase	57,51%	57,61%

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2017

Gambar 3.4
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2016



Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2017

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2012-2016 (Persen)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
A	Belanja Tidak Langsung	74,33	58,90	47,96	53,31	57,23
B	Belanja Langsung	25,67	41,10	52,04	46,69	42,77
C	Total Realisasi (A + B)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2017



Dari tabel di atas, belanja tidak langsung pada Tahun 2012 sebesar Rp419.011.764.185,00 atau 74,33 persen dari belanja seluruhnya, dan ini dapat ditekan pada Tahun 2014 menjadi Rp403.330.253.651 atau 47,96 persen, namun pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 mengalami kenaikan dikarenakan transfer dana desa dimasukkan dalam rekening belanja bantuan keuangan yang menjadi bagian dari belanja tidak langsung.

Secara proporsional komposisi belanja langsung terhadap belanja total terus mengalami peningkatan dibanding dari tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.7
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata	% Rata-Rata
BELANJA	563.696.948.271,12	684.806.015.072,00	906.667.815.660,00	1.123.320.640.321,60	1.329.717.090.209,53	921.641.701.906,85	100,00%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	419.011.764.185,12	403.330.253.651,00	434.825.120.415,00	598.871.614.750,35	761.044.224.127,00	523.416.595.425,69	56,79%
Belanja Pegawai	369.758.644.948,00	387.817.118.896,00	420.221.452.008,00	448.136.977.221,35	478.679.456.806,00	420.922.729.975,87	45,67%
Belanja Hibah	16.566.704.098,00	2.461.423.692,00	3.904.779.000,00	5.442.943.815,00	26.416.837.500,00	10.958.537.621,00	1,19%
Belanja Bantuan Sosial	2.677.766.000,00	6.760.562.000,00	7.045.410.000,00	2.042.600.000,00	1.279.800.000,00	3.961.227.600,00	0,43%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	29.983.589.163,00	5.945.236.063,00	3.631.194.507,00	142.284.606.214,00	254.668.129.821,00	87.302.551.153,60	9,47%
Belanja Tidak Terduga	25.059.976,12	345.913.000,00	22.284.900,00	964.487.500,00	-	271.549.075,22	0,03%
BELANJA LANGSUNG	144.685.184.086,00	281.475.761.421,00	471.842.695.245,00	524.449.025.571,25	568.672.866.082,53	398.225.106.481,16	43,21%
Belanja Pegawai	29.199.923.910,00	66.071.927.589,00	45.431.776.967,00	33.700.937.081,00	32.277.419.594,00	41.336.397.028,20	4,49%
Belanja Barang dan Jasa	60.897.349.629,00	92.079.331.915,00	197.765.553.872,00	218.927.123.717,00	237.950.668.817,00	161.524.005.590,00	17,53%
Belanja Modal	54.587.910.547,00	123.324.501.917,00	228.645.364.406,00	271.820.96.4773,25	298.444.777.671,53	195.364.703.862,96	21,19%

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2017

Handwritten signature



c. Pembiayaan

Untuk realisasi pembiayaan daerah selama Tahun 2012-2016 terdapat pembiayaan dari SilPa dengan rata-rata pertumbuhan 104,6 persen dimulai dari Tahun 2012 sebesar Rp5.830.417.406,16 dan Tahun 2016 sebesar Rp102.165.717.347,51.

Namun pada Tahun 2015 terdapat Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp594.129.855,60 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp500.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Utang akibat pinjaman daerah sebesar Rp1.198.758.300,00 yang dikarenakan kondisi keuangan daerah belum stabil, sedangkan di Tahun 2016 hanya melakukan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp23.994.158.733,00. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.8
Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016

Kode	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.830.417.406,16	30.196.859.916,31	63.560.880.916,20	130.661.700.990,84	102.165.717.347,51	104,6
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.830.417.406,16	30.196.859.916,31	63.560.880.916,20	130.067.571.135,24	102.165.717.347,51	104,6
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman				594.129.855,60	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	1.698.758.300,00	23.994.158.733,00	0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	500.000.000,00	23.994.158.733,00	0
	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	1.198.758.300,00		0
	PEMBIAYAAN NETTO	5.830.417.406,16	30.196.859.916,31	63.560.880.916,20	128.962.942.690,84	78.171.558.614,51	91,35
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	31.115.196.828,31	65.848.614.498,83	130.067.571.135,24	102.165.717.347,51	43.493.746.915,94	8,73

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2017

4



3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menguraikan rincian mengenai perkembangan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana dalam kurun waktu Tahun 2012-2016 di Kabupaten Aceh Barat. Aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Pada tahun 2012 aset lancar berjumlah sebesar Rp3.295.489.402.871 dan terus meningkat pada Tahun 2016 sebesar Rp7.373.825.277.147. sedangkan untuk aset tetap pada Tahun 2012 sebesar Rp3.252.750.063.853 dan mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga pada Tahun 2016 mencapai angka Rp437.900.446.562.138, untuk aset lainnya pada Tahun 2012 kosong dan pada Tahun 2016 sebesar Rp423.092.270.000.

Kewajiban Kabupaten Aceh Barat hanya terletak pada rekening utang perhitungan pihak ketiga pada Tahun 2015 sebesar Rp61.639.992.200 dan pendapatan diterima dimuka pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 berjumlah Rp25.614.083.266

Untuk ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi, untuk ekuitas dana lancar pada Tahun 2012 mencapai Rp3.472.996.292.012. Namun, pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 kosong. Sedangkan untuk ekuitas dana investasi pada Tahun 2012 sebesar Rp3.254.100.362.853 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti dalam tabel berikut.

Tabel 3.9
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	RATA-RATA	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET	3.314.875.845.384,74	3.476.863.370.091,43	3.875.233.681.365,15	2.697.949.640.343,55	2.744.968.448.329,05	3.221.978.197.102,78	(4,61)
1.1.	ASET LANCAR	37.649.452.663,74	73.953.250.334,67	169.159.555.339,01	168.104.916.562,38	89.599.779.296,70	107.693.390.839,30	24,20
1.1.1.	Kas di daerah	27.856.422.668,28	63.804.138.444,80	130.038.720.835,24	102.142.651.232,51	43.519.962.235,20	73.472.379.083,21	11,80
1.1.2.	Kas di bendahara pengeluaran	3.258.774.160,03	2.044.476.054,03	28.850.300,00	23.066.115,00	31.506.930,00	1.077.334.711,81	(68,64)
1.1.3.	Kas di bendahara penerimaan	4.217.500,00	523.698.710,45	5.710.854.415,35	70.007.472,25	96.587.310,56	1.281.073.091,72	118,76
1.1.4.	Kas lainnya	-	-	-	4.949.368,00	-	989.873,60	-
1.1.5.	Piutang Pajak	2.153.751.922,43	2.175.144.489,43	16.768.402.309,43	5.129.885.714,72	8.135.174.144,89	6.872.471.716,18	39,41
1.1.8.	Piutang Retribusi	1.386.306.975,00	1.436.832.798,00	1.288.229.894,00	118.505.495,00	35.270.000,00	853.029.032,40	(60,06)
1.1.11.	Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-	285.463.520,08	57.092.704,02	-
1.1.12.	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	4.979.980.501,31	-	-	995.996.100,26	-
1.1.13.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	45.260.000,00	54.010.000,00	45.260.000,00	45.033.700,00	-	37.912.740,00	(100,00)
1.1.16.	Piutang Lainnya	-	-	-	41.632.817.236,53	28.558.406.010,13	14.038.244.649,33	-
1.1.19.	Persediaan	2.944.719.438,00	3.914.949.837,96	10.299.257.083,68	18.938.000.228,37	8.937.409.145,84	9.006.867.146,77	31,99
1.2.	INVENTANSI JANGKA PANJANG	23.126.029.868,00	27.969.440.334,17	26.433.961.546,92	21.772.482.504,11	42.480.162.836,63	28.356.415.417,97	-
1.2.1.	INVENTASI NON PERMANEN	-	-	832.623.325,00	-	-	166.524.665,00	-
1.2.1.1.	Pinjaman kepada perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2.	Inventasi Non Permanen Lainnya	-	-	832.623.325,00	-	-	166.524.665,00	-
1.2.1.3.	Pinjaman jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	INVENTASI PERMANEN	23.126.029.868,00	27.969.440.334,17	25.601.338.221,92	21.772.482.504,11	42.480.162.836,63	28.189.890.752,97	16,42
1.2.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah daerah	23.126.029.868,00	27.969.440.334,17	25.601.338.221,92	21.772.482.504,11	42.480.162.836,63	28.189.890.752,97	16,42
1.2.2.2.	Inventasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	ASET TETAP	3.252.750.063.853,00	3.373.347.787.510,59	3.675.176.399.179,59	2.500.802.524.524,42	2.609.439.028.878,97	3.082.303.160.789,31	(5,36)
1.3.1.	Tanah	567.113.201.246,00	571.968.298.107,00	633.191.010.687,00	684.224.883.447,00	686.883.597.312,00	628.676.198.159,80	4,91
1.3.2.	Peralatan dan mesin	130.763.198.877,00	152.987.783.783,59	180.484.001.773,59	213.157.733.808,02	249.623.779.842,02	185.403.299.616,84	17,54
1.3.3.	Gedung dan bangunan	427.479.222.935,00	458.770.567.253,00	523.547.983.699,00	609.610.631.503,00	683.682.513.797,00	540.618.183.837,40	12,46
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	2.108.465.311.924,00	2.161.376.500.625,00	2.264.164.707.075,00	2.504.943.248.115,00	2.703.100.044.415,00	2.348.409.962.430,80	6,41
1.3.5.	Aset tetap lainnya	9.902.341.155,00	11.745.778.119,00	13.081.259.602,00	15.590.183.574,36	20.964.628.432,36	14.256.838.176,54	20,62

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	RATA-RATA	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	9.026.787.716,00	16.498.859.623,00	60.707.436.343,00	23.838.583.705,00	34.749.901.823,00	28.964.313.842,00	40,07
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	(1.550.562.739.627,96)	(1.769.563.436.742,41)	(664.025.635.274,07)	-
1.4	ASET LAINNYA	1.350.299.000,00	1.592.891.912,00	4.463.765.299,63	7.269.716.752,64	3.449.477.316,75	3.625.230.056,20	26,42
1.4.1	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-	36.208.000,00	7.241.600,00	-
1.4.2	Tuntutan Pembendaharaan	-	918.336.912,00	958.570.055,00	-	-	375.381.393,40	-
1.4.3	Tuntutan Ganti rugi	-	-	-	958.570.055,00	(958.570.055,00)	-	-
1.4.4	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	Aset tak berwujud	-	571.720.000,00	843.720.000,00	1.342.543.090,00	(1.218.319.209,00)	307.932.776,20	-
1.4.6	Aset Lain lain	1.350.299.000,00	102.835.000,00	2.661.475.244,63	6.530.185.280,64	2.381.952.898,75	2.605.349.484,80	15,25
2.	KEWAJIBAN	-	-	1.166.373.599,60	4.264.545.565,33	25.642.868.330,58	6.214.757.499,10	186,14
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	1.166.373.599,60	4.264.545.565,33	25.642.868.330,58	6.214.757.499,10	180,14
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	-	-	-	616.399.922,00	-	123.279.984,40	-
2.1.2	Pendapatan diterima dimuka	-	-	1.166.373.599,60	10.808.333,33	245.332.499,33	284.502.886,45	(40,53)
2.1.3	Utang belanja	-	-	-	339.955.200,00	21.438.800.651,25	4.355.751.170,25	-
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	3.297.382.110,00	3.958.735.180,00	1.451.223.458,00	-
3.	EKUITAS DANA	3.314.875.845.202,74	3.475.270.478.179,43	3.874.067.357.765,55	2.693.685.094.778,22	2.719.325.579.998,47	3.215.444.871.184,88	
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	37.649.452.663,74	73.953.250.334,67	167.993.181.739,41	-	-	55.919.176.947,56	(100,00)
3.1.1.	SILPA	31.115.196.828,31	65.848.614.498,83	130.067.571.135,24	-	-	45.406.276.492,48	(100,00)
	Pendapatan yang ditangguhkan	4.217.500,00	523.698.710,45	5.710.854.415,35	-	-	1.247.754.125,16	(100,00)
3.1.2.	Cadangan piutang	3.585.318.897,43	3.665.987.287,43	23.081.872.704,74	-	-	6.066.635.777,92	(100,00)
3.1.3.	Cadangan persediaan	2.944.719.438,00	3.914.949.837,96	10.299.257.083,68	-	-	3.431.785.271,93	(100,00)
3.1.4.	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang jangka pendek	-	-	(1.166.373.599,60)	-	-	(233.274.719,92)	-
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	3.277.226.392.539,00	3.401.317.227.844,76	3.706.074.176.026,14	-	-	2.076.923.559.281,98	(100,00)
	Diinvestasikan dalam investasi Jangka Panjang	23.126.029.686,00	27.969.440.334,17	26.434.011.546,92	-	-	15.505.896.313,42	(100,00)
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	3.252.750.063.853,00	3.373.347.787.510,59	3.675.176.399.179,59	-	-	2.060.254.850.108,64	(100,00)
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	1.350.299.000,00	1.592.891.912,00	4.463.765.299,63	-	-	1.162.812.859,93	(100,00)
	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.314.875.845.202,74	3.475.270.478.179,43	3.875.233.731.365,15	2.697.949.640.343,55	2.744.968.448.329,05	3.221.659.628.683,98	(4,61)

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2017



Dalam rangka memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial daerah, perlu dilakukan analisa atau interpretasi terhadap data finansial yang tercermin dalam laporan keuangan daerah. Terdapat dua bentuk umum rasio keuangan yang sering digunakan dalam menganalisis kondisi keuangan dan kinerja yaitu rasio likuiditas (*liquidity ratio*) dan rasio solvabilitas (*solvability ratio*). Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek. Pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan dalam membayar hutang jangka pendeknya disebut Pemerintah Daerah yang liquid. Tingkat likuiditas suatu daerah dapat diukur dengan beberapa cara diantaranya dengan menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek/hutang lancar (*Current Ratio*). Cara lainnya ialah dengan menunjukkan kemampuan Daerah membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan dibanding asset lain. Cara ini lebih dikenal dengan *Quick Ratio Analysis*. Sementara rasio solvabilitas yang disebut juga dengan rasio leverage digunakan untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh daerah dengan dana yang dipinjamkan dari pemerintah pusat/swasta/investor. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio leverage adalah *total debt to equity ratio* (rasio hutang terhadap ekuitas) dan *total debt to total asset ratio* (rasio hutang terhadap total aktiva). Berikut dapat dilihat perkembangan *balance sheet ratio* Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016.

Tabel 3.10
Balance Sheet Ratio Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016

BALANCE SHEET RATIOS		YEARS				
		2012	2013	2014	2015	2016
LIQUIDITY	CURRENT RATIO	0,00	0,00	145,03	39,42	3,49
	QUICK RATIO	0,00	0,00	136,20	34,98	3,15
SOLVABILITY RATIO	DEBT TO ASSET RATIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	DEBT TO EQUITY RATIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2017

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ratio lancar (*current ratio*) selama Tahun 2012-2016 diatas 1 atau diatas 100 persen. Pada Tahun 2012 dan Tahun 2013 *current ratio* 0,00 persen, hal ini karena pada tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak memiliki kewajiban jangka pendek. Gambaran data tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sangat mampu untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Begitu juga halnya dengan *quick ratio* yang menunjukkan aktivitas lancar paling likuid untuk menutupi hutang lancar.

Disisi nilai *total debt to total assets ratio* dan *debt to equity ratio* Tahun 2012-2016 juga menunjukkan porsi hutang terhadap aktiva masih sangat kecil. Dari tabel diatas terlihat bahwa pada periode Tahun 2012-2015 baik nilai *total debt to total assets ratio* dan *debt to equity ratio* 0,00 persen dan pada Tahun 2016 sebesar 0,01 persen.

Sedangkan untuk melihat keefektifan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menggunakan aktiva yang dimiliki maka dilakukan analisis rasio aktivitas sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Handwritten signature

Tabel 3.11
Ratio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016

Ratio Aktivitas	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rata-rata Umur Piutang	2807,69	2,71	4,74	17,50	23,83
Rata-rata Umur Persediaan	24,61	20,33	18,25	28,56	31,77

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2017

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata umur piutang yang diperlukan untuk melunasi piutang menjadi relatif singkat, kecuali pada Tahun 2012 berkisar 2.807,69 persen, sedangkan rata-rata umur piutang yang paling singkat penyelesaiannya terjadi pada Tahun 2013 berkisar 2,71 persen.

Untuk rata-rata umur persediaan yang menggambarkan rasio berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan pada periode Tahun 2012-2016 terlihat relatif singkat. Dari tabel tersebut dapat dilihat rata-rata umur persediaan lebih lama terjadi pada Tahun 2016 berkisar 31,77 persen dengan perputaran persediaan berkisar 11,49 persen, sedangkan rata-rata umur persediaan paling singkat terjadi pada Tahun 2014 berkisar 18,56 persen dengan perputaran persediaan sekitar 20,00 persen.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2012-2017

Berdasarkan hasil analisis, arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki skala prioritas pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, penyediaan kesempatan kerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, meningkatkan pelayanan umum masyarakat dan mewujudkan pelaksanaan syariat secara kaffah serta pemberdayaan perempuan dan pemuda dengan mengikutsertakan lembaga adat, pelaksanaannya secara bertahap sesuai potensi dan kemampuan keuangan daerah.

Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam rangka mensukseskan visi dan misi Bupati untuk pembangunan Kabupaten Aceh Barat adalah perlunya dukungan keuangan daerah yang sehat. Dengan pengelolaan Keuangan Daerah yang memenuhi unsur transparansi, efisien dan efektif dibutuhkan suatu kebijakan keuangan yang tepat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

Kebijakan Keuangan Daerah merupakan suatu tindakan pengelolaan pendapatan dan belanja Daerah dalam rangka mendukung berbagai kebijakan Pemerintah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBK dengan mengacu kepada penyusunan anggaran berbasis kinerja berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pengelolaan belanja daerah;
5. Pengelolaan pembiayaan daerah yang meliputi aspek kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada



perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan kepentingan umum.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Jika ditinjau dari besarnya proporsi belanja kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah selama Tahun 2012 hingga Tahun 2016 terlihat bahwa persentase belanja aparatur dalam lima tahun tersebut terus mengalami penurunan. Tahun 2012 persentase belanja aparatur sebesar 70,78 persen dan terus turun pada Tahun 2016 menjadi 38,43 persen. Dengan kata lain dalam rentang waktu lima tahun belanja kebutuhan aparatur ini telah dilakukan efisiensi.

Tabel 3.12
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016

No	Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase perbandingan total Belanja dan total pengeluaran
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	2012	398.958.568.858,00	563.696.948.271,12	70,78
2.	2013	453.889.046.485,00	684.806.015.072,00	66,28
3.	2014	465.653.228.975,00	906.667.815.660,00	51,36
4.	2015	481.837.914.302,35	1.125.019.398.621,60	42,83
5.	2016	510.956.876.400,00	1.329.717.090.209,53	38,43

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat, 2017

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah.

3.2.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Tahun 2012 defisit riil berjumlah Rp25.284.779.422,15 dan jumlah ini terus meningkat dalam 2 (dua) tahun berikutnya yaitu Rp35.651.754.582,52 pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 sebesar Rp66.506.690.219,04 sedangkan Tahun 2015 dan Tahun 2016 berada dalam posisi minus yaitu sejumlah Rp28.495.983.643,33. Defisit riil Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp5.830.417.406,16 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun 2011 sebesar Rp8.884.145.862,82. Sedangkan Tahun 2015, defisit riil yang terjadi ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp130.661.700.990,84 yang semuanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2014 sebesar Rp130.067.571.135,24. Sedangkan untuk Tahun 2016 ditutup oleh Silpa sebesar Rp102.165.717.348, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Barat

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	588.981.727.693,00	720.457.769.673,00	973.174.505.879,00	1.096.523.414.978,00	1.295.039.278.511,00
	<i>Dikurang realisasi</i>					
2	Belanja Daerah	563.696.948.271,00	684.806.015.072,00	906.667.815.660,00	1.123.320.640.322,00	1.329.717.090.210,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	1.698.758.300,00	23.994.158.733,00
A	Surplus/(Defisit)	25.284.779.422,00	35.651.754.601,00	66.506.690.219,00	- 28.495.983.643,00	- 34.677.811.699,00

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat, 2017



Tabel 3.14

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Barat

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	5.830.417.406,00	30.196.859.916,00	63.560.880.916,00	130.067.571.135,00	102.165.717.348,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	594.129.856,00	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat, 2017

Tabel 3.15
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Aceh Barat

No.	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	5.830.417.406,00	0,99%	30.196.859.916,00	4,19%	63.560.880.916,00	6,53%	130.067.571.135,00	11,86%	102.165.717.348,00	7,89%
2	Pelampauan penerimaan PAD										

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat, 2017



3.3 Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil analisis, arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki skala prioritas untuk memenuhi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu ***Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas.***

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Hasil tinjauan terhadap kondisi pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017, maka untuk RPJMD Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah dalam tahun tersebut. Berikut adalah proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2022.

Tabel 3.16
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan %	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PENDAPATAN	1,15%	1.251.178.454.852,99	1.269.125.429.004,62	1.287.333.400.741,82	1.305.806.202.958,10	1.324.547.725.219,67
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,80%	164.140.534.232,00	165.781.939.574,32	167.439.758.970,06	169.114.156.559,76	170.805.298.125,36
	Pendapatan Pajak Daerah	0,80%	16.170.500.000,00	16.332.205.000,00	16.495.527.050,00	16.660.482.320,50	16.827.087.143,71
	Hasil Retribusi Daerah	0,80%	9.409.654.500,00	9.503.751.045,00	9.598.788.555,45	9.694.776.441,00	9.791.724.205,41
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,80%	4.916.063.499,00	4.965.224.133,99	5.014.876.375,33	5.065.025.139,08	5.115.675.390,47
	Zakat	0,80%	14.070.500.000,00	14.211.205.000,00	14.353.317.050,00	14.496.850.220,50	14.641.818.722,71
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,80%	119.573.816.233,00	120.769.554.395,33	121.977.249.939,28	123.197.022.438,68	124.428.992.663,06
	DANA PERIMBANGAN	1,20%	782.043.595.040,00	793.774.248.965,60	805.680.862.700,08	817.766.075.640,59	830.032.566.775,19
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1,20%	21.953.150.040,00	22.282.447.290,60	22.616.683.999,96	22.955.934.259,96	23.300.273.273,86
	Dana Alokasi Umum	1,20%	570.763.544.000,00	579.324.997.160,00	588.014.872.117,40	596.835.095.199,16	605.787.621.627,15
	Dana Alokasi Khusus	1,20%	189.326.901.000,00	192.166.804.515,00	195.049.306.582,73	197.975.046.181,47	200.944.671.874,19
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,20%	304.994.325.580,99	309.569.240.464,71	314.212.779.071,68	318.925.970.757,75	323.709.860.319,12
	Pendapatan Hibah	1,20%	24.469.800.000,00	24.836.847.000,00	25.209.399.705,00	25.587.540.700,58	25.971.353.811,08
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1,20%	24.441.232.580,99	24.807.851.069,70	25.179.968.835,75	25.557.668.368,29	25.941.033.393,81
	Dana Penyesuaian	1,20%	256.083.293.000,00	259.924.542.395,00	263.823.410.530,93	267.780.761.688,89	271.797.473.114,22
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BELANJA	0,95%	1.278.779.639.368,99	1.294.030.650.411,13	1.309.464.961.746,81	1.325.084.791.256,23	1.340.892.383.809,40
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0,92%	774.263.192.290,99	783.207.747.744,66	792.256.772.797,00	801.411.499.944,55	810.673.176.356,32
	Belanja Pegawai	1,00%	462.487.048.303,99	468.268.136.407,79	474.121.488.112,89	480.048.006.714,30	486.048.606.798,23



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas*

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan %	2018	2019	2020	2021	2022
	Belanja Subsidi	1,00%	5.750.064.000,00	5.821.939.800,00	5.894.714.047,50	5.968.397.973,09	6.043.002.947,76
	Belanja Hibah	1,00%	6.728.600.000,00	6.812.707.500,00	6.897.866.343,75	6.984.089.673,05	7.071.390.793,96
	Belanja Bantuan Sosial	1,00%	3.250.000.000,00	3.290.625.000,00	3.331.757.812,50	3.373.404.785,16	3.415.572.344,97
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,00%	2.553.700.000,00	2.585.621.250,00	2.617.941.515,63	2.650.665.784,57	2.683.799.106,88
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	0,80%	280.705.779.987,00	283.512.837.786,87	286.347.966.164,74	289.211.445.826,39	292.103.560.284,65
	Belanja Tidak Terduga	0,80%	12.788.000.000,00	12.915.880.000,00	13.045.038.800,00	13.175.489.188,00	13.307.244.079,88
	BELANJA LANGSUNG	1,00%	504.516.447.078,00	510.822.902.666,48	517.208.188.949,81	523.673.291.311,68	530.219.207.453,07
	Belanja Pegawai	1,00%	44.406.455.760,00	44.961.536.457,00	45.523.555.662,71	46.092.600.108,50	46.668.757.609,85
	Belanja Barang dan Jasa	1,00%	269.873.578.889,00	273.246.998.625,11	276.662.586.107,93	280.120.868.434,28	283.622.379.289,70
	Belanja Modal	1,00%	190.236.412.429,00	192.614.367.584,36	195.022.047.179,17	197.459.822.768,91	199.928.070.553,52
	SURPLUS / (DEFISIT)	-9,95%	-27.601.184.516,00	-24.905.221.406,51	-22.131.561.004,98	-19.278.588.298,13	-16.344.658.589,72
C	PEMBIAYAAN	-9,95%	27.601.184.516,00	24.905.221.406,51	22.131.561.004,98	19.278.588.298,13	16.344.658.589,72
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-9,95%	27.601.184.516,00	24.905.221.406,51	22.131.561.004,98	19.278.588.298,13	16.344.658.589,72
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat, 2017

Handwritten signature

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya

Tabel 3.17
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Aceh Barat

No	Uraian	Proyeksi Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan	1.251.178.454.852,99	1.269.125.429.004,62	1.287.333.400.741,82	1.305.806.202.958,10	1.324.547.725.219,67
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	27.601.184.516,00	24.905.221.406,51	22.131.561.004,98	19.278.588.298,13	16.344.658.589,72
	Total penerimaan	1.278.779.639.368,99	1.294.030.650.411,13	1.309.464.961.746,80	1.325.084.791.256,23	1.340.892.383.809,39
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	774.263.192.290,99	783.207.747.744,66	792.256.772.797,00	801.411.499.944,55	810.673.176.356,32
5	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	504.516.447.078,00	510.822.902.666,48	517.208.188.949,81	523.673.291.311,68	530.219.207.453,07

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat, 2017



Tabel 3.18
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Aceh Barat

Uraian	Proyeksi Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kapasitas riil kemampuan keuangan	504.516.447.078,00	510.822.902.666,48	517.208.188.949,81	523.673.291.311,68	530.219.207.453,07
Prioritas I	241.005.391.058,04	228.734.619.037,47	236.371.156.340,32	240.117.444.168,62	245.734.528.767,83
Prioritas II	234.648.995.022,00	248.921.722.474,39	248.548.496.728,64	251.281.773.978,25	252.299.080.166,90
Prioritas III	28.862.060.997,96	33.166.561.154,62	32.288.535.880,85	32.274.073.164,81	32.185.598.518,34

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat, 2017

Prioritas I : belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar

Prioritas II : belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah

Prioritas III : belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

3.4 Bantuan Keuangan Dana Otsus Kepada Pemerintah Daerah

Pengelolaan Dana Otsus Kabupaten sejak Tahun 2014 dikelola sendiri oleh Kabupaten/Kota masing-masing. Alokasi Dana Otsus Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2014 sebesar Rp126.392.648.587,00. Pada Tahun 2015 berkurang sebesar Rp125.447.783.438,00. Untuk Tahun 2016, Alokasi Dana Otsus Kabupaten Aceh Barat terus mengalami penurunan menjadi Rp120.027.345.386,00. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2017, pada Tahun 2018 Dana Otsus dikelola kembali oleh Provinsi, namun usulan program kegiatan berasal dari Kabupaten.

3.5 Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Pertumbuhan Dana Desa Kabupaten Aceh Barat merupakan yang terbesar dalam sejarahnya. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pusat dan pemerintah kabupaten dengan ketaatan dan komitmen yang telah mengalokasikan dana desa sebesar 10 % dari APBK sumber dana perimbangan serta pajak daerah dan retribusi daerah.

Awal Tahun 2013 dana desa untuk Kabupaten Aceh Barat masih tergolong minim yaitu sebesar Rp5.685.000.000,00 yang kemudian meningkat menjadi Rp252.590.530.647,00 pada Tahun 2015. Peningkatan dana desa yang signifikan tersebut mulai dirasakan mulai Tahun 2014 dengan anggaran mencapai Rp143.514.014.285,00 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana desa yang disalurkan selama ini digunakan gampong sesuai dengan APBG yang sudah disusun berdasarkan musyawarah antara keuchik dan tuha peut serta unsur kompeten lainnya di gampong seperti pembangunan jalan, drainase, irigasi, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Selain itu, hampir seluruh gampong yang berada di Kabupaten Aceh Barat juga telah melakukan penguatan kelembagaan pemerintah gampong dengan mendirikan kantor keuchik dan sarana pendukung lainnya dengan menggunakan dana desa untuk menunjang kegiatan pemerintahan.

3.6 Dana CSR.

Di Kabupaten Aceh Barat sendiri CSR sudah mulai ada sejak masuknya perusahaan-perusahaan besar dan kecil dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat. Namun, kegiatan CSR yang dijalankan oleh pihak perusahaan tidak teridentifikasi oleh Pemerintah Daerah sehingga baik *input*, *ouput* dan *outcome* dari Program/Kegiatan CSR yang dijalankan tidak dapat terlihat dan dirasakan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat. Hal ini terjadi karena belum terbangunnya sebuah koordinasi yang sinergi antara Pemerintah Daerah dengan para perusahaan swasta.

Sudah berjalan sejak Tahun 2013, dimulai dari satu perusahaan dengan Pagu CSR sebesar Rp986.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp604.035.400,00. Tahun 2014 juga dengan satu perusahaan dengan pagu sebesar Rp6.927.660.000,00 dan realisasi Rp1.671.213.076,00, Tahun 2015 dengan nilai Rp22.018.883.454,00 dengan realisasi Rp4.641.976.935,00 dengan total 14 perusahaan, dan pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp4.109.178.112,00 dengan jumlah 15 perusahaan dengan realisasi Rp3.508.780.280 dan Tahun 2017 ini senilai Rp4.904.901.500,00 terlihat bahwa program CSR ini masih terus berjalan hingga sekarang.



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Letak geografis Kabupaten Aceh Barat yang strategis di kawasan Barat Selatan Aceh yang didukung dengan ketersediaan faktor produksi berupa bonus demografi dimana penduduk Kabupaten Aceh Barat yang didominasi oleh kelompok usia produktif, potensi SDA unggulan dan ketersediaan lahan untuk budidaya merupakan potensi Kabupaten Aceh Barat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Disamping hal tersebut, masyarakat yang religius dan tersedianya sarana dan prasarana publik, terutama Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta dan dibangunnya Rumah Sakit Regional juga merupakan peluang tersendiri dalam pembangunan Kabupaten Aceh Barat.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan hasil evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017, dengan realisasi RPJM sebesar 90,22 persen yang termasuk dalam predikat kinerja tinggi, namun masih dijumpai adanya permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Hal ini selain disebabkan oleh faktor penghambat berupa kelemahan, ancaman dan tantangan yang ada, juga karena peluang yang tersedia masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Secara garis besar, permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Aceh Barat antara lain adalah:

1. Pelaksanaan Syariat Islam yang belum optimal

Dengan dibukanya kran informasi teknologi yang tidak mengenal ruang dan diluar kendali disamping belum optimalnya semangat beragama dalam masyarakat telah menyebabkan masyarakat terutama generasi muda, menjadi kurang dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Syariat Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun permasalahan syariat Islam yang dijumpai antara lain:

- a. **Masih banyak diantara masjid dan meunasah yang belum melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah.** Sesuai hasil data survei pelaksanaan syariat islam, bahwa masih terdapat mesjid dan meunasah yang belum melaksanakan shalat berjamaah 5 (lima) waktu secara penuh, khususnya di kecamatan-kecamatan yang berada di luar kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh pekerjaan pokok masyarakat adalah petani sehingga waktu pelaksanaan shalat zhuhur dan ashar tidak dilakukan secara berjamaah.
- b. **Masih banyak masjid yang belum melaksanakan kemakmuran masjid,** sebagian besar masyarakat masih mengfungsikan masjid sebagai tempat ibadah dan zikir saja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 59 Tahun 2015 tentang pelaksanaan kemakmuran Masjid dan Lembaga Keagamaan di Masjid dalam Kabupaten Aceh Barat, telah diatur bahwa masjid memiliki 4 fungsi yakni : (1) Tempat ibadah dan zikir, (2) tempat *Ta'lim wa Ta'lim*, (3) Tempat dakwah; dan (4) Tempat hikmat kepada umat.
- c. **Dayah yang ada di Kabupaten Aceh Barat masih banyak yang belum teregistrasi.** Dari 81 pesantren/dayah yang ada di Kabupaten Aceh Barat, dari data Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah terdapat sekitar 28 dayah

yang sudah teregistrasi. Hal ini sangat penting mengingat untuk dapat menjamin kualitas pendidikan dayah.

- d. **Masih terbatasnya dayah dengan program hafiz alquran.** Dari 81 dayah yang ada, hanya 3 (tiga) pesantren yang memiliki program Hafiz Al quran, yakni Dayah Bulisch di Gampong Suak Indrapuri dan Dayah Pelmaha Sirajul Mukhlisin di Gampong Kampung Belakang, dan Pesantren Hafiz Kabupaten di Meureubo.
- e. **Belum optimalnya penegakan qanun Syariat Islam yang ada di Kabupaten Aceh Barat.** Hal ini terlihat dengan masih dijumpainya kasus pelanggaran Syariat Islam khususnya pelanggaran maisir dan khalwat sehingga pada Tahun 2017 telah dilakukan uqubat cambuk sekitar 32 orang.
- f. **Terbatasnya Sarana dan prasarana pendukung kegiatan keagamaan,** seperti belum tersedianya sarana prasarana pendidikan dayah dan TPA dan tempat ibadah seperti sarana untuk wudhu dan penyediaan air.
- g. **Belum optimalnya pelaksanaan majelis taklim,** hal ini disebabkan karena belum dianggarkannya dana pelaksanaan kegiatan tersebut di masing-masing organisasi perangkat daerah.
- h. **Masih rendahnya penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah,** hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dan perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat untuk membayar ZIS.

2. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Governance)

Berbagai perencanaan dan program pembangunan akan terlaksana secara baik apabila terdapat tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik melalui transparansi, keterbukaan, responsivitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Adapun masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan antara lain:

- a. **Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.** Karena terbatasnya sumber daya aparatur yang handal, dengan tata laksana yang jelas dan kinerja yang belum terukur menyebabkan belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Hal ini tercermin dari hasil laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2016 dengan nilai sebesar 61 interpretasi baik namun dengan catatan-catatan perbaikan.
- b. **Masih kurangnya pengawasan dan penilaian kinerja aparatur.** Hal ini dikarenakan masih terbatasnya PPNS dalam setiap organisasi perangkat daerah serta keterlibatan APIP dalam pengawasan belum maksimal.
- c. **Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan.** Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah belum dapat dibangun secara menyeluruh mengingat keterbatasan dana di APBK.
- d. **Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang responsif gender,** antara lain:

- Masih terjadi ketimpangan gender dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. IPG Kabupaten Aceh Barat masih berada di bawah IPG Provinsi Aceh, dengan perbandingan angka Provinsi Aceh sebesar 91,5 dan Kabupaten Aceh Barat sebesar 83,5. Jika dibandingkan dengan IPM, angka IPG Kabupaten Aceh Barat ini lebih tinggi dari angka IPM. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan gender di Kabupaten Aceh Barat.
- Keterlibatan perempuan di parlemen dan sumbangan pendapatan perempuan yang masih rendah;
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 masih berada di bawah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Aceh. Komponen IDG yang masih rendah di Kabupaten Aceh Barat adalah keterlibatan perempuan di parlemen yang hanya 8 persen dan sumbangan pendapatan perempuan sebesar 28,29 persen;
- Masih ada dijumpainya lanjut usia terlantar;
- Pembangunan masih netral gender;

Selama ini, pembangunan yang dilaksanakan lebih kepada pertimbangan netral gender. Asumsi yang digunakan adalah sama untuk setiap penerima manfaat. Dengan dikeluarkannya Qanun Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Aceh Barat, maka pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat akan lebih mengoptimalkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan secara lebih responsif dengan memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak, lansia serta penyandang disabilitas.

e. Belum optimalnya peran Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Barat.

- Masih rendahnya realisasi TJSLP dimana pada Tahun 2015 hanya 46%, Tahun 2016 sebesar 76,11% dan pada Tahun 2017 kondisi November sebesar 47,70%
- Masih adanya perusahaan di Kabupaten Aceh Barat yang belum bergabung dalam Forum TJSLP yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2015, hal ini menjadi tantangan ke depan untuk tetap memperkuat kerjasama pembangunan dengan pihak ketiga.

f. Belum optimalnya perencanaan berbasis pembangunan kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan belum menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan. Pembangunan masih dititikberatkan kepada pembangunan infrastruktur, hal ini dapat dilihat dari masih kecilnya belanja untuk program kegiatan pembangunan kependudukan.

3. Pelaksanaan dan perawatan perdamaian Aceh yang belum optimal

Meskipun perdamaian telah dapat diwujudkan sejak adanya MoU Helsinki, namun pelaksanaan perdamaian abadi berikut stabilitas perdamaian yang ada belumlah cukup optimal. Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah:

a. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan eks kombatan.

Belum optimalnya kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat yang khususnya ditujukan kepada mantan kombatan dapat menyebabkan keadaan yang tidak



kondusif sehingga pemerintah memberikan berbagai pelatihan dan bantuan modal kerja melalui dana APBK dan Dana Desa pada Tahun 2018.

b. Masih terbatasnya ketersediaan tenaga Polisi Pamong Praja dan Petugas linmas.

Rasio ketersediaan Polisi Pamong Praja dan Petugas linmas yang semakin menurun. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan dalam jumlah personil, sementara di sisi lainnya, jumlah penduduk terus meningkat.

c. Masih tingginya angka kriminalitas.

Hal ini juga menjadi tugas besar bagi pemerintah kabupaten ke depan. Diperlukan komitmen dan dukungan yang cukup kuat dari semua pihak agar stabilitas perdamaian ini tetap terjaga dengan optimal.

4. Jumlah penduduk miskin dan Pengangguran yang masih tinggi

Kemiskinan dan pengangguran merupakan isu yang sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Keduanya berkaitan dengan minimnya atau bahkan ketiadaan pendapatan untuk menopang hidup sehari-hari. Permasalahan kemiskinan merupakan persoalan yang pelik. Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi oleh penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat:

a. Tingginya persentase penduduk dibawah garis kemiskinan

Gambaran tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Barat dalam 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Angka kemiskinan tertinggi terjadi pada Tahun 2013 dengan posisi angka 23,70 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 44.320 jiwa. Angka ini mengalami penurunan yang cukup perlahan pada tahun selanjutnya (2014) dengan capaian 22,97 % dengan penduduk miskin 43.900 jiwa. Capaian terbaik diperoleh dalam Tahun 2015 dengan penurunan angka sebesar 1,51% (21,46 persen) atau berkurangnya penduduk miskin sebanyak 2.540 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini terus membaik pada Tahun 2016 dengan angka kemiskinan mencapai 20,38 persen atau jumlah penduduk miskin menjadi 40.110 jiwa.

Hal ini disebabkan oleh :

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat cenderung stagnan akibat pengaruh global serta pertumbuhan ekonomi belum merata;
2. Terbatasnya lapangan usaha dan tingginya tingkat pengangguran, akibat tidak terpenuhinya kualifikasi/skill sumber daya calon tenaga kerja;
3. Masih rendahnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas;
4. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
5. Masih terbatasnya akses terhadap infrastuktur dasar seperti sanitasi dan air minum yang layak; dan
6. Sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen.

b. Pengangguran yang masih tinggi

Meskipun jumlah pengangguran di Kabupaten Aceh Barat dapat dikurangi sebanyak 921 orang selama setahun terakhir, namun jumlah pengangguran di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 sebanyak 5.054 orang itu tergolong tinggi hal



ini karena permintaan tenaga kerja lokal tidak diimbangi dengan kualitas/skill calon tenaga kerja.

5. Pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan dan lemahnya pemanfaatan SDA unggulan yang menjadi sektor basis

- Pertumbuhan ekonomi yang stagnan
Selama kurun waktu Tahun 2013-2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat hanya berkisar antara 3,35-4,24 persen. Angka pertumbuhan ini masih dibawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dan Nasional.
- Lemahnya pemanfaatan SDA unggulan
SDA unggulan Kabupaten Aceh Barat adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Salah satu penyebab lemahnya pertumbuhan ekonomi ini adalah karena masih lemahnya pemanfaatan SDA unggulan.

6. Masih seringnya terjadi bencana alam

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

- a. **Kabupaten Aceh Barat merupakan daerah rawan bencana**
Potensi kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat meliputi Potensi bencana geologi, bencana tsunami, longsor, angin puting beliung, banjir, abrasi dan erosi, kekeringan dan kebakaran hutan.
- b. **Belum optimalnya upaya mitigasi bencana.** Hal ini dikarenakan mitigasi bencana belum menjadi budaya masyarakat, sarana dan prasarana belum memadai serta masih kurangnya jumlah desa tangguh yang dibentuk.

7. Kualitas sumber daya manusia yang masih lemah

- a. **Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**
Sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 IPM Kabupaten Aceh Barat masih dibawah rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional.
- b. **Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur**
Kualitas sumber daya aparatur (PNS) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat masih tergolong rendah yang ditunjukkan oleh rasio tingkat pendidikan PNS terhadap jumlah PNS secara keseluruhan. Pada Tahun 2011 rasio PNS lulusan pendidikan jenjang S1, S2 dan S3 terhadap jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah 0,34 yang berarti terdapat 34 orang PNS yang berpendidikan S1, S2 dan S3 secara kumulatif di dalam 100 orang PNS. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan kondisi pada Tahun 2010 yang mempunyai rasio sebesar 0,37 atau terdapat 37 orang PNS berpendidikan S1, S2 dan S3 secara kumulatif di dalam 100 orang PNS.
- c. **Rendahnya kualitas pencari kerja**
Kabupaten Aceh Barat memiliki bonus demografi karena kelompok usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dari usia non produktif dengan perbandingan persentase sebesar 67,71 persen dan 32,29 persen. Jika ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar pencari kerja SLTA dengan persentase 57,63 persen. Sedangkan Pencari kerja dengan pendidikan Sarjana/Pascasarjana hanya sebesar 13,2 persen.

[Handwritten signature]

8. Belum berkembangnya objek wisata spritual, budaya dan adat istiadat

Salah satu sektor yang mampu menumbuh kembangkan perekonomian di Kabupaten Aceh Barat adalah sektor pariwisata. Hanya saja potensi wisata, budaya dan adat yang sangat potensial dan beragam, hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendongkrak perekonomian masyarakat. Dengan berkembangnya sektor pariwisata, dapat merangsang tumbuh dan berkembang sektor lainnya seperti sektor perdagangan dan jasa.

9. Masih terbatasnya infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat

Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat yang ada di kabupaten Aceh Barat masih terbatas. Adapun permasalahan yang dijumpai antara lain:

a. Belum optimalnya aksesibilitas perhubungan antar wilayah dan terbatasnya jalan dalam kondisi baik

Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya gampong terpencil di Kabupaten Aceh Barat. Jumlah gampong terpencil di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 602 Tahun 2014 berjumlah 64 gampong. Dengan pesatnya pembangunan jalan, jumlah gampong terpencil ini sudah dapat ditekan. Berdasarkan hasil survey, jumlah gampong terpencil di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 berjumlah 39 gampong.

Dari jalan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016, jalan dalam kondisi baik sepanjang 403,83 km atau sebesar 46 persen dari panjang jalan yang ada. Sedangkan 53,59 persen lainnya merupakan jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat berjumlah 468,33 km.

b. Masih kurangnya penyediaan air minum yang layak

Sumber air minum penduduk Kabupaten Aceh Barat terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Adapun yang termasuk ke dalam jaringan perpipaan berasal dari PDAM dan BPSPAM, sedangkan yang termasuk bukan jaringan perpipaan terdiri atas sumur gali terlindung, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, mata air terlindung serta penampungan air hujan.

Penggunaan air minum ini, tidak semuanya memenuhi syarat kesehatan. Dari semua sumber air minum yang ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016, hanya 33,43 persen yang memenuhi syarat (akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak) dengan jumlah 64.788 orang.

Jika dipilah dari kelompok 40 persen (4 desil) penduduk berpendapatan terbawah, persentase penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air minum yang layak Tahun 2014 hanya 18,95 persen.

c. Terbatasnya penggunaan jamban yang sehat

Penggunaan jamban sehat di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 masih sangat terbatas. Jumlah penduduk yang sudah menggunakan jamban sehat berjumlah 74.335 orang atau hanya 38,4 persen dari jumlah penduduk yang ada.

Sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat tidak memiliki fasilitas buang air besar. Fasilitas jamban umum dan jamban bersama juga sangat sedikit dalam hal jumlah dan masyarakat penggunaannya. Meskipun demikian, sudah ada 43,72 persen penduduk miskin yang telah memiliki fasilitas jamban sendiri. Namun hanya 6,77 persen diantaranya yang memiliki sanitasi yang layak.

Permasalahan lain, target nasional pencapaian SDGs untuk sanitasi layak bagi 40% penduduk berpendapatan terbawah pada Tahun 2019 menjadi 100%, target ini sangat sulit untuk dapat dipenuhi.

d. Masih ada rumah tangga yang belum mendapatkan fasilitas penerangan dari listrik PLN

Meskipun Tahun 2014 tercatat 322 gampong telah dijangkau fasilitas penerangan berupa jaringan listrik PLN, namun di Tahun 2016, masih terdapat rumah tangga yang belum menggunakan fasilitas ini. Pada Tahun 2015 dengan jumlah rumah tangga sebesar 48.027 keluarga di Kabupaten Aceh Barat sudah mendapatkan fasilitas pelayanan listrik dengan persentase sebesar 80,08 persen. Di Tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan sebesar 523 rumah tangga dengan persentase menjadi 80,18 persen.

Berdasarkan Basis Data Terpadu diketahui bahwa akses penerangan listrik untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 sudah mencapai 98,44 persen. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 99,10 persen di Tahun 2016. Untuk pencapaian target nasional pencapaian SDGs Tahun 2019 yakni meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada Tahun 2019, optimis dapat dicapai.

e. Masih terdapat bangunan tempat tinggal yang tidak layak huni

Data BDT Tahun 2015 menunjukkan bahwa masih terdapat bangunan tempat tinggal penduduk yang tidak layak huni. Hal ini disebabkan karena masih ada bangunan tempat tinggal yang berlantaikan tanah. Disamping itu, masih ada sebesar 7,92 persen rumah penduduk miskin masih beratapkan ijuk/rumbia.

f. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana transportasi serta konektivitas antar wilayah. Hal ini dikarenakan belum tersedianya masterplan transportasi untuk menunjang konektivitas antar daerah, sehingga penyediaan moda transportasi umum baru mengandalkan bus sekolah milik pemerintah daerah.

10. Merupakan daerah bermasalah kesehatan

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2011 telah menempatkan Kabupaten Aceh Barat sebagai Daerah Bermasalah Kesehatan. Permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh Kabupaten Aceh Barat cukup kompleks, diantaranya adalah:

a. Tingginya angka kematian bayi

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Aceh Barat selama 8 (delapan tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi. Jumlah kasus kematian bayi tertinggi terjadi pada Tahun 2015 dengan jumlah kematian sebesar 90 kasus. Jumlah ini mengalami penurunan di Tahun 2016 menjadi 57 kasus dengan Angka Kematian Bayi sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus terendah terjadi Tahun 2011 dengan jumlah kematian bayi sebanyak 37 kasus.

b. Tingginya angka kematian ibu

Jumlah kematian ibu melahirkan selama 8 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan jumlah kematian tertinggi sebanyak 6 kasus yang terjadi di Tahun 2009, 2012, 2014 dan 2016. Kematian ibu terendah terjadi di Tahun 2015 dengan

jumlah 3 kasus. Jumlah kematian ibu Tahun 2016 yang berjumlah 6 kasus terdiri atas 2 kasus kematian karena edema paru dan shock hipovolemik sepsis, 3 kasus kematian disebabkan pendarahan post partum dan 1 kasus kematian disebabkan infeksi purpuralis/nifas.

c. Masih terdapat adanya balita gizi buruk

Tingkat persentase prevalensi balita kekurangan gizi yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2015 berjumlah 14 kasus yang terdiri atas 8 orang balita laki-laki dan 6 orang balita perempuan atau 0,17 persen dari balita yang ditimbang dengan jumlah 8.324 balita. Tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan. Jumlah kasus balita gizi buruk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 berjumlah 17 kasus dengan 11 kasus pada balita laki-laki dan 6 kasus dialami oleh balita perempuan.

d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM bidang kesehatan

Jumlah rumah sakit yang ada saat ini di Kabupaten Aceh Barat berjumlah 4 unit yakni Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien, Rumah Sakit TNI-AD, Rumah Sakit Montela dan Rumah Sakit Harapan Sehat yang semuanya berlokasi di pusat Kota Meulaboh. Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 sangat kecil yakni 0,02 dimana 1 (satu) unit rumah sakit melayani 49.480 jiwa penduduk.

Rasio untuk puskesmas adalah 7,32 per 100.000 penduduk atau 1 (satu) unit Puskesmas melayani 13.656 jiwa penduduk, puskesmas pembantu memiliki rasio sebesar 24,78 per 100.000 penduduk atau 1 (satu) unit Puskesmas Pembantu melayani 4.035 jiwa penduduk.

Rasio ketersediaan dokter di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 adalah 35,09 per 100.000 penduduk dimana 1 (satu) orang dokter melayani 2.850 jiwa penduduk. Untuk tenaga para medis yang paling besar rasionya adalah perawat dan bidan yaitu sebesar 302,91 per 100.000 penduduk atau 1 (satu) orang perawat/bidan melayani 2.849 jiwa penduduk menurun dibandingkan tahun lalu. Sedangkan tenaga para medis lainnya mempunyai rasio antara 119,20 per 100.000 penduduk.

e. Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Hal ini dikarenakan budaya PHBS, Promkes, Germas dan pemucuan di masyarakat masih kurang akibat belum optimalnya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat.

11. Masih rendahnya akses layanan dan kualitas pendidikan

a. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah

Sebagian anak yang tidak bersekolah dapat dilihat dari jumlah anak yang putus sekolah. Namun, secara umum, jumlah anak yang tidak bersekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni. Tahun 2016, APM SD/MI sebesar 95,77 persen. Hal ini berarti terdapat 4,23 persen penduduk usia 7-12 tahun, tidak bersekolah. Sementara untuk APM SMP/MTS adalah 85,91. Angka ini menunjukkan bahwa 14,09 persen penduduk usia 13-15 tahun tidak bersekolah. Dan untuk APM SMA/MA sebesar 75,49 persen menunjukkan sebesar 24,51 persen penduduk usia 16-18 tahun tidak bersekolah.

**b. Rata-rata lama sekolah masih rendah**

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 adalah 8,73 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pada saat Pemerintah Pusat sudah mencanangkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, di Kabupaten Aceh Barat Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun belum tuntas.

c. Belum optimalnya penerapan pendidikan Islami pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya materi dan jam muatan lokal islami yang diterapkan di sekolah. Serta budaya islami dalam proses belajar mengajar belum sepenuhnya diterapkan (seperti membaca doa sebelum masuk kelas / mulai pelajaran).

d. Terbatasnya pendidikan vokasional (kejuruan) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya tenaga pendidik sesuai dengan kompetensi kejuruan serta terbatasnya Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

12. Ketahanan pangan yang belum optimal

Upaya ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Barat masih belum optimal. Adapun permasalahan yang dihadapi Antara lain:

a. Rendahnya kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. Hal ini disebabkan karena budaya masyarakat yang belum seimbang dalam mengkonsumsi buah, sayuran dan susu serta diversifikasi pangan yang masih kurang (terbatas hanya konsumsi beras / nasi) disamping itu dipengaruhi juga oleh pendapatan yang terbatas.

b. Masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian dan perikanan. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya jumlah penyuluh untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan perikanan serta pasca panen.

c. Belum optimalnya pemasaran hasil pertanian dan perikanan. Hal ini disebabkan karena belum terkoordinirnya penampung besar dengan produsen sehingga dalam pemasaran mengalami hambatan, serta masih maraknya sistem *tengkulak ijon* dan rendahnya harga barang ketika musim panen.

d. Belum optimalnya industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Hal ini disebabkan karena minimnya sarana pengolahan, pelatihan untuk hasil pertanian dan perikanan, serta *trend* industri pengolahan belum menjadi pilihan (produk langsung dikonsumsi).

e. Masih rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan. Budaya masyarakat untuk menanam buah dan sayuran di lahan pekarangan masih kurang dikarenakan pola hidup yang konsumtif dan masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan.

f. Efektifitas pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Aceh Barat belum maksimal dengan angka Indeks Areal Terairi sebesar 35,62 persen, untuk

mencapai efektifitas pengelolaan jaringan irigasi masih memerlukan penyediaan jaringan irigasi sebesar 64,38 persen lagi pada masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan di bidang irigasi adalah antara lain: 1) belum berfungsinya jaringan irigasi secara maksimal; 2) terbatasnya pembangunan jaringan irigasi untuk menggantikan alih fungsi lahan beririgasi; 3) belum optimalnya peningkatan jaringan irigasi teknis; 4) tingkat kerusakan jaringan irigasi masih tinggi dimana persentase jaringan irigasi dalam kondisi buruk sebesar 47,69 persen; 5) belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan dan 6) terbatasnya debit andalan di beberapa daerah irigasi.

g. Rendahnya Nilai Tukar Petani

Sampai dengan saat ini nilai tukar petani masih jauh dari harapan yaitu sebesar 104,12 pada Tahun 2016. Hal ini mengindikasikan sulitnya untuk menciptakan *aglomerasi* mata rantai pertanian yang baik mulai dari *on farm* hingga *off farm* nya. Bagaimana menyediakan infrastruktur yang mampu mendukung keberhasilan pertanian menjadi kunci utama dalam pembangunan pangan ke depan.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah tidak lagi bersifat *reaktif*, tetapi lebih *antisipatif*.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas dapat ditetapkan isu-isu strategis Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, yakni:

1. Penanggulangan daerah bermasalah kesehatan

Isu strategis penanggulangan daerah bermasalah kesehatan difokuskan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, diantaranya dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan rumah sakit regional dan rujukan serta menambah ketersediaan tenaga dokter dan pendistribusian tenaga kesehatan di kecamatan, sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi dan ibu serta penurunan kasus gizi buruk.

2. Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau

Isu strategis pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan siap menghadapi dunia kerja. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan mutu dan akses pendidikan yang komprehensif dan sistematis, termasuk di dalamnya optimalisasi mutu pendidikan, pemerataan distribusi guru di daerah perkotaan maupun pedesaan, penyediaan guru menurut bidang studi, peningkatan pendidikan vokasional, peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dayah, serta peningkatan kompetensi guru.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Isu strategis peningkatan kualitas sumberdaya manusia difokuskan kepada peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil, honorer, dan teungku dayah sesuai dengan kemampuan daerah dengan harapan akan meningkatkan kinerja dan menghindari praktek KKN dalam pemerintahan serta pemberian beasiswa S1, S2 maupun S3 sehingga kualitas PNS dan Non PNS semakin baik.

4. Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*)

Isu strategis pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) difokuskan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan. Menempatkan pimpinan OPD sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian, serta menjadikan aparatur pemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat.

Di samping itu, dengan isu strategis ini juga akan melahirkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah dengan berbagai optimalisasi dibidang pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah seperti pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender, upaya pengendalian masalah kependudukan dan optimalisasi peran TJSPLP dalam pembangunan.

5. Pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan mitigasi bencana

Isu strategis pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan mitigasi bencana dapat menurunkan kesenjangan wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat. Dalam hal ini, peningkatan kualitas infrastruktur dasar (irigasi, air baku, infrastruktur pemukiman) dan perbaikan konektivitas antar wilayah akan memberi manfaat tidak hanya pada peningkatan aktivitas perekonomian, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Aceh Barat.

Penerapan pembangunan infrastruktur juga melalui strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana. Dalam hal ini, indeks kualitas lingkungan hidup diharapkan dapat meningkat. Untuk itu, pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang didukung partisipasi masyarakat dapat menurunkan dampak risiko bencana dan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan mengacu kepada KLHS.

6. Percepatan penanggulangan kemiskinan

Isu strategis percepatan penanggulangan kemiskinan difokuskan untuk menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran. Peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK), Pemenuhan beras Rastra, Subsidi Listrik, pemberian beasiswa untuk siswa dan santri, pembangunan sarana dan prasarana dasar masyarakat, peningkatan program PKH, dan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat serta mendorong lembaga TP2KD dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan yang efektif.

7. Percepatan pertumbuhan ekonomi

Isu strategis percepatan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan penguatan bidang pertanian, perikanan, industri, dan koperasi dan UMKM, serta pariwisata difokuskan

untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang akan memberi manfaat dalam rangka membangun pertanian dan ekonomi maritim, serta mengelola rantai pasok (*supply chain management*) di seluruh sektor produksi. Meningkatkan nilai tambah (*value added*), mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan sumber daya daerah dan memproteksi produk-produk yang dihasilkan, serta memiliki peluang untuk menghasilkan pendapatan daerah melalui ekspor-impor, meningkatkan pariwisata Islami dengan membangun sarana dan prasarana dalam menaikkan jumlah kunjungan wisata domestik dan manca negara yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Pemantapan penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat

Isu strategis pemantapan penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat difokuskan untuk menurunkan angka pelanggaran syariat Islam dan menjadikan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup. Di samping itu, melalui isu strategis ini akan memperkuat eksistensi kelembagaan institusi ke-Islaman dalam menyebarkan nilai-nilai ke-Islaman dengan cara penegakan Qanun Syariat Islam, optimalisasi semangat beragama di dalam masyarakat, peningkatan tenaga keagamaan dalam mengembangkan tugas syariat Islam dan pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan keagamaan.

9. Optimalisasi pelaksanaan dan perawatan perdamaian Aceh

Isu strategis Optimalisasi pelaksanaan dan perawatan perdamaian Aceh difokuskan untuk penguatan pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sesuai dengan prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif. Menuntaskan aturan turunan UUPA untuk diimplementasikan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Di samping itu, peningkatan semangat nasionalisme dalam masyarakat dan pemberdayaan mantan kombatan dalam bidang ideologi, sosial dan ekonomi.

10. Pengembangan dan pelestarian budaya dan adat istiadat

Isu strategis pengembangan dan pelestarian budaya dan adat istiadat difokuskan untuk memperkuat pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap jenjang pendidikan dan penguatan budaya masyarakat adat yang berdampak kepada peningkatan kepekaan sosial serta membangun kembali nilai-nilai budaya ke Aceh yang Islami dan *pluralistik* dengan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan MAA baik di kabupaten, kecamatan dan gampong untuk memperkuat budaya dan adat istiadat Islami.

11. Optimalisasi upaya ketahanan pangan

Isu strategis optimalisasi upaya ketahanan pangan difokuskan melalui pemanfaatan lahan perkarangan dan diversifikasi pangan serta pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat secara mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain, serta memotong rantai distribusi pangan.



BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Secara harfiah, visi merupakan pengkondisian masa depan daerah yang ingin di capai berdasarkan batasan tempat dan waktu. Visi harus dapat menjabarkan pokok-pokok permasalahan yang akan diselesaikan atas kondisi aktual yang sejalan dengan kebijakan. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi kepala daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berlaku selama 5 (lima tahun). Untuk menyusun visi tersebut, antara lain kepala daerah harus berpedoman kepada dokumen perencanaan makro (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dalam rangka sinkronisasi sasaran pokok dan arah kebijakannya. Oleh karena itu, berdasarkan arah pembangunan tahun ketiga jangka panjang daerah, kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis daerah di tetapkan visi Kabupaten Aceh Barat selama 5 (lima) tahun ke depan (2017-2022) sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS"

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat untuk Tahapan Pembangunan ke-3 Tahun 2017-2022 yakni ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta pemanfaatan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Mewujudkan visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 terdapat tiga kata kunci, antara lain **(1) Islami (2) Pembangunan dan (3) Ekonomi Kerakyatan**. Secara teknis pelaksanaannya didukung dengan empat pendekatan, yaitu Transparansi, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas. Untuk itu setidaknya ada 7 (tujuh) hal yang memiliki urgensi yang patut digaris bawahi dan perlu penjabaran lebih lanjut agar tidak terjadi multitafsir/ambigu terhadap visi yang ditetapkan. Berikut dijelaskan penjabaran sebagaimana dimaksud:

- Islami : Pemerintah dan masyarakat Aceh Barat dalam melaksanakan pembangunan sosial kemasyarakatan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islami dan nilai luhur Pancasila dengan mengedepankan amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk mewujudkan keadilan sosial (*Baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*).
- Pembangunan : Pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat, untuk menuju



perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.

- Ekonomi Kerakyatan :** Membangun ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan menganut sistem perekonomian pada kekuatan ekonomi rakyat. Dengan kata lain ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam berpartisipasi aktif meningkatkan perekonomian dalam berbagai usaha-usaha produktif.
- Transparansi :** Pemerintah Aceh Barat dalam berbagai kebijakan pembangunan selalu terbuka menyediakan informasi yang lengkap untuk kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan guna menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Kredibel :** Mewujudkan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
- Akuntabel :** Mewujudkan pemerintahan yang memberikan pertanggungjawaban dengan berlandaskan pada berbagai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Terintegritas :** Mewujudkan pemerintahan yang memiliki konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai keislaman dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Tabel 5.1.
Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
"Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas"	Islami	Pemerintah dan masyarakat Aceh Barat dalam melaksanakan pembangunan sosial kemasyarakatan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islami dan nilai luhur Pancasila dengan mengedepankan amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk mewujudkan keadilan sosial (<i>Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur</i>).
	Pembangunan	Pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat, untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.
	Ekonomi Kerakyatan	Membangun ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan menganut sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Dengan kata lain ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dapat memberikan



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam berpartisipasi aktif meningkatkan perekonomian dalam berbagai usaha-usaha produktif.

5.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi kepala daerah Tahun 2017-2022 tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu :

- 1. Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang Syar'i dan Mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang Bersih.** Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan syariat islam secara kaffah dalam setiap sendi-sendi kehidupan (pemerintah dan masyarakat). Di sisi lain, kebijakan penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semua itu dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang ditandai dengan adanya perbaikan kinerja birokrasi di setiap lini secara cepat, murah, transparan dan akuntabel melalui pendidikan agama, aqidah dan akhlak.
- 2. Mewujudkan Perdamaian Aceh yang Abadi Sesuai dengan Nilai-Nilai Luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsinki dan UUPA.** Kegiatan ini dilakukan; Pertama, mensosialisasikan dan mengimplementasikan MoU Helsinki kepada pelajar dan mahasiswa. Kedua, meningkatkan pemahaman mantan kombatan tentang kehidupan berbangsa, bernegara dan berpolitik. Ketiga, memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang perdamaian, hukum dan terorisme.
- 3. Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu pada Sektor SDA dengan Pengelolaan Terintegrasi berlandaskan Tata Ruang dan Peta Kebencanaan.** Membangun ekonomi kerakyatan pada sektor Sumber Daya Alam (SDA) dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam, antara lain sektor pertanian, perkebunan/kehutanan, kelautan dan pertambangan dengan memberikan modal usaha melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan koperasi dengan melibatkan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda). Di sisi lain, pembangunan berkaitan dengan mitigasi dan penanganan kebencanaan dilaksanakan melalui penempatan bidang mitigasi bencana di salah satu SKPK, seperti BPBD atau Dinas Sosial melalui kerjasama dengan kampus-kampus khususnya dengan pusat kajian kebencanaan dengan sistem koordinasi kebencanaan yang terintegrasi dengan semua SKPK.
- 4. Meningkatkan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Kontrak (honorar) dan Teungku Dayah.** Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan mempersiapkan Sumber daya Manusia Aceh Barat dalam menghadapi persaingan global melalui peningkatan kesejahteraan dan pendidikan.
- 5. Mengembangkan dan Melestarikan Objek Wisata Spiritual, Seni, Budaya, Adat dan Adat-Istiadat serta Olahraga Sesuai dengan Potensi Kedaerahan (Kearifan Lokal).** Langkah-langkah yang dilakukan, antara lain: Pertama, dalam bidang pelestarian objek wisata spiritual, pemerintah melakukan pemugaran objek-objek wisata bersejarah/spiritual sebagai potensi wisata lokal, nasional dan internasional. Kedua, seni dan budaya yaitu mengidentifikasi seni tradisional khas Aceh, memberikan pembinaan secara intensif serta mengirim dan

mementaskan/mempromosikan seni tradisional kabupaten Aceh Barat baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional, sebagai upaya pelestarian warisan leluhur bangsa. Ketiga, dalam bidang adat dan adat istiadat menumbuhkan kembangkan tradisi/kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tatanan aturan Syar'i sebagai piranti pengaruh budaya global. Ketiga, hal dimaksud dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Barat. Keempat, bidang keolahragaan dengan melibatkan pelajar, pemuda dan mahasiswa dengan memberdayakan Komite Olahraga Nasional (KONI).

6. **Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pendukung dalam Mewujudkan Aceh Barat sebagai Zona Ketahanan Pangan Nasional.** Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta membuka daerah terisolir guna meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan hasil produksi pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan. Pemerintah secara berkesinambungan akan membangun fasilitas sarana jalan, irigasi, perluasan area lahan pertanian, seperti pembukaan lahan sawah baru, lahan tanaman palawija dengan menggalakkan kembali "*Budaya Meuseuraya*" sebagai semangat keacehan. Di samping itu, pemerintah juga menyediakan bibit unggul, pupuk, peralatan pertanian, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan membuka akses yang lebih mudah bagi para petani dalam mengelola lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Optimalisasi stabilitas harga pasar hasil-hasil pertanian masyarakat, pemerintah juga membentuk satuan tugas (satgas) melalui SKPK terkait yang bekerjasama dengan berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah dalam bidang peternakan mengembangkan peternakan terpadu berwawasan agribisnis.
7. **Memberikan Pelayanan Kesehatan Menuju Masyarakat Aceh Barat yang Sehat Jasmani dan Rohani serta Meningkatkan SDM Bidang Kesehatan.** Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak serta masyarakat miskin, terutama di daerah terpencil atau daerah tertinggal melalui pembukaan akses-akses dalam bidang kesehatan. Di sisi lain, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan harapan usia hidup produktif pemerintah juga melakukan pengendalian penyebaran penyakit menular, gizi buruk, gizi lebih serta krisis kesehatan akibat bencana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat pemerintah secara bertahap juga meningkatkan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kesehatan serta meningkatkan peran serta Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK).
8. **Meningkatkan Kesejahteraan dan Keahlian Tenaga Pendidik serta Membuka Akses Pendidikan kepada Masyarakat Aceh Barat.** Pemerintah dalam mewujudkan akselerasi mutu pendidikan umum dan pendidikan agama memberikan tunjangan kesejahteraan kepada para guru/teungku dayah agar dapat meningkat kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial. Di samping itu, pemerintah juga membuka akses pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memberikan beasiswa berprestasi dan bantuan pendidikan kepada putra dan putri Kabupaten Aceh Barat untuk mengikuti studi lanjutan di dalam dan luar negeri.

Gambar 5.1.

**Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan
Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat**

RPJM KABUPATEN ACEH BARAT

**"TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN,
KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS"**

Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang Syar'i dan Mewujudkan
Pemerintahan Aceh Barat yang Bersih

Mewujudkan Perdamaian Aceh yang Abadi Sesuai dengan Nilai-nilai Luhur
Pancasila, UUD 1945, MoU Helsinki dan GUPA

Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu pada Sektor SDA dengan Pengelolaan
Terintegrasi Berlandaskan Tata Ruang dan Peta Kebencanaan

Meningkatkan Kesejahteraan Sumberdaya Manusia seperti Aparatur Sipil
Negara (ASN), Tenaga Kontrak (honorar) dan Teungku Dayah

Mengembangkan dan Melestarikan Objek Wisata Spiritual, Seni, Budaya, Adat dan
Adat Istiadat serta Olahraga Sesuai dengan Potensi Kedarifatan (Kearifan Lokal)

Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pendukung dalam Mewujudkan Aceh
Barat sebagai Zona Ketahanan Pangan Nasional

Memberikan Pelayanan Kesehatan Menuju Masyarakat Aceh Barat yang
Sehat Jasmani dan Rohani serta Meningkatkan SDM Bidang Kesehatan

Meningkatkan Kesejahteraan dan Keahlian Tenaga Pendidik serta
Membuka Akses Pendidikan kepada Masyarakat Aceh Barat

RPJP KABUPATEN ACEH BARAT

**"KABUPATEN ACEH BARAT YANG MAJU, MANDIRI, ADIL,
MAKMUR DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ISLAM"**

Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika,
Berbudaya, dan Beradab Berlandaskan Islam

Mewujudkan Masyarakat yang Mempunyai Daya-saing.

Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berdasarkan Hukum

Mewujudkan Aceh Barat yang Aman, Damai, dan Bersatu

Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan

Mewujudkan Kabupaten Aceh Barat yang Asri dan Lestari

Mewujudkan Kabupaten Aceh Barat menjadi Daerah yang Maju, Mandiri, Kokoh dan
Berbasis Kepentingan Masyarakat.

Mewujudkan Kabupaten Aceh Barat yang Berperan Penting dalam Konstelas
Provinsi dan Nasional

Mewujudkan Sistem Pengelolaan Pemerintah yang Sesuai dengan
Peraturan, Aparatur yang Profesional

Mewujudkan dan Membuka Peluang Peran Masyarakat dalam
Mengontrol Kinerja Aparatur Pemerintah.

Gambar 5.2.

Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh

RPJM KAB. ACEH BARAT

"TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS"

Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang Syar'i dan Mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang Bersih

Mewujudkan Perdamaian Aceh yang Abadi sesuai dengan Nilai-nilai Luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsinki dan UUPA

Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu pada Sektor SDA dengan Pengelolaan Terintegrasi Berlandaskan Tata Ruang dan Peta Kebencanaan

Meningkatkan Kesejahteraan Sumberdaya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Kontrak (honorar) dan Teungku Dayah

Mengembangkan dan Melestarikan Objek Wisata Spiritual, Seni, Budaya, Adat dan Adat-Istiadat serta Olahraga Sesuai dengan Potensi Kedaerahan (Kearifan Lokal)

Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pendukung dalam Mewujudkan Aceh Barat sebagai Zona Ketahanan Pangan Nasional

Memberikan Pelayanan Kesehatan Menuju Masyarakat Aceh Barat yang Sehat Jasmani dan Rohani serta Meningkatkan SDM Bidang Kesehatan

Meningkatkan Kesejahteraan dan Keahlian Tenaga Pendidik serta Membuka Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Aceh Barat

RPJM ACEH

"TERWUJUDNYA ACEH DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI"

Reformasi Birokrasi untuk Tercapainya Pemerintahan yang Bersih dan Berakhlak, guna Mendukung Pelayanan Publik yang Mudah, Cepat dan Berkualitas

Memperkuat Perkembangan Syariat Islam beserta Nilai-nilai Keislaman dan Budaya Keacehan dalam Kehidupan Masyarakat dengan Iktikaf Ahlul Sunnah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'ah dengan Tetap Menghormati Mazhab Lain

Meningkatkan Integritas Nasionalisme Bangsa Berlandaskan Perdamaian sebagai landasan untuk Pembangunan MoU Helsinki

Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saling di Tingkat Nasional dan Regional melalui Peningkatan Mutu Pendidikan secara Merata Baik Pendidikan Vokasional, Dayah dan Umum

Memastikan Semua Rakyat Aceh Mendapatkan Akses Layanan Kesehatan secara Mudah, Berkualitas dan Terintegrasi

Menjamin Kedaulatan dan Ketahanan Pangan terhadap Kesejahteraan Petani dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Pertanian dan Kelautan

Menyediakan Sumber Energi yang Bersih dan Terbarukan dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Listrik bagi Rakyat dan Industri sebagai Komitmen Aceh dalam Pembangunan Rendah Emisi

Membangun dan Melindungi Sentra Produksi dan Industri Jasa Kreatif yang Menghasilkan Produk Kompetitif untuk Memperluas Lapangan Kerja serta Memberikan Kemudahan Akses Pemodal

Revitalisasi Fungsi Perencanaan Daerah dengan Prinsip Evidence Based Planning yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan

Gambar 5.3.

**Keseiarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan
Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Aceh**

RPJM KAB. ACEH BARAT

**"TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG
TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS"**

Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang Syari dan Mewujudkan
Pemerintahan Aceh Barat yang Bersih

Mewujudkan Perdamaian Aceh yang Abadi sesuai dengan Nilai-nilai
Luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsinki dan UUPA

Membangun Ekonomi kerakyatan yang Bertumpu pada Sektor SDA dengan
Pengelcaian Terintegrasi Berlandaskan Tata Ruang dan Peta Kebencanaan

Meningkatkan Kesejahteraan Sumberdaya Manusia seperti Aparatur
Sipil Negara (ASN), Tenaga Kontrak (honorar) dan Teungku Dayah

Mengembangkan dan Melastarkan Objek Wisata Spiritual, Seni, Budaya,
Adat dan Adat-Istiadat serta Cagar Budaya sesuai dengan Potensi Kedarifan
(Kearifan Lokal)

Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pendukung dalam
Mewujudkan Aceh Barat sebagai Zona Ketahanan Pangan Nasional

Memberikan Pelayanan Kesehatan menuju Masyarakat Aceh Barat yang
Sehat Jasmani dan Rohani serta Meningkatkan SDM Bidang Kesehatan

Meningkatkan Kesejahteraan dan Keahlian Tenaga Pendidik serta Membuka
Akses Pendidikan kepada Masyarakat Aceh Barat

RPJP ACEH

**"ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN
SEJAHTERA"**

Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia sesuai
dengan Nilai-nilai Islami

Mewujudkan Masyarakat yang Mampu Memenuhi
Kebutuhan Hidup dalam Aspek Ekonomi, Sosial dan
Spiritual

Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan
Hukum

Mewujudkan Aceh yang Aman, Damai, dan Bersatu

Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas,
Maju, Adil dan Merata

Mewujudkan Aceh yang Lestari dan Tangguh
Terhadap Bencana

Gambar 5.4.
**Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan
Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional**

RPJM KAB. ACEH BARAT
**"TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG
TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS"**

- Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang Syar'i dan Mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang Bersih
- Mewujudkan Pardaimalan Aceh yang Abadi sesuai dengan Nilai-nilai tahun Pencasila, UUD 1945, MoU Helsinki dan UUPA
- Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu pada Sektor SDA dengan Pengelolaan Terintegrasi Berlandaskan Tata Ruang dan Peta Kebencanaan
- Meningkatkan Kesejahteraan Sumberdaya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Kontrak (honorir) dan Teungku Dayah
- Mengembangkan dan Melestarikan Objek Wisata Spiritual, Seni, Budaya, Adat dan Adat Istiadat serta Olahraga sesuai dengan Potensi Kedaerahan (Kearifan Lokal)
- Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pendukung dalam Mewujudkan Aceh Barat sebagai Zona Ketahanan Pangan Nasional
- Memberikan Pelayanan Kesehatan Menuju Masyarakat Aceh Barat yang Sehat Jasmani dan Rohani serta Meningkatkan SDM Bidang Kesehatan
- Meningkatkan Kesejahteraan dan Keahlian Tenaga Pendidik serta Membuka Akses pendidikan kepada Masyarakat Aceh Barat

RPJM NASIONAL
**"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong"**

- Mewujudkan Keamanan Nasional yang Mampu Menjaga Kedaulatan Wilayah, Menopang Kemandirian Ekonomi dengan Mengamankan Sumber Daya Maritim dan Mencerminkan Kepribadian Indonesia Sebagai Negara Kepulauan
- Mewujudkan Masyarakat Maju, Berkesinambungan dan Demokratis Berlandaskan Negara Hukum
- Mewujudkan Politik Luar Negeri Bebas, Aktif dan Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim
- Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera
- Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing
- Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional
- Mewujudkan Masyarakat yang Berkepribadian dalam Kebudayaan



5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam dataran operasional, jabaran visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan tersebut bisa saja dicapai dalam masa 5 (lima) tahun atau kurang dan menjadi tolok ukur keberhasilan kepala daerah selama memimpin Kabupaten Aceh Barat. Tujuan dan sasaran tersebut disusun secara realistis dan terukur (kualitatif maupun kuantitatif) untuk dilihat perkembangan pembangunannya selama tahun 2017-2022. Lebih rinci terhadap hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2.
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Visi : "TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL, DAN TERINTEGRITAS"										
	Misi 1 : Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang Syar'i dan Mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang Bersih										
1.1		Mewujudkan nilai-nilai akhlakul Karimah dengan pengamalan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	50	53,75	57,78	62,11	66,77	71,78	71,78
1.1.1		Meningkatnya pengamalan Syariat Islam dalam masyarakat	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	266	150	121	97	79	64	64
			Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	Rp (Milyar)	12,6	14	14,70	15,44	16,21	17,02	17,02
1.2		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Kategori Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B	B	BB	BB	BB	BB
1.2.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	CC	B	B	BB	BB	BB	BB
			Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.2.2		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Reformasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	70,81	71,00	71,67	73,00	74,00	75,00	75,00
			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50	56	59	61	63	66	66



No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
			Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan	Inovasi	5	6	7	8	9	10	10
			Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Versi Ombudsment	Nilai	43,86	53,98	55,98	57,98	59,98	61,98	61,98
Misi 2 : Mewujudkan Perdamaian Aceh yang Abadi Sesuai dengan Nilai-nilai Luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsinki dan UUPA											
2.1		Mewujudkan semangat nasionalisme dalam bingkai penguatan kualitas perdamaian dalam masyarakat.	Jumlah Kebijakan Turunan Regulasi UUPA yang Mengakomodir Peningkatan Korban Konflik dan Mantan Kombatan	Kebijakan	0	1	1	1	1	1	5
2.1.1		Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik / mantan kombatan	Pemberdayaan ekonomi korban konflik / mantan kombatan	Orang	120	120	120	120	120	120	600
2.2		Terwujudnya masyarakat yang patuh dan taat pada ketentuan tentang ketertiban, ketentraman umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan	Persen	80	82	84	86	88	90	90
2.2.1		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Persen	89	90	91	92	93	94	94
			Rasio Linmas Persatuan Penduduk	Rasio	0,0005	0,0005	0,0016	0,0026	0,0036	0,0046	0,0046
Misi 3 : Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu pada Sektor SDA dengan Pengelolaan Terintegrasi Berlandaskan Tata Ruang dan Peta Kebencanaan											
3.1		Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Persen	3,35	3,91	4,47	5,03	5,59	6,15	6,15
3.1.1		Menurunkan angka kemiskinan									

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,20	4,79	3,81	3,32	2,94	2,46	2,46
			Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	20,38	18,61	17,98	17,25	16,56	15,90	15,90
3.1.2		Meningkatnya iklim investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN/PMA	15	17	18	19	20	21	21
			Pertumbuhan PDRB	Persen	3,35	3,91	4,47	5,03	5,59	6,15	6,15
			Pengendalian Laju Inflasi	Persen	3,77	3,23	3,17	3,11	3,05	2,99	2,99
3.2		Optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi lokal	Nilai Tukar Petani	Persen	104,12	104,42	104,72	105,02	105,32	105,62	105,62
3.2.1		Meningkatnya Produktivitas dan nilai tanibah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Produksi perikanan	Ton	20.412	20.417	20.420	20.423	20.427	20.432	20.432
			Nilai Tukar Petani	Persen	104,12	104,42	104,72	105,02	105,32	105,62	105,62
			Produksi Komoditi Unggulan	Ton	77.787,73	80.098,73	81.905,73	84.713,43	88.022,23	90.832,23	90.832,23
			Produktivitas Padi atau bahan utama lainnya	Ton/Ha	5,22	5,40	5,60	5,80	5,90	6,00	28,70
			Produksi Daging Pertahun	Kg	287.234	293.234	299.834	307.434	313.559	319.991	319.991
3.3		Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kategori	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya kualitas lingkungan	Hasil Pengukuran kualitas Air	Persen	32	63	65	67	69	71	71
			Hasil Pengukuran kualitas Udara	Persen	83,93	83,93	84,93	85,93	86,93	87,93	87,93
3.3.1			Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	4,25	5,10	5,52	5,52	5,95	6,37	6,37
3.4		Tumbuhnya kesadaran terhadap Mitigasi Bencana	Kategori Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang



No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
3.4.1		Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	200	188	176	164	152	140	140
Misi 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Sumberdaya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Kontrak (honorar) dan Teungku Dayah											
4.1		Meningkatnya Profesionalisme dan Kesejahteraan Aparatur	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,26	71,17	72,33	73,44	74,34	75,42	75,42
4.1.1		Meningkatnya kesejahteraan Aparatur	Persentase peningkatan pendapatan aparatur ASN	Persen	0,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	6,25
4.1.2		Meningkatnya ketrampilan dan keahlian SDM Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	Persen	42,20	46,20	50,20	54,20	58,20	62,20	62,20
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	64,40	71,39	73,02	74,68	76,39	78,13	78,13
Misi 5 : Mengembangkan dan Melestarikan Objek Wisata Spiritual, Seni, Budaya, Adat dan Adat Istiadat serta Olahraga Sesuai dengan Potensi Kedaerahan (Kearifan Lokal)											
5.1		Mengembangkan wisata spritual berbasis muatan lokal	Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	1,55	2,57	3,59	4,61	5,63	6,65	6,65
5.1.1		Berkembangnya wisata spritual berbasis muatan lokal	Jumlah Destinasi Wisata Spiritual yang dikembangkan	lokasi	2	2	2	2	2	2	10
5.2		Melestarikan adat istiadat dan budaya	Jumlah Kebijakan Pelestarian dan pembinaan adat istiadat	Kebijakan	1	1	1	1	1	1	5
5.2.1		Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga adat	Persentase pembinaan adat istiadat	Persen	31,06	46,58	62,11	77,64	93,17	100	100
5.3		Mengembangkan Olahraga Berprestasi	Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi	Cabor	4	5	6	8	10	11	11
5.3.1		Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet berprestasi tingkat provinsi / nasional/Internasional	Atlet	4	7	10	13	16	19	65

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
Misi 6 : Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pendukung dalam Mewujudkan Aceh Barat sebagai Zona Ketahanan Pangan Nasional.											
6.1		Menyediakan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana yang Memadai	Persentase Lahan Produktif	Persen	91,21	90,61	90,01	89,41	88,82	88,22	88,22
6.1.1		Meningkatkan Infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi	Persen	34,71	36,52	38,34	40,16	41,98	43,46	43,46
			Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	8.387	8.587	8.787	8.987	9.187	9.387	9.387
6.2		Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyediaan bahan pangan	Ketersediaan Bahan pangan	Persen	6,14	6,14	6,26	6,39	6,51	6,65	6,65
6.2.1		Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan	Pola Pangan Harapan (konsumsi)	Persen	60,11	61,75	62,55	63,75	64,50	66,70	66,70
			Persentase Desa Swasembada Pangan	Persen	11	22	33	44	55	66	66
Misi 7 : Memberikan Pelayanan Kesehatan Menuju Masyarakat Aceh Barat yang Sehat Jasmani dan Rohani serta Meningkatkan SDM Bidang Kesehatan											
7.1		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Penurunan Peringkat Daerah Bermasalah Kesehatan	Peringkat	379 di Tahun 2012	-	-	-	-	284	284
7.1.1		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68	68,20	68,40	68,60	68,80	69,00	69,00
			Angka Kematian bayi	/1000 kelahiran hidup	17	15	14	13	12	11	11
			Angka Kematian Ibu	/100.000 kelahiran hidup	175 / 6 Kasus	136 / 5 Kasus	132 / 5 Kasus	102 / 4 Kasus	99 / 4 Kasus	96/ 3 Kasus	96/3 Kasus



No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
			Persentase balita gizi buruk (Stunting)	Persen	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08	0,06	0,06
			Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	Persen	30,77	53,85	100	100	100	100	100
Misi 8 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Keahlian Tenaga Pendidik serta Membuka Akses Pendidikan kepada Masyarakat Aceh Barat											
8.1		Mengoptimalkan Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Persen	8,73	8,96	9,41	10,61	10,93	11,16	11,16
8.1.1		Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Persen	8,73	8,96	9,41	10,61	10,93	11,16	11,16
			Angka melek huruf	Persen	98,62	98,83	98,83	98,96	99,04	99,14	99,14

4

5.4. Janji Bupati dan Wakil Bupati

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi misi serta komitmen-komitmen yang telah disampaikan pada saat kampanye yang dapat dituangkan ke dalam program kerja di RPJM maupun Renstra OPD. Berikut adalah Janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Tabel 5.3.
Janji Bupati dan Wakil Bupati

Visi	Aspek	Indikator
"Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas"	Islami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan operasional untuk Dayah / Pesantren. 2. Pengadaan sarana dan prasarana bagi Teungku / Pengajar Dayah. 3. Pengadaan sarana dan prasarana bagi Dayah/Pesantren. 4. Peningkatan Majelis Taklim dan pemberian dana operasional. 5. Peningkatan Lembaga Kajian Tauhid Tasawuf tingkat gampong, kecamatan dan kabupaten secara berkala dan terjadwal. 6. Peran serta Wilayatul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Peraja (Satpol PP) dengan aktif dalam penegakan syariat Islam dan ketertiban umum. 7. Terpenuhinya pembekalan bagi teungku dayah dan khatib-khatib jum'at/juru penerangan agama. 8. Terwujudnya peta wilayah penegakan syariat Islam.
	Pembangunan Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan prasana dan sarana infrastruktur rumpun pertanian. 2. Peningkatan kerjasama investor dalam dan luar negeri. 3. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. 4. Pembangunan infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 5. Pembangunan kehidupan sosial dan keagamaan untuk kemaslahatan bersama. 6. Pembangunan kota dan desa/gampong secara merata dan berkelanjutan.
	Ekonomi Kerakyatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian dana bergulir 15 Juta untuk kegiatan pengembangan usaha produktif dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). 2. Bantuan beasiswa berprestasi dan bantuan pendidikan untuk mahasiswa / pelajar. 3. Pemberian raskin gratis untuk masyarakat prasejahtra. 4. Subsidi listrik gratis untuk kaum dhuafa.



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 merupakan tahapan ke-3 dari Rencana pembangunan jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025.

6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Tahap ke-3 (2017-2022)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM-II, RPJM-III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan pemanfaatan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat, kemampuan menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan daerah dan dalam negeri makin menguat yang ditandai dengan terbangunnya profesionalisme institusi ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat serta daerah serta meningkatnya kecukupan kesejahteraan sarana dan prasarana aparatur penegak qanun dan peraturan dan perundang-undangan melalui pemberdayaan masyarakat. Kehidupan demokrasi masyarakat makin mengakar dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan makin mantapnya pengamalan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan serta semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Kabupaten Aceh Barat dalam berbagai kerja sama dengan provinsi, antar daerah kabupaten dan kecamatan dalam wilayah dalam rangka mewujudkan tatanan regional dan lokal yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan.

Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur daerah makin mampu mendukung pembangunan daerah. Kesejahteraan rakyat terus membaik dan meningkat sebanding dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kecamatan, pedesaan dan daerah terpencil dengan adanya sumber penghasilan yang merata, karena didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga sosial ekonomi yang handal. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya perkembangan yang optimal dan kesejahteraan serta perlindungan anak, tercapainya kondisi penduduk yang bertumbuh dengan seimbang dan mantapnya budaya serta karakter masyarakat secara islami.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari, terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat, serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Daya saing perekonomian Kabupaten Aceh Barat semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri dengan kualitas sumber daya manusia, pertanian dalam arti luas dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah, masyarakat dan swasta, makin selarasnya pembangunan pendidikan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perdagangan serta koperasi serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dan tempat usaha dapat tercapai, terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Kabupaten Aceh Barat, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat yang kurang mampu mendapat tempat tinggal yang layak huni, sehingga kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota dan pedesaan tanpa permukiman kumuh.

6.2. Strategi Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

6.2.1. Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang Syar'i dan Mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang Bersih

Untuk dapat mencapai sasaran dari misi ini, adapun strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Memberdayakan majelis taklim di seluruh tingkatan lembaga, baik di lingkungan pemerintahan, pendidikan dan lingkungan gampong;
2. Meningkatkan peran masyarakat dan gampong dalam pengawasan Syariat Islam;
3. Meningkatkan peran serta ulama dalam pembinaan keagamaan;
4. Meningkatkan sosialisasi terhadap kesadaran membayar ZIS;
5. Menerapkan sistem ekonomi syaria'ah pada kelompok pelaku usaha dan lembaga syariah;
6. Meningkatkan dan menggalakkan pelaksanaan sosialisasi perhub 59/2015 dan mendorong pemerintahan gampong untuk melaksanakan kemakmuran mesjid;
7. Mendorong dan menggalakkan pelaksanaan shalat 5 waktu secara berjamaah di masjid melalui edaran dan himbauan agar aparaturnya dan masyarakat menghentikan segala aktifitas dan melaksanakan shalat secara berjamaah di masjid terdekat;
8. Meningkatkan kinerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah yang berkoordinasi dengan Satpol PP dan WH dalam penegakan Qanun Syariat Islam;
9. Mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten agar dayah/ pesantren membuka program tahfiz Al-Quran;
10. Mempercepat kinerja stakeholder terkait dalam proses akreditasi dayah;
11. Pembenahan sarana dan prasarana keagamaan;
12. Menyusun regulasi tentang standar sarana dan prasarana masjid/meunasah;
13. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan;



14. Penerapan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi kependudukan dan gender di berbagai bidang pembangunan;
15. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan serta kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik;
16. Meningkatkan dan memperbaiki fungsi pelayanan publik yang tidak bersifat koruptif dan kolusif serta Nepotisme;
17. Penguatan inovasi pelayanan publik;
18. Menjalin kerjasama dan membuat MoU dengan perusahaan.

6.2.2. Mewujudkan Perdamaian Aceh yang Abadi Sesuai dengan Nilai-nilai Luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsinki dan UUPA

Strategi yang dilaksanakan untuk melaksanakan misi ini adalah:

1. Penguatan kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan konflik;
2. Memberikan Sosialisasi dan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi;
3. Memperkuat regulasi dan pemahaman masyarakat terhadap K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dan perlindungan masyarakat;
4. Pembentukan dan Penguatan lembaga Linmas di tingkat Gampong dengan Peraturan Bupati;
5. Menggalakkan siskamling di setiap gampong.

6.2.3. Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu pada Sektor SDA dengan Pengelolaan Terintegrasi Berlandaskan Tata Ruang dan Peta Kebencanaan.

Untuk mewujudkan misi ini, adapun strategi yang perlu ditempuh adalah:

1. Meningkatkan kemampuan pendapatan masyarakat miskin;
2. Menciptakan lapangan kerja dan penguatan vokasional;
3. Melaksanakan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin dengan cara melakukan bimbingan, pelatihan dan penyediaan modal usaha melalui bantuan bergulir oleh BUMG;
4. Penguatan usaha kecil dan menengah serta menyusun regulasi BUMG;
5. Menyusun regulasi tentang kebijakan pemberian bantuan dana bergulir 15 juta untuk kegiatan pengembangan usaha produktif dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui Dana Desa;
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengendalian inflasi;
7. Meningkatkan peluang investasi;
8. Menyusun regulasi untuk kemudahan investor melakukan investasi di Kabupaten Aceh Barat;
9. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
10. Meningkatkan pengolahan industri hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
11. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap melalui penyediaan sarana dan prasarana alat tangkap;
12. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan perikanan darat;
13. Peningkatan kinerja penyuluh dalam pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani;
14. Meningkatkan fungsi dan peran panglima laot;
15. Mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau;

16. Penggiatan usaha-usaha perbaikan lahan kritis;
17. Meningkatkan ketaatan pembangunan terhadap Tata Ruang;
18. Mengoptimalkan penerapan dan pengawasan AMDAL;
19. Integrasi Konsep Pengurangan Resiko bencana (PRB) ke dalam Rencana pembangunan;
20. Meningkatkan jumlah dan kualitas Desa Tangguh;
21. Penguatan kelembagaan dan regulasi bidang pencegahan dan penanganan bencana.

6.2.4. Meningkatkan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Kontrak (honorar) dan Teungku Dayah.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran dari misi ini adalah :

1. Meningkatkan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara, Tenaga honorer dan Teungku Dayah;
2. Program pendidikan dan pelatihan SDM;
3. Pengembangan sarana dan prasarana lembaga pelatihan serta pemanfaatan pasar kerja global;
4. Partisipasi Teungku Dayah mengajar pada kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah.

6.2.5. Mengembangkan dan Melestarikan Objek Wisata Spiritual, Seni, Budaya, Adat dan Adat-Istiadat serta Olahraga Sesuai dengan Potensi Kedaerahan (Kearifan Lokal)

Untuk tercapainya sasaran dari misi ini, strategi yang ditempuh antara lain:

1. Pembenahan dan peningkatan kualitas objek wisata spiritual yang ada di Kabupaten Aceh Barat;
2. Melakukan Promosi pariwisata spiritual;
3. Optimalisasi pembangunan kepariwisataan sesuai dengan Masterplan Pariwisata;
4. Mengembangkan Objek Wisata lainnya;
5. Penguatan lembaga adat, Mukim, Tuha Peut serta sanggar budaya/seni melalui pembinaan kelembagaan;
6. Menggalakkan kepedulian terhadap pengembangan budaya lokal;
7. Menyediakan sarana pelestarian kebudayaan berupa Museum Daerah dan Rumah Tradisional;
8. Menerbitkan regulasi terkait pelestarian kebudayaan seperti Peraturan Bupati tentang Pakaian Adat, Kesenian Daerah, dan Penetapan Cagar Budaya dan lain-lain;
9. Peningkatan sarana prasarana olahraga;
10. Pembinaan atlet dalam Kabupaten Aceh Barat;
11. Pemberian penghargaan keolahragaan dan even lain terkait peningkatan minat olahraga;
12. Penguatan fungsi organisasi keolahragaan.

6.2.6. Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pendukung dalam Mewujudkan Aceh Barat sebagai Zona Ketahanan Pangan Nasional.

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dari misi ini adalah:

1. Peningkatan upaya keberlanjutan pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan;
2. Penambahan trayek dan moda transportasi antar kecamatan;
3. Meningkatkan pembangunan rumah layak huni setiap tahunnya;
4. Meningkatkan elektrisitas masyarakat Aceh Barat;

5. Meningkatkan penyediaan sanitasi dan air minum layak bagi masyarakat;
6. Mengurangi daerah genangan dan banjir melalui optimalisasi pembangunan saluran drainase baik ditingkat kabupaten maupun gampong;
7. Penyusunan perencanaan drainase secara komprehensif dan spasial;
8. Meningkatkan produktivitas pertanian atau bahan pangan lokal lainnya;
9. Menggalakkan pemanfaatan lahan pekarangan;
10. Menyusun regulasi untuk melindungi petani dalam menjual hasil produksi pertanian;
11. Mengoptimalkan koperasi pertanian.

6.2.7. Memberikan Pelayanan Kesehatan Menuju Masyarakat Aceh Barat yang Sehat Jasmani dan Rohani serta Meningkatkan SDM Bidang Kesehatan.

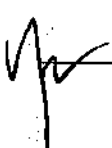
Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dari misi ini adalah:

1. Meningkatkan promosi kesehatan untuk hidup bersih dan sehat melalui Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
2. Meningkatkan kualitas SDM kesehatan dengan penyediaan beasiswa dokter spesialis;
3. Menambah insentif bagi dokter di daerah terpencil;
4. Optimalisasi layanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi dan balita untuk menurunkan angka kematian bayi dan Ibu;
5. Memastikan keberadaan dan pelayanan bidan di desa;
6. Mengoptimalkan pelayanan posyandu di fasilitas kesehatan;
7. Meningkatkan pemantauan status gizi masyarakat dan pemberian makanan tambahan;
8. Mereplikasi program buru sergap gizi buruk di semua puskesmas;
9. Peningkatan mutu fasilitas kesehatan (akreditasi).

6.2.8. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keahlian Tenaga Pendidik serta Membuka Akses Pendidikan kepada Masyarakat Aceh Barat.

Untuk menjalankan misi ini, adapun strategi yang dijalankan antara lain:

1. Memperluas akses pendidikan bagi anak usia sekolah melalui Gerakan Ayo Sekolah;
2. Pemberian Beasiswa miskin dan berprestasi;
3. Meningkatkan materi tambahan dalam menghadapi Ujian Nasional untuk peningkatan nilai ujian nasional;
4. Meningkatkan kualifikasi pendidik minimal D.IV/SI;
5. Meningkatkan jumlah guru yang bersertifikasi;
6. Meningkatkan kualitas dan pengawasan terhadap guru daerah terpencil;
7. Meratanya distribusi guru;
8. Menambah kurikulum muatan lokal dengan melaksanakan pesantren jum'at dan pengajian;
9. Meningkatkan insentif atau tambahan tunjangan kinerja guru terutama di daerah terpencil;
10. Meningkatkan akses pendidikan anak usia dini dengan ketersediaan sarana dan prasana PAUD (1 desa minimal 1 PAUD);
11. Tersedianya biaya operasional PAUD.





Tabel 6.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Aceh Barat

Visi		
"TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS"		
Misi		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1		
Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang Syar'i dan Mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang Bersih		
Mewujudkan nilai-nilai dan akhlaqul Karimah dengan pengamalan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan	Meningkatnya pengamalan Syariat Islam dalam masyarakat	Memberdayakan majelis taklim di seluruh tingkatan lembaga, baik di lingkungan pemerintahan, pendidikan dan lingkungan gampong
		Meningkatkan peran masyarakat dan gampong dalam pengawasan Syariat Islam
		Meningkatkan peran serta ulama dalam pembinaan keagamaan
		Meningkatkan sosialisasi terhadap kesadaran membayar ZIS
		Menerapkan sistem ekonomi syari'ah pada kelompok pelaku usaha dan lembaga syariah
		Meningkatkan dan menggalakkan pelaksanaan sosialisasi perbub 59/2015 dan mendorong pemerintahan gampong untuk melaksanakan kemakmuran masjid
		mendorong dan menggalakkan pelaksanaan shalat 5 waktu secara berjamaah di masjid melalui edaran dan himbauan agar aparaturnya dan masyarakat menghentikan segala aktifitas dan melaksanakan shalat secara berjamaah di masjid terdekat
		Meningkatkan kinerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah yang berkoordinasi dengan Satpol PP dan WH dalam penegakan Qanun Syariat Islam
		Mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten agar dayah/pesantren membuka program tahfiz Al-Quran
		Mempercepat kinerja stakeholder terkait dalam proses akreditasi dayah
		Pembenahan sarana dan prasarana keagamaan



Tujuan	Sasaran	Strategi
		Menyusun regulasi tentang standar sarana dan prasarana masjid/meunasah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan
		Penerapan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi kependudukan dan gender di berbagai bidang pembangunan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Reformasi Birokrasi	Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan serta kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik
		Meningkatkan dan memperbaiki fungsi pelayanan publik yang tidak bersifat koruptif dan kolusif serta nepotisme
		Penguatan inovasi pelayanan publik
		Menjalin kerjasama dan membuat MoU dengan perusahaan
Misi 2		
Mewujudkan Perdamaian Aceh yang Abadi Sesuai dengan Nilai-nilai Luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsynki dan UUPA		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan semangat nasionalisme dalam bingkai penguatan kualitas perdamaian dalam masyarakat	Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik/mantan kombatan	Penguatan kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan konflik
		Memberikan Sosialisasi dan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi
Terwujudnya masyarakat yang patuh dan taat pada ketentuan tentang ketertiban, ketentraman umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Memperkuat regulasi dan pemahaman masyarakat terhadap K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dan perlindungan masyarakat
		Pembentukan dan Penguatan lembaga Linmas di tingkat Gampong dengan Peraturan Bupati
		Menggalakkan siskamling di setiap gampong
Misi 3		
Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu pada Sektor SDA dengan Pengelolaan Terintegrasi Berlandaskan Tata Ruang dan Peta Kebencanaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Menurunkan angka kemiskinan	Meningkatkan kemampuan pendapatan masyarakat miskin
		Menciptakan lapangan kerja dan penguatan vokasional



Tujuan	Sasaran	Strategi
		Melaksanakan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin dengan cara melakukan bimbingan, pelatihan dan penyediaan modal usaha melalui bantuan bergulir oleh BUMG
		Penguatan usaha kecil dan menengah serta menyusun regulasi BUMG
		Menyusun regulasi tentang kebijakan pemberian bantuan dana bergulir 15 juta untuk kegiatan pengembangan usaha produktif dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui Dana Desa
		Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pengendalian inflasi
	Meningkatnya iklim investasi	Meningkatkan peluang investasi
		Menyusun regulasi untuk kemudahan investor melakukan investasi di Kabupaten Aceh Barat
Optimalisasi pengelolaan Potensi ekonomi Lokal	Meningkatnya Produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		Meningkatkan pengolahan industri hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap melalui penyediaan sarana dan prasarana alat tangkap
		Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan perikanan darat
		Peningkatan kinerja penyuluh dalam pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani
		Meningkatkan fungsi dan peran panglima laut
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan	Mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau
		Penggiatan usaha-usaha perbaikan lahan kritis
		Meningkatkan ketaatan pembangunan terhadap Tata Ruang
		Mengoptimalkan penerapan dan pengawasan AMDAL



Tujuan	Sasaran	Strategi
Tumbuhnya kesadaran terhadap Mitigasi Bencana	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana	Integrasi Konsep Pengurangan Resiko Bencana (PRB) ke dalam Rencana pembangunan
		Meningkatkan jumlah dan kualitas Desa Tangguh
		Penguatan kelembagaan dan regulasi bidang pencegahan dan penanganan bencana
Misi 4		
Meningkatkan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Kontrak (Honorar) dan Teungku Dayah		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Profesionalisme dan Kesejahteraan Aparatur	Meningkatnya kesejahteraan Aparatur	Meningkatkan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara, Tenaga honorar dan Teungku Dayah
	Meningkatnya ketrampilan dan keahlian SDM	Program pendidikan dan pelatihan SDM
		Pengembangan sarana dan prasarana lembaga pelatihan serta pemanfaatan pasar kerja global
		Partisipasi Teungku Dayah mengajar pada kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah
Misi 5		
Mengembangkan dan Melestarikan Objek Wisata Spiritual, Seni, Budaya, Adat dan Adat-Istiadat serta Olahraga Sesuai dengan Potensi Kedaerahan (Kearifan Lokal)		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Mengembangkan wisata spritual berbasis muatan lokal	Berkembangnya wisata spritual berbasis muatan lokal	Pembenahan dan peningkatan kualitas objek wisata spritual yang ada di Kabupaten Aceh Barat
		Melakukan Promosi pariwisata spritual
		Optimalisasi pembangunan kepariwisataan sesuai dengan Masterplan Pariwisata
		Mengembangkan Objek Wisata lainnya
Melestarikan Adat Istiadat dan Budaya	Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga adat	Penguatan lembaga adat, mukim, tuha peut serta sanggar budaya/seni melalui pembinaan kelembagaan
		Menggalakkan kepedulian terhadap pengembangan budaya lokal
		Menyediakan sarana pelestarian kebudayaan berupa Museum Daerah dan Rumah Tradisional
		Menerbitkan regulasi terkait pelestarian kebudayaan seperti Peraturan Bupati tentang Pakaian Adat, Kesenian Daerah,



Tujuan	Sasaran	Strategi
		dan Penetapan Cagar Budaya dan lain-lain
Mengembangkan Olahraga Berprestasi	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Peningkatan sarana prasarana olahraga
		Pembinaan atlet dalam Kabupaten Aceh Barat;
		Pemberian penghargaan keolahragaan dan even lain terkait peningkatan minat olahraga
		Penguatan fungsi organisasi keolahragaan
Misi 6		
Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pendukung dalam Mewujudkan Aceh Barat sebagai Zona Ketahanan Pangan Nasional		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Menyediakan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana yang Memadai	Meningkatkan Infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah	Peningkatan upaya keberlanjutan pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan
		Penambahan trayek dan moda transportasi antar kecamatan
		Meningkatkan pembangunan rumah layak huni setiap tahunnya
		Meningkatkan elektrisitas masyarakat Aceh Barat
		Meningkatkan penyediaan sanitasi dan air minum layak bagi masyarakat
		Mengurangi daerah genangan dan banjir melalui optimalisasi pembangunan saluran drainase baik ditingkat kabupaten maupun gampong
		Penyusunan perencanaan drainase secara komprehensif dan spasial
Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyediaan bahan pangan	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan	Meningkatkan produktivitas pertanian atau bahan pangan lokal lainnya
		Menggalakkan pemanfaatan lahan pekarangan
		Menyusun regulasi untuk melindungi petani dalam menjual hasil produksi pertanian
		Mengoptimalkan koperasi pertanian
Misi 7		
Memberikan Pelayanan Kesehatan Menuju Masyarakat Aceh Barat yang Sehat Jasmani dan Rohani serta Meningkatkan SDM Bidang Kesehatan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan promosi kesehatan untuk hidup bersih dan sehat melalui Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat



Tujuan	Sasaran	Strategi
		(Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
		Meningkatkan kualitas SDM kesehatan dengan penyediaan beasiswa dokter spesialis
		Menambah insentif bagi dokter di daerah terpencil
		Optimalisasi layanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi dan balita untuk menurunkan angka kematian bayi dan Ibu
		Memastikan keberadaan dan pelayanan bidan di desa
		Mengoptimalkan pelayanan posyandu di fasilitas kesehatan
		Meningkatkan pemantauan status gizi masyarakat dan pemberian makanan tambahan
		Mereplikasi program buru sergap gizi buruk di semua puskesmas
		Peningkatan mutu fasilitas kesehatan (akreditasi)

Misi 8

Meningkatkan Kesejahteraan dan Keahlian Tenaga Pendidik serta Membuka Akses Pendidikan kepada Masyarakat Aceh Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mengoptimalkan Wajib Belajar 12 Tahun	Meningkatnya kualitas pendidikan	Memperluas akses pendidikan bagi anak usia sekolah melalui Gerakan Ayo Sekolah
		Pemberian Beasiswa miskin dan berprestasi
		Meningkatkan materi tambahan dalam menghadapi Ujian Nasional untuk peningkatan nilai ujian nasional
		Meningkatkan kualifikasi pendidik minimal D.IV/SI
		Meningkatkan jumlah guru yang bersertifikasi
		Meningkatkan kualitas dan pengawasan terhadap guru daerah terpencil
		Meratanya distribusi guru
		Menambah kurikulum muatan lokal dengan melaksanakan pesantren jum'at dan pengajian
		Meningkatkan insentif atau tambahan tunjangan kinerja guru terutama di daerah terpencil

Handwritten signature

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatkan akses pendidikan anak usia dini dengan ketersediaan sarana dan prasana PAUD (1 desa minimal 1 PAUD)
		Tersedianya biaya operasional PAUD.

6.3. Arah Kebijakan

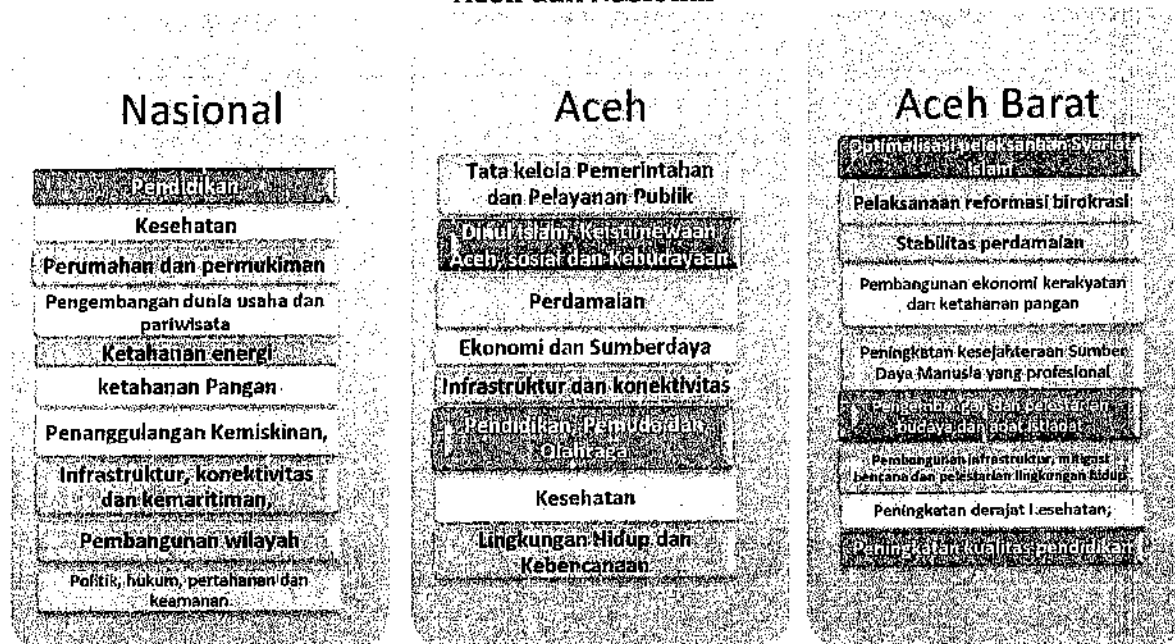
6.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Barat Tahun 2017-2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan Syariat Islam;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Stabilitas perdamaian;
4. Pembangunan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan;
5. Peningkatan kesejahteraan Sumber Daya Manusia yang profesional;
6. Pengembangan dan pelestarian budaya dan adat istiadat;
7. Pembangunan infrastruktur, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup;
8. Peningkatan derajat kesehatan; dan
9. Peningkatan kualitas pendidikan.

Gambar 6.1

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Barat dengan Aceh dan Nasional



6.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2018)

Arah kebijakan dan hasil pembangunan tahun pertama sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada tahap-tahap berikutnya. Pada tahun pertama ini, kepala daerah terpilih harus mampu membangun komitmen dan kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Tahun 2018 menjadi dasar bagi penyelarasan kebijakan



pembangunan jangka menengah periode Tahun 2017-2022. Adapun tema pembangunan periode I adalah:

***"Reformasi Birokrasi dan Percepatan Pembangunan
Berlandaskan Syariat Islam dengan Fokus Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"***

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan konsolidasi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, kredibel, akuntabel dan terintegritas dalam melaksanakan pelayanan prima.

Pembangunan yang dilakukan pada tahap ini adalah menyiapkan berbagai regulasi berupa Peraturan Bupati terkait kebijakan pelaksanaan Syariat Islam, kebijakan tentang ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, wisata spiritual dan kebijakan lainnya. Selain itu, di tahun pertama ini difokuskan pembangunan infrastruktur untuk membuka daerah terpencil, dan infrastruktur pendukung terlaksananya pelayanan dasar, termasuk infrastruktur pendukung penanggulangan bencana dengan tetap mengupayakan stabilitas perdamaian.

6.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2019)

Arah pembangunan tahun ke-2 merupakan lanjutan dari tahap I, yang menentukan keberhasilan tahap III. Adapun tema pembangunan tahun ke-2 adalah:

***"Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Percepatan
Pembangunan Ketahanan Pangan"***

Pembangunan tahun kedua ini telah mulai dibangun BUMG di setiap gampong, dan mulai disalurkan berbagai dana yang dikelola oleh BUMG untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai upaya peningkatan swasembada pangan terus ditingkatkan dengan meningkatkan sarana dan prasarana produksi pertanian dan pembangunan infrastruktur untuk mencapai daerah terpencil serta membuka jalan usaha tani itu sendiri.

6.3.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2020)

Arah pembangunan tahun ketiga ini adalah tahun strategis dalam pembangunan jangka menengah ke-4 ini. Pada tahun ini pemberdayaan ekonomi masyarakat telah mulai berjalan. Di tahun ini juga harus dilaksanakan secara giat pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian yang sudah berjalan. Di tahun ke-3 ini harus terlihat adanya perubahan besar yang dilakukan oleh pimpinan daerah. Untuk itulah, pada tahun ini pembangunan difokuskan dengan tema:

***"Pemantapan Infrastruktur Dasar
dan pengembangan Destinasi Wisata"***

Dalam tahun ini, jumlah daerah terpencil di Kabupaten Aceh Barat harus dapat berkurang secara signifikan. Di samping itu, pada tahun ini juga akan dikembangkan destinasi wisata religius dan pengembangan budaya dan adat istiadat daerah. Pada tahun ke-3 ini juga dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator pembangunan yang telah dilaksanakan.

6.3.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2021)

Arah pembangunan tahun keempat ini merupakan kelanjutan dari tahap pembangunan sebelumnya. Untuk itu, adapun tema pembangunan yang diangkat untuk tahun keempat adalah:

“Pemantapan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Optimalisasi Pendidikan dan Kesehatan”

Tahun ini merupakan tahun puncak pembangunan periode 2017-2022. Tahun ini juga merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan program ekonomi kerakyatan. Di tahun ini, angka kemiskinan Kabupaten Aceh Barat harus dapat turun dengan signifikan. Di tahun ini upaya pengembangan destinasi wisata, pelestarian budaya dan adat istiadat tetap dilanjutkan. Namun, fokus pembangunan lebih kepada pemantapan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu guru, aparatur pemerintahan, tenaga kesehatan dan penguatan ulama.

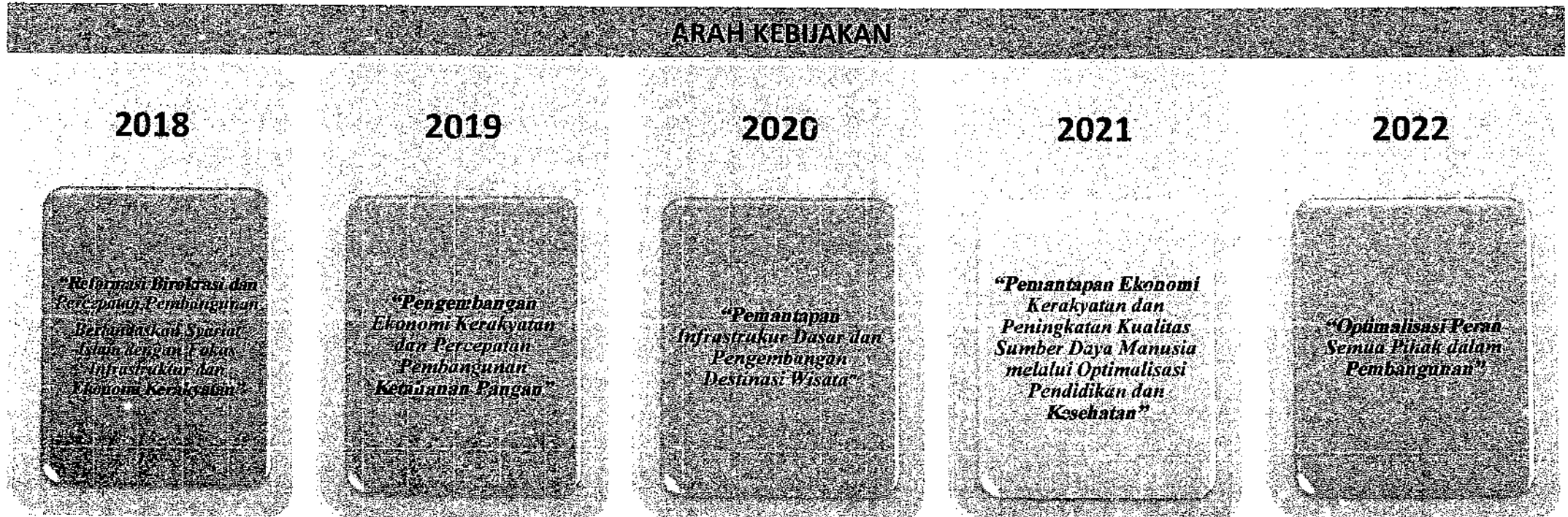
6.3.6. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2022)

Arah pembangunan tahun kelima memiliki makna strategis yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan jangka menengah Tahun 2017-2022. Semua indikator sasaran pembangunan jangka menengah seyogyanya sudah dapat tercapai pada tahun ini. Untuk itu, tema pembangunan yang diangkat untuk tahun kelima ini adalah:

“Optimalisasi Peran Semua Pihak dalam Pembangunan”

Pada tahun ini, dilaksanakan kerjasama yang solid dari semua pihak dalam pencapaian target kinerja pembangunan. Disamping menentukan keberhasilan pimpinan daerah, hasil kinerja tahun ini juga akan sangat menentukan dalam merumuskan rencana pembangunan tahun mendatang.

Gambar 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat



[Handwritten signature]



6.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Visi dan misi Kabupaten Aceh Barat perlu dijabarkan dalam program prioritas unggulan daerah disertai dengan kebutuhan pendanaan. Program prioritas unggulan tersebut menjadi panduan organisasi perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan yang tercantum di dalam Rencana Strategis sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.



Tabel 6.2
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018- 2022

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Misi 1 : Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syariahi dan mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang bersih					23.592.819,0 76,00		26.055.745,0 98,86		23.765.043,33 1,57		26.366.741,9 47,84		23.865.757,8 32,18		123.646.107,2 86,45	
	Tujuan : Mewujudkan nilai-nilai dan akhlakul Karimah dengan pengamalan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	50	53,75		57,78		62,11		66,77		71,78		71,78		
	Sasaran 1 : Meningkatnya pengamalan Syariat Islam dalam masyarakat	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	266	150		121		97		79		64		64		
		Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	Rp (Milyar)	12,6	14		14,70		15,44		16,21		17,02		17,02		
1.01.1.01.02.26	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan					872.621.400,0 0		3.329.955.052,46		851.933.173,16		3.343.658.786,31		845.435.616,31		9.243.604.028,24	DSI&PD, Setdakab & 12 Kecamatan
		Jumlah tenaga pengajar / guru dayah yang dilatih	Orang	30	35		40		45		50		55		55		DSI&PD
		Persentase Melek Alquran	Persentase	65	67		70		73		75		80		80		DSI&PD
		Jumlah Hafiz Alquran	Orang	30	35		40		45		50		55		55		DSI&PD
		Persentase Pembinaan dan Peningkatan Kemakmuran Tempat Ibadah	persen	90	92		94		96		98		100		100		Setdakab
		Jumlah Pembinaan kegiatan syiar dan syair religi islami	Jumlah	4	4		4		4		4		4		20		Setdakab

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran masjid	Persen	90	100		100		100		100		100		100		12 Kecamatan
1.01.1.01.02.28	Program Pengembangan Dayah dan Balee Seumeubeut					2.369.054.800,00		2.043.439.523,00		2.095.511.413,00		2.039.247.457,00		2.043.707.955,00		10.590.961.148,00	DSI&PD
		Jumlah dayah yang teregistrasi	Dayah	29	31		33		35		37		40		40		DSI&PD
		Jumlah dayah dengan Program Tahfiz Al Qur'an	Dayah	3	4		4		5		5		6		6		DSI&PD
1.01.1.01.02.29	Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam					3.380.782.224,00		3.288.603.619,06		3.335.987.638,58		3.379.199.744,62		3.365.180.657,62		16.749.753.883,88	DSI&PD, Satpol PP&WH, Sekr. MPU & Setdakab
		Jumlah Kegiatan Perayaan hari besar Islam	kali	6	6		6		6		6		6		6		DSI&PD
		Persentase masjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu	Persen	67	72		80		85		90		95		95		DSI&PD
		Jumlah masjid yang melaksanakan kemakmuran masjid	Masjid	70	90		110		125		135		147		147		DSI&PD
		Persentase masjid yang memenuhi standar	Persen	60	65		70		75		80		85		85		DSI&PD
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Majelis Taklim	Persen	90	95		100		100		100		100		100		DSI&PD
		Persentase penegakan qanun syariat islam	persen	100	100		100		100		100		100		100		Satpol PP dan WH



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah santriwan/Santriwati yang dilatih	Orang	40	40		40		40		40		40		200		Sekr. MPU
		Jumlah Fatwa Ulama yang disosialisasikan	Jumlah	5	5		5		5		5		5		25		Sekr. MPU
		Jumlah pengawasan dan pencegahan pendangkalan aqidah yang dilaksanakan	kali	4	4		4		4		4		4		20		Sekr. MPU
		Jumlah Peserta yang diberikan penyuluhan tentang penyembelihan hewan kurban secara halal	orang	80	85		90		95		100		105		105		Sekr. MPU
		Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	11	11		11		11		11		11		55		Setdakab
		Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	298	298		309		309		309		309		1534		12 Kecamatan
1.01.1.01.02.31	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		540.000.000,00	DSI&PD
		Cakupan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Persen	50	55		60		65		70		75		75		
	Program Pembinaan dan Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam					377.613.250,00		377.613.250,00		377.613.250,00		377.613.250,00		377.613.250,00		1.888.066.250,00	Satpol PP dan WTI
		Cakupan Razia Penegakan Syariat Islam (Maksiat dan pelanggaran etika dalam masyarakat)	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Kasus Pelanggaran syariat islam	kasus	266	150		121		97		79		50		50		

Handwritten signature/initials

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang ditangani	persen	100	100		100		100		100		100		100		
1.06.06.03.24	Program Pelayanan Kehidupan Beragama	Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	Milyar Rupiah	12,6	14	14.560.500.000,00	14,7	14.800.300.000,00	15,44	14.853.200.000,00	16,21	14.853.200.000,00	17,02	14.853.200.000,00	17,02	73.920.400.000,00	Sekr. BMK
	Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Kategori Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B		B		BB		BB		BB		BB		
	Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	CC	B		B		BB		BB		BB		BB		
		Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		
		Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK	WDP/WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
1.01.1.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					1.838.959.452,00		1.922.524.704,34		1.962.892.294,83		2.007.293.452,93		2.019.143.433,02		9.750.813.337,12	34 SKPK & 12 Kecamatan
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B		B		A		A		Dinas Pendidikan
		APBR Tepat Waktu	Bulan	Nov	Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Dinas Pendidikan
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B		B		B		B		MPD
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	A		A		A		A		A		A		DSI&PD
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B		B		B		B		Dinas PUPR
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B		B		B		B		Dinas PERKUM
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	C		CC		CC		CC		CC		CC		Satpol PP dan WH
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B		B		B		B		Kesbangpol



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	0		B		B		B		B		B		Dinsos
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B		B		B		B		BPBD
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B		B		B		B		Sekr. BMK
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	CC	B		B		B		B		B		B		Sekr. MPU
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B		B		B		B		DP3A&KB
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	NA	A		B		B		B		A		A		Dinas Pangan
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B		B		B		B		DIH
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B		B		BB		BB		Disdukcapil
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	BB		B		B		B		B		B		DPMG
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B		B		A		A		Dishub
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	CC		B		B		B		B		B		Diskominfo
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B		B		B		B		DPMPPTSP
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP MAA	Huruf	A	A		A		A		A		A		A		MAA
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	CC	B		B		B		B		B		B		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	A		A		A		A		A		A		DKP
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B		B		B		B		Disparbudpora
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B		B		B		B		DPTPH
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		A		A		A		A		Disbunnak
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	BB		B		B		B		B		B		Disdag
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B		B		B		B		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		BB		BB		BB		BB		Setdakab
		Nilai AKIP Kabupaten	Huruf	B	BB		BB		BB		A		A		A		Setdakab
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B		B		B		B		Sekretariat DPRK
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B		B		B		B		12 Kecamatan
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		BB		BB		BB		BB		BB		Inspektorat
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP B	Jumlah	23	25		30		32		35		38		40		Inspektorat
		Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Huruf	CC	B		B		BB		BB		BB		BB		Inspektorat
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	A		A		A		A		A		A		Bappeda
		Nilai Perencanaan Kinerja	Person	20,45	22,35		23,28		24,21		25,14		26,07		26,07		Bappeda
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B		B		B		B		BPKD
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	CC	B		B		B		B		B		B		BKPSDM
4.02 4.02.01 22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Opini audit eksternal atas LKPD	opini	WTP	WTP	79.240.450,00	WTP	79.240.450,00	WTP	76.070.832,00	WTP	80.171.049,84	WTP	77.669.713,09	WTP	392.392.494,93	Inspektorat
	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Reformasi Birokrasi	Index Kepuasan Masyarakat	Indeks	70,81	71,00		71,67		73,00		74,00		75,00		75,00		
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	50	51		52		53		54		55		55		
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan	Inovasi	5	6		7		8		9		10		10		
		Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Versi Ombudsment	Nilai	50	53,98		55,98		57,98		59,98		61,98		61,98		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.02 4.02.01 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	Indek Kapabilitas APIP Kab. Aceh Barat	indek	1.V.3.d c	Lv.3	80.797.500,00	Lv.3	80.797.500,00	Lv.3	77.565.600,00	Lv.3	81.746.385,84	Lv.4	79.195.385,84	Lv.4	400.102.371,68	Inspektorat
4.01.4.01. 03.31	Program Peningkatan Pelayanan Publik					33.250.000,00		33.271.000,00		34.269.130,00		34.611.821,30		34.611.821,30		170.013.772,60	Setdakab
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	14,89	17,02		19,15		21,28		23,4		25,53		25,53		
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Misi 2 : Mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsinki dan UUPA					2.732.992.999,00		2.628.364.463,62		2.431.146.684,19		2.462.425.233,29		2.456.831.251,91		12.711.760.632,01	
	Tujuan 1 : Mewujudkan semangat nasionalisme dalam bingkai penguatan kualitas perdamaian dalam masyarakat.	Jumlah Kebijakan Turunan Regulasi UUPA yang Mengakomodir Peningkatan Korban Konflik dan Mantan Kombatan	Kebijakan	0	1		1		1		1		1		5		
	Sasaran 1 : Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik / mantan kombatan	Pemberdayaan ekonomi korban konflik / mantan kombatan	Orang	120	120		120		120		120		120		600		
	Program Peningkatan Kualitas Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Berkembangnya Agrobisnis Pedesaan	Persen	70	80	100.000.000,00	85	100.000.000,00	90	100.000.000,00	95	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	500.000.000,00	Setdakab
2.11 3.06.01 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM					51.100.000,00		56.210.000,00		61.831.000,00		68.014.106,00		74.815.510,00		311.970.610,00	Disdag
		Jumlah UKM yang dibina	UKM	2419	2419		2419		2419		2419		2419		2419		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	76,44	79,26		82,08		84,9		87,72		90,54		90,54		
		Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	50	58		66		74		82		90		90		
		Persentase BPR/LKM aktif	Persen	15	16		17		18		19		20		20		
1.05 1.05.02 24	Program pembinaan ideologi kebangsaan					137.356.000,00		85.192.439,29		87.740.212,47		88.625.694,59		88.625.694,59		487.548.040,94	Kesbangpol
		Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang SARA	jumlah	94	95		96		97		98		99		99		
		Frekuensi pembinaan masyarakat tentang ideologi pancasila	jumlah	1	1		1		1		1		1		5		
		Jumlah mantan kombatan, korban konflik dan mantan tapol/napol yang dibina dan diberdayakan	Orang	0	120		120		120		120		120		600		
	Tujuan 2 : Terwujudnya masyarakat yang patuh dan taat pada ketentuan tentang ketertiban, ketentraman umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan	Persen	80	82		84		86		88		90		90		
	Sasaran 1 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Persen	89	90		91		92		93		94		94		
		Rasio Linmas Persatuan Penduduk	Rasio	0,0005	0,0005		0,0016		0,0026		0,0036		0,0046		0,0046		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kreatif, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja [tujuan/impact/outcome]	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05 1.05.02 16	Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal					1.988.693.839,00		1.915.161.655,00		1.802.663.300,00		1.824.442.223,97		1.812.046.832,59		9.343.008.050,56	Kesbangpol, 12 Kecamatan & Satpol PP dan WH
		Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan	persen	80	85		86		87		88		89		89		Kesbangpol
		Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	40	40		60		61		62		63		15		12 Kecamatan
		Tingkat penyelesaian pelanggaran (ketertiban, ketenteraman, keindahan) K3	persen	89	100		100		100		100		100		100		Satpol PP dan WH
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Kali	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		Satpol PP dan WH
		Persentase Penegakan PERDA	persen	89	100		100		100		100		100		100		Satpol PP dan WH
	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat					135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		675.000.000,00	Satpol PP dan WH
		Rasio Linmas Persatuan Penduduk	rasio	0,35	0,8		1		1		1		1		1		
		Jumlah Satuan Linmas setiap Gampong	Orang	100	644		644		966		966		1288		1288		
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Kali	0	3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		
		Jumlah poskamling aktif	jumlah	NA	181		181		181		181		181		181		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05 1.05.02 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan					47.301.825,00		36.033.586,19		37.114.593,78		37.485.739,71		37.485.739,71		195.421.484,30	Keshangpol
		Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang SARA	persen	94	95		96		97		98		99		99		
		Pelatihan bela negara	pelatihan	0	1		1		1		1		1		5		
1.05 1.05.02 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan	Persentase sekolah yang dibangun Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dibagi jumlah pendidik di Aceh	persen	0	10	23.153.415,00	15	16.428.796,00	20	16.921.659,00	25	16.921.659,00	30	16.921.659,00	100	90.347.188,00	Keshangpol
1.05.1.05. 02.29	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan	persen	80	85	24.635.510,00	86	29.033.140,00	87	29.904.134,00	88	30.203.175,00	89	30.203.175,00	89	143.979.134,00	Keshangpol
1.05 1.05.02 25	Program pencegahan dini ancaman masyarakat	Jumlah deteksi dini mengenai situasi yang mengancam ketentraman masyarakat.	Kali	2	2	55.562.500,00	3	32.857.591,00	3	33.843.318,00	3	33.843.318,00	3	33.843.318,00	14	189.950.045,00	Keshangpol
1.05 1.05.02 26	Program Pendidikan Bagi Masyarakat					82.332.100,00		77.168.491,23		79.483.545,97		80.278.381,43		80.278.381,43		399.540.900,06	Keshangpol
		Frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan DKP (angkatan)	Jumlah	5	1		1		1		1		1		5		
		frekuensi sosialisasi pembinaan politik daerah	Jumlah	5	1		1		1		1		1		5		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	persen	87	90		90		95		95		95		98		
1.05 1.05.02 23	Program Pelaksanaan Pemilu	Prosentase Pelanggaran Pemilu	persen	30	20	37.205.510,00	15	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	137.205.510,00	Kesbangpol
1.05 1.05.02 26	Program kebijakan politik pemerintah	Frekuensi sosialisasi pembinaan politik daerah	Kali	4	1	25.517.000,00	1	28.949.768,91	1	29.715.261,97	1	30.012.414,59	1	30.012.414,59	5	144.106.860,06	Kesbangpol
1.05 1.05.02 29	Program pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan					25.135.300,00		16.428.796,00		16.921.659,00		17.598.527,00		17.598.527,00		93.682.809,00	Kesbangpol
		Frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (angkatan)	Kali	4	6		6		6		6		6		30		
	Misi 3: Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan						38.803.092,08,00		22.598.274,503,13		23.668.256,729,99		23.527.106,862,14		25.316.211,569,06		133.912.941,672,32
	Tujuan 1: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Persen	3,35	3,91		4,47		5,03		5,59		6,15		6,15		
	Sasaran 1: Menurunkan angka kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,20	4,79		3,81		3,32		2,94		2,46		2,46		
		Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	20,38	18,61		17,98		17,25		16,56		15,90		15,90		
2.01.2.08. 01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja					303.729.400,00		303.729.400,00		303.729.400,00		303.729.400,00		303.729.400,00		1.518.647.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi	jumlah	3	3		4		5		6		7		7		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	224	394		564		734		904		1074		1074		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	orang	96	192		288		384		480		576		576		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	150	180		210		240		270		300		300		
1.06.4.01.03.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					364.711.000,00		310.950.200,00		315.712.706,00		317.347.833,06		317.347.833,06		1.626.069.572,12	Setdikab, 12 Kecamatan & Dinsos
		Persentase Verifikasi dan Penyusunan Data Penerima Bantuan Sosial	persen	100	100		100		100		100		100		100		Setdikab
		Jumlah KPM penerima rastra	KPM	10601	10601		11019		10869		10719		10569		100		12 Kecamatan
		pemberdayaan masyarakat yang ditangani melalui UEP	Persen	0	0		35		40		40		45		45		Dinsos
		Persentase PMKS yang tertangani	Persen	30	40		45		50		55		60		60		Dinsos
2.01.3.08.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja (PPKK)					753.548.273,00		753.548.273,00		246.637.425,36		249.103.799,61		249.103.799,61		2.251.941.570,59	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Rasio Penduduk yang bekerja	persen	93,56	93,60		93,65		93,69		93,73		93,78		93,78		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,2	4,79		3,81		3,32		2,94		2,46		2,46		
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar	orang	7858	7658		6785		5988		4565		3255		26251		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah Perusahaan yang menjalin kerjasama dalam penempatan tenaga kerja	perusahaan	NA	5		7		9		11		13		13		
		Angka partisipasi angkatan kerja	persen	66,15	66,24		66,33		66,42		66,51		66,60		66,60		
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	persen														
1.06 1.06.01 25	Program Keluarga Harapan	Jumlah keanggotaan PKH	Orang	6000	11000	189.500.000,00	11000	185.326.480,00	11000	108.486.274,00	11000	109.571.137,00	11000	109.571.137,00	11000	622.455.028,00	Dinsos
	Sasaran 2 : Meningkatkan iklim investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN/PMA	15	17		18		19		20		21		21		
		Pertumbuhan PDRB	Persen	3,35	3,91		4,47		5,03		5,59		6,15		6,15		
		Pengendalian Laju Inflasi	Persen	3,13	3,79		3,81		3,83		3,86		3,88		3,88		
2.12 2.12.01 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					310.063.000,00		390.052.000,00		374.238.594,00		398.053.276,00		422.857.766,00		1.895.264.636,00	DPMPPTSP
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Milyar/Rupiah	4,283	4,29		4,318		4,32		4,326		4,329		4,329		
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Trilyun)	Trilyun	3,808	3,815		3,83		3,842		3,848		3,852		3,852		
2.12 4.01.03 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					299.937.000,00		98.000.000,00		96.736.409,00		100.887.307,00		40.000.000,00		635.560.716,00	Setdakab & DPMPPTSP
		Adanya Direktur PDAM dan Pakar Beusaree	Jumlah	0	2		0		0		0		0		1		Setdakab
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	15	17		18		19		20		21		21		DPMPPTSP
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Wirausaha Muda	persen	16,7	20	50.000.000,00	22	50.000.000,00	24	50.000.000,00	26	50.000.000,00	28	50.000.000,00	28	250.000.000,00	Disparbudpora



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Tujuan 2 : Optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi lokal	Nilai Tukar Petani	Persen	104,12	104,42		104,72		105,02		105,32		105,62				
	Sasaran 1 : Meningkatkan Produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Produksi perikanan	Ton	20412	20417		20420		20423		20427		20432		20432		
		Nilai Tukar Petani	Persen	104,12	104,42		104,72		105,02		105,32		105,62		105,62		
		Produksi Komoditi Unggulan	Ton	77787,73	80098,73		81905,73		84713,43		88022,23		90832,23		90832,23		
		Produktivitas Paduan bahan utama lainnya	Ton/Ha	5,22	5,40		5,60		5,80		5,90		6,00		6,00		
		Produksi Daging Pertahun	Kg	287234	293234		299834		307434		313559		319991		319991		
3.06.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang Usaha Informal	persen	18,96	18,96	115.650.000,00	18,96	127.215.000,00	20,00	139.936.500,00	21	153.930.150,00	22	169.323.165,00	22	706.054.615,00	Disdag
3.07.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					241.000.000,00		265.100.000,00		291.610.000,00		320.771.000,00		352.848.100,00		1.471.329.100,00	Disdag
		Jumlah IKM yang di bina	IKM	2431	50		5,5		6,0		6,5		7,0		7,2		
		Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	6,96	8,59		10,22		11,85		13,48		15,11		15,11		
		Kontribusi Industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	persen	0,00	0,67		0,67		0,70		0,75		0,75		0,75		
3.07.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					121.925.000,00		134.117.500,00		147.529.250,00		162.282.175,00		178.510.393,00		744.364.318,00	Disdag
		Pertumbuhan industri	persen	20,81	22,64		24,47		26,30		28,13		29,96		29,96		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Tonjoknya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	persen	1,92	2,00		2,00		2,00		2,10		2,20		2,20		
3.07 3.06.01 19	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah Industri yang hasil produksinya dapat dijual Keluar Kabupaten Aceh Barat	persen	6,96	5	95.100.000,00	6	1.619.000.000,00	6	1.779.740.000,00	5	1.780.014.000,00	5	3.106.084.210,00	27	8.379.938.210,00	Disdag
3.01.3.01. 01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan					805.884.000,00		554.784.000,00		545.000.000,00		660.418.000,00		441.270.000,00		3.007.356.000,00	DKP
		Produksi Perikanan (ton)	Ton	20.412	20.417		20.420		20.423		20.427		20.432		102.119		
		Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	Ton	0	335		338		341		343		345		345		
		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	Persen	40,95	48,57		51,43		52,67		51,25		51,76		51,76		
3.01.3.01. 01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap					1.473.872.000,00		1.511.032.000,00		1.551.032.000,00		1.491.032.000,00		1.726.032.000,00		7.753.000.000,00	DKP
		Produksi Perikanan ((ton)	Ton	20.412	20.417		20.420		20.423		20.427		20.432		102.119		
		Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	0	2.948		2.959		2.980		2.985		3.000		14.872		
3.01.3.01. 01.15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Cakupan bina kelompok nelayan	persen	40,95	48,61	130.500.000,00	51,39	105.792.000,00	52	125.000.000,00	52,56	108.000.000,00	53,75	106.773.000,00	53,75	576.065.000,00	DKP
3.01.3.01. 01.19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	kg/kapita/tahun	49,5	49,51		49,52	50.000.000,00	49,53	60.000.000,00	49,54	50.000.000,00	49,55	50.000.000,00	247,65	210.000.000,00	DKP
3.01.3.01. 01.27	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Jumlah nelayan, Petani Pembudidaya dan pengolah yang dilatih	Orang	140	280	92.000.000,00	420	92.000.000,00	560	91.920.000,00	700	91.920.000,00	840	91.920.000,00	840	459.760.000,00	DKP



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.01.3.01.01.28	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Kelautan	Jumlah nelayan, Petani Pembudidaya dan pengolah yang dilatih	Orang	140	280	56.000.000,00	420	53.536.000,00	560	55.747.000,00	700	54.471.000,00	840	53.386.000,00	840	273.140.000,00	DKP
3.01.3.01.01.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi Perikanan ((ton)	Ton	20,412	20,417	100.000.000,00	20,420	135.000.000,00	20,423	150.000.000,00	20,427	150.000.000,00	20,432	150.000.000,00	102,119	685.000.000,00	DKP
2.03.2.03.01.08	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan					441.632.600,00		447.017.500,00		442.179.140,00		449.291.529,00		449.291.529,00		2.229.412.298,00	Dinas Pangan & Disbunnak
		Distribusi dan akses pangan	persen	80	100		100		100		100		100		100		Dinas Pangan
		Jangkauan hasil produksi ke luar daerah	Lokal, regional, nasional	regional	regional		regional		regional		regional		regional		regional		Disbunnak
3.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					603.370.100,00		585.207.724,06		1.396.763.956,61		700.731.596,17		700.731.596,17		4.086.804.973,81	DPTPH & Disbunnak
		Nilai Tukar Petani	Persen	104,12	104,42		104,72		105,02		105,32		105,62		105,62		DPTPH
		Rasio kelompok tani terhadap petani	Rasio	4	4,04		4,08		4,12		4,16		4,20		4,20		DPTPH
		Nilai Tukar Petani	Persen	104,12	104,42		104,72		105,02		105,32		105,62		105,62		Disbunnak
		Rasio kelompok tani terhadap petani	Rasio	4	4,04		4,08		4,12		4,16		4,20		4,20		Disbunnak
3.03.3.03.01.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					4.000.000.000,00		2.459.680.144,60		2.533.470.548,94		2.600.545.109,25		2.665.033.184,94		14.258.728.987,73	DPTPH
		Jumlah komoditas yang bersertifikat	jenis komoditi	1	2		3		3		3		3		3		
		Indek Penanaman (IP)	indeks	1,53	1,56		1,59		1,62		1,65		1,68		1,68		
3.03.3.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					16.133.414,624,00		1.067.730.736,21		1.122.190.138,30		1.134.593.809,76		1.135.453.547,73		20.613.382.856,00	DPTPH & Disbunnak



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	5,22	5,4		5,6		5,8		5,9		6,0		6,0		DPTPH
		Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura															DPTPH
		Padi	Ton	99,750	105,633		110,914		116,460		122,283		128,397		128,397		
		Jagung	Kg	385,64	395		405		415		425		435		435		
		Kedelai	Kg	2,03	2,09		2,15		2,21		2,26		2,35		2,35		
		Kacang Tanah	Kg	749,69	772		795		819		843		869		869		
		Ubi Kayu	Kg	753,84	776		799		823		848		873		873		
		Durian	Kg	29,670	30,560		31,477		32,422		33,394		34,396		34,396		
		Rambutan	Kg	5,851	6,026		6,207		6,393		6,585		6,783		6,783		
		Langsat	Kg	4,824	4,969		5,118		5,272		5,43		5,593		5,593		
		Cabai Besar	Kg	623	642		661		681		702		723		723		
		Semangka	Kg	779	802		826		851		877		903		903		
		Produksi sektor perkebunan (Kakao)	Kg	9,2	9,2		9,2		8,9		8,7		8,7		8,7		Disbunnak
		Produksi sektor perkebunan (Sawit)	Kg	59.615,31	61.415,31		63.215,31		65.015,31		66.815,31		68.615,31		68.615,31		Disbunnak
		Produksi sektor perkebunan (Karet)	Kg	16.884,48	17,384,48		17.384,48		18,384,48		19.884,48		20,884,48		20.884,48		Disbunnak
		Produksi sektor perkebunan (Kelapa Dalam)	Kg	1.273	1.284		1.291		1.299		1.308		1.318		1.318		Disbunnak
		Produksi sektor perkebunan (Pinang)	Kg	NA	NA		5.739,80		5.739,80		5.739,80		5.739,80		5.739,80		Disbunnak
3.03.3.03.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan					1.041.910.000,00		357.036.000,00		358.747.080,00		359.334.550,80		359.334.550,80		2476.362.181,60	DPTPH
		Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	452	527		553		581		610		640		640		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rasio penyuluh terhadap kelompok tani	Rasio	1:06	1:07		1:08		1:09		1:10		1:10		1:10		
3.03 3.03.02 21	Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					328.185.561,00		236.245.489,00		243.332.853,00		235.371.753,00		233.444.022,00		1.276.579.678,00	Disbunnak
		Angka Kematian Ternak	Ekor	277	-		29.247		29.832		30.429		31.038		120.546,00		
		Jumlah kasus penyakit ternak	Kasus	18	0		0		0		0		0		0		
		persentase kasus penyakit ternak yang di tangani	persen	72	100		100		100		100		100		100		
		Jumlah populasi ternak yang di vaksinasi	Ekor	14.227	22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		
3.03 3.03.02 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					669.046.510,00		671.916.547,00		708.132.849,00		696.039.103,00		678.149.655,00		3.413.294.664,00	Disbunnak
		Jumlah populasi ternak besar															
		Jumlah populasi ternak sapi	Ekor	5.462	5.571		5.682		5.795		5.910		6.028		28.986		
		Jumlah populasi ternak kerbau	Ekor	23.173	23.636		24.108		24.590		25.081		25.582		122.997		
		Jumlah populasi ternak kecil															
		daging	ton	569	581		592		604		616		629		3.022		
		unggas	Ekor	229.011	233.591		238.262		243.027		247.887		252.844		1.215.611		
		produktivitas daging hasil penggemukan	Kg	100 ke 150	100 ke 150		100 ke 150		100 ke 150		100 ke 150		100 ke 150		100 ke 150		
3.03 3.03.02 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase daging yang ASUH untuk di konsumsi masyarakat	persen	100	100	145.840.000,00	100	120.165.758,00	100	126.642.693,00	100	122.691.441,00	100	121.280.489,00	100	636.620.381,00	
	Tujuan 3 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kategori	Cukup	Cukup		Cukup		Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		
	sasaran 1 :Meningkatnya kualitas lingkungan	Hasil Pengukuran kualitas Air	Persen	32	63		65		67		69		71		71		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Bertanggungjawab

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja [tujuan/impact/outcome]	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Hasil Pengukuran kualitas Udara	Persen	83,93	83,93		84,93		85,93		86,93		87,93		87,93		
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	4,2	5,1		5,5		5,5		5,9		6,4		6,4		
2.05.2.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					4.301.192.250,00		4.516.251.862,50		4.742.064.455,63		4.979.167.678,41		5.228.126.062,33		23.766.802.308,86	DLH
		Total Timbulan sampah yang ditangani	m3	114	114		120		125		130		140		140		
		Persentase cakupan area pelayanan sampah perkotaan	persen	20	20		25		30		35		40		40		
		Persentase Penanganan Sampah	persen	85	85		87		90		95		100		100		
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	persen	10	10		12		14		16		20		20		
2.05.2.05.01	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					610.799.500,00		641.339.475,00		673.406.448,75		707.076.771,19		742.430.609,75		3.375.052.804,68	DLH
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	persen	32	63		65		67		69		71		71		
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	persen	83,93	83,93		84,93		85,93		86,93		87,93		87,93		

[Signature]

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PDU LHD yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	persen	13	13		16		20		23		26		26		
		Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) [orang]	orang	0	2		2		3		3		4		4		
		Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten	Kali	0	1		1		1		1		1		1		
2.05.2.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	0	0	256.320.000,00	0,67	269.136.000,00	0,67	282.592.800,00	0,67	296.722.440,00	0,67	311.558.562,00	0,67	1.416.329.802,00	DLH
2.05.2.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah jenis Informasi	Jenis	2	2	50.250.000,00	2	100.642.500,00	2	105.674.625,00	2	110.958.356,25	2	116.506.274,06	4	484.031.755,31	DLH
2.05.2.05.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					355.822.050,00		773.613.152,50		812.293.810,13		852.908.500,63		895.553.925,66		3.690.191.438,92	DLH



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	0,19	0,24		0,25		0,27		0,29		0,29		0,29		
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	persen	4,25	5,1		5,52		5,52		5,95		6,37		6,37		
2.05.2.05.01.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Penanganan lahan kritis	Persen	20	25	192.100.000,00	25	201.705.000,00	25	211.790.250,00	25	222.379.762,50	25	233.498.750,63	25	1.061.473.763,13	DLH
2.05.2.05.01.09	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase Penanganan Konflik	Persen	100	100	160.650.000,00	100	168.682.500,00	100	177.116.625,00	100	185.972.456,25	100	195.271.079,06	100	887.692.660,31	DLH
	Tujuan 4 : Tumbuhnya kesadaran terhadap Mitigasi Bencana	Kategori Risiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Sedang		Sedang		
	Sasaran 1 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana	indeks	203	188		176		164		152		140		140		
1.04 1.05.02 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran					2.995.470.800,00		2.180.500.000,00		2.245.915.000,00		2.268.374.150,00		2.268.374.150,00		11.958.634.100,00	BPBD
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	89	90		91		92		93		94		94		
		Tercapai Response Time Rate Pemadam Kebakaran	Menit	20	18		18		17		16		15		15		
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	persen	0,0041	0,0041		0,0046		0,0046		0,0046		0,0046		0,0046		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.04 1.06.02 21	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam					1.013.668.340,00		1.022.221.260,46		1.052.887.898,28		1.063.416.777,26		1.063.416.777,26		5.215.611.053,26	BPBD
		Indeks Resiko Bencana	indeks	200	188		176		164		152		140		140		
		Persentase bencana alam yang dapat ditanggulangi	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Rasio Sekolah Siaga Bencana	persen	81,43	83		85		87		89		90		90		
		Jumlah Desa Tangguh	Desa	173	183		193		203		213		223		223		
		Jumlah Relawan Bersertifikasi	Orang	1823	2000		2100		2150		2200		2250		2250		
	Misi 4: Meningkatkan kesejahteraan Sumberdaya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak (honorer) dan Teungku Dayah					21.344.457,516,00		21.112.372,734,07		20.868.013,699,83		21.360.401,529,68		20.915.443,041,14		106.100.688,520,73	
	Tujuan 1: Meningkatnya Profesionalisme dan Kesejahteraan Aparatur	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	69,26	71,17		72,33		73,44		74,34		75,42		75,42		
	Sasaran 1: Meningkatnya kesejahteraan aparatur ASN	Persentase peningkatan pendapatan aparatur ASN	persen	0	1,25		1,25		1,25		1,25		1,25		6,25		
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	60	65	15.301.650.000,00	70	15.301.650.000,00	75	15.301.650.000,00	80	15.301.650.000,00	85	15.301.650.000,00	85	76.508.250.000,00	47 OPD
	Sasaran 2: Meningkatnya ketrampilan dan keahlian SDM Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	Persen	42,20	46,20		50,20		54,20		58,20		62,20		62,20		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	64,4	71,39		73,02		74,68		76,39		78,13		78,13		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Masyarakat Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05. 1.05.01. 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang dilatih				3.559.985.242,00		4.399.750.845,59		4.115.145.795,36		4.597.140.738,69		4.152.964.738,69		20.824.987.360,32	Satpol PP dan WH, Kesbangpol, DLH, Dishub, DPMPTSP, DPTII, Setdakab, Sekr.DPRK, BPKD, BKPSDM, Diskominfo, Dishub
		Jumlah aparatur yang dilatih	Orang	2	2		2		2		2		2		10		Satpol PP dan WH
		Jumlah aparatur yang dilatih	orang	0	2										2		Kesbangpol
		Jumlah aparatur yang dilatih	Orang	8	3		3		3		3		3		3		DLH
		Jumlah SDM yang dilatih	orang	8	2		2		2		2		2		10		Dishub
		Jumlah SDM yang terampil di bidang pelayanan perizinan.	orang	12	0		12		12		12		12		12		DPMPTSP
		Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	502	502		502		502		502		502		502		DPTPH
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61,77	62		63		64		65		66		66		Setdakab
		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	75,39	76		77		78		79		80		80		Setdakab
		Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	OPD	-	6		6		6		6		6		6		Setdakab
		Jumlah Aparatur yang dilatih	orang	45	45		45		45		45		45		45		Sekretariat DPRK
		Persentase Aparatur handal	persen	50	65		70		75		80		85		85		BPKD

Handwritten signature

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	120	120		120		120		120		120		120		BKPSDM
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	42,2	42,2		42,7		42,9		42,9		42,9		42,9		BKPSDM
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	persen	32	35		38		39		40		40,3		40,3		BKPSDM
2.10.2.10.01.17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi					27.511.000,00		66.648.960,00		70.241.338,00		68.049.809,00		67.267.280,00		299.718.387,00	Diskominfo
		Jumlah tenaga teknis yang dilatih TIK	orang	NA	100		100		100		100		100		100		Diskominfo
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kelompok	0	12		12		12		12		12		12		Diskominfo
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di gampong	Kelompok	5	25		50		75		100		125		125		Diskominfo
4.03.4.03.01.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Peserta yang dilatih setiap tahunnya	Orang	92	92	122.535.000,00	92	122.535.000,00	92	122.535.000,00	92	122.535.000,00	92	122.535.000,00	460	612.675.000,00	Bappeda
4.05.4.05.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					2.832.776.274,00		1.221.787.928,48		1.258.441.566,47		1.271.025.982,00		1.271.026.022,46		7.855.057.773,41	BKPSDM



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah	32	34		34		34		34		34		34		
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	266	310		310		310		310		310		310		
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jumlah	1.828	1.942		1.950		2.100		2.150		2.200		2.200		
		Persentase pelanggaran pegawai	persen	12	10		9		9		8		7		7		
	Misi 5: Mengembangkan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni, budaya, adat dan adat istiadat serta olahraga sesuai dengan potensi kedaerahan (kearifan lokal)					7.400.881.529,00		7.767.012.229,00		8.068.470.367,00		8.765.871.129,00		7.151.357.270,00		35.153.592.690,00	
	Tujuan 1 : Mengembangkan wisata spritual berbasis muatan lokal	Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	1,55	2,57		3,59		4,61		5,63		6,65		6,65		
	Sasaran 1 : Berkembangnya wisata spritual berbasis muatan lokal	Jumlah Destinasi Wisata Spiritual yang dikembangkan	Lokasi	2	2		2		2		2		2		10		
3.02.3.02.01.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	PAD sektor pariwisata	Persen	0,000128	0,000117	76.850.000,00	0,000123	66.542.000,00	0,000107	68.530.260,00	0,000102	69.223.643,00	0,000098	69.223.643,00	0,000098	350.377.546,00	Disparbudpora
3.02.3.02.01.16	Program pengembangan destinasi pariwisata					1.650.456.529,00		1.650.456.529,00		1.650.456.529,00		1.650.456.529,00		1.650.456.529,00		8.252.282.645,00	Disparbudpora
		Kunjungan wisata	orang	1099	1099		1118		1055		1332		1500		1500		
		Jumlah Destinasi Wisata Spiritual yang dikembangkan	lokasi	2	2		2		2		2		2		10		
	Tujuan 2 : Melestarikan adat istiadat dan budaya	Jumlah Kebijakan Pelestarian dan pembinaan adat istiadat	Kebijakan	1	1		1		1		1		1		5		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Sasaran 1 :Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga adat	Persentase pembinaan adat istiadat	persen	31,06	46,58		62,11		77,64		93,17		100		100		
	Program Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Jumlah Pelatihan Adat	kali	4	0		6	145.000.000,00	6	250.000.000,00	6	240.000.000,00	6	280.000.000,00	24	915.000.000,00	MAA
2.16 2.16.01 19	Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Jumlah Masyarakat yang mengikuti pelatihan hukum adat	orang	250	200	479.000.000,00	250	85.000.000,00	250	90.000.000,00	250	165.000.000,00	250	100.000.000,00	250	919.000.000,00	MAA
	Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh							310.000.000,00		250.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		1.200.000.000,00	MAA
		Jumlah gampong yang menerapkan peradilan adat	gampong	0	0		10		15		20		25		25		
		jumlah sengketa adat yang diselesaikan/ditinjau secara damai	kasus	0	0		25		30		35		45		135		
2.16 3.02.01 15	Program Pengembangan Nilai Budaya					2.650.770.000,00		2.730.770.000,00		865.138.546,00		2.730.770.000,00		2.650.770.000,00		11.628.218.546,00	Disparbudpora
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	8	8		9		9		10		10		11		
	Program Pengembangan Nilai - Nilai Sejarah					551.330.000,00		1.251.330.000,00		606.463.000,00		0,00		0,00		2.409.123.000,00	Disparbudpora
		Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu	Jumlah	13	13		13		13		13		13		13		
2.16 3.02.01 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	sanggar	17	17	557.150.000,00	20	605.532.200,00	20	623.690.166,00	20	629.935.148,00	20	629.935.148,00	20	3.046.258.662,00	Disparbudpora



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Tonjoknya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas*

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Tujuan 3 : Mengembangkan Olahraga Berprestasi	Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi	Cabor	4	5		6		8		10		11		11		
	Sasaran 1 : Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet berprestasi tingkat provinsi / nasional/Internasional	Atlet	4	7		10		13		16		19		65		
2.13 3.02.01 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					1.215.325.000,00		697.381.500,00		1.434.175.866,00		725.485.975,00		725.485.975,00		4.797.854.316,00	Disparbudpora
		Cakupan pembinaan olahraga	persen	13,04	15,04		17,04		19,04		21,04		23,04		23,04		
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	persen	58,82	58,82		77,20		77,20		84,55		84,55		84,55		
		Cakupan pembinaan atlet muda	persen	20,65	20,65		30,43		26,63		25,54		37,5		37,5		
		Jumlah atlet berprestasi	orang	7	8		9		10		11		12		12		
2.13 3.02.01 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Gedung Olah Raga	unit	0	1	220.000.000,00	1	225.000.000,00	1	230.000.000,00	1	235.000.000,00	1	725.485.975,00	1	1.635.485.975,00	Disparbudpora
	Misi 6 : Pembangunan Prasarana dan sarana Infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona ketahanan pangan nasional.						101.535.546.747,00		116.066.307.714,87		116.743.594.421,97		116.236.718.915,21		117.437.705.789,36		568.019.873.588,40
	Tujuan 1 : Menyediakan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana yang Memadai	Persentase Lahan Produktif	Persen	91,21	90,61		90,01		89,41		88,82		88,22		88,22		
	Sasaran 1 : Meningkatkan Infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah	Persentase sarana dan prasarana Transportasi	Persen	34,71	36,52		38,34		40,16		41,98		43,46		43,46		
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	8387	8587		8787		8987		9187		9387		9387		
1.03 1.03.01 15	Program pembangunan jalan dan jembatan					72.611.000,00		74.063.744,079,17		74.877.100.000,00		74.880.791,000,00		74.917.970,104,00		371.350.605,183,17	Dinas PUPR



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	persen	44,81	47,81		50,81		53,81		56,81		60		60		
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	persen	0,010	0,010		0,098		0,096		0,094		0,092		0,092		
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	persen	15,74	17,4		17,58		17,87		17,95		18,50		18,5		
		Persentase jalan sempadan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	persen	0,44	0,42		0,4		0,38		0,36		0,34		0,34		
1.03 1.03.01 19	Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan					2.400.000.000,00		3.640.000.000,00		2.904.000.000,00		2.994.400.000,00		3.013.840.000,00		14.952.240.000,00	Dinas PUPR
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	persen	44,81	47,81		50,81		53,81		56,81		60		60		
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	persen	0,01	0,01		0,01		0,01		0,012		0,012		0,012		
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	persen	15,74	17,4		17,58		17,87		17,95		18,50		18,5		
		Persentase jalan sempadan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	persen	0,44	0,42		0,4		0,38		0,36		0,34		0,34		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.03 1.03.01 24	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya					14.327.000.000,00		17.759.700.000,00		17.335.670.000,00		17.469.237,000,00		17.976.160.700,00		84.667.767.700,00	Dinas PUPR
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	persen	56	58,2		59,36		60,55		61,76		63		63		
		Rasio jaringan Irigasi dengan luas area sawah terairi	rasio	0,16	0,18		0,20		0,34		0,34		0,35		0,35		
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	8.387	8.587		8787		8.987		9.187		9.387		9.387		
1.03 1.04.01 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	0,45	0,48	5.489.923.610,00	0,51	6.115.183.340,00	0,54	6.298.638.840,20	0,57	5.361.625.228,60	0,6	5.361.625.228,60	0,6	28.626.996.247,40	Dinas PERKIM
1.04 1.04.01 15	Program Pengembangan Perumahan					2.783.000.000,00		2.783.000.000,00		2.783.000.000,00		2.783.000.000,00		2.783.000.000,00		13.915.000.000,00	Dinas PERKIM
		Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,27	0,27		0,28		0,29		0,3		0,31		0,31		
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	69	77		78		79		79		80		80		
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	persen	56	59		61		62		64		65		65		
		Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,17	0,77		0,78		0,79		0,8		0,8		0,8		
1.04 1.04.01 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan					2.154.200.000,00		2.154.200.000,00		2.154.200.000,00		2.154.200.000,00		2.154.200.000,00		10.771.000.000,00	Dinas PERKIM
		persentase rumah tinggal bersanitasi	persen	69	76,4		80,15		85,33		87,8		90		90		
		Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	0,005	0,05		0,04		0,04		0,03		0,03		0,03		
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	persen	0,04	0,04		0,03		0,02		0,01		0,00		0,00		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	persen	7	5,77		5,02		4,29		3,2		2,94		2,94		
		Persentase permukiman yang tertata	persen	60	68		70		72		75		78		78		
	program peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	0,45	0		0,51	7.832.220.000,00	0,54	8.615.442.000,00	0,57	8.776.986.200,00	0,6	9.424.684.820,00	0,6	34.649.333.020,00	Dinas PERKIM
2.09.2.09.01.15	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan					162.066.237,00		178.272.860,70		196.100.146,77		215.710.161,45		237.281.177,59		989.430.583,51	Dishub
		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	114.624	116.916		119.255		121.640		124.073		126.554		126.554		
		Jumlah Pelabuhan Laut dan Penyeberangan /Terminal Bis dan Barang	buah	8	8		9		9		10		11		11		
		Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	173.268	174.890		176.749		178.624		180.526		182.444		182.444		
	Tujuan 2 :Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyediaan bahan pangan	Ketersediaan Bahan pangan	Persen	6,14	6,14		6,26		6,39		6,51		6,65		6,65		
	Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan	Pola Pangan Harapan (konsumsi)	Persen	60,11	61,75		62,55		63,75		64,50		66,70		66,70		
		Persentase Desa Swasembada Pangan	Persen	11	22		33		44		55		66		77		
2.03.2.03.01.15	Program Peningkatan Ketahanan pangan (pertanian /perkebunan)					1.608.356.900,00		1.539.987.435,00		1.579.443.435,00		1.600.769.325,16		1.568.943.759,16		7.897.500.854,32	Dinas Pangan & DPTPH
		Rata-rata Konsumsi Pangan Per Kapita	persen	31,11	31,11		31,75		32,5		33,45		34,75		34,75		Dinas Pangan



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		Jumlah lumbung pangan	Lumbung	11	16		21		26		31		36		36		Dinas Pangan
		Jumlah desa mandiri pangan	Kawasan	5	10		15		20		25		30		30		Dinas Pangan
		Ketersediaan pangan utama	Ton	20464	20464		20.873,28		20.881,47		21299,1		21725,08		21725,08		Dinas Pangan
		Ketersediaan energi dan protein perkapita	gram/kapita/hari	3,543	3,543		3,600		3,602		3,604		3,605		3,605		Dinas Pangan
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	65,5	66,5		67,75		68,75		69,5		75,5		75,5		Dinas Pangan
		Pola Pangan Harapan (konsumsi) (persentase)	Persen	60,11	61,75		62,55		63,75		64,50		66,70		66,70		Dinas Pangan
		Penganekaragaman pangan	Persen	75,25	76,5		77,25		78,6		79,35		80,25		80,25		Dinas Pangan
		Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	60,25	61,95		62,75		63,5		64,75		65,50		65,50		Dinas Pangan
		Ketersediaan dan cadangan pangan Daerah	Persen	6,139	6,139		6,262		6,387		6,514		6,645		6,645		Dinas Pangan
		Penanganan daerah rawan pangan	Desa	10	15		20		25		30		36		36		Dinas Pangan
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	persen	25,15	25,47		25,8		26,13		26,46		26,8		26,8		DPTPH
		Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	persen	33,38	33,45		34,45		35,45		36,45		37,45		37,45		DPTPH
		Kontribusi Kelompok Petani Terhadap PDRB	persen	53	53		54		55		56		57		57		DPTPH
		Rata-rata Konsumsi Pangan Per Kapita	persen	31,11	31,11		31,75		32,5		33,45		34,75		34,75		DPTPH
	Misi 7 : Memberikan pelayanan kesehatan menuju masyarakat Aceh Barat yang sehat jasmani dan rohani serta meningkatkan SDM bidang kesehatan					37.379.032,708,00		51.656.223,725,92		53.948.771,994,27		53.501.205,089,70		54.094.470,306,86		250.579.703,823,75	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja [tujuan/impact/outcome]	Satuan	Kendisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Penurunan Peringkat Daerah Bermasalah Kesehatan	Peringkat	379 di Tahun 2012	0		0		0		0		284		284		
	Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68	68,2		68,40		68,60		68,80		69,00		69,00		
		Angka Kematian bayi	/1000 kelahiran hidup	17	15		14		13		12		11		11		
		Angka Kematian Ibu	/100.000 kelahiran hidup	175 / 6 Kasus	136 / 5 Kasus		132 / 5 Kasus		102 / 4 Kasus		99 / 4 Kasus		96 / 3 Kasus		96 / 3 Kasus		
		Persentase balita gizi buruk (Stunting)	Persen	0,11	0,11		0,10		0,09		0,08		0,06		0,06		
		Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	Persen	30,77	53,85		100		100		100		100		100		
1.02.1.02.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya					4.705.603.614,00		5.127.275.978,92		6.165.301.462,44		5.318.997.476,86		5.417.388.502,17		26.734.567.034,39	Dinas Kesehatan
		Jumlah puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	unit	0	2		5		7		9		13		13		
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,637	0,66		0,675		0,68		0,685		0,69		0,69		
		Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	Rasio	0,02	0,02		0,025		0,025		0,025		0,025		0,025		
		Cakupan pembantu puskesmas	Persen	14,5	14,5		14,5		14,5		14,5		14,5		14,5		
		Cakupan puskesmas	Persen	108	108		108		108		108		108		108		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi*

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					8.920.151.575,00		5.298.679.669,00		5.458.463.826,83		5.715.760.419,84		5.975.000.000,00		31.368.055.490,67	Dinas Kesehatan
		Usia Harapan Hidup	Tahun	68	68,2		68,4		68,6		68,8		69		69		
		Penurunan Peringkat Daerah Bermasalah Kesehatan	Peringkat	379 di Tahun 2012	0		0		0		0		284		284		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persen	23	46		69		84		100		100		100		
		jumlah pelayanan kesehatan haji	orang	256	270		280		290		300		310		1450		
1.02.1.02.01.20	Program perbaikan gizi masyarakat					95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		475.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Balita Gizi Buruk	persen	0,11	0,11		0,10		0,9		0,8		0,6		0,6		
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	persen	1,6	1,5		1,4		1,3		1,2		1		1		
1.02.1.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak					3.300.780.528,00		3.242.980.528,00		3.250.980.528,00		3.272.200.230,00		3.288.157.433,69		16.355.099.247,69	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	17	15		14		13		12		11		11		
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	17	16		15		14		13		12		12		
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	79,5	80		85		90		95		100		100		
		Cakupan pelayanan nifas	persen	72,1	75		80		85		90		95		95		
		Cakupan pelayanan anak balita	persen	70	75		80		85		90		95		95		
		Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 kelahiran hidup	984	985		986		987		988		989		989		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	11	11		10		9		9		8		6		
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	/100.000 kelahiran hidup	175 / 6 Kasus	136 / 5 Kasus		132 / 5 Kasus		102 / 4 Kasus		99 / 4 Kasus		96/ 3 Kasus		96/ 3 Kasus		
		Cakupan kunjungan bayi	persen	70,81	75		80		85		90		95		95		
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	51	55		60		65		70		75		75		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	66	75		80		85		90		95		95		
		Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	persen	92,5	95		96		97		98		100		100		
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	persen	45	50		55		60		65		70		70		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	66	75		85		90		90		95		95		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persen	76	78		80		82		84		86		86		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	persen	84	87		90		93		96		99		99		
		Cakupan kunjungan Hamil K1	persen	86	90		92		94		96		98		98		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi pelayanan kesehatan					1.817.913.991,00		1.791.000.000,00		1.795.000.000,00		1.800.000.000,00		1.771.000.000,00		8.974.913.991,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Puskesmas terakreditasi	Unit	4	7		2		0		0		0		13		
		Labkesda terakreditasi	Unit	0	0		0		1		0		0		1		
1.02.1.02.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata					18.539.583,00		36.091.287,55		37.174.026.177,00		37.289.246,96		37.537.924,37		166.632.068,06	BLUD
		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	persen	85	100		100		100		100		100		100		
		Tersedianya ruang Cardiac Center	Alat/orang	NA	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		Tersedianya ruang HCU, Stroke Center	Alat/orang	NA	belum ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
	Program Standarisasi pelayanan kesehatan					-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		40.000.000,00	BLUD
		Akreditasi pelayanan rumah sakit	kategori	bintang g dua	bintang g dua		bintang g empat		bintang g empat		bintang g lima		bintang g lima		bintang g lima		
		Rasio tingkat pemakaian bed di rumah sakit (BOR)	kategori	bintang g dua	bintang g dua		bintang g dua		bintang g lima		bintang g lima		bintang g lima		bintang g lima		
		Baku mutu limbah cair	persen	65	68		70		75		80		83				
		Waktu tunggu pelayanan rawat jalan	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Waktu tunggu obat jadi	menit	120	100		90		80		70		60		60		
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	menit	90	80		60		50		40		30		30		
		Persentase kepuasan pasien	Huruf	B	A		A		A		A		A		A		
		Persentase kepuasan staf	persen		75		85		95		100		100		100		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/cutcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Tingkat kesehatan BLUD	Persen	0	75		85		95		100		100		100		
	Misi 8: Meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik serta membuka akses pendidikan kepada masyarakat Aceh Barat					1.360.172.439,00		1.037.422.004,92		1.055.199.499,81		1.061.303.106,39		1.061.303.106,39		5.575.480.156,51	
	Tujuan 1: Mengoptimalkan Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Persen	8,73	8,96		9,41		10,61		10,93		11,16		11,16		
	Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pendidikan	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Persen	8,73	8,96		9,41		10,61		10,93		11,16		11,16		
		Angka melek huruf	Persen	98,62	98,83		98,83		98,96		99,04		99,14		99,14		
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					344.233.597,00		123.578.000,00		127.285.340,00		128.558.193,40		128.558.193,40		852.213.323,80	Dinas Pendidikan
		Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	66,35	68,55		71,11		72,65		74,87		77,09		77,09		
		Persentase Guru Bersertifikasi	Persen	16	28		40		52		64		76		76		
		Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					823.438.842,00		723.724.004,92		732.090.559,81		734.963.076,99		734.963.076,99		3.749.179.560,71	Dinas Pendidikan & MPD
		adanya perbup tentang penerbitan izin pendidikan	Perbup	NA	NA		ada		ada		ada		ada		ada		Dinas Pendidikan
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	8	8		9		9		9		10		10		Dinas Pendidikan
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	17	16		16		16		15		15		15		Dinas Pendidikan
		Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio	3,89	3,92		3,95		3,96		3,97		3,99		3,99		Dinas Pendidikan
		Jumlah Sosialisasi Pendidikan	kali	5	1		1		1		1		1		5		MPD



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah seminar Pendidikan	Kali	0	2		2		2		2		2		10		MPD
		Jumlah anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh pendidikan	orang	0	150		250		350		400		500		500		MPD
		Jumlah komite sekolah yang dibina	komite	80	245		260		274		288		303		303		MPD
1.01.1.01.01.23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan					192.500.000,00		190.120.000,00		195.823.600,00		197.781.836,00		197.781.836,00		974.007.272,00	Dinas Pendidikan & MPD
		Kategori Nilai Ujian Rata-rata (A,B,C dan D)	Huruf	C	C		B		B		B		A		A		Dinas Pendidikan
		Persentase Sekolah Berakreditasi A	Persen	13,82	14,01		15,22		15,62		16,5		17,33		17,33		
		Pelaksanaan Musyawarah Daerah	kali	0	1		-		-		-		-		1		MPD
Jumlah						234.648.995.022,00		248.921.722.474,39		248.548.496.728,64		251.281.773.978,25		252.299.080.166,90		1.235.700.068.370,17	

Handwritten signature



BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 yaitu :

"Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas"

Berdasarkan visi tersebut, maka dirumuskan program yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif target sesuai dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam rangka mensukseskan visi Kabupaten Aceh Barat maka perlu adanya dukungan keuangan daerah yang sehat dengan unsur transparansi, efisien dan efektif. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

Kebijakan keuangan daerah merupakan suatu tindakan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mendukung berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dengan mengacu kepada penyusunan anggaran berbasis kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pembangunan daerah Tahun 2017-2022 terdiri dari Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan yang diuraikan secara lebih rinci dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8
	Kapasitas Rill Keuangan	504.516.447.078,00	510.822.902.666,48	517.208.188.949,81	523.673.291.311,68	530.219.207.453,07
B	BELANJA	1.278.779.639.368,99	1.294.030.650.411,13	1.309.464.961.746,81	1.325.084.791.256,23	1.340.892.383.809,40
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	774.263.192.290,99	783.207.747.744,66	792.256.772.797,00	801.411.499.944,55	810.673.176.356,32
	Belanja Pegawai	462.487.048.303,99	468.268.136.407,79	474.121.488.112,89	480.048.006.714,30	486.048.606.798,23
	Belanja Subsidi	5.750.064.000,00	5.821.939.800,00	5.894.714.047,50	5.968.397.973,09	6.043.002.947,76
	Belanja Hibah	6.728.600.000,00	6.812.707.500,00	6.897.866.343,75	6.984.089.673,05	7.071.390.793,96
	Belanja Bantuan Sosial	3.250.000.000,00	3.290.625.000,00	3.331.757.812,50	3.373.404.785,16	3.415.572.344,97
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.553.700.000,00	2.585.621.250,00	2.617.941.515,63	2.650.665.784,57	2.683.799.106,88
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	280.705.779.987,00	283.512.837.786,87	286.347.966.164,74	289.211.445.826,39	292.103.560.284,65
	Belanja Tidak Terduga	12.788.000.000,00	12.915.880.000,00	13.045.038.800,00	13.175.489.188,00	13.307.244.079,88
	BELANJA LANGSUNG	504.516.447.078,00	510.822.902.666,48	517.208.188.949,81	523.673.291.311,68	530.219.207.453,07
	Belanja Pegawai	44.406.455.760,00	44.961.536.457,00	45.523.555.662,71	46.092.600.108,50	46.668.757.609,85
	Belanja Barang dan Jasa	269.873.578.889,00	273.246.998.625,11	276.662.586.107,93	280.120.868.434,28	283.622.379.289,70
	Belanja Modal	190.236.412.429,00	192.614.367.584,36	195.022.047.179,17	197.459.822.768,91	199.928.070.553,52

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat, 2017

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2022

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					365.497.778.030,00		387.266.839.800,65		394.832.211.601,19		399.806.960.718,73		403.534.669.580,48		1.950.938.459.739,05	
1.01	Pendidikan					42.404.834.807,00		40.793.522.425,04		38.654.851.682,05		41.434.206.873,79		39.184.472.820,97		202.471.888.608,85	
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan																
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	60	65	5.004.850.000,00	70	2.244.597.184,00	75	2.244.597.184,00	80	2.244.597.184,00	85	2.244.597.184,00	95	13.983.238,736,00	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	60	65	175.700.000,00	70	191.398.694,00	75	191.398.694,00	80	191.398.694,00	85	191.398.694,00	85	941.294.776,00	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penetapan Angka Kredit Kenaikan Pangkat dan Tahunan bagi guru dan pengawas sekolah jenjang TK-SD-SMP	Persen	90	91	63.000.000,00	92	43.187.310,00	93	41.891.690,70	94	40.634.939,98	95	39.415.891,78	95	228.129.832,46	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					30.000.000,00		29.600.000,00		29.600.000,00		29.600.000,00		29.600.000,00		148.400.000,00	Dinas Pendidikan
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B		B		A		A		
		APBK Tepat Waktu	Bulan	Nov	Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini					424.600.000,00		171.276.400,00		176.414.692,00		178.965.602,20		180.181.152,20		1.131.437.846,40	Dinas Pendidikan
		APK PAUD	Persen	27,33	30,19		31,25		32,31		33,38		34,43		34,43		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas*

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		Persentase PAUD yang Menerapkan Pendidikan Karakter	Persen	NA	10		30		45		55		65		65		
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					7.308.250.000,00		7.471.436.568,90		7.695.579.665,97		7.911.270.726,95		8.125.616.710,32		38.512.153.672,13	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI/Paket A	Persen	109,27	109,86		110,34		110,72		111,45		111,89		111,89		
		APK SMP/MTsN/Paket B	Persen	105,46	106,15		107,19		108,21		109,24		109,78		109,78		
		APM SD/MI/Paket A	Persen	95,58	95,63		95,68		95,73		95,78		95,83		95,83		
		APM SMP/MTsN/Paket B	Persen	85,91	85,96		86,01		86,06		86,11		86,16		86,16		
		Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,79	99,81		99,83		99,86		99,9		99,94		99,94		
		Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	98,54	98,56		98,61		98,71		98,84		99,19		99,19		
		Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,10	0,10		0,09		0,08		0,07		0,06		0,06		
		Angka Putus sekolah SMP/MTs	Persen	0,03	0,03		0,025		0,02		0,015		0,01		0,01		
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	75,25	75,59		77,89		79,15		81,93		84,80		84,80		
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	82,45	85,65		90,43		92,42		94,31		96,20		96,20		
		Persentase Infrastruktur Pendidikan kondisi baik	Persen	84,15	84,75		85,23		85,88		86,97		86,56		86,92		
		Jumlah sekolah ramah anak (SD)	Unit	1	15		20		25		30		35		35		
		Jumlah sekolah ramah anak (SMP)	Unit	0	10		13		16		19		25		25		
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	36,58	36,58		36,58		36,58		36,58		36,58		36,58		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Tenunjadaya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas*

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal					539.000.000,00		55.095.776,00		56.749.679,28		57.317.176,07		57.317.176,07		765.480.807,43	Dinas Pendidikan
		Jumlah lembaga pendidikan non formal yang dibantu pembayaannya	Lembaga	180	180		173		182		177		176		176		
		Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke atas	Persen	98,62	98,73		98,81		98,96		99,04		99,14		99,14		
		Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					344.233.597,00		123.578.000,00		127.285.340,00		128.558.193,40		128.558.193,40		852.213.323,80	Dinas Pendidikan
		Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	66,35	68,55		71,11		72,65		74,87		77,09		77,09		
		Persentase Guru Bersertifikasi	Persen	16	28		40		52		64		76		76		
		Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					378.600.000,00		278.885.162,92		287.251.717,81		290.124.234,99		290.124.234,99		1.524.985.350,71	Dinas Pendidikan
		adanya perbup tentang penerbitan izin pendidikan	Perbup	NA	NA		ada		ada		ada		ada		ada		
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	8	8		9		9		9		10		10		
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	17	16		16		16		15		15		15		
		Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio	3,89	3,92		3,95		3,96		3,97		3,99		3,99		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Tonjoknya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01.1.01.01.23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan					142.500.000,00		190.120.000,00		195.823.600,00		197.781.836,00		197.781.836,00		924.007.272,00	Dinas Pendidikan
		Kategori Nilai Ujian Rata-rata (A,B,C dan D)	Huruf	C	C		B		B		B		A		A		
		Persentase Sekolah Berakreditasi A	Persen	13,82	14,01		15,22		15,62		16,5		17,33		17,33		
1.01.1.01.01.24	Program Perayaan Hari Besar Nasional	Jumlah Peringatan Hari Pendidikan (Hardikda, Hardiknas, Hari Guru Nasional)	Jumlah	2	2	48.000.000,00	2	48.079.294,70	2	49.521.673,55	2	50.016.890,28	2	50.016.890,28	2	245.634.748,81	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.25	Program Perencanaan Pengawasan	Jumlah dokumen perencanaan fisik	Dokumen	6	6	200.000.000,00	6	205.200.000,00	6	216.260.280,00	6	209.512.959,00	6	207.103.560,00	30	1.038.076.799,00	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.50	Program BOS (SD dan SMP)	Persentase Penyaluran Dana BOS SD dan SMP	Persen	NA	100	19.469.800,00	0	19.469.800,00	0	19.469.800,00	0	19.469.800,00	0	19.469.800,00	0	97.349.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.03	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah																
1.01.1.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80	85	202.312.333,00	90	202.977.730,00	95	213.126.617,00	100	223.782.948,00	100	234.972.095,00	100	1.077.171.723,00	MPD
1.01.1.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	75	80	74.754.166,00	85	103.404.234,00	90	108.574.446,00	95	114.003.168,00	100	149.703.326,00	100	550.439.340,00	MPD
1.01.1.01.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	75.000.000,00	MPD
1.01.1.01.03.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					444.838.842,00		444.838.842,00		444.838.842,00		444.838.842,00		444.838.842,00		2.224.194.210,00	MPD
		Jumlah Sosialisasi Pendidikan	kali	5	1		1		1		1		1		5		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Tercapainya Aceh Barat yang Telami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah seminar Pendidikan	Kali	0	2		2		2		2		2		10		
		Jumlah anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh pendidikan	orang	0	150		250		350		400		500		500		
		Jumlah komite sekolah yang dibina	komite	80	245		260		274		288		303		303		
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan					50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50.000.000,00	MPD
		Pelaksanaan Musyawarah Daerah	kali	0	1		-		-		-		-		1		
1.01.1.01.02	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah																
1.01.1.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	75	80	227.972.400,00	85	212.134.784,00	85	207.892.085,00	90	203.734.241,00	100	199.659.556,00	100	1.051.393.066,00	DSI&PD
1.01.1.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	60	65	246.351.795,00	70	138.300.000,00	75	107.200.000,00	80	108.550.000,00	85	111.850.000,00	90	712.251.795,00	DSI&PD
1.01.1.01.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	A	15.000.000,00	A	15.000.000,00	A	15.000.000,00	A	15.000.000,00	A	15.000.000,00	A	75.000.000,00	DSI&PD
1.01.1.01.02.26	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan					104.921.400,00		2.629.912.029,00		141.688.859,00		2.629.912.029,00		161.688.859,00		5.668.123.176,00	DSI&PD
		Jumlah tenaga pengajar / guru dayah yang dilatih	Orang	30	35		40		45		50		55		55		
		Persentase Melek Alquran	Persentase	65	67		70		73		75		80		80		
		Jumlah Hafiz Alquran	Orang	30	35		40		45		50		55		55		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Tenunjudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1.01.1.01.02.28	Program Pengembangan Dayah dan Balee Seumeubeut					2.369.054.800,00		2.043.439.523,00		2.095.511.413,00		2.039.247.457,00		2.043.707.955,00		10.590.961.148,00	DSI&PD
		Jumlah dayah yang teregistrasi	Dayah	29	31		33		35		37		40		40		
		Jumlah dayah dengan Program Tahfiz Al Quran	Dayah	3	4		4		5		5		6		6		
1.01.1.01.02.29	Program Pembinaan Syariah dan Syiar Islam					2.214.151.501,00		2.256.029.635,00		2.282.636.435,00		2.318.715.029,00		2.304.695.942,00		11.376.228.542,00	DSI&PD
		Jumlah Kegiatan Perayaan hari besar Islam	kali	6	6		6		6		6		6		6		
		Persentase masjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu	Persen	67	72		80		85		90		95		95		
		Jumlah masjid yang aktif melaksanakan kemakmuran masjid	Masjid	70	90		110		125		135		147		147		
		Persentase masjid yang memenuhi standar	Persen	60	65		70		75		80		85		85		
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Majelis Taklim	Persen	90	95		100		100		100		100		100		
1.01.1.01.02.31	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah						100.000.000,00		100.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		540.000.000,00		DSI&PD
		Cakupan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Persen	50	55		60		65		70		75		75		
1.01.1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah																



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Sasaran	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pembinaan dan Pencegahan Pelanggaran Syariah Islam					377.613.250,00		377.613.250,00		377.613.250,00		377.613.250,00		377.613.250,00		1.988.066.250,00	Satpol PP dan WH
		Cakupan Razia Penegakan Syariah Islam (Maksiat dan pelanggaran etika dalam masyarakat)	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Kasus Pelanggaran syariah islam	kasus	266	150		121		97		79		50		50		
		Persentase Kasus Pelanggaran Syariah Islam yang ditangani	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Pembinaan Syariah dan Syiar Islam	Persentase penegakan qanun syariah islam	persen	100	100	200.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	600.000.000,00	Satpol PP dan WH
1.01.1.06.04	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama																
1.01.1.06.04.29	Program Pembinaan Syariah dan Syiar Islam					686.975.723,00		666.907.784,06		686.915.017,58		693.784.167,76		693.784.167,76		3.428.366.860,16	Sekr. MPU
		Jumlah santriwan/Santriwati yang dilatih	Orang	40	40		40		40		40		40		200		
		Jumlah Fatwa Ulama yang disosialisasikan	Jumlah	5	5		5		5		5		5		25		
		Jumlah pengawasan dan pencegahan pendangkalan aqidah yang dilaksanakan	kali	4	4		4		4		4		4		20		
		Jumlah Peserta yang diberikan penyuluhan tentang penyembelihan hewan kurban secara halal	orang	80	85		90		95		100		105		105		
1.01.4.0.1.03	Sekretariat Daerah																



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Telami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi*

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kiner Ja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penangge ung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01.4.01 .06.26	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan					417.700.000,00		340.043.023,46		350.244.314,16		353.746.757,31		353.746.757,31		1.815.480,852,24	Setdakab
		Persentase Pembinaan dan Peningkatan Kemakmuran Tempat Ibadah	persen	90	92		94		96		98		100		100		
		Jumlah Pembinaan kegiatan syiar dan syair religi islami	Jumlah	4	4		4		4		4		4		20		
1.01.4.01 .06.29	Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam					25.650.000,00		25.666.200,00		26.436.186,00		26.700.547,86		26.700.547,86		131.153.481,72	Setdakab
		Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	11	11		11		11		11		11		55		
1.01 4.01	Kecamatan																
1.01 4.01.13.29	Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam	Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	298	298	254.005.000,00	309	240.000.000,00	309	240.000.000,00	309	240.000.000,00	309	240.000.000,00	1534	1.214.005,000,00	12 Kecamatan
1.01 4.01.13.26	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan	Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid	Persen	90	100	350.000.000,00	100	360.000.000,00	100	360.000.000,00	100	360.000.000,00	100	330.000.000,00	100	1.760.000,000,00	12 Kecamatan
1.02	Kesehatan					162.936.942.584,00		169.711.842,020,46		176.853.741.372,58		178.780.473.912,16		180.975.265.167,95		869.258.265.057,15	
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan																
1.02.1.02 .01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	53	65	2.782.400.607,00	70	3.080.896.452,67	75	3.088.896.452,67	80	3.088.896.452,65	85	3.088.896.452,65	85	15.129.986,417,64	Dinas Kesehata n
1.02.1.02 .01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	60	65	5.318.616.948,00	70	2.516.121.633,90	75	1.876.163.890,53	80	2.037.814.761,69	80	2.398.657.484,00	80	14.147.574,717,22	Dinas Kesehata n
1.02.1.02 .01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					226.155.871,00		170.000.000,00		97.000.000,00		99.000.000,00		99.000.000,00		691.155.871,00	Dinas Kesehata n



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Integritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Cakupan dokter per satuan penduduk	persen	0,1	0,15		0,15		0,16		0,16		0,16		0,16		
		cakupan tenaga medis per satuan penduduk	persen	1,86	1,96		1,96		1,96		1,96		1,96		1,96		
1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	CC	B	25.000.000,00	B	23.000.000,00	B	23.000.000,00	B	23.000.000,00	B	158.378.611,09	B	252.378.611,09	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					4.150.879.000,00		4.061.197.000,00		4.205.516.042,00		4.212.516.042,00		3.993.506.639,58		20.623.714,723,58	Dinas Kesehatan
		Cakupan sediaan farmasi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
1.02.1.02.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya					4.705.603.614,00		5.127.275.978,92		6.165.301.462,44		5.318.997.476,86		5.417.388.502,17		26.734.567,034,39	Dinas Kesehatan
		Jumlah puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	unit	0	2		5		7		9		13		13		
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,637	0,66		0,675		0,68		0,685		0,69		0,69		
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,02		0,025		0,025		0,025		0,025		0,025		
		Cakupan pembantu puskesmas	Persen	14,5	14,5		14,5		14,5		14,5		14,5		14,5		
		Cakupan puskesmas	Persen	108	108		108		108		108		108		108		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Jalani, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja akhir RPJMD	OPD Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					8.920.151.575,00		5.298.679.669,00		5.458.463.826,83		5.715.760.419,84		5.975.000.000,00		31.368.055.490,67	Dinas Kesehatan
		Usia Harapan Hidup	Tahun	68	68,2		68,4		68,6		68,8		69		69		
		Penurunan Peringkat Daerah Bermasalah Kesehatan	Peringkat	379 di Tahun 2012	0		0		0		0		284		284		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persen	23	46		69		84		100		100		100		
		jumlah pelayanan kesehatan haji	orang	256	270		280		290		300		310		1450		
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat					327.146.257,00		245.000.000,00		251.000.000,00		257.000.000,00		257.000.000,00		1.337.146.257,00	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelaksanaan surveil keluarga sehat	Persen	3,8	50		100		-		-		-		-		
		Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	15,57	16,08		16,58		17,58		18,09		18,59		18,59		
		Rasio posyandu persatuan balita	rasio	20,00	20,46		20,7		25,36		25,36		25,36		25,36		
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular					583.599.295,00		630.000.000,00		634.000.000,00		638.000.000,00		638.000.000,00		3.123.599.295,00	Dinas Kesehatan
		Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per penduduk)	Persen	<5	<5		<5		<5		<5		<5		<5		
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	Persen	20,2	25		30		30		35		35		35		
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	Persen	23,5	85		85		85		85		85		85		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	0	0		0		0		0		0		0		
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	0	55		65		70		75		80		80		
		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	75	77		78		80		85		90		90		
		Cakupan Desa UCI	Persen	57	65		70		75		80		85		85		
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	62	65		70		75		80		85		85		
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	13,56	25		25		30		35		35		35		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Penderita diare yang ditangani	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Angka kejadian Malaria	persen	0	<1		<1		<1		<1		<1		<1		
		Tingkat kematian akibat malaria	persen	0	0		0		0		0		0		0		
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	persen	0	20		20		20		20		25		25		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan penanganan kasus rabies	Persen	100	100		100		100		100		100		100		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1.02 1.02.01 34	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit tidak Menular					217.250.000,00		197.250.000,00		201.250.000,00		228.000.000,00		248.000.000,00		1.091.750.000,00	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan penderita hipertensi	persen	23,8	23,38			23,38		23,38		23,38		23,38		23,38	
		Cakupan pelayanan penderita diabetes melitus	persen	6,5	6,4			6,27		6,14		6,14		6,14		6,14	
		Cakupan pelayanan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	persen	80	80			90		90		90		90		90	
		Cakupan penanganan gangguan jiwa akibat NAPZA	persen	NA	15			20		25		30		35		35	
1.02.1.02 .01.20	Program perbaikan gizi masyarakat					95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		475.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100			100		100		100		100		100	
		Persentase Balita Gizi Buruk	persen	0,11	0,11			0,10		0,9		0,8		0,6		0,6	
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	persen	1,6	1,5			1,4		1,3		1,2		1		1	
1.02.1.02 .01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi standar	persen	50	60	207.250.000,00	75	207.250.000,00	85	210.250.000,00	90	226.000.000,00	100	236.000.000,00	100	1.086.750.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02 .01.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Cakupan tempat pengelolaan makanan sesuai standar kesehatan	persen	30	35	53.235.202,00	40	53.235.202,00	50	53.235.202,00	75	53.235.202,00	100	53.235.202,00	100	266.176.010,00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02 .01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak					3.300.780.528,00		3.242.980.528,00		3.250.980.528,00		3.272.200.230,00		3.288.157.433,69		16.355.099.247,69	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	17	15		14		13		12		11		11		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Telami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas*

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	17	16		15		14		13		12		12		
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	79,5	80		85		90		95		100		100		
		Cakupan pelayanan nifas	persen	72,1	75		80		85		90		95		95		
		Cakupan pelayanan anak balita	persen	70	75		80		85		90		95		95		
		Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 kelahiran hidup	984	985		986		987		988		989		989		
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	11	11		10		9		9		8		8		
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/100.000 kelahiran hidup	175 / 6 Kasus	136 / 5 Kasus		132 / 5 Kasus		102 / 4 Kasus		99 / 4 Kasus		96 / 3 Kasus		96 / 3 Kasus		
		Cakupan kunjungan bayi	persen	70,81	75		80		85		90		95		95		
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	51	55		60		65		70		75		75		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	66	75		80		85		90		95		95		
		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	persen	92,5	95		96		97		98		100		100		
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	persen	45	50		55		60		65		70		70		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	66	75		85		90		90		95		95		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja akhir RPJMD	OPD Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persen	76	78		80		82		84		86		86		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	persen	84	87		90		93		96		99		99		
		Cakupan kunjungan ibu Hamil K1	persen	86	90		92		94		96		98		98		
1.02.1.02.01.39	Program pengembangan data/informasi kesehatan	Jumlah puskesmas yang memiliki layanan informasi kesehatan	UPTD	13	13	106.219.086,00	13	106.219.086,00	13	105.357.344,00	13	105.357.344,00	13	130.457.344,00	13	553.610.204,00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi pelayanan kesehatan					1.817.913.991,90		1.791.000.000,00		1.795.000.000,00		1.800.000.000,00		1.771.000.000,00		8.974.913,991,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Puskesmas terakreditasi	Unit	4	7		2		0		0		0		13		
		Labkesda terakreditasi	Unit	0	0		0		1		0		0		1		
1.02.1.02.01.37	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	persen	0	30	140.000.000,00	30	55.000.000,00	35	57.000.000,00	40	59.000.000,00	45	59.000.000,00	45	370.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.51	Program penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Non Kapitasi)	Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas	persen	100	100	2.632.200.000,00	100	2.816.454.000,00	100	3.013.605.780,00	100	3.224.558.184,60	100	3.450.277,257,52	100	15.137.095,222,12	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.52	Program penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)					13.275.643,110,00		13.939.425,264,87		14.636.396,528,11		15.368.216,354,52		16.136.627,172,25		73.356.308,429,75	Dinas Kesehatan
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	persen	80	90		95		100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan jaminan kesehatan nasional	persen	90	95		95		100		100		100		100		
1.02.1.02.02	BLUD																



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02.1.02.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru/ rumah sakit mata					18.539.583.00 0,00		36.091.287.550,00		37.174.026.177,00		37.289.246.962,00		37.537.924.371,00		166.632.068.060,00	BLUD
		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	persen	85	100		100		100		100		100		100		
		Tersedianya ruang Cardiac Center	Alat/orang	NA	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		Tersedianya ruang HCU, Stroke Center	Alat/orang	NA	belum ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
1.02.1.02.02.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (JKN)				1	95.512.114.50 0,00	1	89.954.569.656,00	1	94.452.298.139,00	1	95.658.674.482,00	1	95.933.658.698,00	5	471.511.315.475,00	BLUD
		Jumlah kerjasama Rumah Sakit rujukan dan jejaring	angka	1	2		2		2		2		2		2		
		Peningkatan kelas Rumah Sakit menjadi Kelas B Pendidikan	kategori	B	B pendidikan		B pendidikan		B pendidikan		B pendidikan		B pendidikan		B pendidikan		
		Pembinaan rujukan balik kepada Puskesmas	kali	0	12		11		10		10		9		9		
		Jumlah KSO Alat Kesehatan	angka	1	2		2		2		2		2		2		
		Jumlah staf yang mengikuti program Spesialis dan Sub-Spesialisasi	orang	1	17		5		5		5		5		5		
		Jumlah staf yang mengikuti program Spesialisasi Perawat dan Paramedis lainnya	orang	4	10		10		11		12		15		15		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah staf yang mengikuti program S2 dan S3	orang	0	5		7		10		12		12		12		
		Persentase staf yang mengikuti pelatihan	persen	50	55		60		65		65		70		70		
	Program Standarisasi pelayanan kesehatan							10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		40.000.000,00	BLUD
		Akreditasi pelayanan rumah sakit	kategori	bintang dua	bintang dua		bintang empat		bintang empat		bintang lima		bintang lima		bintang lima		
		Rasio tingkat pemenuhan bed di rumah sakit (BOR)	kategori	bintang dua	bintang dua		bintang dua		bintang lima		bintang lima		bintang lima		bintang lima		
		Baku mutu limbah cair	persen	65	68		70		75		80		83				
		Waktu tunggu pelayanan rawat jalan	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Waktu tunggu obat jadi	menit	120	100		90		80		70		60		60		
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	menit	90	80		60		50		40		30		30		
		Persentase kepuasan pasien	Huruf	B	A		A		A		A		A		A		
		Persentase kepuasan staf	persen		75		85		95		100		100		100		
		Tingkat kesehatan BLUD	Persen	0	75		85		95		100		100		100		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					125.025.507.819,00		135.508.680.049,07		137.197.958.913,09		137.111.012.590,78		140.225.731.483,00		675.068.890.854,94	
1.03 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1.03 1.03.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	75	80	1.188.046.709,00	85	1.306.851.379,90	90	1.437.536.517,89	95	1.581.290.169,68	100	1.739.419.186,65	100	7.253.143.963,12	Dinas PUPR



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Tercapainya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1.03 1.03.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	75	80	1.535.187.500,00	85	358.706.250,00	90	284.576.875,00	95	313.034.562,50	100	344.338.018,75	100	2.835.843.206,25	Dinas PUPR	
1.03 1.03.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang dilatih tentang jasa konstruksi	Orang	10	10	40.000.000,00	13	44.000.000,00	13	48.400.000,00	12	53.240.000,00	12	58.564.000,00	60	244.204.000,00	Dinas PUPR	
1.03 1.03.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B	65.150.000,00	B	71.665.900,00	B	71.541.500,00	B	86.714.650,00	B	95.386.115,00	B	390.457.265,00	Dinas PUPR	
1.03 1.03.01 15	Program pembangunan jalan dan jembatan					72.611.000,00		74.063.744,079,17		74.877.100,00		74.880.791,00		74.917.970,104,00		371.350.605,183,17	Dinas PUPR	
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/jam)	persen	44,81	47,81		50,81		53,81		56,81		60		60			
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	persen	0,010	0,010		0,098		0,096		0,094		0,092		0,092			
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	persen	15,74	17,4		17,58		17,87		17,95		18,50		18,5			
		Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	persen	0,44	0,42		0,4		0,38		0,36		0,34		0,34			
1.03 1.03.01 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik/ aliran air tidak tersumbat	persen	40	40	1.290.000.000,00	42	2.419.000.000,00	44	1.560.900.000,00	46	1.716.990.000,00	47,2	1.888.689,00	47,2	8.875.579,00	Dinas PUPR	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1.03 1.03.01 18	Program Rehabilitasi/peeliharaan jalan dan jembatan					2.400.000.000,00		3.640.000.000,00		2.904.000.000,00		2.994.400.000,00		3.013.840.000,00		14.952.240.000,00	Dinas PUPR
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/jam)	persen	44,81	47,81		50,81		53,81		56,81		60		60		
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	persen	0,01	0,01		0,01		0,01		0,012		0,012		0,012		
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	persen	15,74	17,4		17,58		17,87		17,95		18,50		18,5		
		Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	persen	0,44	0,42		0,4		0,38		0,36		0,34		0,34		
1.03 1.03.01 24	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya					14.327.000.000,00		17.759.700.000,00		17.335.670.000,00		17.469.237.000,00		17.976.160.700,00		84.867.767,700,00	Dinas PUPR
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	persen	56	58,2		59,36		60,55		61,76		63		63		
		Rasio jaringan irigasi dengan luas area sawah terairi	rasio	0,16	0,18		0,20		0,34		0,34		0,35		0,35		
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	8.387	8,587		8787		8.987		9.187		9.387		9.387		
1.03 1.03.01 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase penduduk berakses air minum	persen	40	44	6.722.000.000,00	48	7.394.200.000,00	52	8.019.062.180,00	56	8.019.062.180,00	60	8.741.680.200,00	60	38.896.004.560,00	Dinas PUPR



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.03 1.03.01 27	Program Pengombangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersantitas	persen	69	76,4	9.044.000.000,00	80,15	9.948.400.000,00	85,33	10.943.240.000,00	87,9	10.943.240.000,00	90	10.941.320.400,00	90	51.820.200.400,00	Dinas PUPR
1.03 1.03.01 28	Program Pengendalian Banjir	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	persen	12	14	4.189.500.000,00	15,8	4.608.450.000,00	16,7	5.069.295.000,00	18	5.069.295.000,00	19,3	5.133.846.950,00	19,3	24.070.386,950,00	Dinas PUPR
1.03 1.03.01 31	Program Pembangunan / Rehabilitasi Gedung/ Tempat	Terbangunnya/terehabnyagedung dan bangunan lainnya untuk keperluan daerah dan masyarakat luas	unit	4	4	2.645.060.000,00	4	4.109.500.000,00	4	4.520.450.000,00	4	4.620.450.000,00	4	5.469.744,500,00	4	21.365.144,500,00	Dinas PUPR
	Program Perencanaan Tata Ruang					235.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		401.243.500,00		763.678.500,00	Dinas PUPR
		Ketaatan terhadap RTRW	persen	40	65		70		75		80		85		85		
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	persen	0	0		0		0		0		0		0		
		Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	persen	2,07	2,07		2,07		2,08		2,09		2,09		2,09		
1.03 1.03.01 35	Program Pemanfaatan Ruang					20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		122.102.000,00	Dinas PUPR
		Ketaatan terhadap RTRW	persen	40	65		70		75		80		85		85		
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	persen	0	0		0		0		0		0		0		
1.03 1.03.01 36	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		183.153.000,00	Dinas PUPR
		Ketaatan terhadap RTRW	persen	40	65		70		75		80		85		85		
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	persen	0	0		0		0		0		0		0		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1.03 1.03.01 36	Program Bina Konstruksi	Persentase ketertiban penyelenggaraan konstruksi	persen	100	100	42.300.000,00	100	46.530.000,00	100	51.183.000,00	100	56.301.300,00	100	61.931.430,00	100	258.245.730,00	Dinas PUPR
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-PU-an	ketersediaan alat ukur dan bahan lab ke PU-an	persen	0	100	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	30.000.000,00	Dinas PUPR
1.03 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
1.03 1.03.01 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat	persen	40	40	1.736.600.000,00	42	1.736.600.000,00	44	1.736.600.000,00	46	1.736.600.000,00	47,2	1.736.600,00	47,2	8.683.000,00	Dinas PERKIM
1.03 1.03.01 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase penduduk berakses air minum	persen	40	44	1.034.800.000,00	48	1.442.650.000,00	52	1.586.915.000,00	56	1.745.606.500,00	60	1.920.167,15	60	7.730.138,65	Dinas PUPR
1.03 1.04.01 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	0,45	0,48	5.489.923,610,00	0,51	6.115.183.340,00	0,54	6.298.638,840,20	0,57	5.361,625,228,60	0,6	5.361,625,228,60	0,6	28.626.996,247,40	Dinas PERKIM
1.04 1.04.01 31	Program pembangunan/rehabilitasi gedung/tempat	Terbangunnya/terehabnyagedung dan bangunan lainnya untuk keperluan daerah dan masyarakat luas	Paket	0	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	10	1.750.000,00	Dinas PERKIM
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					10.562.941,415,00		17.293.230,635,46		18.194,060,512,28		18.410,227,961,65		19.080,150,087,59		83.540,610,611,98	
1.04 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
1.04 1.04.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	75	80	413.722.588,00	85	483.383.388,00	90	483.383.388,00	95	483.383.388,00	100	483.383.388,00	100	2.347.256,140,00	Dinas PERKIM



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Sejahtera, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.04 1.04.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	60	65	553.929.687,00	70	168.929.687,00	75	168.929.687,00	80	168.929.687,00	85	168.929.687,00	85	1.229.648.435,00	Dinas PERKIM
1.04 1.04.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B	19.400.000,00	B	20.000.000,00	B	20.000.000,00	B	20.000.000,00	B	20.000.000,00	B	99.400.000,00	Dinas PERKIM
1.04 1.04.01 15	Program Pengembangan Perumahan					2.783.000.000,00		2.783.000.000,00		2.783.000.000,00		2.783.000.000,00		2.783.000.000,00		13.915.000.000,00	Dinas PERKIM
		Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,27	0,27		0,28		0,29		0,3		0,31		0,31		
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	69	77		78		79		79		80		80		
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	persen	56	59		61		62		64		65		65		
		Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,17	0,77		0,78		0,79		0,8		0,8		0,8		
1.04 1.04.01 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan					2.154.200.000,00		2.154.200.000,00		2.154.200.000,00		2.154.200.000,00		2.154.200.000,00		10.771.000.000,00	Dinas PERKIM
		persentase rumah tinggal bersantitas	persen	69	76,4		80,15		85,33		87,8		90		90		
		Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	0,005	0,05		0,04		0,04		0,03		0,03		0,03		
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	persen	0,04	0,04		0,03		0,02		0,01		0,00		0,00		
		Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	persen	7	5,77		5,02		4,29		3,2		2,94		2,94		
		Persentase permukiman yang tertata	persen	60	68		70		72		75		78		78		

[Signature]

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	program peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	0,45	0	-	0,51	7.832.220.000,00	0,54	8.615.442.000,00	0,57	8.776.986.200,00	0,6	9.424.684.820,00	0,6	34.649.333.020,00	Dinas PERKIM
1.04 1.04.01 17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	persen	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	1.000.000,00	Dinas PERKIM
1.04 1.06.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																
1.04 1.06.02 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran					2.995.470.800,00		2.180.500.000,00		2.245.915.000,00		2.268.374.150,00		2.268.374.150,00		11.958.634.100,00	BPBD
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	89	90		91		92		93		94		94		
		Tercapai Response Time Rate Pemadam Kebakaran	Menit	20	18		18		17		16		15		15		
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	persen	0,0041	0,0041		0,0046		0,0046		0,0046		0,0046		0,0046		
1.04 1.06.02 21	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam					1.013.668.340,00		1.022.221.260,46		1.052.887.898,28		1.063.416.777,26		1.063.416.777,26		5.215.611,053,26	BPBD
		Indeks Resiko Bencana	indeks	200	188		176		164		152		140		140		
		Persentase bencana alam yang dapat ditanggulangi	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Rasio Sekolah Siaga Bencana	persen	81,43	83		65		87		89		90		90		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah Desa Tangguh	Desa	173	183		193		203		213		223		223		
		Jumlah Relawan Bersertifikasi	Orang	1823	2000		2100		2150		2200		2250		2250		
1.04.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup																
1.04.2.05.01.20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman					383.950.000,00		403.147.500,00		423.304.875,00		444.470.118,75		466.693.624,69		2.121.566,118,44	DLH
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	0,19	0,24		0,25		0,27		0,29		0,29		0,29		
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	persen	4,25	5,1		5,52		5,52		5,95		6,37		6,37		
1.04.4.01.03	Sekretariat Daerah																
1.04.4.01.03.15	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah penerbitan bantuan rumah layak huni	KK	141	750	45.600.000,00	750	45.628.800,00	750	46.997.664,00	750	47.467.640,64	750	47.467.640,64	750	233.161.745,28	Setdakab
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					5.383.431.745,00		4.988.903.296,62		4.786.064,517,19		4.811.159,966,29		4.798.764,574,91		24.768.324,100,01	
1.01.1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah																
1.05.1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80	80	1.938.031.605,00	85	1.938.031.605,00	90	1.938.031.605,00	95	1.938.031.605,00	100	1.938.031.605,00	100	9.690.158,025,00	Satpol PP dan WH
1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	75	80	416.739.658,00	85	235.728.854,00	90	235.728.854,00	95	235.728.854,00	100	235.728.854,00	100	1.359.655,074,00	Satpol PP dan WH
1.05.1.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas	Jumlah aparatur yang dilatih	Orang	2	2	77.500.000,00	2	77.500.000,00	2	77.500.000,00	2	77.500.000,00	2	77.500.000,00	10	387.500.000,00	Satpol PP dan WH

[Handwritten signature]

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Sumber Daya Aparatur																
1.05.1.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	C	15.000.000,00	CC	15.000.000,00	CC	15.000.000,00	CC	15.000.000,00	CC	15.000.000,00	CC	75.000.000,00	Satpol PP dan WH
1.05.1.05.01.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					1.670.631.850,00		1.535.776.624,00		1.421.262.512,00		1.443.170.703,00		1.431.997.071,00		7.502.838.760,00	Satpol PP dan WH
		Tingkat penyelesaian pelanggaran (ketertiban, ketentraman, keindahan) K3	persen	89	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kali	x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		
		Persentase Penegakan PERDA	persen	89	100		100		100		100		100		100		
	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat					135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		675.000.000,00	Satpol PP dan WH
		Rasio Linmas Persatuan Penduduk	rasio	0,35	0,8		1		1		1		1		1		
		Jumlah Satuan Linmas setiap Gampong	Orang	100	644		644		966		966		1288		1288		
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kali	0	3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		
		Jumlah poskamling aktif	jumlah	NA	181		181		181		181		181		181		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05 1.05.02	Kantor Kesatuan Bangsa dan politik																
1.05 1.05.02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	85	87	255.907.618,00	89	197.748.424,00	90	197.748.424,00	95	197.748.424,00	100	197.748.424,00	100	1.046.901.314,00	Kesbang pol
1.05 1.05.02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80	85	74.359.965,00	88	37.739.950,00	90	37.739.950,00	92	37.739.950,00	95	37.739.950,00	95	225.319.765,00	Kesbang pol
1.05 1.05.02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang dilatih	orang	0	2	9.000.000,00									2	9.000.000,00	Kesbang pol
1.05 1.05.02 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B	14.999.900,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	74.999.900,00	Kesbang pol
1.05 1.05.02 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan	persen	80	85	108.762.476,00	86	112.310.231,00	87	115.679.538,00	88	116.836.333,47	89	116.836.333,47	89	570.424.911,94	Kesbang pol
1.05 1.05.02 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan					47.301.825,00		36.033.586,19		37.114.593,78		37.485.739,71		37.485.739,71		195.421.484,39	Kesbang pol
		Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang SARA	persen	94	95		96		97		98		99		99		
		Pelatihan bela negara	pelatihan	0	1		1		1		1		1		5		

Handwritten signature

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satman	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1.05 1.05.02 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan	Persentase sekolah yang dibina Ideologi, Karakter dan Wawasan kebangsaan dibagi jumlah pendidik di Aceh	persen	0	10	23.153.415,00	15	16.428.796,00	20	16.921.659,00	25	16.921.659,00	30	16.921.659,00	100	90.347.188,00	Keshang pol	
1.05.1.05. 02.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pkat)	Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan	persen	80	85	24.635.510,00	86	29.033.140,00	87	29.904.134,00	88	30.203.175,00	89	30.203.175,00	89	143.979.134,00	Keshang pol	
1.05 1.05.02 24	Program pembinaan Ideologi kebangsaan					137.356.000,00		85.192.439,29		87.748.212,47		88.625.694,59		88.625.694,59		487.548.040,94	Keshang pol	
		Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang SARA	jumlah	94	95		96		97		98		99		99			
		Frekuensi pembinaan masyarakat tentang ideologi pancasila	jumlah	1	1		1		1		1		1		5			
		Jumlah mantan kombatan, korban konflik dan mantan tapol/napol yang dibina dan diberdayakan	Orang	0	120		120		120		120		120		600			
1.05 1.05.02 25	Program pencegahan dini ancaman masyarakat	Jumlah diteksi secara dini mengenai situasi yang mengancam ketenteraman masyarakat.	Kali	2	2	55.562.500,00	3	32.857.591,00	3	33.843.318,00	3	33.843.318,00	3	33.843.318,00	14	189.950.045,00	Keshang pol	
1.05 1.05.02 26	Program Pendidikan Politik Bagi Masyarakat					82.332.100,00		77.168.491,23		79.483.545,97		80.278.381,43		80.278.381,43		399.540.900,06	Keshang pol	



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (angkatan)	Jumlah	5	1		1		1		1		1		5		
		frekuensi sosialisasi pembinaan politik daerah	Jumlah	5	1		1		1		1		1		5		
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	persen	87	90		90		95		95		95		98		
1.05 1.05.02 23	Program Pelaksanaan Pemilu	Prosentase Pelanggaran Pemilu	persen	30	20	37.205.510,00	15	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	137.205.510,00	Kesbang pol
1.05 1.05.02 26	Program kebijakan politik pemerintah	Frekuensi sosialisasi pembinaan politik daerah	Kali	4	1	25.517.000,00	1	28.849.768,91	1	29.715.261,97	1	30.012.414,59	1	30.012.414,59	5	144.106.860,06	Kesbang pol
1.05 1.05.02 29	Program pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan					25.135.300,00		16.428.796,80		16.921.659,00		17.598.527,00		17.598.527,00		93.682.809,00	Kesbang pol
		Frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (angkatan)	Kali	4	6		6		6		6		6		30		
		Jumlah LSM terdaftar	LSM	7	7		8		9		10		11		11		
1.01 4.01.	Kecamatan																
1.01 4.01.13.1 6	Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	40	40	209.299.513,00	60	267.075.000,00	61	265.721.250,00	62	264.435.187,50	63	263.213.428,12	15	1.269.744.378,62	12 Kecamatan
1.06	Sosial					19.184.119.660,00		18.970.661.374,00		19.145.534.604,00		19.259.879.414,06		19.270.285.454,06		95.830.480.506,12	
1.06 1.06.01	Dinas Sosial																
1.06 1.06.01 01	Program Pelayanan Administrasi	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	persen	65	70	353.458.707,00	75	254.545.595,00	80	254.545.595,00	85	254.545.595,00	90	254.545.595,00	90	1.371.641.087,00	Dinsos

Handwritten signature

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Perkantoran	Pemerintah															
1.06 1.06.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	50	60	143.337.614,00	65	90.627.000,00	70	90.627.000,00	75	90.627.000,00	80	90.627.000,00	80	505.845.614,00	Dinsos
1.06 1.06.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	0	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	75.000.000,00	Dinsos
1.06 1.06.01 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					168.311.000,00		95.060.000,00		97.911.800,00		98.890.918,00		98.890.918,00		559.064.636,00	Dinsos
		pemberdayaan masyarakat yang ditangani melalui UEP	Persen	0	0		35		40		40		45		45		
		Persentase PMKS yang tertangani	Persen	30	40		45		50		55		60		60		
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase Orang Tua Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	70	75	25.000.000,00	80	100.000.000,00	84	200.000.000,00	88	300.000.000,00	90	300.000.000,00	90	925.000.000,00	
1.06 1.06.01 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	80	70,1	82.155.928,00	70,1	72.435.720,00	70,1	74.608.792,00	70,2	75.354.880,00	70,2	75.354.880,00	70,2	379.910.200,00	Dinsos
1.06 1.06.01 17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	60	75	1.042.000.000,00	75	1.034.359.000,00	75	1.044.987.770,00	80	1.055.437.648,00	80	1.065.843.688,00	80	5.242.628.106,00	Dinsos



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Tenunjudaya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.06.106.01.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani	Persen	70	75	40.012.975,00	75	41.636.280,00	80	42.885.368,00	80	43.314.222,00	90	43.314.222,00	90	211.163.067,00	Dinsos
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang cacat yang kebutuhan dasar terpenuhi	Persen	50	60	300.000.000,00	70	300.000.000,00	75	300.000.000,00	80	300.000.000,00	85	300.000.000,00	85	1.500.000.000,00	Dinsos
1.06.106.01.25	Program Keluarga Harapan	Jumlah keanggotaan PKH	Orang	6000	11000	189.500.000,00	11000	105.326.480,00	11000	108.486.274,00	11000	109.571.137,00	11000	109.571.137,00	11000	622.455.028,00	Dinsos
1.06.106.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																
1.06.106.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	85	85	958.986.500,00	86	841.684.132,00	88	841.684.132,00	90	841.684.132,00	95	841.684.132,00	95	4.325.723.028,00	BPBD
1.06.106.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	75	80	518.706.789,00	85	439.409.101,00	90	439.409.101,00	95	439.409.101,00	100	439.409.101,00	100	2.276.343.193,00	BPBD
1.06.106.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	75.000.000,00	BPBD
1.06.106.03	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten																
1.06.106.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	85	90	212.819.882,00	95	207.422.740,00	100	207.422.740,00	100	207.422.740,00	100	207.422.740,00	100	1.042.510.842,00	Sekr. BMK

Handwritten signature

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.06.06.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	90	90	83.208.125,00	90	114.200.000,00	95	114.200.000,00	95	114.200.000,00	100	114.200.000,00	100	540.008.125,00	Sekr. BMK
1.06.06.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	75.000.000,00	Sekr. BMK
1.06.06.03.24	Program Pelayanan Kehidupan Beragama	Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	Milyar Rupiah	12,6	14	14.560.500,00	14,70	14.800.300,00	15,44	14.853.200,00	16,21	14.853.200,00	17,02	14.853.200,00	17,02	73.920.400,00	Sekr. BMK
1.06.1.06.04	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama																
1.06.1.06.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	70	80	131.575.640,00	80	120.425.126,00	80	120.425.126,00	80	120.425.126,00	80	120.425.126,00	80	613.276.144,00	Sekr. MPU
1.06.1.06.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	70	80	118.146.500,00	80	77.340.000,00	80	77.340.000,00	80	77.340.000,00	80	77.340.000,00	80	427.506.500,00	Sekr. MPU
1.06.1.06.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	CC	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	75.000.000,00	Sekr. MPU
1.06.4.01.03	Sekretariat Daerah																
1.06.4.01.03.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	Persentase Verifikasi dan Penyusunan Data Penerima Bantuan Sosial	persen	100	100	40.000.000,00	100	63.690.200,00	100	65.600.906,00	100	66.256.915,06	100	66.256.915,06	100	361.804.936,12	Setdakab



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Integritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya																
1.01 - 4.01.05	Kecamatan																
1.01 - 4.01.05.15	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah KPM penerima rastra	KPM	10601	10601	156.400.000,00	11019	152.200.000,00	10869	152.200.000,00	10719	152.200.000,00	10569	152.200.000,00	100	765.200.000,00	12 Kecamatan
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar					37.473.777,065,04		43.862.968,406,30		40.775.877,179,03		41.638.349,771,34		42.829.339,899,82		206.580.312,321,53	
2.01	Tenaga kerja					1.123.777,673,00		1.171.349,673,00		667.860,985,36		671.502,301,21		671.502,301,21		4.305.992,933,79	
2.01.3.08.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja																
2.01.3.08.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja					303.729.400,00		303.729.400,00		303.729.400,00		303.729.400,00		303.729.400,00		1.518.647,000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi	jumlah	3	3		4		5		6		7		7		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	224	394		564		734		904		1074		1074		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	orang	96	192		288		384		480		576		576		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	150	180		210		240		270		300		300		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
2.01.3.08.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja (PPKK)					753.548.273,00		753.548.273,00		246.637.425,36		249.103.799,61		249.103.799,61		2.251.941,570,59	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Rasio Penduduk yang bekerja	persen	93,56	93,60		93,65		93,69		93,73		93,78		93,78		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,2	4,79		3,81		3,32		2,94		2,46		2,46		
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar	orang	7858	7658		6765		5988		4565		3255		28251		
		Jumlah Perusahaan yang menjalin kerjasama dalam penempatan tenaga kerja	perusahaan	NA	5		7		9		11		13		13		
		Angka partisipasi angkatan kerja	persen	66,15	66,24		66,33		66,42		66,51		66,60		66,60		
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	persen														
2.01.3.08.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					66.500.000,00		114.072.000,00		117.494.160,00		118.669.101,60		118.669.101,60		535.404.363,20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Keselamatan dan perlindungan	persen	76,92	77		75		76,92		77,82		78		78		
		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun															
		Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah															
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak					628.831.100,00		948.553.750,00		856.248.937,50		914.136.384,38		1.094.593.203,59		4.442.363,375,47	



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
2.02 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat																
2.02.2.02 .01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80	84	206.575.000,00	86	216.903.750,00	90	227.748.937,50	95	239.136.384,36	100	251.093.203,59	100	1.141.457.275,47	DP3A&KB
2.02.2.02 .01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	70	75	165.363.100,00	80	165.000.000,00	85	110.500.000,00	90	111.500.000,00	100	172.000.000,00	100	724.363.100,00	DP3A&KB
2.02.2.02 .01.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	75.000.000,00	DP3A&KB
2.02.2.02 .01.19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					111.493.000,00		0,00		30.000.000,00		50.000.000,00		0,00		191.493.000,00	DP3A&KB
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	83,5	83,7		84,1		84,88		85,21		85,67		85,67		
		Jumlah OPD dan Desa yang melaksanakan PPRG	OPD	47	369		369		369		369		369		369		
2.02.2.02 .01.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan					50.000.000,00		79.500.000,00		74.000.000,00		76.500.000,00		77.500.000,00		357.500.000,00	DP3A&KB
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	persen	8	8		12		12		12		12		12		

[Handwritten signature]

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	persen	83,50	83,70		83,70		83,75		83,75		83,80		83,80		
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	29,82	29,95		30,15		30,15		30,30		30,50		30,50		
		Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah	persen	70,18	70,05		69,85		69,85		69,70		69,50		69,50		
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	15,00	15,50		16,40		17,30		18,20		19,10		19,10		
	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak						160.150.000,00		135.000.000,00		142.000.000,00		220.000.000,00		657.150.000,00		
		Rasio KDRT	Rasio	0,042	0,037		0,037		0,031		0,031		0,025		0,025		DP3A&KE
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas inap/PA dan PPT/PKT di Rumah Sakit	persen	100	100		100		100		100		100		100		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100	100		100		100		100		100		100		
2.02.2.02.01.21	Program Perlindungan Anak	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	persen	2,80	2,75	80.400.000,00	2,70	212.000.000,00	2,65	264.000.000,00	2,6	280.000.000,00	2,6	259.000.000,00	2,60	1.095.400.000,00	DP3A&KB
	Program Pengembangan Data/ Informasi	Tingkat Ketersediaan Data Gender dan Anak	persen	0,00	0	-	20,00	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	2,6	100.000.000,00	2,60	200.000.000,00	DP3A&KB
2.03	Pangan					2.244.258.428,00		2.282.669.711,00		2.231.912.367,00		2.248.812.145,16		2.248.812.145,16		11.256.484.796,32	
2.03.2.03.01	Dinas Pangan																

[Signature]



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.03.2.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	60	70	396.108.628,00	80	302.702.276,00	90	315.454.307,00	95	326.227.022,00	100	344.572.262,00	100	1.685.064.495,00	Dinas Pangan
2.03.2.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100	100	224.792.900,00	100	400.000.000,00	100	322.014.625,00	100	281.815.798,00	100	320.296.124,00	100	1.548.919.447,00	Dinas Pangan
2.03.2.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin PNS	persen	100	0	-	100	25.000.000,00		0,00	100	25.000.000,00	0	0,00	100	50.000.000,00	Dinas Pangan
2.03.2.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	NA	A	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	A	15.000.000,00	A	75.000.000,00	Dinas Pangan
2.03.2.03.01.15	Program Peningkatan Ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)					1.084.701.900,00		1.100.810.235,00		1.127.090.919,00		1.143.893.284,00		1.112.067.718,00		5.568.564.056,00	Dinas Pangan
		Rata-rata Konsumsi Pangan Per Kapita	persen	31,11	31,11		31,75		32,5		33,45		34,75		34,75		
		Jumlah lumbung pangan	Lumbung	11	16		21		26		31		36		36		
		Jumlah desa mandiri pangan	Kawasan	5	10		15		20		25		30		30		
		Ketersediaan pangan utama	Ton	20464	20464		20.873,28		20.881,47		21299,1		21725,08		21725,08		
		Ketersediaan energi dan protein perkapita	gram/kapita/hari	3,543	3,543		3,600		3,602		3,604		3,605		3,605		
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	65,5	66,5		67,75		68,75		69,5		75,5		75,5		
		Pola Pangan Harapan (konsumsi) (persentase)	Persen	60,11	61,75		62,55		63,75		64,50		66,70		66,70		
		Pengankaragaman pangan	Persen	75,25	76,5		77,25		78,6		79,35		80,25		80,25		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas*

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RP/MD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	60,25	61,95		62,75		63,5		64,75		65,50		65,50		
		Ketersediaan dan cadangan pangan Daerah	Persen	6,139	6,139		6,262		6,387		6,514		6,645		6,645		
		Penanganan daerah rawan pangan	Desa	10	15		20		25		30		36		36		
2.03.3.03.01	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura																
2.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)					523.655.000,00		439.177.200,00		452.352.516,00		456.876.041,16		456.876.041,16		2.328.936.798,32	DPTPII
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	persen	25,15	25,47		25,8		26,13		26,46		26,8		26,8		
		Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	persen	33,38	33,45		34,45		35,45		36,45		37,45		37,45		
		Kontribusi Kelompok Petani Terhadap PDRB	persen	53	53		54		55		56		57		57		
		Rata-rata Konsumsi Pangan Per Kapita	persen	31,11	31,11		31,75		32,5		33,45		34,75		34,75		
2.04	Pertanahan					385.500.000,00		4.378.754.000,00		3.381.320.620,00		2.516.798.107,20		1.632.621.227,20		12.294.993.954,40	
2.04.4.01.03	Sekretariat Daerah																
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					300.000.000,00		4.293.200.000,00		3.293.200.000,00		2.427.796.281,00		1.543.619.401,00		11.857.815.682,00	Setdakab



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi*

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemhangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kiner ja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penangg ung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Tertibnya Penataan Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase luas lahan bersertifikat	persen	26,97	50		50		75		90		100		100		
		Penyelesaian izin lokasi	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan					85.500.000,00		85.554.000,00		88.120.620,00		89.001.826,20		89.001.826,20		437.178.272,40	Setdakab
		Terselesaikannya Konflik - Konflik Pertanahan	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Penyelesaian kasns tanah Negara	persen	25	50		50		75		90		100		100		
2.05	Lingkungan hidup					6.321.816.600,00		7.085.037.430,00		7.455.938.926,50		7.827.835.872,83		8.218.252.666,47		36.908.881.495,79	
2.05.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup																
2.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	persen	75	80	423.583.500,00	85	444.762.675,00	90	467.000.808,75	95	490.350.849,19	100	514.868.391,65	100	2.340.566.224,58	DLH
2.05.2.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana LH	persen	60	70	294.699.300,00	75	309.434.265,00	80	324.905.978,25	85	341.151.277,16	90	358.208.841,02	90	1.628.399.661,43	DLH
2.05.2.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang dilatih	Orang	8	3	14.150.000,00	3	14.857.500,00	3	33.000.000,00	3	34.500.000,00	3	36.000.000,00	3	132.507.500,00	DLH
2.05.2.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	75.000.000,00	DLH



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kondibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.05.2.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					4.301.192.250,00		4.516.251.862,50		4.742.064.455,63		4.979.167.678,41		5.228.126.062,33		23.766.802.308,66	DLH
		Total Timbulan sampah yang ditangani	m3	114	114		120		125		130		140		140		
		Persentase cakupan area pelayanan sampah perkotaan	persen	20	20		25		30		35		40		40		
		Persentase Penanganan Sampah	persen	85	85		87		90		95		100		100		
		Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	persen	10	10		12		14		16		20		20		
2.05.2.05.01.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					610.799.500,00		641.339.475,00		673.406.448,75		707.076.771,19		742.430.609,75		3.375.052.804,68	DLH
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	persen	32	63		65		67		69		71		71		
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	persen	83,93	83,93		84,93		85,93		86,93		87,93		87,93		
		Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	persen	13	13		16		20		23		26		26		
		Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) [orang]	orang	0	2		2		3		3		4		4		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten	Kali	0	1		1		1		1		1		1		
2.05.2.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	0	0	256.320.000,00	0,67	269.136.000,00	0,67	282.592.800,00	0,67	296.722.440,00	0,67	311.558.562,00	0,67	1416.329.802,00	DLH
2.05.2.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Jenis Informasi	Jenis	2	2	50.250.000,00	2	100.642.500,00	2	105.674.625,00	2	110.958.356,25	2	116.506.274,06	4	484.031.755,31	DLH
2.05.2.05.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					355.822.050,00		773.613.152,50		812.293.810,13		852.908.500,63		895.553.925,66		3.690.191.438,92	DLH
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	0,19	0,24		0,25		0,27		0,29		0,29		0,29		
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	persen	4,25	5,1		5,52		5,52		5,95		6,37		6,37		
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					2.296.869.260,00		2.663.508.960,00		2.803.277.908,00		2.967.888.052,00		3.089.959.180,00		13.821.503.360,00	
2.06.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	75	80	269.594.000,00	84	264.291.516,00	87	259.005.685,00	90	253.825.572,00	93	248.749.060,00	93	1.295.465.833,00	Disdukcapil
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	70	75	236.808.260,00	80	204.749.850,00	83	202.702.351,00	86	200.675.328,00	88	198.668.574,00	88	1.043.604.363,00	Disdukcapil
2.06.2.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	BB	15.000.000,00	BB	75.000.000,00	Disdukcapil
2.06.2.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan					1.775.467.000,00		1.329.467.594,00		1.376.569.872,00		1.398.387.152,00		1.427.541.546,00		7.307.433.164,00	Disdukcapil
		Rasio penduduk ber e-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,85	0,83		0,86		0,88		0,91		0,93		0,93		
		Rasio bayi berakte kelahiran (usia 0-1 tahun)	Rasio	0,55	0,65		0,7		0,75		0,8		0,85		0,85		
		Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	sudah	sudah		sudah		sudah		sudah		sudah		sudah		
		Cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0-18 tahun)	persen	75	80		83		85		87		90		90		
		Rasio kepemilikan akta kematian	Rasio	0,25	0,30		0,33		0,35		0,37		0,40		0,40		
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		78	81		81		84		87		90		90		
	Program Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan						850.000.000,00		950.000.000,00		1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		4.100.000.000,00		

[Handwritten signature]

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	0	0		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	0	0		sudah		sudah		sudah		sudah		sudah		
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					4.564.784.056,04		4.739.905.510,50		4.573.565.170,13		4.718.769.147,46		4.807.139.866,32		23.404.183.750,44	
2.07 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong																
2.07 2.07.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80	80	333.697.428,00	85	367.067.171,00	90	396.315.700,00	95	408.657.270,00	100	416.512.997,00	100	1.922.250.566,00	DPMG
2.07 2.07.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	70	75	170.528.286,04	80	187.581.115,00	85	205.000.000,00	90	263.000.000,00	95	271.000.000,00	95	1.097.109.401,04	DPMG
2.07 2.07.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	BB	17.000.000,00	B	20.000.000,00	B	20.000.000,00	B	20.000.000,00	B	20.000.000,00	B	97.000.000,00	DPMG
2.07 2.07.01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kedisiplinan PNS(Atribut)	persen	100	100	17.472.000,00	100	0,00	100	0,00	100	17.472.000,00	100	0,00	100	34.944.000,00	DPMG
2.07 2.07.01 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					268.946.700,00		161.173.470,00		119.026.856,00		118.826.850,00		144.350.956,00		812.324.832,00	DPMG
		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	persen	35	36		38		43		45		65		65		
		Pemeliharaan Pasca Program pemberdavaan	persen	60	65		68		70		70,53		75		75		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		masyarakat															
		Jumlah kelompok binaan LPM	LPM	5	7		9		11		14		15		15		
		Jumlah BUMG yang aktif	unit	75	247		267		287		307		322		322		
2.07 2.07.01 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					966.654.000,00		1.063.313.400,00		1.169.715.298,00		1.257.943.851,00		1.356.331.885,00		5.813.958.434,00	DPMG
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	persen	3,89	4,23		4,24		4,25		4,26		4,27		4,27		
		Persentase PKK aktif	persen	89	90		95		98		100		100		100		
		Persentase Posyandu aktif	persen	18	20		25		30		40		46		46		
		persentase gampong yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	persen	74,22	79,5		90,06		96,27		99,68		100		100		
2.07 2.07.01 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa mengikuti pelatihan	persen	75	80	344.722.590,00	85	264.847.240,00	90	144.625.000,00	95	154.625.000,00	100	159.625.000,00	100	1.068.444.830,00	DPMG
2.07 2.07.01 21	Program peningkatan kerjasama masyarakat dalam membangun desa	Jumlah peserta yang terlibat dalam membangun desa (bhakti sosial masyarakat)	Jumlah	400	420	148.435.500,00	440	154.479.058,00	450	153.000.000,00	460	153.000.000,00	460	153.000.000,00	460	753.914.558,00	DPMG
2.07 2.07.01	Peningkatan dan Pelayanan	Jumlah Mukim	Mukim	36	36	1.217.438.676,00	36	1.330.182.579,00	36	1.217.438.788,00	36	1.217.438.700,00	36	1.217.138.700,00	36	6.199.637.443,00	DPMG



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
22	Pemerintah Mukim																
1.01 4.01.	Keramatan																
1.01 4.01.05.1 7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase PKK Aktif	gampung	322	322	117.500.000,00	322	195.000.000,00	322	195.000.000,00	322	195.000.000,00	322	195.000.000,00	100	897.500.000,00	12 Kecamatan
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	RKPG dan APBG Tepat Waktu	Bulan	Januari	Januari	870.388.876,00	Januari	896.261.477,50	Januari	953.463.528,13	Januari	812.805.476,46	Januari	774.190.328,32	Januari	4.207.099,686,40	12 Kecamatan
2.04.4.0 1.03	Sekretariat Dacrah																
	Program Peningkatan Kualitas Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Berkembangnya Agribisnis Pedesaan	Persen	70	80	100.000.000,00	85	100.000.000,00	90	100.000.000,00	95	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	500.000.000,00	Setdikab
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					5.907.465.187,00		6.129.913.826,00		5.701.560.826,00		5.714.060.826,00		5.709.560.826,00		29.162.561.491,00	
2.08 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																
2.08.2.08 01.15	Program Keluarga Berencana					5.867.515.187,00		6.029.963.826,00		5.592.560.826,00		5.626.560.826,00		5.596.560.826,00		28.713.161.491,00	DP3A&KB
		Rasio ekseptor KB	persen	68,27	63,00		63,00		63,00		64,50		65,00		65,00		
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi	persen	100	100		100		100		100		100		100		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		permintaan masyarakat															
		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	persen	71,95	73,51		77,99		81,11		85,45		91,99		91,99		
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	18,00	17,50		17,45		17,40		17,35		17,35		17,35		
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	persen	8,17	8,20		8,31		8,43		8,54		8,67		8,67		
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	persen	49,24	40,97		41,75		43,05		44,12		45,15		46,15		
		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	persen	5,56	11,11		11,11		16,67		16,67		16,67		16,67		
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	persen	100	100		100		100		100		100		100		

Handwritten signature

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2013		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	persen	60,61	63,63		63,63		66,07		66,07		69,7		69,7		
		Total Fertility Rate (TFR)	persen	2,95	2,9		2,87		2,84		2,8		2,77		2,77		
		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	persen	2,10	2,08		2,05		2,02		2,00		1,97		1,97		
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	persen	68,18	68,18		70,45		70,45		72,73		72,73		72,73		
	Program Pemberdayaan Keluarga						60.000.000,00		67.000.000,00		62.000.000,00		69.000.000,00		258.000.000,00		
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	persen	84,45	85,1		85,25		85,6		85,9		86		86		
		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	persen	97,10	97,39		97,60		97,60		97,75		97,75		97,75		
		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	persen	16,67	16,67		16,67		16,67		25,00		25,00		25,00		
		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 6 fungsi keluarga	persen	59,33	71,43		71,88		72,93		73,33		73,91		73,91		
		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	persen	100	100		100		100		100		100		100		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terdapatnya Aceh Barat yang Telami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas*

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
					Tahun 2013		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	persen	10	10		11		12		13		14		14		
2.08.2.08.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja					15.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		0,00		16.000.000,00		65.000.000,00	DP3A&KB
		Cakupan PUS dgn Istri Usia Dibawah 20 Tahun	persen	6,04	6		5,95		5,9		5,85		5,8		5,8		
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	persen	258,33	275		283,33		283,33		291,67		291,67		291,67		
2.08.2.08.01.24	Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu - PADU					24.950.000,00		24.950.000,00		25.000.000,00		25.500.000,00		26.000.000,00		126.400.000,00	DP3A&KB
		Rata-rata jumlah anak perkeluarga	persen	3,46	3,18		3,17		3,15		3,05		2,97		2,97		
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	persen	100	100		100		100		100		100		100		
2.09	Perhubungan					2.304.162.023,00		2.568.873.935,50		2.760.761.329,05		2.976.837.461,96		3.239.521.208,15		13.850.155,957,66	
2.09.2.09.01	Dinas Perhubungan																
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	85	90	417.076.713,00	95	458.784.384,30	100	504.662.822,73	100	555.129.105,00	100	610.642.015,50	100	2.546.295,040,54	Dishub
2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana perhubungan	persen	60	70	790.974.670,00	75	864.367.847,20	80	889.804.631,92	85	922.785.095,11	90	984.063.604,62	90	4.451.995,848,86	Dishub



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.09.2.09.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin PNS (atribut)	persen	75	100		100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	160.000.000,00	Dishub
2.09.2.09.01.06	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM yang dilatih	orang	8	2		2		2		2		2		10	0,00	Dishub
2.09.2.09.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B	15.000.000,00	B	16.500.000,00	B	18.150.000,00	B	19.965.000,00	A	21.961.500,00	A	91.576.500,00	Dishub
2.09.2.09.01.15	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan					162.066.237,00		178.272.860,70		196.100.146,77		215.710.161,45		237.281.177,59		989.430.583,51	Dishub
		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	114.624	116.916		119.255		121.640		124.073		126.554		126.554		
		Jumlah Pelabuhan Laut dan Penyeberangan /Terminal Bis dan Barang	buah	8	8		9		9		10		11		11		
		Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	173.268	174.890		176.749		178.624		180.526		182.444		182.444		
2.09.2.09.01.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor					79.370.589,00		87.307.647,90		96.038.412,69		105.642.253,96		116.206.479,35		484.565.382,90	Dishub
		Persentase Uji KIR angkutan umum	Persen	56,8	58,48		60,21		61,96		63,79		65,67		65,67		
		Jumlah Uji KIR angkutan umum	Unit	3.882	3.858		3.976		4.056		4.137		4.220		4.220		
2.09.2.09.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					817.173.814,00		898.891.195,40		988.780.314,94		1.087.658.346,43		1.196.424.181,08		4.988.927.851,85	Dishub



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Tonjoknya Aceh Barat yang Telam, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas*

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rasio ijin trayek	Rasio	0,00003	0,00003		0,00003		0,00004		0,00005		0,00005		0,00005		
		Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,0029	0,0029		0,0030		0,0031		0,0032		0,0030		0,0030		
2.09.2.09.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					22.500.300,00		24.750.000,00		27.225.000,00		29.947.500,00		32.942.250,00		137.364.750,00	Dishub
		Pemasangan Rambu-rambu	Persen	76,9	76,9		79,29		81,67		84,05		86,43		86,43		
2.10	Komunikasi & Informatika					2.176.404.072,00		1.943.121.672,00		1.990.167.693,00		1.978.728.762,92		1.969.964.411,92		10.058.386.611,84	
2.10.2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian																
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	75	80	343.389.434,00	85	333.303.162,00	90	326.964.247,00	95	320.752.111,00	100	314.935.219,00	100	1.639.344.173,00	Diskominfo
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	30	50	256.886.250,00	60	128.860.525,00	70	128.821.721,00	80	128.482.116,00	90	128.145.907,00	90	771.196.519,00	Diskominfo
2.10.2.10.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	A	CC	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	75.000.000,00	Diskominfo
2.10.2.10.01.18	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Jumlah Penerbitan Tabloid	Kali/Tahun	0	5	94.000.000,00	5	91.200.000,00	5	96.115.680,00	5	93.116.870,00	5	92.046.026,00	25	466.478.576,00	Diskominfo
2.10.2.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					405.000.000,00		333.600.000,00		351.581.040,00		340.511.711,00		336.694.676,00		1.767.487.427,00	Diskominfo
		Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	75	80		82		84		86		88		88		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah Media Komunikasi Publik (TV, Radio, Website)	buah	2	2		2		2		2		2		2		
		Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	40	45		89,5		90		90,3		90,7		90,7		
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	85	89		89,5		90		90		90,7		90,7		
		Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	75	80		82		89,5		90		90,3		90,3		
2.10.2.10.01.16	Program pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan komunikasi					24.818.500,00	89,5	14.893.625,00	90	14.893.625,00	90,3	14.893.625,00	90,7	14.893.625,00	90,7	84.393.000,00	Diskominfo
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	NA	20		40		60		80		90		90		
		Jumlah Aparatur Persandian yang disertifikasi oleh BSSN	orang	NA	NA		2		3		4		5		5		
		Rasio OPD yang menggunakan Persandian untuk Dokumen	Rasio	NA	0,11		0,32		0,43		0,64		1,00		1,00		
2.10.2.10.01.17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi					27.511.000,00		66.648.960,00		70.241.338,00		66.049.809,00		67.267.280,00		299.718.387,00	Diskominfo
		Jumlah tenaga teknis yang dilatih TIK	orang	NA	100		100		100		100		100		100		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kelompok	0	12		12		12		12		12		12		
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di gampong	Kelompok	5	25		50		75		100		125		125		
2.10.2.10.01.20	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					100.498.888,00		157.309.000,00		160.174.450,00		163.183.173,00		166.342.331,00		747.507.842,00	Diskominfo
		Persentase sistem informasi layanan publik yang terupdate	Persen	NA	48		48		48		48		48		48		
		Persentase OPD yang menerapkan E-Government	Persen	NA	NA		20		40		60		80		80		
		Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	Website	1	1		1		1		1		1		1		
2.10.4.01.03	Sekretariat Daerah																
2.10.4.01.03.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah media informasi Pemerintah Daerah yang dapat diakses Publik	Jumlah	3	4	909.300.000,00	4	802.306.400,00	4	826.375.592,00	4	834.639.347,92	4	834.639.347,92	4	4.207.260.687,84	Setdakab
2.11.3.06.01	Keperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					319.725.000,00		324.835.000,00		330.456.000,00		336.639.100,00		343.440.510,00		1.655.095.610,00	
2.11.3.06.01.16	Dinas Perdagangan																
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM					51.100.000,00		56.210.000,00		61.831.000,00		68.014.100,00		74.815.510,00		311.970.610,00	Disdag
		Jumlah UKM yang dibina	UKM	2419	2419		2419		2419		2419		2419		2419		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	76,44	79,26		82,08		84,9		87,72		90,54		90,54		
		Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	50	58		66		74		82		90		90		
		Persentase BPR/LKM aktif	Persen	15	16		17		18		19		20		20		
2.11 3.06.01 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Persentase	62,5	68,16	268.625.000,00	73,82	268.625.000,00	79,48	268.625.000,00	85,14	268.625.000,00	90,8	268.625.000,00	90,8	1.343.125.000,00	Disdag
2.12	Penanaman modal					1.263.505.518,00		1.039.305.067,00		1.068.089.245,00		1.040.553.109,00		1.026.875.199,00		5.438.328.138,00	
2.12 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu																
2.12 2.12.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80	80	257.804.820,00	85	252.648.724,00	90	247.595.745,00	90	242.643.834,00	95	237.790.958,00	95	1.238.484.085,00	DPMPTSP
2.12 2.12.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80	90	178.474.748,00	90	91.363.431,00	90	91.149.796,00	90	89.948.298,00	90	89.758.816,00	90	540.695.089,00	DPMPTSP
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM yang terampil di bidang pelayanan perizinan.	orang	12	0		12	30.000.000,00	12	29.000.000,00	12	29.000.000,00	12	28.000.000,00	12	116.000.000,00	DPMPTSP
2.12 2.12.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	75.000.000,00	DPMPTSP
2.12 2.12.01 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					310.063.000,00		390.052.000,00		374.238.594,00		398.053.276,00		422.857.766,00		1.895.264.636,00	DPMPTSP



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Milyar/Rupiah	4,283	4,29		4,318		4,32		4,326		4,329		4,329		
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Trilyun)	Trilyun	3,808	3,815		3,83		3,842		3,848		3,852		3,852		
2.12 2.12.01 16	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan					137.750.950,00		132.240.912,00		139.368.697,00		135.020.594,00		133.467.659,00		677.848.612,00	DPMPTSP
		Persentase izin yang diproses sesuai dengan SOP	persen	97,99	99,63		99,65		99,65		99,65		99,65		99,65		
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	indeks	84	84		84		84		84		84		84		
2.12 2.12.01 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					99.937.000,00		98.000.000,00		96.736.409,00		100.887.307,00		40.000.000,00		435.560.716,00	DPMPTSP
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	15	17		18		19		20		21		21		
2.12 2.12.01 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi					64.475.000,00		30.000.000,00		75.000.000,00		30.000.000,00		60.000.000,00		259.475.000,00	DPMPTSP
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Milyar/Rupiah	4,283	4,29		4,318		4,32		4,326		4,329		4,329		
2.12 4.01.03	Sekretariat Daerah							0,00		0,00		0,00		0,00			
2.12 4.01.03 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Adanya Direktur PDAM dan Paket Beusaree	Jumlah	0	2	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	Setdakab
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga					1.752.141.327,00		1.238.236.827,00		1.981.475.080,00		1.280.458.181,00		2.432.151.034,00		8.684.462.449,00	



Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
2.13 3.02.01	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga																
2.13 3.02.01 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan					204.066.327,00		204.066.327,00		203.656.544,00		205.693.109,00		205.693.109,00		1.023.175.416,00	Disparbudpora
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	24,9	25,9		26,9		27,9		28,9		29,9		29,9		
2.13 3.02.01 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					1.215.325.000,00		697.381.500,00		1.434.175.866,00		725.485.975,00		725.485.975,00		4.797.854.316,00	Disparbudpora
		Cakupan pembinaan olahraga	persen	13,04	15,04		17,04		19,04		21,04		23,04		23,04		
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	persen	58,82	58,82		77,20		77,20		84,55		84,55		84,55		
		Cakupan pembinaan atlet muda	persen	20,65	20,65		30,43		26,63		25,54		37,5		37,5		
		Jumlah atlet berprestasi	orang	7	8		9		10		11		12		12		
2.13 3.02.01 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Gedung Olah Raga	unit	0	1	220.000.000,00	1	225.000.000,00	1	230.000.000,00	1	235.000.000,00	1	725.485.975,00	1	1.635.485.975,00	Disparbudpora
2.13 3.02.01 22	Program Perayaan Hari Besar Nasional	Jumlah Perayaan hari kebudayaan dan olah raga	kali	1	1	62.750.000,00	1	61.789.000,00	1	63.642.670,00	1	64.279.097,00	1	725.485.975,00	5	977.946.742,00	Disparbudpora
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Wirausaha Muda	persen	16,7	20	50.000.000,00	22	50.000.000,00	24	50.000.000,00	26	50.000.000,00	28	50.000.000,00	28	250.000.000,00	
2.14	Statistik					19.000.000,00		19.012.009,00		19.582.360,00		19.778.183,60		19.778.183,60		97.150.727,20	
2.14 4.01.03	Sekretariat Daerah																



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.14 4.01.03 15	Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	70,81	71	19.000.000,00	72	19.012.000,00	73	19.582.360,00	74	19.778.183,60	75	19.778.183,60	75	97.150.727,20	Setdakab
2.15	Persandian					31.710.000,00		45.600.000,00		48.057.840,00		46.558.435,00		46.023.013,00		217.949.288,00	
2.10.2.1 0.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian																
2.10.2.10 .01.	Program Pengamanan Informasi Daerah					31.710.000,00		45.600.000,00		48.057.840,00		46.558.435,00		46.023.013,00		217.949.288,00	Diskominfo
		persentase Persandian terhadap informasi yang harus diamankan	Persen	NA	100		100		100		100		100		100		
		Rasio Dokumen Yang diamankan	Rasio	NA	0,11		0,32		0,43		0,64		1,00		1,00		
2.16	Kebudayaan					5.017.053.283,00		5.928.952.200,00		3.510.449.712,00		4.927.630.148,00		4.901.305.148,00		24.285.390.491,00	
2.16 2.16.01	Sekretariat Majelis Adat Aceh																
2.16 2.16.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	72	92	688.597.001,00	94	710.270.000,00	96	730.250.000,00	98	760.825.000,00	100	813.300.000,00	100	3.703.242,001,00	MAA
2.16 2.16.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	55	60	75.206.282,00	70	76.050.000,00	75	79.900.000,00	80	66.100.000,00	85	92.300.000,00	85	389.556.282,00	MAA
2.16 2.16.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP MAA	Huruf	A	A	15.000.000,00	A	15.000.000,00	A	15.000.000,00	A	15.000.000,00	A	15.000.000,00	A	75.000.000,00	MAA
	Program Pembinaan	Jumlah Pelatihan Adat	kali	4	0	-	6	145.000.000,00	6	250.000.000,00	6	240.000.000,00	6	280.000.000,00	24	915.000.000,00	MAA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
	Lembaga Adat dan Tokoh Adat																
2.16 2.16.01 19	Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Jumlah Masyarakat yang mengikuti pelatihan hukum adat	orang	250	200	479.000.000,00	250	85.000.000,00	250	90.000.000,00	250	165.000.000,00	250	100.000.000,00	250	919.000.000,00	MAA
	Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh						310.000.000,00		250.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		1.200.000,00	MAA	
		Jumlah gampong yang menerapkan peradilan adat	gampong	0	0		10		15		20		25		25		
		jumlah sengketa adat yang diselesaikan/dirinda klan/juti secara damai	kasus	0	0		25		30		35		45		135		
2.16 3.02.01	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga																
2.16 3.02.01 15	Program Pengembangan Nilai Budaya					2.650.770.000,00		2.730.770.000,00		865.138.546,00		2.730.770.000,00		2.650.770.000,00		11.528.218,546,00	Disparbudpora
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	8	8		9		9		10		10		11		
	Program Pengembangan Nilai - Nilai Sejarah					551.330.000,00		1.251.330.000,00		606.463.000,00		0,00		0,00		2.409.123,00	Disparbudpora
		Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu	Jumlah	13	13		13		13		13		13		13		
2.16 3.02.01 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	sanggar	17	17	557.150.000,00	20	605.532.200,00	20	623.698.166,00	20	629.935.148,00	20	629.935.148,00	20	3.046.250,662,00	Disparbudpora



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Telawi, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.17	Perpustakaan					941.361.683,00		1.168.706.544,30		1.210.820.428,50		1.254.899.216,63		1.170.852.221,20		5.746.700.093,63	
2.17 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																
2.17 2.17.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	70	80	211.362.980,00	85	215.590.239,60	90	219.902.044,00	95	224.300.085,00	100	228.786.087,00	100	1.099.941.435,60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 2.17.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	65	68	148.310.203,00	70	238.093.379,70	75	240.954.313,50	80	243.823.856,63	90	116.702.095,20	90	987.883.848,03	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 2.17.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	CC	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.036.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 2.17.01 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					566.688.500,00		700.022.925,00		735.024.071,00		771.775.275,00		810.364.039,00		3.583.874.810,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,37	0,44		0,47		0,51		0,55		0,58		0,58		
		Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (orang)	orang	25,341	26,608		27,875		29,142		30,409		31,676		31,676		
		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buku	12,579	13,208		13,837		14,466		15,095		15,724		15,724		
		Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	7	7		9		11		13		15		15		
		Layanan pustaka digital	sistem	0	1		1		1		1		1		1		
2.18	Kearsipan					175.411.855,00		186.612.300,00		184.251.751,00		196.464.337,00		206.987.535,00		949.727.798,00	
2.18 2.17.01	Dinas Perpustakaan																

Handwritten signature

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	dan Kearsipan																
2.18 2.17.01 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	4	5	32.110.000,00	10	38.902.500,00	15	40.847.625,00	20	42.890.006,00	25	45.034.507,00	25	199.784.638,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 2.17.01 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen arsip yang dilestarikan	dokumen	2400	2640	54.950.855,00	2910	56.988.750,00	3180	59.838.188,00	3610	62.830.097,00	3840	65.971.602,00	3840	300.579.492,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 2.17.01 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah arsip yang di pelihara	box	8000	8800	21.375.000,00	9700	22.443.750,00	10.600	23.565.938,00	11.700	24.744.234,00	12.800	25.981.446,00	12.800	118.110.368,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 2.17.01 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam pengelolaan arsip secara baku	OPD	2	3	66.976.000,00	4	68.277.300,00	5	60.000.000,00	6	66.000.000,00	7	70.000.000,00	7	331.253.300,60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Urusan Pilihan					47.593.282,934,00		28.788.531,188,49		30.127.733,206,17		29.670.731,106,47		31.290.787,096,07		167.471.065,531,20	
3.01	Kelautan dan perikanan					5.367.112,000,00		3.094.527,000,00		3.192.556,800,00		3.187.252,850,00		3.208.238,500,00		18.049.687,150,00	
3.01.3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan																
3.01.3.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	85	90	402.995.000,00	95	368.553.500,00	95	366.409.900,00	100	353.811.850,00	100	348.209.800,00	100	1.839.980,050,00	DKP
3.01.3.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80	82	2.178.361.000,00	84	110.684.500,00	86	133.247.900,00	88	104.100.000,00	90	124.397.200,00	90	2.650.790,600,00	DKP
3.01.3.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	A	15.000.000,00	A	15.000.000,00	A	15.000.000,00	A	15.000.000,00	A	15.000.000,00	A	75.000.000,00	DKP



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.01.3.01.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan					805.884.000,00		554.784.000,00		545.000.000,00		660.418.000,00		441.270.000,00		3.007.356.000,00	DKP
		Produksi Perikanan (ton)	Ton	20,412	20,417		20,420		20,423		20,427		20,432		102,119		
		Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	Ton	0	335		338		341		343		345		345		
		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	Persen	40,95	48,57		51,43		52,67		51,25		51,76		51,76		
3.01.3.01.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap					1.473.872.000,00		1.511.032.000,00		1.551.032.000,00		1.491.032.000,00		1.726.032.000,00		7.753.000.000,00	DKP
		Produksi Perikanan ((ton)	Ton	20,412	20,417		20,420		20,423		20,427		20,432		20,432		
		Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	0	2.948		2.959		2.980		2.985		3.000		14,872		
3.01.3.01.01.15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Cakupan bina kelompok nelayan	persen	40,95	48,61	130.500.000,00	51,39	105.792.000,00	52	125.000.000,00	52,56	108.000.000,00	53,75	106.773.000,00	53,75	576.065.000,00	DKP
3.01.3.01.01.19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	kg/kapita/tahun	49,5	49,51		49,52	50.000.000,00	49,53	60.000.000,00	49,54	50.000.000,00	49,55	50.000.000,00	247,65	210.000.000,00	DKP
3.01.3.01.01.17	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya laut	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	kg/kapita/tahun	49,5	49,51	112.500.000,00	49,52	98.145.000,00	49,53	99.200.000,00	49,54	108.500.000,00	49,55	101.250.500,00	247,65	519.595.500,00	DKP
3.01.3.01.01.27	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Jumlah nelayan, Petani Pembudidaya dan pengolah yang dilatih	Orang	140	280	92.000.000,00	420	92.000.000,00	560	91.920.000,00	700	91.920.000,00	840	91.920.000,00	840	459.760.000,00	DKP



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.01.3.01.01.23	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Kelautan	umlah nelayan, Petani Pembudidaya dan pengolah yang dilatih	Orang	140	280	56.000.000,00	420	53.536.000,00	560	55.747.000,00	700	54.471.000,00	840	53.386.000,00	840	273.140.000,00	DKP
3.01.3.01.01.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi Perikanan (ton)	Ton	20.412	20.417	100.000.000,00	20.420	135.000.000,00	20.423	150.000.000,00	20.427	150.000.000,00	20.432	150.000.000,00	102.119	685.000.000,00	DKP
3.02	Pariwisata					2.593.288,175,00		2.342.260.804,00		2.344.257,064,00		2.344.942,447,00		2.344.942,447,00		11.969.690,937,00	
3.02.3.02.01	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga																
3.02.3.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80	85	438.595.507,00	85	377.755.000,00	90	377.755.000,00	90	377.755.000,00	100	377.755.000,00	100	1.949.615,507,00	Disparbudpora
3.02.3.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	65	70	412.386.139,00	75	232.507.275,00	80	232.507.275,00	85	232.507.275,00	90	232.507.275,00	90	1.342.415,239,00	Disparbudpora
3.02.3.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	75.000.000,00	Disparbudpora
3.02.3.02.01.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	PAD sektor pariwisata	Persen	0,000128	0,000117	76.850.000,00	0,0001123	66.542.000,00	0,000107	68.538.260,00	0,000102	69.223.643,00	0,000098	69.223.643,00	0,000098	350.377.546,00	Disparbudpora
3.02.3.02.01.16	Program pengembangan destinasi pariwisata					1.650.456.529,00		1.650.456.529,00		1.650.456.529,00		1.650.456.529,00		1.650.456.529,00		8.252.282,645,00	Disparbudpora
		Kunjungan wisata	orang	1099	1099		1118		1055		1332		1500		1500		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		jumlah Destinasi Wisata Spiritual yang dikembangkan	lokasi	2	2		2		2		2		2		10		
3.03	Pertanian					24.659.549,524,00		7.295.453.263,67		8.169.378.716,90		7.527.365.042,32		7.581.484.724,98		55.233.231,271,87	
2.03.2.03.01	Dinas Pangan																
2.03.2.03.01.02	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Distribusi dan akses pangan	persen	90	100	113.700.100,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	513.700.100,00	Dinas Pangan
3.03.3.03.01	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura																
3.03.3.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	100	100	449.608.765,00	100	432.954.664,00	100	432.954.664,00	100	432.954.664,00	100	432.954.664,00	100	2.181.427,421,00	DPTPH
3.03.3.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100	100	203.661.240,00	100	113.018.150,00	100	113.018.150,00	100	113.018.150,00	100	113.018.150,00	100	655.733.840,00	DPTPH
3.03.3.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	502	502	31.650.000,00	502	19.748.715,00	502	20.341.176,45	502	20.544.588,21	502	20.544.588,21	502	112.829.067,87	DPTPH
3.03.3.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B	67.767.620,00	B	77.454.420,00	B	79.328.052,60	B	79.971.333,13	B	79.971.333,13	B	384.492.758,86	DPTPH
3.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					303.370.100,00		385.207.724,86		1.096.763.956,61		400.731.596,17		400.731.596,17		2.586.804,973,81	DPTPH
		Nilai Tukar Petani	Persen	104,12	104,42		104,72		105,02		105,32		105,62		105,62		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		Rasio kelompok tani terhadap petani	Rasio	4	4,04		4,08		4,12		4,16		4,20		4,20		
3.03.3.03.01.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					4.000.000.000,00		2.459.680.144,60		2.533.470.548,94		2.600.545.109,25		2.665.033.184,94		14.258.728.987,73	DPTPH
		Jumlah komoditas yang bersertifikat	Jenis komoditi	1	2		3		3		3		3		3		
		Indeks Penanaman (IP)	Indeks	1,53	1,56		1,59		1,62		1,65		1,68		1,68		
3.03.3.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					1.264.474.475,00		542.086.336,21		560.176.406,30		566.959.940,76		567.819.678,73		3.501.516.837,00	DPTPH
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	5,22	5,4		5,6		5,8		5,9		6,0		6,0		
		Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura															
		Padi	Ton	99,750	105,633		110,914		116,460		122,283		128,397		128,397		
		Jagung	Kg	385,64	395		405		415		425		435		435		
		Kedelai	Kg	2,03	2,09		2,15		2,21		2,28		2,35		2,35		
		Kacang Tanah	Kg	749,69	772		795		819		843		869		869		
		Ubi Kayu	Kg	753,84	776		799		823		848		873		873		
		Durian	Kg	29,670	30,560		31,477		32,422		33,394		34,396		34,396		
		Rambutan	Kg	5,851	6,026		6,207		6,393		6,585		6,783		6,783		
		Langsat	Kg	4,824	4,969		5,118		5,272		5,43		5,593		5,593		
		Cabai Besar	Kg	623	642		661		681		702		723		723		
		Semangka	Kg	779	802		826		851		877		903		903		
3.03.3.03.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan					1.041.910.000,00		357.036.000,00		358.747.080,00		359.334.550,80		359.334.550,80		2.476.362.181,60	DPTPH



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	452	527		553		581		610		640		640		
		Rasio penyuluh terhadap kelompok tani	Rasio	1:06	1:07		1:08		1:09		1:10		1:10		1:10		
3.03.3.03.02	Dinas Perkebunan dan Peternakan																
3.03.3.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80	85	385.183.230,00	90	330.583.030,00	95	330.583.030,00	95	330.583.030,00	100	330.583.030,00	100	1.707.515.350,00	Disbunnak
3.03.3.03.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	75	80	143.279.274,00	85	216.694.385,00	90	216.694.385,00	95	216.694.385,00	100	216.694.385,00	100	1.010.056.814,00	Disbunnak
3.03.3.03.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	A	15.000.000,00	A	15.000.000,00	A	15.000.000,00	A	75.000.000,00	Disbunnak
3.03.3.03.02.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jangkauan hasil produksi ke luar daerah	Lokal, regional, nasional	regional	regional	327.932.500,00	regional	347.017.500,00	regional	342.179.140,00	regional	349.291.529,00	regional	349.291.529,00	regional	1.715.712.198,00	Disbunnak
3.03.3.03.02.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					14.868.940.149,00		545.644.400,00		562.013.732,00		567.633.869,00		567.633.869,00		17.111.866.019,00	Disbunnak
		Produksi sektor perkebunan (Kakao)	Kg	9,2	9,2		9,2		8,9		8,7		8,7		8,7		
		Produksi sektor perkebunan (Sawit)	Kg	59.615,31	61.415,31		63.215,31		65.015,31		66.815,31		68.615,31		68.615,31		
		Produksi sektor perkebunan (Karet)	Kg	16.884,48	17.384,48		17.304,48		18.384,48		19.884,48		20.884,48		20.884,48		
		Produksi sektor perkebunan (Kelapa Dalam)	Kg	1.273	1.284		1.291		1.299		1.308		1.318		1.318		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Tercapainya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
					Tahun 2010		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Produksi sektor perkebunan (Pinang Betara)	Kg	NA	NA		5.739,80		5.739,80		5.739,80		5.739,80		5.739,80		
3.03 3.03.02 21	Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					328.185.561,00		236.245.489,00		243.332.853,00		235.371.753,00		233.444.022,00		1.276.579.678,00	Disbunnak
		Angka Kematian Ternak	Ekor	277	-		29.247		29.832		30.429		31.038		120.546,00		
		Jumlah kasus penyakit ternak	Kasus	18	0		0		0		0		0		0		
		persentase kasus penyakit ternak yang di tangani	persen	72	100		100		100		100		100		100		
		Jumlah populasi ternak yang di vaksinasi	Ekor	14.227	22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		
3.03 3.03.02 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					669.046.510,00		671.916.547,00		708.132.849,00		696.039.103,00		678.149.655,00		3.413.284.664,00	Disbunnak
		Jumlah populasi ternak besar															
		Jumlah populasi ternak sapi	Ekor	5462	5.571		5.682		5.795		5.910		6.028		28.986		
		Jumlah populasi ternak kerbau	Ekor	23.173	23.636		24.108		24.590		25.081		25.582		122.997		
		Jumlah populasi ternak Kecil															
		daging	ton	569	581		592		604		616		629		3.022		
		unggas	Ekor	229,011	233,591		238,262		243,027		247,887		252,844		1.215.611		
		produktivitas daging hasil penggemukan	Kg	100 ke 150	100 ke 150		100 ke 150		100 ke 150		100 ke 150		100 ke 150		100 ke 150		
3.03 3.03.02 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase daging yang ASUH untuk di konsumsi masyarakat	persen	100	100	145.840.000,00	100	120.165.758,00	100	126.642.693,00	100	122.691.441,00	100	121.280.489,00	100	636.620.381,00	
3.03 3.03.02 15	Program peningkatan Kesejahteraan Petani					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		1.500.000.000,00	Disbunnak



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Telami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Nilai Tukar Petani	Persen	104,12	104,42		104,72		105,02		105,32		105,62		105,62		
		Rasio kelompok tani terhadap petani	Rasio	4	4,04		4,08		4,12		4,16		4,20		4,20		
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase ketersediaan data dan peternakan	persen	100			100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	115.000.000,00	Disbunnak
3.04	Kehutanan					352.750.000,00		370.387.500,00		388.906.875,00		408.352.218,75		428.769.829,69		1.949.166.423,44	
2.05.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup																
2.05.2.05.01.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Penanganan lahan kritis	Persen	20	25	192.100.000,00	25	201.705.000,00	25	211.790.250,00	25	222.379.762,50	25	233.498.750,63	25	1.061.473.763,13	DLH
2.05.2.05.01.09	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase Penanganan Konflik	Persen	100	100	160.650.000,00	100	168.682.500,00	100	177.116.625,00	100	185.972.456,25	100	195.271.079,06	100	887.692.660,31	DLH
3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral					11.780.768,00,00		11.780.768,00,00		11.780.768,00,00		11.780.768,00,00		11.780.768,00,00		58.903.840,00,00	
3.05.1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
3.05.1.04.01.17	program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan					11.780.768,00,00		11.780.768,00,00		11.780.768,00,00		11.780.768,00,00		11.780.768,00,00		58.903.840,00,00	Dinas PERKIM
		Persentase subsidi listrik masyarakat miskin	Persen	80,18	84,18		86,18		92,18		96,18		100		100		
		Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	99,9	100		100		100		100		100		100		
		Rasio ketersediaan daya listrik	rasio	76,4	75,1		75,4		75,6		75,7		76		76		

[Handwritten signature]



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
3.06	Perdagangan					1.617.446,72 6,00		1.331.947.991,82		1.455.578,25 3,27		1.588.956,32 6,40		1.734.366,9 05,40		7.728.296,20 2,89	
3.06 3.06.01	Dinas Perdagangan																
3.06 3.06.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	75	80	381.676.441,0 0	80	418.744.932,00	85	460.619.425,0 0	90	506.681.368,0 0	95	557.349.505,00	95	2.325.071,67 1,00	Disdag
3.06 3.06.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	75	78	226.095.285,0 0	80	277.132.878,00	84	304.846.166,0 0	88	335.330.782,0 0	90	368.863.861,00	90	1.512.268,97 2,00	Disdag
3.06 3.06.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	BB	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,0 0	B	75.000.000,0 0	Disdag
3.06 3.06.01 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					764.225.000,0 0		378.647.500,00	19	416.512.250,0 0	19,41	458.163.475,0 0	19,82	503.979.823,00	19,82	2.521.526,04 8,00	Disdag
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	17,77	18,50		18,77		19,00		19,20		19,88		19,88		
		Pengendalian Barang Dagangan yang beredar dari bahan Berbahaya	Jumlah	4	4		4		4		4		4		4		
		Pengendalian Harga Barang Dagangan	Jumlah	4	4		4		4		4		4		4		
		Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai	0	0,6		1,2		1,8		2,4		2,4		2,4		
3.06 3.06.01 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersediaanya sarana dan prasarana perdagangan bagi pedagang	Kecamatan	41 Lost, 220 Kios dan 63 Dasar an	41 Lost, 220 Kios dan 63 Dasar an	72.300.000,00	41 Lost, 220 Kios dan 63 Dasar an	72.383.151,82	41 Lost, 220 Kios dan 63 Dasar an	74.554.646,37	41 Lost, 220 Kios dan 63 Dasar an	75.300.192,84	41 Lost, 220 Kios dan 63 Dasar an	75.300.192,84	41 Lost, 220 Kios dan 63 Dasar an	369.838.183,87	Disdag



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.06 3.06.01 19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang Usaha Informal	persen	18,96	18,96	115.650.000,00	18,96	127.215.000,00	20,00	139.936.500,00	21	153.930.150,00	22	169.323.165,00	22	706.054.815,00	Disdag
4.01.4.0 1.03	Sekretariat Daerah																
4.01.4.01 .03.10	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Terkendalinya Inflasi Daerah	Jumlah	4	4	42.500.000,00	4	42.824.530,00	4	44.109.265,90	4	44.550.358,56	4	44.550.358,56	20	218.534.513,02	Setdakab
3.07 3.07 3.06.01	Perindustrian Dinas Perdagangan					458.025.000,00		2.018.217.500,00		2.218.879.250,00		2.263.067.175,00		3.637.442.703,00		10.595.631.628,00	
3.07 3.06.01 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					241.000.000,00		265.100.000,00		291.610.000,00		320.771.000,00		352.848.100,00		1.471.329.190,00	Disdag
		Jumlah IKM yang di bina	IKM	2431	50		5,5		6,0		6,5		7,0		7,2		
		Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	6,96	8,59		10,22		11,85		13,48		15,11		15,11		
		Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	persen	0,00	0,67		0,67		0,70		0,75		0,75		0,75		
3.07 3.06.01 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					121.925.000,00		134.117.500,00		147.529.250,00		162.282.175,00		178.510.393,00		744.364.318,00	Disdag
		Pertumbuhan industri	persen	20,81	22,64		24,47		26,30		28,13		29,96		29,96		
		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	persen	1,92	2,00		2,00		2,00		2,10		2,20		2,20		
3.07 3.06.01 19	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah Industri yang hasil produksinya dapat dijual Keluar Kabupaten Aceh Barat	persen	6,96	5	95.100.000,00	6	1.619.000.000,00	6	1.779.740.000,00	5	1.780.014.000,00	5	3.106.984.210,00	27	8.379.938.210,00	Disdag
3.08	Transmigrasi					764.343.509,00		554.969.129,00		577.408.247,00		570.027.047,00		574.773.986,00		3.041.521.918,00	

[Handwritten signature]

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.01.3.08.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja																
2.01.3.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	85	86	371.840.367,00	87	259.595.429,00	88	254.403.521,00	89	249.315.450,00	90	282.338.652,00	90	1.417.493.419,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.3.08.01.02	Program Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80	85	233.483.142,00	85	142.114.500,00	90	140.693.355,00	95	139.286.421,00	95	137.893.557,00	100	793.470.975,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.3.08.01.03	Program Peningkatan Disiplin aparatur	persentase kedisiplinan PNS	persen	100	0		0	0,00	100	21.600.000,00	100	23.760.000,00	0	0,00	100	45.360.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.3.08.01.06	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	16.500.000,00	B	15.000.000,00	B	76.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.3.08.01.16	Program Transmigrasi Lokal	Persentase transmigran swakarsa	Persen	13,8	13,9	144.020.000,00	13,10	138.259.200,00	13,21	145.711.371,00	13,25	141.165.176,00	13,45	139.541.777,00	13,45	708.697.524,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					53.951.609,048,96		50.904.563,271,04		51.472.366,963,41		52.557.249,715,14		52.564.410,868,71		261.450.199,867,26	
4.01	Administrasi Pemerintahan					27.550.572,309,00		25.163.477,698,37		25.381.334,949,93		25.419.568,519,79		25.419.568,519,79		128.934.521,996,87	
4.01.4.01.03	Sekretariat Daerah																
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	85	86	6.791.127.000,00	88	6.801.141.976,00	90	6.801.141.976,00	95	6.801.141.976,00	100	6.801.141.976,00	100	33.995.694,904,00	Setdakab



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas*

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.01.4.01.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					91.057.500,00		91.115.010,00		93.848.460,30		94.786.944,90		94.786.944,90		465.594.860,10	Setdakab
		Persentase kepatuhan PNS memakai pakaian dinas	Persen	80	100		100		100		100		100		100		
		Jumlah pakaian yang diadakan	Paket	0	6		6		6		6		6		30		
4.01.4.01.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah					1.512.200.000,00		1.125.510.400,00		1.159.275.712,00		1.170.868.469,12		1.170.868.469,12		6.138.723.050,24	Setdakab
		Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat	Jumlah	60	70		75		95		80		80		80		
		Persentase Rapat Pemantapan dan Koordinasi Pemerintahan	Persen	4x / 100%	4x / 100%		4x / 100%		4x / 100%		4x / 100%		4x / 100%		4x / 100%		
		Tersedianya Jaminan Kesehatan kepada Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah	NA	2		2		2		2		2		2		
4.01.4.01.03.27	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Persentase penataan daerah otonomi baru dengan baik	Persen	70	80	723.000.000,00	85	560.854.000,00	90	575.679.620,00	95	583.456.416,20	100	583.456.416,20	100	3.026.446.452,40	Setdakab
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	75	80	2.849.351.312,00	85	2.966.400.000,00	85	2.966.400.000,00	90	2.966.400.000,00	95	2.966.400.000,00	95	14.714.991.312,00	Setdakab
4.01.4.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					869.200.000,00		729.666.301,00		757.556.290,30		759.071.852,93		759.071.852,93		3.874.566.296,89	Setdakab
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61,77	62		63		64		65		66		66		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	75,39	76		77		78		79		80		80		
		Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	OPD	-	6		6		6		6		6		6		
4.01.4.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					491.600.000,00		587.470.800,00		605.094.924,00		611.145.873,24		611.145.873,24		2.906.457,470,48	Setdakab
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		BB		BB		BB		BB		
		Nilai AKIP Kabupaten	Huruf	B	BB		BB		BB		A		A		A		
4.01.4.01.03.31	Program Peningkatan Pelayanan Publik					33.250.000,00		33.271.000,00		34.269.130,00		34.611.821,30		34.611.821,30		170.013.772,60	Setdakab
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	14,89	17,02		19,15		21,20		23,4		25,53		25,53		
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.4.01.03.28	Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional Di Kabupaten Aceh Barat	Jumlah Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Di Kabupaten Aceh Barat	Kali	6	7	765.555.000,00	7	633.955.140,00	7	652.973.794,20	7	659.503.532,14	7	659.503.532,14	7	3.371.490,998,48	Setdakab
4.01.4.01.03.29	Program Pembinaan Hukum Masyarakat					655.041.937,00		605.424.069,25		623.586.791,33		629.822.659,24		629.822.659,24		3.143.698,116,06	Setdakab
		Jumlah penyuluhan dan bimtek hukum	Jumlah	2	2		2		2		2		2		10		
		Jumlah kasus hukum yang didampingi (litigasi)	Kasus	9	40		45		50		55		60		250		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Telawi, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		persentase kasus hukum yang didampingi (litigasi)	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Jumlah kasus hukum yang didampingi (Non litigasi)	Kasus	51	55		60		65		70		75		325		
		persentase kasus hukum yang didampingi (Non litigasi)	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
4.014.01.03.30	Program Pemantapan Produk Hukum Daerah					150.000.000,00		139.738.200,00		143.930.346,00		145.369.649,46		145.369.649,46		724.407.844,92	Setdakab
		Jumlah produk hukum	SK	708	750		800		850		900		950		4250		
			Qanun	16	16		18		18		20		25		97		
			Perbub	97	97		98		98		98		100		491		
4.01.4.01.04	Sekretariat DPRK																
4.01.4.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	85	88	5.184.437.906,00	89	4.655.218.505,00	90	4.655.218.505,00	93	4.655.218.505,00	95	4.655.218.505,00	95	23.805.311,926,00	Sekretariat DPRK
4.01.4.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	85	88	1.547.577.827,00	91	1.420.219.623,00	94	1.420.219.623,00	97	1.420.219.623,00	100	1.420.219.623,00	100	7.228.456,319,00	Sekretariat DPRK
4.01.4.01.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase disiplin PNS	persen	85	100	249.266.000,00	100	218.638.000,00	100	225.197.140,00	100	227.449.111,40	100	227.449.111,40	100	1.147.999,362,80	Sekretariat DPRK
4.01.4.01.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah SDM yang dilatih	orang	45	45	1.105.316.667,00	45	1.050.714.023,65	45	1.082.235.444,36	45	1.093.057.798,80	45	1.093.057.798,80	45	5.424.381,732,62	Sekretariat DPRK
4.01.4.01.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B	54.581.027,00	B	48.026.916,34	B	49.017.723,83	B	49.357.901,07	B	49.357.901,07	B	250.341.469,30	Sekretariat DPRK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
4.01 4.01.04 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					1.349.869.860,00		1.044.345.350,79		1.072.404.189,17		1.082.037.723,69		1.082.037.723,69		5.630.694.847,34	Sekretariat DPRK
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada		
		Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada		
		Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada		
	Program Peningkatan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK					125.000.000,00		35.647.500,00		36.716.925,00		37.084.094,25		37.084.094,25		271.532.613,50	Sekretariat DPRK



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Bertanggungjawab

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Tersedianya jaminan Kesehatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK	ada	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada		
1.01	Kecamatan																
4.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	75	80	1.483.056.439,00	85	1.333.068.123,65	90	1.313.360.078,35	95	1.292.705.120,10	100	1.292.705.120,10	100	6.714.894.981,20	12 Kecamatan
4.01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	70	80	1.340.043.834,00	85	903.052.759,69	90	933.208.277,36	95	926.259.447,95	100	926.259.447,95	100	5.028.823.766,94	12 Kecamatan
4.01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B	160.000.000,00	B	180.000.000,00	B	180.000.000,00	B	180.000.000,00	B	180.000.000,00	B	900.000.000,00	12 Kecamatan
4.02	Pengawasan					2.992.344.401,00		2.508.564.565,50		2.425.727.841,59		2.524.133.798,88		2.544.769.374,61		12.995.539.981,58	
4.01.4.01.03	Sekretariat Daerah																
4.01.4.01.03.08	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					185.500.000,00		128.331.000,00		132.180.930,00		133.502.739,30		133.502.739,30		713.017.408,60	Setdakab
		Persentase Penyelesaian Masalah Pemerintahan Mukim dan Gampong	persen	75	80		85		90		95		100		100		
		Persentase pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pembangunan Kab. Aceh Barat	persen	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.02	Inspektorat																
4.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	100	100	303.299.532,00	100	298.299.260,00	100	292.333.274,00	100	286.486.609,30	100	280.756.877,12	100	1.461.175.552,42	Inspektorat
4.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	70	80	120.092.900,00	86	65.223.477,00	90	64.571.242,23	96	63.925.529,81	100	63.206.274,51	100	377.099.423,55	Inspektorat
4.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					267.310.175,00		212.541.765,00		204.640.094,40		214.861.695,49		208.626.010,59		1.107.979.740,48	Inspektorat
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		BB		BB		BB		BB		BB		
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP B	Jumlah	23	25		30		32		35		38		40		
		Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Huruf	CC	B		B		BB		BB		BB		BB		
4.02.01.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					1.481.515.100,00		1.169.542.150,00		1.122.760.464,00		1.183.277.253,01		1.236.550.909,00		6.193.645.876,01	Inspektorat
		Jumlah tindak lanjut temuan API yang ditindaklanjuti	Jumlah	148	150		160		158		155		152		152		
		Jumlah rekomendasi temuan BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah	42	40		58		36		34		32		32		
4.02.01.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Indek Kapabilitas APIC Kab. Aceh Barat	indek	LV.3, dc	LV.3	80.797.500,00	Lv.3	80.797.500,00	Lv.3	77.565.600,00	Lv.3	81.746.385,84	Lv.4	79.195.385,84	Lv.4	400.102.371,68	Inspektorat



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.02.01.22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur pengawasan	Opini audit eksternal atas LKPD	opini	WTP	WTP	79.240.450,00	WTP	79.240.450,00	WTP	76.070.832,00	WTP	80.171.049,84	WTP	77.669.713,09	WTP	392.392.494,93	Inspektoral
4.02.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah operasi tangkap tangan	Kasus	2	3	474.588.744,00	3	474.588.963,50	2	455.605.404,96	2	480.162.536,29	0	465.181.465,16	0	2.350.127.113,91	Inspektoral
4.03	Perencanaan					6.485.793,472,00		5.327.586.658,95		5.501.896.384,02		6.362.433.264,82		6.349.195,801,58		30.026.905,581,37	
4.03.4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																
4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80	83	750.713.896,00	85	733.450.000,00	88	769.200.000,00	90	810.000.000,00	95	850.800.000,00	95	3.914.163.896,00	Bappeda
4.03.4.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	75	80	819.370.000,00	85	452.066.000,00	90	227.000.000,00	95	236.000.000,00	100	245.000.000,00	100	1.979.436.000,00	Bappeda
4.03.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kedisiplinan Aparatur (Atribut)	persen	0	100	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	150.000.000,00	Bappeda
4.03.4.03.01.05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		100.000.000,00	Bappeda
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	A		A		A		A		A		A		
		Nilai Perencanaan Kinerja	Persen	20,45	22,35		23,28		24,21		25,14		26,07		26,07		
4.03.4.03.01.15	Program pengembangan data/informasi	Persentase data terpilah dan terpadu	Persen	10	25	568.629.015,00	30	811.360.465,75	40	1.184.000.000,00	60	1.406.750.000,00	75	1.314.250.000,00	75	5.284.989,480,75	Bappeda



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (uutcome)	Samian	Kiner ja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggu ng Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.03.4.03 .01.19	Program Perencanaan Kota Menengah dan Besar	Cakupan Wilayah Terlayani sarana dan prasarana perkotaan	Persen	60	65	145.000.009,00	70	145.000.000,00	75	145.000.000,00	80	145.000.000,00	85	145.000.000,00	85	725.000.000,00	Bappeda
4.03.4.03 .01.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Peserta yang dilatih setiap tahunnya	Orang	92	92	122.535.000,00	92	122.535.000,00	92	122.535.000,00	92	122.535.000,00	92	122.535.000,00	460	612.675.000,00	Bappeda
4.03.4.03 .01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					2.662.752.089,00		2.084.000.000,00		2.269.000.000,00		2.734.500.000,00		2.807.000.000,00		12.357.252,089,00	Bappeda
		Persentase usulan masyarakat yang tertampung didalam dokumen perencanaan	persen	72	73,6		75,2		76,8		78		80		80		
		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam	Persen	100	100		100		100		100		100		100		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		RKPD															
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Hasil Penelitian yang menjadi Acuan dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	0	100		100		100		100		100		100		
		APBK Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		
4.03.4.03.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi					455.000.000,00		390.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		1.505.000.000,00	Bappeda
		Persentase realisasi dana CSR	persen	60	72		75		78		81		84		84		
		Jumlah Perusahaan dalam forum TJSLP	Perusahaan	15	18		19		20		21		22		22		
		Jumlah Dana CSR	Rupiah	4,9	18,09		18,63		19,19		19,76		20,36		20,36		
		Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	persen	20,38	18,61		17,98		17,25		16,56		15,9		15,9		
		Jumlah Penduduk Miskin	Orang	40110	39312		38919		38276		37672		37077		37077		
		Rasio kesenjangan kemiskinan	Rasio	4,72	4,62		4,52		4,42		4,32		4,22		4,22		
		Persentase dana desa untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi	persen	26,25	26,25		27,75		28,75		29,75		30		30		
		Jumlah Nilai Capaian	Nilai	100	110		110		110		120		120		120		
		Jumlah Kasus Korupsi	Kasus	0	0		0		0		0		0		0		
4.03.4.03.01.23	Program perencanaan sosial dan budaya					400.000.000,00		161.000.000,00		167.000.000,00		174.000.000,00		330.000.000,00		1.232.000.000,00	Bappeda
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		83,5	83,7		84,1		84,88		85,21		85,67		85,67		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		55,46	57,41		61,15		63,67		64,43		65,21		65,21		
4.03.4.03.01.24	Program Perencanaan Wilayah dan Sumber daya alam	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100	210.000.000,00		35.000.000,00		65.000.000,00		200.000.000,00	100	0,00	100	560.000.000,00	Bappeda
1.01.4.01	Kecamatan																
1.01.4.01.13.26	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen	70	75	301.793.472,00	75	293.175.193,20	75	283.161.384,02	75	263.648.264,82	75	264.610.801,58	75	1.406.389.115,62	12 Kecamatan
4.04	Keuangan					12.356.556.186,96		14.492.054.183,80		14.663.725.048,88		14.722.665.378,91		14.722.665.379,53		70.957.666.178,08	
4.04.4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah																
4.04.4.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	75	80	1.554.222.500,00	85	1.709.644.750,00	90	1.742.644.750,00	95	1.734.317.080,00	100	1.879.849.050,00	100	8.620.678.130,00	BPKD
4.04.4.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	60	70	3.772.875.259,00	80	4.324.146.304,00	90	4.702.247.799,40	100	4.103.050.217,46	100	4.582.068.373,25	100	21.484.387,953,11	BPKD
4.04.4.04.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Aparatur yang handal	persen	50	65	356.242.200,00	70	841.866.420,00	75	431.053.062,00	80	882.162.078,00	85	437.486.078,00	85	2.948.809,830,00	BPKD
4.04.4.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B	281.150.730,00	B	309.265.803,00	B	335.520.000,00	B	344.177.000,00	B	353.094.700,00	B	1.623.208,233,00	BPKD
4.04.4.04.01.17	Program Peningkatan dan					6.392.065.497,96		7.307.130.906,80		7.452.259.437,48		7.658.959.003,45		7.470.167,178,28		36.280.582,023,97	BPKD



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Telawi, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah																
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
		Persentase SILPA terhadap APBD	persen	4,18	2,16		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
		Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	persen	0	0		0		0		0		0		0		
		Persentase belanja pendidikan (20%)	persen	23	20		20		20		20		20		20		
		Persentase belanja kesehatan (10%)	persen	10	10		10		10		10		10		10		
		Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Rasio	42,65 : 57,35	39,45 : 60,55		40 : 60		40 : 60		40 : 60		45:55		45:55		
		Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	10	10		10		10		10		10		10		
		Penetapan APBD	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		
		Persentase PAD terhadap pendapatan	persen	11	13,12		14		15		16		17		17		
4.05	Kepegawaian					4.566.342.680,00		3.412.880.164,42		3.499.682.738,99		3.528.448.752,74		3.528.211.793,20		18.535.566.129,35	
4.05.4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM																
4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80	83	401.860.431,00	85	354.823.350,00	86	354.823.350,00	88	354.823.350,00	90	354.823.350,00	90	1.921.153.831,00	BKPSDM
4.05.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80	85	198.768.000,00	85	165.700.000,00	86	165.700.000,00	88	165.700.000,00	90	165.700.000,00	90	861.568.000,00	BKPSDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.05.4.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	CC	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	15.000.000,00	B	75.000.000,00	BKPSDM
4.05.4.05.01.04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase penanganan proses pensiun PNS	persen	94	96	21.011.600,00	98	20.171.000,00	100	21.258.000,00	100	20.595.000,00	100	20.358.000,00	100	103.393.600,00	BKPSDM
4.05.4.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					1.096.926.375,00		1.635.397.885,94		1.684.459.822,52		1.701.304.420,74		1.701.304.420,74		7.819.392.924,94	BKPSDM
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	120	120		120		120		120		120		120		
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	42,2	42,2		42,7		42,9		42,9		42,9		42,9		
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	persen	32	35		38		39		40		40,3		40,3		
4.05.4.05.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					2.832.776.274,00		1.221.787.928,48		1.258.441.566,47		1.271.025.982,00		1.271.026.022,46		7.855.057.773,41	BKPSDM
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah	32	34		34		34		34		34		34		
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	266	310		310		310		310		310		310		
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jumlah	1.828	1.942		1.950		2.100		2.150		2.200		2.200		



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Telami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase pelanggaran pegawai	persen	12	10		9		9		8		7		7		
Jumlah						504.516.447,078,00	510.822.902,666,48	517.208.188.949,81	523.673.291.311,68	530.219.207,453,07	2.586.440.037,459,04						

Sumber : Bappeda Kab. Aceh Barat, 2017

Handwritten signature



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Barat

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target Tahun Ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	150	121	97	79	64
2	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	Rp (Milyar)	14,00	14,70	15,44	16,21	17,02
3	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	B	B	BB	BB	BB
4	Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5	Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	71,00	71,67	73,00	74,00	75,00
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	56	59	61	63	66
8	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan	Inovasi	6	7	8	9	10
9	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Versi Ombudsment	Nilai	53,98	55,98	57,98	59,98	61,98
10	Pemberdayaan ekonomi korban konflik / mantan kombatan	Orang	120	120	120	120	120
11	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Persen	90	91	92	93	94
12	Rasio Linmas Persatuan Penduduk	Rasio	0,0005	0,0016	0,0026	0,0036	0,0046
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,79	3,81	3,32	2,94	2,46
14	Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	18,61	17,98	17,25	16,56	15,90
15	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN/PMA	17	18	19	20	21
16	Pertumbuhan PDRB	Persen	3,91	4,47	5,03	5,59	6,15
17	Pengendalian Laju Inflasi	Persen	3,23	3,17	3,11	3,05	2,99
18	Produksi perikanan	Ton	20.417	20.420	20.423	20.427	20.432
19	Nilai Tukar Petani	Persen	104,42	104,72	105,02	105,32	105,62
20	Produksi Komoditi Unggulan	Ton	80.098,73	81.905,73	84.713,43	88.022,23	90.832,23
21	Produktivitas Padi atau bahan utama lainnya	Ton/Ha	5,40	5,60	5,80	5,90	6,00
22	Produksi Daging Pertahun	Kg	293.234	299.834	307.434	313.559	319.991
23	Hasil Pengukuran kualitas Air	Persen	63	65	67	69	71
24	Hasil Pengukuran kualitas Udara	Persen	84	85	86	87	88



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target Tahun Ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022
25	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	5,10	5,52	5,52	5,95	6,37
26	Indeks Resiko Bencana	Indeks	188	176	164	152	140
27	Persentase peningkatan pendapatan aparatur ASN	Persen	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
28	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	Persen	46,20	50,20	54,20	58,20	62,20
29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	71,39	73,02	74,68	76,39	78,13
30	Jumlah Destinasi Wisata Spiritual yang dikembangkan	lokasi	2	2	2	2	2
31	Persentase pembinaan adat istiadat	Persen	46,58	62,11	77,64	93,17	100
32	Jumlah Atlet berprestasi tingkat provinsi / nasional/Internasional	Atlet	7	10	13	16	19
33	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi	Persen	36,52	38,34	40,16	41,98	43,46
34	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	8.587	8.787	8.987	9.187	9.387
35	Pola Pangan Harapan (konsumsi)	Persen	61,75	62,55	63,75	64,50	66,70
36	Persentase Desa Swasembada Pangan	Persen	22	33	44	55	66
37	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68,20	68,40	68,60	68,80	69,00
38	Angka Kematian bayi	/1000 kelahiran hidup	15	14	13	12	11
39	Angka Kematian Ibu	/100.000 kelahiran hidup	136 / 5 Kasus	132 / 5 Kasus	102 / 4 Kasus	99 / 4 Kasus	96/ 3 Kasus
40	Persentase balita gizi buruk (Stunting)	Persen	0,11	0,1	0,09	0,08	0,06
41	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	Persen	53,85	100	100	100	100
42	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Persen	8,96	9,41	10,61	10,93	11,16
43	Angka melek huruf	Persen	98,83	98,83	98,96	99,04	99,14

Handwritten signature

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	3,35	3,91	4,47	5,03	5,59	6,15	6,15
2	Pengendalian Laju inflasi	Persen	3,77	3,23	3,17	3,11	3,05	2,99	2,99
3	PDRB per kapita	Persen	26,86	33,35	33,75	34,08	34,84	35,06	35,06
4	Indeks Gini	Indeks	0,35	0,33	0,28	0,26	0,25	0,23	0,23
5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	Persen	1,07	1,08	1,09	1,10	1,12	1,13	1,13
6	Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	20,38	18,61	17,98	17,25	16,56	15,90	15,90
7	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	40.110	39.312	38.919	38.276	37.672	37.077	37.077
8	Rasio kesenjangan kemiskinan	Rasio	4,72	4,62	4,52	4,42	4,32	4,22	4,22
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,26	71,17	72,33	73,44	74,34	75,42	75,42
10	Angka melek huruf	Persen	98,62	98,83	98,83	98,96	99,04	99,14	99,14
11	Indeks Kepuasan masyarakat	Indeks	70,81	71,00	71,67	73,00	74,00	75,00	75,00
12	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Versi Ombudsman	Nilai	43,86	53,98	55,98	57,98	59,98	61,98	61,98
13	Kategori Hasil Evaluasi LPD	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
14	Angka rata-rata lama sekolah	Persen	8,73	8,96	9,41	10,61	10,93	11,16	11,16
15	Angka usia harapan hidup	Tahun	68,00	68,20	68,40	68,60	68,80	69,00	69,00
16	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08	0,06	0,06
17	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0	1,0
18	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	15,57	16,08	16,58	17,58	18,09	18,59	18,59
19	Angka partisipasi angkatan kerja	Persen	66,15	66,24	66,33	66,42	66,51	66,60	66,60
20	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	64,40	71,39	73,02	74,68	76,39	78,13	78,13
21	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	6,20	4,79	3,81	3,32	2,94	2,46	2,46
22	Jumlah Pengangguran	Orang	5.937	5.162	4.307	3.939	3.664	3.220	3.220
23	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	93,56	93,60	93,65	93,69	93,73	93,78	93,78
24	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	59,39	59,59	59,79	59,99	60,19	60,39	60,59
25	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	Persen	44,99	45,49	45,99	46,49	46,99	47,49	47,99
26	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,48



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas*

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
27	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	11	13,12	14	15	16	17	17
28	Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK	WDP, WTP dan Disklaimer	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Ketersediaan dan cadangan pangan Daerah	Persen	6,14	6,14	6,26	6,39	6,51	6,65	6,65
30	Penanganan daerah rawan pangan	Desa	10	15	20	25	30	36	36
31	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	25,15	25,47	25,80	26,13	26,46	26,80	26,80
32	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	25,15	25,47	25,80	26,13	26,46	26,80	26,80
33	Produksi Komoditi Unggulan	Ton	77.787,73	80.098,73	81.905,73	84.713,43	88.022,23	90.832,23	90.832,23
34	Produksi sektor perkebunan (Kakao)	Ton	9,2	9,2	9,2	8,9	8,7	8,7	8,7
	Produksi sektor perkebunan (Sawit)	Ton	59.615,31	61.415,31	63.215,31	65.015,31	66.815,31	68.615,31	68.615,31
	Produksi sektor perkebunan (Karet)	Ton	16.884,48	17.384,48	17.384,48	18.384,48	19.884,48	20.884,48	20.884,48
	Produksi sektor perkebunan (Kelapa Dalam)	Ton	1.273,00	1.284,00	1.291,00	1.299,00	1.308,00	1.318,00	1.318,00
	Produksi sektor perkebunan (Pinang)	Ton	5,74	11,48	17,22	22,96	28,70	34,44	34,44
35	Produksi Daging Pertahun	Kg	287.234	293.234	299.834	307.434	313.559	319.991	319.991
36	Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong)	Kg	19.713	21.713	23.713	26.713	28.213	30.100	30.100
	Produksi Sektor Peternakan (Kerbau)	Kg	175.187	179.187	183.187	187.187	191.187	195.187	195.187
	Produksi Sektor Peternakan (Kambing)	Kg	90.754	90.754	91.354	91.854	92.354	92.779	92.779
	Produksi Sektor Peternakan (Domba)	Kg	1.580	1.580	1.680	1.780	1.805	1.925	1.925
37	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Persen	1,87	2,12	1,99	1,91	1,87	1,76	1,76
38	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Persen	5,18	6,68	6,69	6,70	6,75	6,77	6,77
39	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,07	1,07	1,08	1,09	1,17	1,18	1,18
40	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	5,92	6,88	7,84	8,80	9,76	10,72	10,72
41	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	17,77	18,50	18,77	19,00	19,20	19,88	19,88
42	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	1,92	2,00	2,00	2,10	2,20	2,20	2,20
43	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	Persen	0,00	0,67	0,67	0,70	0,75	0,75	0,75
44	Pertumbuhan Industri	Persen	20,81	22,64	24,47	26,30	28,13	29,96	29,96
45	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	CC	B	B	BB	BB	BB	BB
46	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan	Inovasi	5	6	7	8	9	10	10
47	Nilai Pencegahan Kasus Korupsi	Nilai	100	110	120	130	140	150	150
II ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rupiah	2.502.146,71	2.502.146,71	2.602.146,61	2.702.156,81	2.752.146,71	2.602.146,61	2.602.146,61
2	Nilai tukar petani	Persen	104,12	104,42	104,72	105,02	105,32	105,62	105,62
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	60,25	61,95	62,75	63,50	64,75	65,50	65,50

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
4	Rata-rata Konsumsi Pangan Per Kapita	Persen	31,11	31,75	32,5	33,45	34,75	34,75	34,75
5	Produktivitas total daerah	Persen	75.035.701	75.035.701	79.036.801	80.036.801	81.035.701	82.036.801	82.036.801
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Persen	90,93	91,20	91,47	91,74	92,01	92,28	92,28
7	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	17,95	30,00	50,00	70,00	90,00	100,00	100,00
8	Rasio ketergantungan	Persen	47,69	47,63	47,35	47,25	47,00	46,97	46,97
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50	56	59	61	63	66	66
III	ASPEK PELAYANAN UMUM								
3.1	Layanan Urusan Wajib Dasar								
3.1.1	Pendidikan								
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	28,40	28,40	29,40	30,40	31,40	32,40	32,40
	APK PAUD	Persen	27,33	30,18	31,25	32,31	33,38	34,43	34,43
	Persentase PAUD yang Menerapkan Pendidikan Karakter	Persen	NA	10,00	30,00	45,00	55,00	65,00	65,00
2	Angka partisipasi kasar								
	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	Persen	109,27	109,86	110,34	110,72	111,45	111,89	111,89
	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	Persen	105,46	106,15	107,19	108,21	109,24	109,78	109,78
	Angka partisipasi kasar SMA	Persen	101,69	101,72	101,75	101,78	101,81	101,84	101,87
3	Angka pendidikan yang ditamatkan								
	Tamat SD dan SLTP	Persen	83,65	100	100	100	100	100	100
	Tamat SLTA keatas	Persen	89,00	90,08	90,12	90,15	90,23	90,30	90,30
4	Angka Partisipasi Murni								
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	95,58	95,63	95,68	95,73	95,78	95,83	95,83
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	85,91	85,96	86,01	86,06	86,11	86,16	86,16
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	75,49	77,49	79,49	81,49	83,49	85,49	85,49
5	Angka Partisipasi Sekolah								
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,79	99,81	99,83	99,86	99,90	99,94	99,94
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	98,54	98,56	98,61	98,71	98,84	99,19	99,19
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	84,79	84,79	85,79	86,09	86,54	87,74	87,74
6	Angka Putus Sekolah:								
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,10	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,030	0,030	0,025	0,020	0,015	0,010	0,010



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Telami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi*

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen	0,14	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10
	Angka Kelulusan:								
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTsN	Persen	98,00	98,30	98,85	99,10	99,25	100	100
8	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	95,35	95,75	96,08	96,28	96,78	97,58	97,58
	Angka Melanjutkan (AM):								
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	105,22	105,52	106,32	106,86	107,19	107,49	107,49
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	99,89	99,89	99,90	99,90	99,92	99,92	99,92
Fasilitas Pendidikan:									
9	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	75,25	75,59	77,89	79,15	81,93	84,80	84,80
10	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	82,45	85,65	90,43	92,42	94,31	96,20	96,20
11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	36,58	36,58	36,58	36,58	36,58	36,58	36,58
12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	8	8	9	9	9	10	10
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	17	16	16	16	15	15	15
14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio	3,89	3,92	3,95	3,96	3,97	3,99	3,99
15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	96,22	96,62	97,49	97,71	98,02	100	100
16	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki	Persen	95,41	100	100	100	100	100	100
17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	98,37	98,73	98,81	98,96	99,04	100	100
18	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV/Guru Layak Mengajar	Persen	66,35	68,55	71,11	72,65	74,87	77,09	77,09
19	Persentase sekolah yang terakreditasi A	Persen	13,82	14,01	15,22	15,62	16,50	17,33	17,33
20	Kategori Nilai Ujian UAN tingkat SMA/SMK/MA Rata-rata (A,B,C dan D)	Kategori	C	C	B	B	B	A	A
21	Persentase tingkat kelulusan UN tingkat nasional	Persen	98,00	98,50	98,90	99,10	99,20	99,50	99,50
22	Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
23	Persentase Guru Bersertifikasi	Persen	16	28	40	52	64	76	76
24	Jumlah sekolah ramah anak (SD)	Unit	1	15	20	25	30	35	35
25	Jumlah sekolah ramah anak (SMP)	Unit	0	10	13	16	19	25	25

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
3.1.2	Kesehatan								
1	Penurunan Peringkat Daerah Bermasalah Kesehatan	Peringkat	379 di Tahun 2012	-	-	-	-	284	284
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	17	15	14	13	12	11	11
3	Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 kelahiran hidup	984	985	986	987	988	989	989
4	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	17	16	15	14	13	12	12
5	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	11	11	10	9	9	8	8
6	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/100,000 kelahiran hidup	175 / 6 Kasus	136 / 5 Kasus	132 / 5 Kasus	102 / 4 Kasus	99 / 4 Kasus	96 / 3 Kasus	96/3 Kasus
7	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	20,00	20,46	20,70	25,38	25,38	25,38	25,38
8	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,637	0,66	0,675	0,680	0,685	0,690	0,690
9	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,02	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
10	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,36	0,44	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47
11	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	4,52	4,52	4,57	4,61	4,66	4,70	4,70
12	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	51	55	60	65	70	75	75
13	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	66	75	85	90	90	95	95
14	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	57	65	70	75	80	85	85
15	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	62	65	70	75	80	85	85
17	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	59,14	62,86	66,58	70,30	74,02	75,00	75,00
18	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100
19	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	0,042	20	20	20	20	25	25
20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	13,56	25	25	30	35	35	35
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Persen	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	20,2	25	30	30	35	35	35



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi*

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	23,5	85	85	85	85	85	85
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
25	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
26	Angka kejadian Malaria	Persen	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
27	Tingkat kematian akibat malaria	Persen	0	0	0	0	0	0	0
28	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	0	0	0	0	0	0	0
29	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0	55	65	70	75	80	80
30	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	75	77	78	80	85	90	90
31	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	63,70	64,55	64,35	64,25	64,15	63,50	63,50
32	Cakupan kunjungan bayi	Persen	70,81	75	80	85	90	95	95
33	Cakupan puskesmas	Persen	108	108	108	108	108	108	108
34	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
35	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	79,5	80	85	90	95	100	100
36	Cakupan pelayanan nifas	Persen	72,1	75	80	85	90	95	95
37	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	45	50	55	60	65	70	70
38	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	69,7	70	75	80	85	90	90
39	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	92,5	95	96	97	98	100	100
40	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	79,1	100	100	100	100	100	100
41	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	0	30	30	35	40	45	45
42	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	Persen	30,77	53,85	100	100	100	100	100
3.1.3	Pekerjaan Umum:								
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,60
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,010	0,010	0,098	0,096	0,094	0,092	0,092
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Persen	1	1	1	0	0	0	0

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/jam)	Persen	44,81	47,81	50,81	53,81	56,81	60,00	60,00
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	15,74	17,40	17,58	17,87	17,95	18,50	18,50
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persen	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,34
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	69	76,40	80,15	85,33	87,80	90	90
8	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	40	40	42	44	46	47,20	47,20
9	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	12	14	15,80	16,70	18	19,30	19,30
10	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	56	58,20	59,36	60,55	61,76	63,00	63,00
11	Rasio Jaringan Irigasi dengan luas area sawah terairi	Rasio	0,16	0,18	0,20	0,34	0,34	0,35	0,35
12	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	8.387	8.587	8.787	8.987	9.187	9.387	9.387
13	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	40	44	48	52	56	60	60
14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	65,20	67,16	69,17	71,25	73,38	75,58	75,58
15	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
16	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Unit	0	1	2	3	4	5	5
17	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio	343,77	374,98	375,15	375,23	375,46	374,99	374,99
18	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	3,16	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
19	Persentase sarana dan prasarana Transportasi	Persen	34,71	36,52	38,34	40,16	41,98	43,46	43,46
3.1.4	Penataan Ruang:								
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0,19	0,24	0,25	0,27	0,28	0,29	0,29
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	4,25	5,10	5,52	5,52	5,95	6,37	6,37
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Rasio	2,07	2,07	2,07	2,08	2,09	2,09	2,09
4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Persen	0	0	0	0	0	0	0



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	0,00	0,00	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
6	Ketaatan terhadap RTRW		40	65	70	75	80	85	85
3.1.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,17	0,77	0,78	0,79	0,80	0,80	0,80
2	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	69	77	78	79	79	80	80
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	56	59	61	62	64	65	65
5	Persentase pemukiman yang tertata	Persen	60	68	70	72	75	78	78
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	7	5,77	5,02	4,29	3,60	2,94	2,94
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Jumlah Desa Terpencil	Desa	39	30	23	15	7	0	0
3.1.6	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1	Rasio Linmas Persatuan Penduduk	Rasio	0,0005	0,0005	0,0016	0,0026	0,0036	0,0046	0,0046
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Persen	89	90	91	92	93	94	94
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	0,0041	0,0041	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	89	90	91	92	93	94	94
5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	89	90	91	92	93	94	94
6	Jumlah Satuan Linmas setiap Gampong	Orang	100	100	316	532	748	966	966
7	Rasio Sekolah Siaga Bencana	Persen	81,43	83	85	87	89	90	90
8	Jumlah Desa Tangguh	Desa	173	183	193	203	213	223	223
9	Jumlah Relawan Bersertifikasi	Orang	1.823	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250	2.250
10	Indeks Resiko Bencana	Indeks	200	188	176	164	152	140	140
11	Jumlah Kasus Kebakaran Lahan	Kasus	1	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
12	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kali Patroli dalam sehari	3	3	3	3	3	3	3
3.1.7	Sosial								
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	35	35	35	40	40	45	45
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	30	35	35	40	40	45	45
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	25	25	25	30	30	35	35
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	75	75	75	75	80	80	80
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	70	70,10	70,10	70,10	70,20	70,20	70,20
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	70,10	70,14	70,17	70,21	70,24	70,28	70,28
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	1,18	1,8	1,8	1,15	1,20	1,25	1,25
3.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
3.2.1	Tenaga Kerja								
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	76,92	76,54	76,35	76,20	75,85	75,5	75,5
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Orang	7.858	7.658	6.785	5.988	4.565	3.255	28.251
3	Keselamatan dan perlindungan	Persen	76,92	77	75	76,92	77,82	78	78
4	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	224	394	564	734	904	1074	1074
6	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	96	192	288	384	480	576	576
7	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	150	180	210	240	270	300	300
8	Rasio lulusan S1/S2/S3	rasio	115	115	116	117	130	142	142
9	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	50,63	52,30	53,47	53,56	53,97	54,81	54,81
10	Jumlah Perusahaan yang menjalin kerjasama dalam penempatan tenaga kerja	Perusahaan	NA	5	7	9	11	13	13



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi*

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	51	47,11	47,28	47,37	47,52	47,76	47,76
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	8,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	49,30	50,37	50,72	50,95	51,23	51,90	51,90
4	Rasio KDRT	Rasio	0,05	0,037	0,037	0,031	0,031	0,025	0,025
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen	2,80	2,75	2,70	2,65	2,60	2,60	2,60
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	21,89	23,08	23,16	23,29	23,35	23,46	23,46
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
14	Jumlah SKPK dan Desa yang melaksanakan PPRG	OPD/Desa	47	369	369	369	369	369	369
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	83,50	83,70	84,10	84,88	85,21	85,67	85,67
16	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	55,46	57,41	61,15	63,67	64,43	65,21	65,21
3.2.3	Pangan								
1	Ketersediaan pangan utama	Ton	20.464,00	20.464,00	20.873,28	20.881,47	21.299,10	21.725,08	21.725,08
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	gram/kapita/hari	3.543	3.543	3.600	3.602	3.604	3.605	3.605
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	65,5	65,5	67,75	68,75	69,5	75,50	75,50
4	Pola Pangan Harapan (konsumsi)	Persen	60,11	61,75	62,55	63,75	64,50	66,70	66,70

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
5	Penganekaragaman pangan	Persen	75,25	76,5	77,25	78,6	79,35	80,25	80,25
6	Distribusi dan akses pangan	Persen	80	100	100	100	100	100	100
7	Desa Swasembada Pangan	Persen	11	22	33	44	55	66	66
3.2.4	Pertanahan								
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	26,97	50,00	50,00	75,00	90,00	100	100
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	25,00	50,00	50,00	75,00	90,00	100	100
3	Penyelesaian izin lokasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.2.5	Lingkungan Hidup								
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada/tidak	tidak ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	ada/tidak	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	ada	ada	ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kabupaten	ada/tidak	tidak ada	tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
4	Hasil Pengukuran kualitas Air	Persen	32	63	65	67	69	71	71
5	Hasil Pengukuran kualitas Udara	Persen	83,93	83,93	84,93	85,93	86,93	87,93	87,93
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	Persen	13	13	16	20	23	26	26
7	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) (orang)	Orang	0	2	2	3	3	4	4
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten	Kali	0	1	1	1	1	1	4
9	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	3	3	3	3	3	3	15
10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten	Kasus	10	9	8	7	6	5	5
11	Total Timbulan sampah yang ditangani	m3	114	114	120	125	130	140	140
12	Persentase cakupan area pelayanan sampah perkotaan	Persen	20	20	25	30	35	40	40
13	Persentase Penanganan Sampah	Persen	85	85	87	90	95	100	100
14	Pencemaran Mutu Air	Persen	40	35	30	25	15	10	10



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
15	Pengawasan Perusahaan terhadap AMDAL	kali/tahun	4	4	4	4	4	4	20
16	Persentase kepatuhan terhadap amdal	Persen	20	22	24	26	28	30	30
3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Indek Pembangunan Kependudukan	Persen	60	65	70	75	80	85	85
2	Rasio penduduk ber e-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,85	0,85	0,86	0,88	0,91	0,93	0,93
3	Rasio bayi berakte kelahiran (usia 0-1 tahun)	Rasio	0,55	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,85
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	78	81	81	84	87	90	90
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0-18 tahun)	Persen	75	80	83	85	87	90	90
8	Rasio kepemilikan akta kematian	Rasio	0,25	0,30	0,33	0,35	0,37	0,40	0,40
3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	74,22	79,50	90,06	96,27	99,68	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	3,89	4,23	4,24	4,25	4,26	4,27	4,27
3	Persentase PKK aktif	Persen	89	90	95	98	100	100	100
4	Persentase Posyandu aktif	Persen	18	20	25	30	40	46	46
5	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	35	36	38	43	45	65	65
6	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	60	65	68	70	70,53	75	75
7	Jumlah BUMG yang aktif	Unit	75	247	267	287	307	322	322
8	Jumlah kelompok binaan LPM	LPM	5	7	9	11	14	15	15
9	Persentase gampong yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	2,10	2,08	2,05	2,02	2,00	1,97	1,97
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,97	2,90	2,87	2,84	2,80	2,77	2,77
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	0,00	68,18	70,45	70,45	72,73	72,73	72,73

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	0,00	47,73	47,73	50,00	50,00	52,23	52,23
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kebijakan	0,00	1	1	1	1	2	6
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sektor	0,00	11	12	13	14	15	15
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	0,00	3	3	4	4	4	18
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	3,46	3,18	3,17	3,15	3,05	2,97	2,97
9	Ratio Akseptor KB	Persen	68,27	69,70	69,85	70,00	70,25	70,40	70,00
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	71,95	73,51	77,99	81,11	85,45	91,99	91,99
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	6,04	6,00	5,95	5,90	5,85	5,80	5,80
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	18,00	17,50	17,45	17,40	17,35	17,35	17,35
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	8,17	8,20	8,31	8,43	8,54	8,67	8,67
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	49,24	40,97	41,75	43,05	44,12	46,15	46,15
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	100	100	100	100	100	100	100
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	84,45	85,10	85,25	85,60	85,90	86,00	86,00
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	97,10	97,39	97,60	97,60	97,75	97,75	97,75
18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	16,67	16,67	16,67	16,67	25,00	25,00	25,00
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	258,33	275,00	283,33	283,33	291,67	291,67	291,67



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kenayataan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi*

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	0,00	11,11	11,11	16,67	16,67	16,67	16,67
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	100	100	100	100	100	100	100
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	60,61	63,63	63,63	66,07	66,07	69,70	69,70
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	59,33	71,43	71,88	72,93	73,33	73,91	73,91
27	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	25	26	26	27	27	27	27
28	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	17,94	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	14,00
3.2.9	Perhubungan								
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	114.624	116.916	119.255	121.640	124.073	126.554	126.554
2	Rasio ijin trayek	Rasio	0,00003	0,00003	0,00003	0,00004	0,00005	0,00005	0,00005
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	3.822	3.898	3.976	4.056	4.137	4.220	4.220
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Penyeberangan /Terminal Bis dan Barang	buah	8	8	9	9	10	11	11
5	Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,0029	0,0029	0,0030	0,0031	0,0032	0,0030	0,0030
6	Persentase Uji KIR angkutan umum	Persen	56,80	58,48	60,21	61,96	63,79	65,67	65,67
7	Pemasangan Rambu-rambu	Persen	76,90	76,90	79,29	81,67	84,05	86,43	86,43
8	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	-	173.268	174.890	176.749	178.624	180.526	182.444	182.444
3.2.10	Komunikasi dan Informatika								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kelompok	0	12	12	12	12	12	12
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di gampong	Kelompok	5	25	50	75	100	125	125
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	75	80	82	84	86	88	88
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	40	45	89,50	90,00	90,30	90,70	90,70
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	85,00	89,00	89,50	90,00	90,00	90,70	90,70
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	75,00	80,00	82,00	89,50	90,00	90,30	90,30
3.2.11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								
1	Persentase koperasi aktif	Persen	62,50	68,16	73,82	79,48	85,14	90,80	90,80
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	50	58	66	74	82	90	90
3	Persentase BPR/LKM aktif	Persen	15	16	17	18	19	20	20
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	76,44	79,26	82,08	84,90	87,72	90,54	90,54
3.2.12	Penanaman Modal								
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN/PMA	15	17	18	19	20	21	21
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	Milyar	3,808	3,815	3,830	3,842	3,848	3,852	3,852
3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	23,01	23,41	24,28	26,58	27,55	28,38	28,38
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	trilyun rupiah	4,283	4,290	4,318	4,320	4,326	4,329	4,329
5	Jumlah Perusahaan dalam forum TJSPL	Perusahaan	15	18	19	20	21	22	22
6	Jumlah MoU Dana CSR	Milyar Rupiah	4,9	18,09	18,63	19,19	19,76	20,36	20,36
7	Persentase Realisasi Dana CSR	Persen	60	72	75	78	81	84	84
8	Persentase izin yang diproses sesuai dengan SOP	Persen	97,99	99,63	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65
3.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga								
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	24,9	25,9	26,9	27,9	28,9	29,9	29,9
2	Persentase wirausaha muda	Persen	16,70	20	22	24	26	28	28
3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	13,04	15,04	17,04	19,04	21,04	23,04	23,04
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	58,82	58,82	77,20	77,20	84,55	84,55	84,55
5	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	20,65	20,65	30,43	26,63	25,54	37,5	37,5
6	Jumlah Atlet berprestasi tingkat provinsi / nasional/Internasional	Atlet	4	7	10	13	16	19	65
7	Jumlah Gedung Olah Raga	Unit	9	12	14	16	18	20	20
3.2.14	Statistik								



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Telani, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi*

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.2.15	Persandian								
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	0	2	2	2	2	2	2
3.2.16	Kebudayaan								
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	8	9	9	9	10	11	11
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	17	20	20	20	20	20	20
3.2.17	Perpustakaan								
1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,37	0,44	0,47	0,51	0,55	0,58	0,58
2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (orang)	Orang	25.341	26.608	27.875	29.142	30.409	31.676	31.676
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul buku	12.579	13.208	13.837	14.466	15.095	15.724	15.724
4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	7	7	9	11	13	15	15
3.2.18	Kearsipan								
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	4	5	10	15	20	25	25
2	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam pengelolaan arsip secara baku	OPD	2	3	4	5	6	7	7
3	Jumlah dokumen arsip yang dilestarikan	Dokumen	2.400	2.640	2.910	3.180	3.610	3.840	3.840
4	Jumlah arsip yang di pelihara	box	8.000	8.800	9.700	10.600	11.700	12.800	12.800
3.3	Layanan Urusan Pilihan								
3.3.1	Pariwisata								
1	Kunjungan wisata	Orang	1.099	1.099	1.118	1.055	1.332	1.500	1.500
2	PAD sektor pariwisata	Persen	0,000128	0,000117	0,000112	0,000107	0,000102	0,000098	0,000098
3	Jumlah Destinasi Wisata Spiritual yang dikembangkan	Lokasi	2	2	2	2	2	2	10
3.3.2	Pertanian								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
1	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	33,38	33,45	34,45	35,45	36,45	37,45	37,45
2	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	25,15	25,15	26,55	26,65	26,75	26,85	26,85
3	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	53	53	54	55	56	57	57
4	Produktivitas Padi atau bahan utama lainnya	Ton/Ha	5,22	5,4	5,6	5,8	5,9	6,0	28,7
5	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok	452	527	553	581	610	640	640
6	Rasio kelompok tani terhadap petani	Rasio	4	4,04	4,08	4,12	4,16	4,20	4,20
7	Indek Penanaman (IP)	Indeks	1,53	1,56	1,59	1,62	1,65	1,68	1,68
8	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura :								
	Padi	Ton	99,75	105,633	110,914	116,46	122,283	128,397	128,397
	Jagung	Kg	385,64	395	405	415	425	435	435
	Kedelai	Kg	2,03	2,09	2,15	2,21	2,28	2,35	2,35
	Kacang Tanah	Kg	749,69	772	795	819	843	869	869
	Ubi Kayu	Kg	753,84	776	799	823	848	873	873
	Durian	Kg	29,67	30,56	31,477	32,422	33,394	34,396	34,396
	Rambutan	Kg	5,851	6,026	6,207	6,393	6,585	6,783	6,783
	Langsat	Kg	4,824	4,969	5,118	5,272	5,43	5,593	5,593
	Cabai Besar	Kg	623	642	661	681	702	723	723
	Semangka	Kg	779	802	826	851	877	903	903
3.3.3	Kehutanan								
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen	11,95	10	9	8	6	5	5
2	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	4,97	4,73	4,70	4,65	4,35	4,30	4,30
3	Jumlah Kasus Kebakaran Lahan	Kasus	1	0	0	0	0	0	0
3.3.4	Energi dan Sumber Daya Mineral								
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	99,90	100	100	100	100	100	100
2	Rasio ketersediaan daya listrik	Persen	74,60	75,10	75,40	75,60	75,70	76	76
3	Persentase pertambangan tanpa ijin	Persen	51,49	51,18	51,08	50,58	50,45	50,30	50,30
4	Persentase subsidi listrik masyarakat miskin	Persen	80,18	84,18	88,18	92,18	96,18	100	100
3.3.5	Perdagangan								
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	2,40	2,40
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	18,96	18,96	18,96	20,00	21,00	22,00	22,00
3.3.6	Perindustrian								



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Telami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi*

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	6,96	8,59	10,22	11,85	13,48	15,11	15,11
3.3.7	Transmigrasi								
1	Persentase transmigran swakarsa	Persen	13,8	13,9	13,10	13,21	13,25	13,45	13,45
3.3.8	Kelautan dan Perikanan								
1	Produksi perikanan	Ton	20.412	20.417	20.420	20.423	20.427	20.432	20.432
2	Konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	49,50	49,51	49,52	49,53	49,54	49,55	49,55
3	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	40,95	48,61	51,39	52,00	52,56	53,75	53,75
4	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	Persen	40,95	48,57	51,43	52,67	51,25	51,76	51,76
5	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	0,00	2.948	2.959	2.980	2.985	3.000	3.000
6	Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	Ton	0,00	335	338	341	343	345	345
7	Jumlah nelayan, Petani Pembudidaya dan pengolah yang dilatih (orang)	orang	140	280	420	560	700	840	840
3.4	Penunjang Urusan								
3.4.1	Perencanaan Pembangunan								
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.4.2	Keuangan								
2	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	4,18	2,16	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0	0	0	0	0	0	0
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	20	20	20	20	20	20	20
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	10	10	10	10	10	10	10
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Rasio	42,65 : 57,35	39,45 : 60,55	40 : 60	40 : 60	40 : 60	45:55	45:55

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	10	10	10	10	10	10	10
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.4.3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	120	120	120	120	120	120	120
2	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	Persen	42,20	46,20	50,20	54,20	58,20	62,20	62,20
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	32,00	35,00	38,00	39,00	40,00	40,30	40,30
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	32	34	34	34	34	34	34
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	266	310	310	310	310	310	310
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	1.828	1.942	1.940	1.935	1.930	1.900	1.900
7	Persentase peningkatan pendapatan aparatur ASN	Persen	0	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	6,25
3.4.4	Penelitian dan pengembangan								
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	0	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen	0	100	100	100	100	100	100
	Penerapan SIDA:								
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	14,89	17,02	19,15	21,28	23,40	25,53	25,53
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.4.5	Pengawasan								
1	Jumlah tindak lanjut temuan APIP yang ditindaklanjuti	temuan	148	150	160	158	155	152	152
2	Jumlah rekomendasi temuan BPK yang ditindaklanjuti	rekomendasi	42	40	38	36	34	32	32
3	Indek Kapabilitas APIP Kab. Aceh Barat	Indeks	LV.3.dc	LV.3	LV.3	LV.3	LV.4	LV.4	LV.4
4	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	12	10	9	9	8	7	7
3.4.6	Sekretariat Dewan								
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.5	Keistimewaan dan Kekhususan Aceh								
3.5.1	Pendidikan								
1	Jumlah dayah yang teregistrasi	Dayah	29	31	33	35	37	40	40
2	Jumlah dayah dengan Program Tahfiz Al Qur'an	Dayah	3	4	4	5	5	6	6
3	Jumlah tenaga pengajar / guru dayah yang dilatih	orang	30	35	40	45	50	55	225
4	Persentase Melek Alquran	Persen	65	67	70	73	75	80	80
5	Jumlah Hafiz Alquran	orang	30	35	40	45	50	55	55
3.5.2	Keagamaan								
1	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	Rp (Milyar)	12,60	14,00	14,70	15,44	16,21	17,02	17,02
2	Persentase masjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu	Persen	67	72	80	85	90	95	95
3	Jumlah masjid yang aktif melaksanakan kemakmuran masjid	Masjid	70	90	110	125	135	147	147
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Majelis Taklim	Persen	90	95	100	100	100	100	100
5	Persentase masjid yang memenuhi standar	Persen	60	65	70	75	80	85	85
6	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	266	150	121	97	79	64	64
7	Jumlah Kegiatan Perayaan hari besar Islam	Kali	6	6	6	6	6	6	6
8	Cakupan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Persen	50	55	60	65	70	75	75
3.5.3	Kebudayaan								
1	Jumlah Gampong yang melaksanakan qanun kebudayaan gampong	Gampong	15	20	25	30	35	40	40
2	Persentase pembinaan adat istiadat	Persen	31,06	46,58	62,11	77,64	93,17	100	100
3.5.4	Kesatuan dan Perdamaian								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD
1	Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan	Persen	80	85	86	87	88	89	89
2	Pemberdayaan ekonomi korban konflik / mantan kombatan	orang	120	120	120	120	120	120	600
3.5.5	Kesatuan Bangsa dan Politik								
1	Frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (angkatan)	Kali	4	6	6	6	6	6	30
2	Frekuensi sosialisasi pembinaan politik daerah	Kali	4	1	1	1	1	1	5
3	Jumlah LSM terdaftar	LSM	7	7	8	9	10	11	11

LAMPIRAN



Tabel 1
Kerangka Pendanaan OTSUS Tahun 2018-2022

2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
120.934.901.304	126.981.646.369	133.330.728.687	139.997.265.122,04	146.997.128.378	668.241.669.860

Sumber : Bappeda Kab. Aceh Barat, 2017

Tabel 2
Kerangka Pendanaan CSR Tahun 2018-2022

Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
18.090.385.905	18.633.097.482	19.192.090.407	19.767.853.119	20.360.888.712	96.044.315.624,95

Sumber : Bappeda Kab. Aceh Barat, 2017

yz

Tabel 3
Kerangka Pendanaan Dana Desa Tahun 2018 - 2022

No	Bidang/Program/Kegiatan	2018	2019	2020	2021	2022	Sumber	Ket
A	Pagu Anggaran	282.658.693.000	318.007.940.000	349.808.734.000	382.289.607.400	412.518.568.140		
1	Bagi Hasil Pajak	1.617.100.000	1.778.810.000	1.956.691.000	2.152.360.100	2.367.596.110	APBK	
2	Bagi Hasil Retribusi	936.600.000	1.030.260.000	1.133.286.000	1.246.614.600	1.371.276.860	APBK	
3	Alokasi Dana Gampong	59.271.700.000	65.198.870.000	71.718.757.000	78.890.632.700	86.779.695.970	APBK	
4	Alokasi Dana Desa	220.833.293.000	250.000.000.000	275.000.000.000	300.000.000.000	322.000.000.000	APBN	
B	Prioritas Belanja	1.246.150.000	1.294.607.500	1.372.987.875	1.427.537.269	1.485.524.132		
1	Penghasilan Tetap dan Operasional	200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	292.820.000	ADG	rata-rata per Gp
2	Bidang Pembangunan Gampong							
-	Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Gampong	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000	48.620.250	ADD	rata-rata per Gp
-	Pengelolaan dan Pembinaan PKK Gampong	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000	48.620.250	ADD	rata-rata per Gp
-	Pengelolaan dan Pembinaan PAUD Gampong	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	9.724.050	ADD	rata-rata per Gp
-	Operasional Distribusi Beras Sejahtera (Rastra)	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	2.431.013	ADD	rata-rata per Gp
-	Pendataan Kependudukan	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	6.077.531	ADD	rata-rata per Gp
-	Itsbat Nikah	2.500.000	2.625.000	2.756.250	2.894.063	3.038.766	ADD	rata-rata per Gp
-	Pembinaan Keluarga Berencana	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	6.077.531	ADD	rata-rata per Gp
-	Talangan Kesehatan	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	6.077.531	ADD	rata-rata per Gp
-	Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	15.650.000	16.432.500	17.254.125	18.116.831	19.022.673	ADD	rata-rata per Gp



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

No	Bidang/Program/Kegiatan	2018	2019	2020	2021	2022	Sumber	Ket
	- Rehabilitasi (Pemeliharaan) Rumah Dhuafa	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	18.232.594	ADD	rata-rata per Gp
	- Penyelenggaraan Peradilan Adat Istiadat	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	1.215.506	ADD	rata-rata per Gp
	- Operasi Pasar	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	ADD	rata-rata per Gp
	- Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik							5.000 / pemilihan
	- Distribusi Beras Sejahtera (Rastra)							
	- Pembangunan Infrastruktur Dasar	500.000.000	510.000.000	520.000.000	530.000.000	540.000.000	ADD	
	- Dan Seterusnya							
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong							
	- Pemberdayaan Ekonomi Gampong	180.000.000	189.000.000	198.450.000	208.372.500	218.791.125	ADD	rata-rata per Gp
	- Pengadaan Handtraktor	27.000.000	27.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	ADD	rata-rata per Gp
	- Sumur Bor untuk Sawah	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	ADD	rata-rata per Gp
	- Dan Seterusnya							

Sumber : Bappeda Kab. Aceh Barat, 2017

[Handwritten signature]

Tabel 4
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
yang bersumber dari Dana Otsus Tahun 2018-2022

SKPD / Program	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Kinerja pada Akhir periode
JUMLAH	120.934.901.304,00	126.981.646.369,20	133.330.728.687,66	139.997.265.122,04	146.997.128.378,15	668.241.669.861,05
DINAS PENDIDIKAN						
Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.000.000.000,00	1.050.000.000,00	1.102.500.000,00	1.157.625.000,00	1.215.506.250,00	5.525.631.250,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	6.003.000.000,00	6.303.150.000,00	6.618.307.500,00	6.949.222.875,00	7.296.684.018,75	33.170.364.393,75
Program Pendidikan Menengah	-	-	-	-	-	-
Program Pendidikan Non Formal	5.757.772.943,00	6.045.661.590,15	6.347.944.669,66	6.665.341.903,14	6.998.608.998,30	31.815.330.104,25
Program Pendidikan Luar Biasa	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.250.000.000,00	1.312.500.000,00	1.378.125.000,00	1.447.031.250,00	1.519.382.812,50	6.907.039.062,50
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	-	-	-	-	-	-
Program Perencanaan dan Pengawasan	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Mutu Pendidikan	-	-	-	-	-	-
DINAS SYARIAH ISLAM DAN PEMBERDAYAAN DAYAH						
Program Pengembangan Dayah dan Balee Seumeubeut	-	-	-	-	-	-
Program Pendidikan Dayah dan Pemberdayaan Santri	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	8.176.207.318,00	8.585.017.683,90	9.014.268.568,10	9.464.981.996,50	9.938.231.096,32	45.178.706.662,82
Program Pendidikan Dayah	2.000.000.000,00	2.100.000.000,00	2.205.000.000,00	2.315.250.000,00	2.431.012.500,00	11.051.262.500,00
DINAS KESEHATAN						
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	-	-
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	500.000.000,00	525.000.000,00	551.250.000,00	578.812.500,00	607.753.125,00	2.762.815.625,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	-	-	-	-	-	-
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	6.240.000.000,00	6.552.000.000,00	6.879.600.000,00	7.223.580.000,00	7.584.759.000,00	34.479.939.000,00
Program Peningkatan Keselamatan Ibu	-	-	-	-	-	-



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

SKPD / Program	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Melahirkan dan Anak						
Program Perencanaan dan Pengawasan		-	-	-	-	-
Program Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK)		-	-	-	-	-
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	1.800.000.000,00	1.890.000.000,00	1.984.500.000,00	2.083.725.000,00	2.187.911.250,00	9.946.136.250,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	-	-	-	-
Program Pengawasan Obat dan Makanan		-	-	-	-	-
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.375.000.000,00	1.443.750.000,00	1.515.937.500,00	1.591.734.375,00	1.671.321.093,75	7.597.742.968,75
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.000.000.000,00	1.050.000.000,00	1.102.500.000,00	1.157.625.000,00	1.215.506.250,00	5.525.631.250,00
Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	678.490.130,00	712.414.636,50	748.035.368,33	785.437.136,74	824.708.993,58	3.749.086.265,14
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	500.000.000,00	525.000.000,00	551.250.000,00	578.812.500,00	607.753.125,00	2.762.815.625,00
RUMAH SAKIT UMUM CUT NYAK DHEN		-	-	-	-	-
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		-	-	-	-	-
DINAS BINA MARGA / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		-	-	-	-	-
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	37.804.430.913,00	39.694.652.458,65	41.679.385.081,58	43.763.354.335,66	45.951.522.052,44	208.893.344.841,34
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2.000.000.000,00	2.100.000.000,00	2.205.000.000,00	2.315.250.000,00	2.431.012.500,00	11.051.262.500,00
Program Pengendalian Banjir		-	-	-	-	-
Program Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Tempat		-	-	-	-	-
DINAS CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN / DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN		-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

SKPD / Program	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Kinerja pada Akhir periode
KAWASAN PERMUKIMAN						
Program Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Tempat		-	-	-	-	-
Program Perencanaan dan Pengawasan		-	-	-	-	-
Program Pengembangan Perumahan		-	-	-	-	-
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		-	-	-	-	-
Program Pengendalian Banjir		-	-	-	-	-
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1.000.000.000,00	1.050.000.000,00	1.102.500.000,00	1.157.625.000,00	1.215.506.250,00	5.525.631.250,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	12.500.000.000,00	13.125.000.000,00	13.781.250.000,00	14.470.312.500,00	15.193.828.125,00	69.070.390.625,00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	3.500.000.000,00	3.675.000.000,00	3.858.750.000,00	4.051.687.500,00	4.254.271.875,00	19.339.709.375,00
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Areal Pemakaman		-	-	-	-	-
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		-	-	-	-	-
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2.500.000.000,00	2.625.000.000,00	2.756.250.000,00	2.894.062.500,00	3.038.765.625,00	13.814.078.125,00
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	-	-	-	-
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		-	-	-	-	-
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI / DIMAS SOSIAL		-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		-	-	-	-	-



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Tonajudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas

SKPD / Program	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.000.000.000,00	2.100.000.000,00	2.205.000.000,00	2.315.250.000,00	2.431.012.500,00	11.051.262.500,00
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	2.500.000.000,00	2.625.000.000,00	2.756.250.000,00	2.894.062.500,00	3.038.765.625,00	13.814.078.125,00
Program Pembinaan Anak Terlantar	-	-	-	-	-	-
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	-	-	-	-	-	-
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	2.250.000.000,00	2.362.500.000,00	2.480.625.000,00	2.604.656.250,00	2.734.889.062,50	12.432.670.312,50
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.000.000.000,00	1.050.000.000,00	1.102.500.000,00	1.157.625.000,00	1.215.506.250,00	5.525.631.250,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	-	-	-	-	-
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	-	-	-	-	-	-
Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	2.500.000.000,00	2.625.000.000,00	2.756.250.000,00	2.894.062.500,00	3.038.765.625,00	13.814.078.125,00
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	-	-
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN / DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan produksi hasil peternakan	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

SKPD / Program	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan		-	-	-	-	-
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN / DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN		-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	6.500.000.000,00	6.825.000.000,00	7.166.250.000,00	7.524.562.500,00	7.900.790.625,00	35.916.603.125,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.000.000.000,00	1.050.000.000,00	1.102.500.000,00	1.157.625.000,00	1.215.506.250,00	5.525.631.250,00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		-	-	-	-	-
DINAS PANGAN		-	-	-	-	-
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	500.000.000,00	525.000.000,00	551.250.000,00	578.812.500,00	607.753.125,00	2.762.815.625,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		-	-	-	-	-
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.500.000.000,00	2.625.000.000,00	2.756.250.000,00	2.894.062.500,00	3.038.765.625,00	13.814.078.125,00
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		-	-	-	-	-
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan		-	-	-	-	-
Program pengembangan budidaya perikanan	500.000.000,00	525.000.000,00	551.250.000,00	578.812.500,00	607.753.125,00	2.762.815.625,00
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		-	-	-	-	-
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		-	-	-	-	-
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial		-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		-	-	-	-	-
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	500.000.000,00	525.000.000,00	551.250.000,00	578.812.500,00	607.753.125,00	2.762.815.625,00
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	500.000.000,00	525.000.000,00	551.250.000,00	578.812.500,00	607.753.125,00	2.762.815.625,00



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi

SKPD / Program	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Kinerja pada Akhir periode
DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI / DINAS PERHUBUNGAN		-	-	-	-	-
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	500.000.000,00	525.000.000,00	551.250.000,00	578.812.500,00	607.753.125,00	2.762.815.625,00
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	500.000.000,00	525.000.000,00	551.250.000,00	578.812.500,00	607.753.125,00	2.762.815.625,00
MAJELIS ADAT ACEH		-	-	-	-	-
Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh		-	-	-	-	-
Program Pengembangan Nilai Budaya		-	-	-	-	-
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		-	-	-	-	-
Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.500.000.000,00	1.575.000.000,00	1.653.750.000,00	1.736.437.500,00	1.823.259.375,00	8.288.446.875,00
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	600.000.000,00	630.000.000,00	661.500.000,00	694.575.000,00	729.303.750,00	3.315.378.750,00

Sumber : Bappeda Kab. Aceh Barat, 2017

72

Tabel 5
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Yang bersumber dari Dana CSR 2018-2022

No.	PT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD	
		Target (keg)	Rp	Target (keg)	Rp	Target (keg)	Rp	Target (keg)	Rp	Target (keg)	Rp	Target (keg)	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PT. KARYA TANAH SUBUR (KTS)		565.050.000,00		582.001.500		599.461.545		617.445.391		635.968.753		2.999.927.189,44
2	PT. AGRO SINERGI NUSANTARA (ASN)		133.000.000,00		136.990.000		141.099.700		145.332.691		149.692.672		706.115.062,73
3	PT. PRIMA AGRO ACEH LESTARI (PAAL)		50.000.000,00		51.500.000		53.045.000		54.636.350		56.275.441		265.456.790,50
4	PT. POTENSI BUMI SAKTI (PBS)		30.000.000,00		30.900.000		31.827.000		32.781.810		33.765.264		159.274.074,30
5	PT. INDONESIA PACIFIC ENERGI (IPE)		21.000.000,00		21.630.000		22.278.900		22.947.267		23.635.685		111.491.852,01
6	PT. BETAMI		156.000.000,00		160.680.000		165.500.400		170.465.412		175.579.374		828.225.186,36
7	PT. MIFA BERSAUDARA		9.553.585.905,00		9.840.193.482		10.135.399.287		10.439.461.265		10.752.645.103		50.721.285.042,15
8	PT. AGRABUDI JASA BERSAMA		350.000.000,00		360.500.000		371.315.000		382.454.450		393.928.084		1.858.197.533,50
9	PT. NIRMALA COAL		20.000.000,00		20.600.000		21.218.000		21.854.540		22.510.176		106.182.716,20
10	PT. ACEH HYDROPOWER		258.750.000,00		266.512.500		274.507.875		282.743.111		291.225.405		1.373.738.890,84
11	PT. MOPOLI RAYA		121.000.000,00		124.630.000		128.368.900		132.219.967		136.186.566		642.405.433,01
12	PT. BANK ACEH		1.605.000.000,00		1.653.150.000		1.702.744.500		1.753.826.835		1.806.441.640		8.521.162.975,05
13	PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI)		100.000.000,00		103.000.000		106.090.000		109.272.700		112.550.881		530.913.581,00
14	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)		4.650.000.000,00		4.789.500.000		4.933.185.000		5.081.180.550		5.233.615.967		24.687.481.516,50
15	PT. BANK MANDIRI		80.000.000,00		82.400.000		84.872.000		87.418.160		90.040.705		424.729.864,80
16	PT. CIPTAKRIDATAMA		0,00		-		-		-		-		-



RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

*Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas*

No.	PT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD	
		Target (keg)	Rp	Target (keg)	Rp	Target (keg)	Rp	Target (keg)	Rp	Target (keg)	Rp	Target (keg)	Rp
17	PT. TELKOM		297.000.000,00		305.910.000		315.087.300		324.539.919		334.276.117		1.576.813.335,57
18	PT. PLN		50.000.000,00		51.500.000		53.045.000		54.636.350		56.275.441		265.456.790,50
19	PT. PERTAMINA		50.000.000,00		51.500.000		53.045.000		54.636.350		56.275.441		265.456.790,50
			18.090.385.905		18.633.097.482		19.192.090.407		19.767.853.119		20.360.888.712		96.044.315.624,95

Sumber : Bappeda Kab. Aceh Barat, 2017

Handwritten signature

BAB IX PENUTUP

RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 merupakan pedoman bagi pemerintahan dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun, serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Kabupaten serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah untuk Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas.

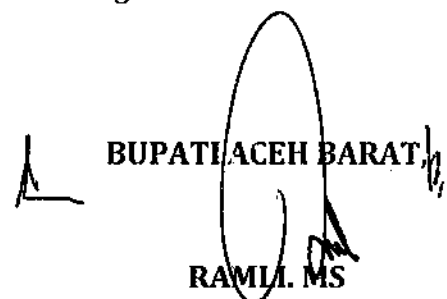
9.1. Pedoman Masa Transisi

Pada masa berakhirnya periode Bupati Aceh Barat Tahun 2017-2022 dan belum adanya dasar dokumen perencanaan tahun berikutnya maka RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 dapat dijadikan pedoman pada masa transisi untuk penyusunan program dan kegiatan prioritas sampai tersedianya dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat periode berikutnya terutama untuk program-program dan kegiatan prioritas yang capaiannya belum memenuhi target. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan dan mengisi kekosongan dasar dokumen perencanaan.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Kabupaten Aceh Barat berkewajiban menyesuaikan Rencana Strategis yang berpedoman kepada RPJM Tahun 2017-2022 Kabupaten Aceh Barat. Renstra tersebut harus mendapat persetujuan Bappeda sebelum ditetapkan oleh Bupati dengan mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
2. Dalam hal pelaksanaan RPJM Tahun 2017-2022 harus dilakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap capaian program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi RPJM yang telah disesuaikan tersebut menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Kabupaten untuk menyesuaikan kembali Renstra.
3. RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 akan menjadi dasar penilaian terhadap kinerja Bupati selama pemerintahannya. Hasil evaluasi kinerja Bupati menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan.
4. Implementasi program pada setiap organisasi perangkat daerah berpedoman kepada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.


BUPATI ACEH BARAT
RAMLI. MS

